



**TAHUN
2022**



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2022 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna secara tepat waktu.

Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan regulasi tersebut, LKPJ dimaknai sebagai laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung serta memuat pertanggungjawaban kinerja yang secara langsung mengarah pada pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, kebijakan strategis yang ditetapkan serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, LKPJ ini memuat hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai bentuk kepatuhan

terhadap amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LKPJ ini juga merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Kebijakan perencanaan dan penganggaran tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2022 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Temanggung. Hal ini merupakan wujud implementasi inovasi dan kolaborasi yang terdiri dari Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Temanggung, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Temanggung secara luas. Patut disadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan

upaya peningkatan pada masa mendatang. Oleh karena itu, catatan-catatan strategis, saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Temanggung merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Temanggung pada masa yang akan datang.

Demikian LKPJ Bupati Temanggung Akhir Tahun Anggaran 2022 disampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKPJ ini. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung pada masa yang akan datang dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Temanggung sehingga terwujudnya Temanggung yang **“Tentrem Marem dan Gandem”**. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

Temanggung, Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



H.M. AL KHADZIQ

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 DASAR HUKUM	I - 1
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	I - 5
1.3 DATA UMUM DAERAH	I - 11
a. Data Geografis Wilayah	I - 11
b. Data Demografi	I - 15
c. Pertumbuhan Penduduk	I - 17
d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah	I - 19
e. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I - 22
f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I - 23
g. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	I - 24
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD	II - 1
2.1 Latar Belakang	II - 1
2.2 Tujuan Perubahan	II - 3
2.3 Dasar Perubahan	II - 3
2.4 Perubahan Penjabaran	II - 5
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	III - 1
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	III - 1
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III - 4
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III - 171
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan	III - 306
3.1.4 Pelaksanaan Urusan Penunjang	III - 346
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	III - 391
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020	III - 398
BAB IV CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN	IV - 1
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan	IV - 1
a. Dasar Hukum	IV - 1

b. Gambaran Umum	IV - 2
c. Target Kinerja	IV - 2
d. Realisasi	IV - 3
4.2 Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan oleh Daerah	IV - 9
4.3 Permasalahan dan Kendala	IV - 31
4.4 Saran dan Tindak Lanjut	IV - 31
BAB V PENUTUP	V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023	I - 8
Tabel 1.2	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung	I - 12
Tabel 1.3	Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian	I - 14
Tabel 1.4	Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2022.....	I - 15
Tabel 1.5	Jumlah dan kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022	I - 16
Tabel 1.6	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2018 - 2022	I - 17
Tabel 1.7	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2022	I - 18
Tabel 1.8	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	I - 19
Tabel 1.9	Profil Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022.....	I - 21
Tabel 1.10	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022	I - 23
Tabel 1.11	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Temanggung Temanggung Tahun 2022	I - 23
Tabel 1.12	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Kabupaten Temanggung Tahun 2022	I - 24
Tabel 3.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III - 4
Tabel 3.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III - 171
Tabel 3.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan	III - 306
Tabel 3.4	Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	III - 346
Tabel 3.5	Kebijakan Strategis Daerah dalam rangka Penyelesaian Masalah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021	III - 391
Tabel 3.6	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2020	III - 398
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV – 5
Tabel 4.2	Data Penerima Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian..	IV - 9
Tabel 4.3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV - 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah	I - 13
------------	--	--------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), dan EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Dengan telah berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 tersebut dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 yang merupakan laporan kinerja pembangunan daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2022, disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Indikator Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Temanggung;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2. Visi Dan Misi Kepala Daerah

1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dilaksanakan dengan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1) **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2) **Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan

ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Masing-masing sasaran pada setiap misi diukur dengan indikator sasaran yang secara rinci dijabarkan tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM					
MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka kemiskinan	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pendidikan	
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)		
		2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	4. Indeks Kinerja RSUD	Kesehatan
		3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	5. Persentase peminjam di perpustakaan	Perpustakaan	
	4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga		6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	7. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Pemuda dan Olah Raga
	5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal		8. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IKP)	Kebudayaan	
	6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan		9. Indek Gotong Royong	10. Indek Toleransi	Pemerintahan Umum
	7. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk		11. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Pengendalian Penduduk	
	8. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	13. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Pemberdaaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		14. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Sosial	

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	3. Pertumbuhan Ekonomi 4. Pendapatan per Kapita 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6. Ketimpangan Pendapatan	1. Meningkatnya kesejahteraan petani	15. Tingkat ketersediaan energi perkapita 16. Tingkat ketersediaan protein perkapita 17. Tingkat ketersediaan lemak perkapita	Pertanian
		2. Meningkatnya kedaulatan pangan	18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 19. Tingkat Konsumsi Ikan	Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan
		3. Meningkatnya pariwisata daerah	20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Pariwisata
		4. Meningkatnya investasi sektor riil	21. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Perindustrian
			22. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Perdagangan
			23. Persentase Koperasi sehat	Koperasi dan UKM
			24. Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	
			25. Indek Kemudahan Berusaha	Penanaman Modal
			26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tenaga Kerja
		5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	27. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			28. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	
			29. Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN
			30. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Perhubungan
		6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Lingkungan Hidup

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	7. Indek Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	32. Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan
			33. Persentase Ketercapaian Kinerja pembangunan daerah	
	34. Manajemen Risiko Indek (MRI)			
	35. Indeks Inovasi Daerah		Penelitian dan Pengembangan	
	36. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		Keuangan	
	37. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			
	38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)		Administrasi Pemerintahan	
	39. Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)			
	40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)			
	41. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)		Pengawasan	
	42. Indeks Profesionalitas ASN		Kepegawaian dan Diklat	

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN
			43. Indeks <i>Merit System</i>	
			44. Indeks Manajemen Kearsipan	Kearsipan
			45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Sekretariat Dewan
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Komunikasi dan Informatika
			47. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	
			48. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Adminduk
			49. Rata-Rata IKM di Kecamatan	Kewilayahan
		3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	50. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			51. Persentase desa yang berpredikat mandiri	
		4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	52. Indeks Rasa Aman	Ketentraman dan Ketertiban Umum
		5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	53. Indeks Resiko Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum_ Kebencanaan

1.3. Data Umum Daerah

a. Data Geografis Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah ± 87.065 Ha. Kabupaten Temanggung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.2
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candiroto
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonoboyo
4	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

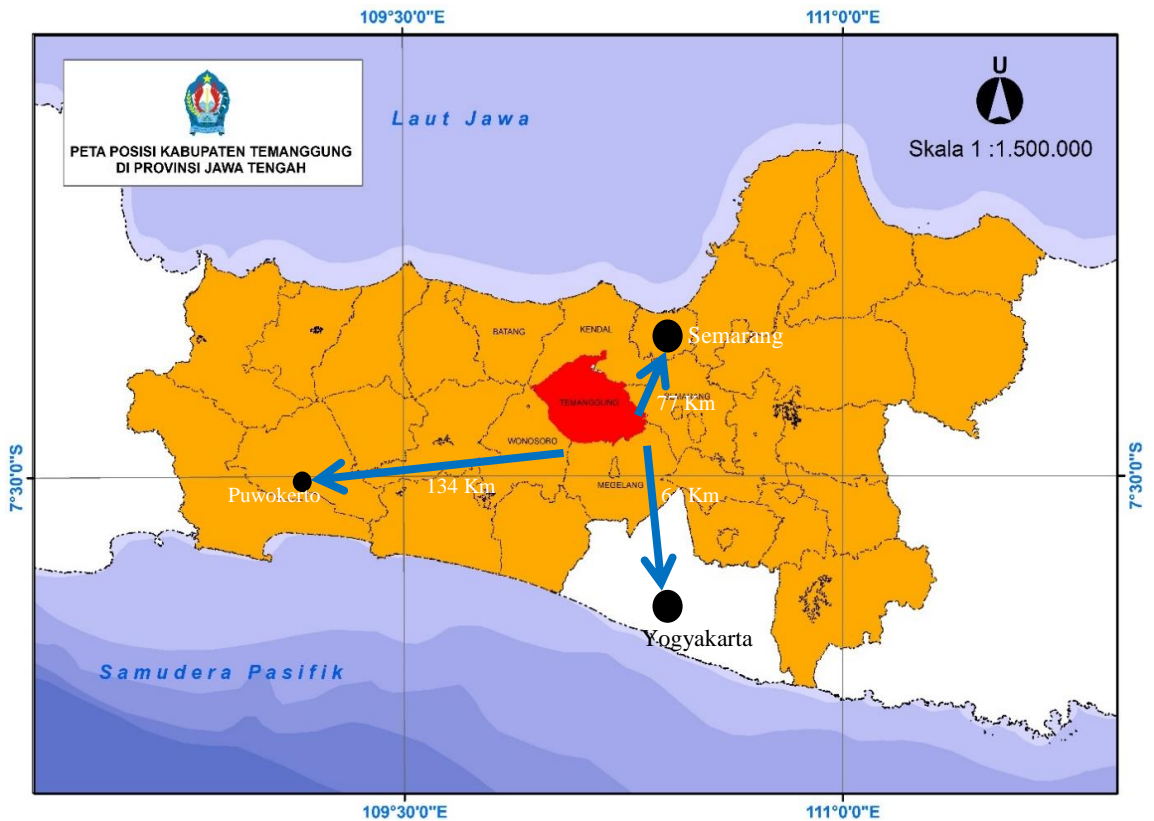
2) Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat $110^{\circ}23'-110^{\circ}46'30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}14'-7^{\circ}32'35''$ Lintang Selatan.

b) Posisi Geografis

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Gambar 1.1
Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah

c) Kemiringan Lahan

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% - 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

d) Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400 - > 1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Kab. Temanggung Berdasarkan Ketinggian

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 – 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 – 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonoboyo
3	750 – 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000 – 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 – 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

e) Geologi

Dilihat dari sisi geologi, lahan seluas 82.675 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat (32,13%), Latosol coklat kemerahan (9,53%), Latosol merah kekuningan (35,33%), Regosol (20,14%), dan Andosol (2,60%).

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan Andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir. Apabila dilihat luas wilayah secara administrasi, kemiringan dan ketinggian disebabkan karena metoda dan pendekatan penghitungan.

b. Data Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung per kecamatan pada tahun 2022 berjumlah 801.267 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 403.324 jiwa (50,336%) dan perempuan sebanyak 397.943 jiwa (49,664%). Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan 1.506 RW dan 5.914 RT dengan pusat pemerintahan di Kota Temanggung. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di
Tiap Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
			Pria	%	Wanita	%	Kec	%		
1	BULU	43,04	25.135	50,756	24.386	49,244	49.521	6,180	103,071	1.151
2	TEMBARAK	26,84	16.065	50,955	15.463	49,045	31.528	3,935	103,893	1.175
3	TEMANGGUNG	33,39	41.395	49,678	41.931	50,322	83.326	10,399	98,722	2.496
4	PRINGSURAT	57,27	26.469	50,145	26.316	49,855	52.785	6,588	100,581	922
5	KALORAN	63,92	23.227	50,058	23.173	49,942	46.400	5,791	100,233	726
6	KANDANGAN	78,36	26.872	50,524	26.315	49,476	53.187	6,638	102,117	679
7	KEDU	34,96	30.013	50,460	29.466	49,540	59.479	7,423	101,856	1.701
8	PARAKAN	22,23	27.069	50,252	26.797	49,748	53.866	6,723	101,015	2.423
9	NGADIREJO	53,31	28.969	50,468	28.432	49,532	57.401	7,164	101,889	1.077
10	JUMO	29,32	15.176	50,094	15.119	49,906	30.295	3,781	100,377	1.033
11	TRETEP	33,65	10.924	51,016	10.489	48,984	21.413	2,672	104,147	636
12	CANDIROTO	59,94	16.724	50,289	16.532	49,711	33.256	4,150	101,161	555

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
			Pria	%	Wanita	%	Kec	%		
13	KRANGGAN	57,61	24.776	49,659	25.116	50,341	49.892	6,227	98,646	866
14	TLOGOMULYO	24,84	11.842	51,004	11.376	48,996	23.218	2,898	104,096	935
15	SELOPAMPANG	17,29	10.286	49,845	10.350	50,155	20.636	2,575	99,382	1.194
16	BANSARI	22,54	12.362	50,672	12.034	49,328	24.396	3,045	102,726	1.082
17	KLEDUNG	32,21	14.331	50,704	13.933	49,296	28.264	3,527	102,857	877
18	BEJEN	68,84	10.880	50,389	10.712	49,611	21.592	2,695	101,568	314
19	WONOBOYO	43,98	13.671	50,922	13.176	49,078	26.847	3,351	103,757	610
20	GEMAWANG	67,11	17.138	50,458	16.827	49,542	33.965	4,239	101,848	506
Jumlah		870,65	403.324	50,336	397.943	49,664	801.267	100	101,352	920

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, data diolah

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin adalah 101,352%. Kecamatan Temanggung prosentase penduduknya paling tinggi yaitu 10,42% dari total jumlah penduduk Temanggung 801,267 atau sebesar 83.404 jiwa. Sedangkan Kecamatan Selopampang jumlah penduduk paling sedikit sebanyak 2.58 % atau sebesar 20.614 jiwa.

Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018-2022

No	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	BULU	48.119	48.785	48.898	49.215	49.521
2	TEMBARAK	30.739	31.107	31.167	31.501	31.528
3	TEMANGGUNG	82.620	83.157	83.275	83.404	83.326
4	PRINGSURAT	51.583	52.122	52.183	52.746	52.785
5	KALORAN	45.098	45.631	45.827	46.295	46.400
6	KANDANGAN	51.618	52.160	52.419	53.030	53.187
7	KEDU	58.072	58.889	59.060	59.264	59.479
8	PARAKAN	53.297	53.588	53.868	54.130	53.866
9	NGADIREJO	55.746	56.233	56.412	57.355	57.401
10	JUMO	29.656	30.002	30.068	30.389	30.295

No	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022
11	TRETEP	20.906	21.113	21.208	21.362	21.413
12	CANDIROTO	32.621	32.956	32.997	33.116	33.256
13	KRANGGAN	48.465	49.021	49.360	49.578	49.892
14	TLOGOMULYO	22.710	22.832	22.900	23.207	23.218
15	SELOPAMPANG	19.986	20.175	20.252	20.614	20.636
16	BANSARI	23.984	24.203	24.307	24.416	24.396
17	KLEDUNG	27.606	27.902	28.053	28.208	28.264
18	BEJEN	21.278	21.482	21.559	21.748	21.592
19	WONOBOYO	26.172	26.294	26.431	26.767	26.847
20	GEMAWANG	33.274	33.612	33.811	33.931	33.965
Jumlah		772.289	783.550	791.264	800.276	801.267

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat, Jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung dari 772.289 jiwa Tahun 2018 bertambah menjadi 801.267 jiwa pada Tahun 2022, atau dalam 5 (lima) tahun naik sejumlah 28.978 jiwa. Jumlah penduduk terbesar pada akhir tahun 2022 adalah di Kecamatan Temanggung, hal tersebut dikarenakan pusat perekonomian Kabupaten Temanggung berada di Kecamatan Temanggung.

c. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Jumlah Penduduk (ribu)					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kota. Magelang	121.872	122.111	121.526	121.610	127.466	0,31	0,27	0,27	0,09	4,82
Kab. Purworejo	716.477	718.316	769.880	773.588	800.275	0,27	0,26	0,99	0,64	3,45
Kab. Wonosobo	787.384	790.504	879.124	886.613	930.000	0,42	0,41	1,49	1,14	4,89
Kab. Magelang	1.279.625	1.290.591	1.299.859	1.305.512	1.312.175	0,89	0,88	0,93	0,59	0,51

Kab/Kota	Jumlah Penduduk (ribu)					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Temanggung	783.550	791.264	795.556	800.429	801.267	1,46	0,98	0,54	0,71	0,10
Rata-rata	814.000	818.461	869.397	776.345	794.641	0,60	0,51	0,95	0,63	2,75
Rata-rata 5 tahun						1,09				

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, dan pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2018-2022 adalah 1,09%.

Sedangkan Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo dan Purworejo. Kepadatan penduduk di Kawasan Purwomanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2022

Kab/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Kepadatan Penduduk Tahun 2022 (Jiwa/Km ²)
Kab. Purworejo	1.091,49	800.275	733
Kab. Wonosobo	984,68	915.653	930
Kab. Temanggung	870,65	801.267	920
Kab. Magelang	1.102,93	1.312.175	1.190
Kota Magelang	18,12	127.466	7.035
Rata-rata			973

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022, data diolah

Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kawasan PURWOMANGGUNG adalah 973 jiwa/km². Daerah dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kota Magelang dengan kepadatan mencapai 7.035 jiwa/km². Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kawasan PURWOMANGGUNG.

d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah.

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindaklanjut dari kedua peraturan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu penataan kelembagaan organisasi pemerintahan secara keseluruhan pada akhir tahun 2020 dan berlaku efektif sejak awal tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dengan hal tersebut maka jumlah Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 1.8
Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

No	Perangkat Daerah	Tipe	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	B	9	Bagian
2	Sekretariat DPRD	B	4	Bagian
3	Inspektorat	A	6	1 Sekretariat 5 Irban
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	A	7	1 Sekretariat, 5 Bidang, 1 UPT Satuan Pendidikan
5	Dinas Kesehatan	A	32	1 Sekretariat, 4 Bidang, 27 UPT
6	Dinas Pekerjaan Umum dan	B	11	1 Sekretariat, 4 Bidang,

No	Perangkat Daerah	Tipe	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
	Penataan Ruang			6 UPT
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	A	8	1 Sekretariat, 4 Bidang, UPT
8	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	C	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
9	Dinas Sosial	B	5	1 Sekretariat, 3 Bidang, 1 UPT
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	A	10	1 Sekretariat, 6 Bidang, 3 UPT
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
14	Dinas Perhubungan	C	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	B	6	1 Sekretariat, 3 Bidang, 2 UPT
17	Dinas Penanaman Modal	-	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	C	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	C	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	B	5	1 Sekretariat, 3 Bidang, UPT
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A	5	1 Sekretariat, 4 Bidang
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	A	7	1 Sekretariat, 6 Bidang
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
25	Kecamatan	A	43	20 kecamatan, 23 Kelurahan

Sumber Data: Bagian Organisasi Setda

Berdasar pada tabel diatas, untuk Dinas Penanaman Modal tidak ada tipologinya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dinas tersebut merupakan dinas yang tidak memiliki atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memiliki tipologi, tetapi berdasarkan kriteria khusus yaitu kategori intensitas kecil melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non PNS di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 menurut golongan, eselon/jabatan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9
Profil Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

NO	JENIS DATA	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Jumlah PNS	6.778	6.670	6.280	5.910	6.347
	1. Golongan I	338	315	292	269	208
	2. Golongan II	1.128	1.082	903	862	1.312
	3. Golongan III	3.245	3.395	3.394	3.281	3.543
	4. Golongan IV	2.067	1.878	1.691	1.498	1.284
II.	Jumlah Pejabat Struktural	710	633	624	626	467
	1. Eselon I	0	0	0	0	0
	2. Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)	23	22	29	27	31
	3. Eselon III (Administrator)	144	134	151	156	152
	4. Eselon IV (Pengawas)	543	477	444	289	284
	5. Eselon V	0	0	0	0	0
III.	Jumlah Fungsional	0	0	0	5,425	5.880
	1. Guru	0	0	0	2.657	2.436
	2. Tertentu	0	0	0	1.394	1.346
	3. Umum (Pelaksana)	0	0	0	1.374	2.098

NO	JENIS DATA	2018	2019	2020	2021	2022
IV	Jumlah Pegawai	6.778	6.670	6.280	8.223	8.029
	1. PNS	6.778	6.670	6.280	5.910	6.347
	2. PPPK	0	0	0	222	1.682
	3. Non PNS (BLUD)	0	0	0	650	650
	4. Non PNS (<i>Supporting Staff</i>)	0	0	0	1.441	1.473
V	Jumlah PNS	6.778	6.670	6.280	5.910	6.347
	Laki-Laki	3.089	2.959	2.743	2.542	2.525
	Perempuan	3.689	3.711	3.537	3.368	3.822

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, selama periode 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 jumlah pegawai negeri sipil dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sejumlah 437 pegawai, karena terdapat pengadaan CPNS tahun 2021 untuk mengisi formasi pegawai pada tahun 2022.

Berdasarkan jumlah pegawai Fungsional (tertentu) di tahun 2022 sejumlah 1.346 orang yang termasuk fungsional penyetaraan /sub koordinator, tidak termasuk tenaga non guru dan tenaga kesehatan

Selain PNS, struktur pegawai di Kabupaten Temanggung juga terdiri dari PPPK, Supporting Staff dengan biaya APBD dan Pegawai Non-PNS (biaya BLUD). Pegawai Non-PNS (Suporting Staff, PPPK) dengan biaya APBD merupakan kelompok pegawai non-PNS dengan jumlah yang cukup banyak.

e. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 98,74 persen atau sebesar Rp1.895.460.677.553,00 dari target sebesar Rp1.919.653.202.123. Secara lengkap, ringkasan realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.10
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.919.653.202.123	1.895.460.677.553	98,74
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	305.939.643.656	308.682.649.584	100,90
4101	Pajak Daerah	69.760.000.000	74.191.559.232	106,35
4102	Retribusi Daerah	9.959.202.250	9.643.158.066	96,83
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.373.922.628	21.426.146.839	105,16
4104	Lain-lain PAD yang Sah	205.846.518.778	203.421.785.447	98,82
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.612.713.558.467	1.585.778.027.969	98,33
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.469.986.011.467	1.448.787.218.335	98,56
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.727.547.000	136.990.809.634	95,98
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
4301	Pendapatan Hibah	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (unaudited)

f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.958.748.409.806,00 atau sebesar 90,55% dari target belanja sebesar Rp2.163.271.983.090,00. Secara lengkap, ringkasan realisasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.11
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA	2.163.271.983.090	1.958.748.409.806	90,55
51	BELANJA OPERASI	1.455.371.245.698	1.295.686.749.508	89,03
5101	Belanja Pegawai	785.276.004.360	710.731.632.791	90,51
5102	Belanja Barang dan Jasa	575.681.578.758	492.943.591.757	85,63
5105	Belanja Hibah	86.988.194.080	85.102.866.541	97,83
5106	Belanja Bantuan Sosial	7.425.468.500	6.908.658.419	93,04
52	BELANJA MODAL	287.510.501.396	247.089.139.440	85,94
5201	Belanja Modal Tanah	9.000.000.000	3.908.713.890	43,43
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.562.797.305	95.059.501.590	82,26
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.551.721.981	102.564.048.329	89,54

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.260.159.121	39.768.985.023	94,11
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.113.272.989	5.766.890.608	94,33
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	22.550.000	21.000.000	93,13
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	0	0,00
5301	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	0	0,00
54	BELANJA TRANSFER	418.390.235.996	415.972.520.858	99,42
5401	Belanja Bagi Hasil	7.951.000.000	7.936.684.862	99,82
5402	Belanja Bantuan Keuangan	410.439.235.996	408.035.835.996	99,41
	Total Surplus/(Defisit)	(243.618.780.967)	(63.287.732.253)	25,98

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (unaudited)

g. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan terdiri penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Secara lengkap, ringkasan realisasi pembiayaan daerah menurut jenis pembiayaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.12
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
6	PEMBIAYAAN			
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	262.465.131.543	254.324.318.417	96,90
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	262.465.131.543	254.248.460.087	96,87
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	75.858.330	0,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.846.350.576	10.629.679.120	56,40
6201	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.846.350.576	5.629.679.120	40,66
	Pembiayaan Netto	243.618.780.967	243.694.639.297	100,03
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	180.406.907.044	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (unaudited)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. Latar Belakang

Perubahan APBD dilakukan karena adanya perubahan peraturan maupun perubahan kebijakan dari pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Hal yang mendasari perlu dilakukan perubahan APBD Tahun 2022 adalah masih berlangsungnya pandemi Covid-19, terjangkitnya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan, serta belanja wajib perlindungan sosial untuk penanganan dampak inflasi. Disamping itu, perubahan APBD tersebut karena adanya kebijakan atau peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berakibat pada perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan mendasarkan pada laporan realisasi anggaran semester I APBD tahun anggaran berjalan. Perubahan APBD tersebut dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Pergeseran anggaran tersebut dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek baik yang menyebabkan perubahan APBD maupun yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa untuk menutupi defisit anggaran, mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya, membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD, melunasi kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah, mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya, dan/atau mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

2.2. Tujuan Perubahan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan tujuan:

1. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dengan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang memerlukan penanganan secara cepat dengan memerhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.
3. Menyesuaikan dengan adanya perubahan peraturan maupun perubahan kebijakan dari pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
4. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2021.

2.3. Dasar Perubahan

Perubahan APBD Tahun 2022 dilakukan seiring dengan adanya perubahan peraturan atau kebijakan dari pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Peraturan atau kebijakan tersebut antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;

5. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2114/SJ Hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
11. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0017254 tentang Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

2.4. Perubahan Penjabaran

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan akhir Semester I, dengan didasarkan pada Perubahan Penjabaran APBD, terdapat beberapa perubahan pada struktur APBD. Perubahan asumsi dasar dimaksud menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Perubahan-perubahan tersebut terdiri dari:

1. Perubahan Pendapatan Daerah

Perubahan pendapatan daerah dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terutama terkait dengan penyesuaian/perubahan target pendapatan daerah.

Pemerintah Daerah melakukan kebijakan penyesuaian terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kondisi riil serta potensi yang dapat dicapai. Evaluasi juga dilakukan atas Pendapatan transfer baik pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah, dan penyesuaian atas lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah.

2. Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah mengalami koreksi sejalan dengan pendapatan daerah yang mengalami perubahan agar nilai defisit menjadi wajar. Perubahan belanja daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum akibat masih terjadinya pandemi Covid-19, terjangkitnya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan serta belanja wajib perlindungan sosial untuk penanganan dampak inflasi. Perubahan belanja daerah juga tersebut disebabkan karena:

- a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan harus dilakukan penyesuaian belanja daerah karena kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kebijakan pemerintah daerah.

- b. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- c. Adanya program/kegiatan yang memerlukan penyesuaian maupun program/kegiatan yang bersifat baru dalam rangka mendukung pencapaian target tahun anggaran berjalan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam rangka persiapan pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2023.

3. Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan pembiayaan daerah dilakukan guna menyesuaikan dengan pendapatan daerah dan belanja daerah guna menutup defisit yang ada. Perubahan penerimaan pembiayaan daerah disebabkan karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2021 yang harus digunakan dalam tahun berjalan.

Sedangkan Perubahan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan untuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan pengembalian biaya pelayanan penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBN pada RSUD Kabupaten Temanggung berdasar notisi hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 terdiri dari:

a. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

1. Pendidikan, dilaksanakan dalam 1 program, 4 kegiatan, dan 48 sub kegiatan;
2. Kesehatan, dilaksanakan dalam 4 program, 7 kegiatan, dan 40 sub kegiatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan dalam 10 program, 14 kegiatan, dan 38 sub kegiatan;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan dalam 2 program, 2 kegiatan, dan 4 sub kegiatan;
5. Ketertarikan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan dalam 3 program, 5 kegiatan, dan 15 sub kegiatan;
6. Sosial, dilaksanakan dalam 6 program, 9 kegiatan, dan 38 sub kegiatan.

b. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar :

1. Tenaga Kerja, dilaksanakan dalam 3 program, 7 kegiatan, dan 15 sub kegiatan;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan dalam 5 program, 9 kegiatan, dan 10 sub kegiatan;
3. Pangan, dilaksanakan dalam 4 program, 4 kegiatan, dan 6 sub kegiatan;
4. Pertanian, dilaksanakan dalam 1 program, 0 kegiatan, dan 0 sub kegiatan;
5. Lingkungan Hidup, dilaksanakan dalam 9 program, 8 kegiatan, dan 12 sub kegiatan;

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dilaksanakan dalam 3 program, 4 kegiatan, dan 6 sub kegiatan;
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilaksanakan dalam 4 program, 4 kegiatan, dan 11 sub kegiatan;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dilaksanakan dalam 3 program, 6 kegiatan, dan 17 sub kegiatan;
9. Perhubungan, dilaksanakan dalam 1 program, 6 kegiatan, dan 15 sub kegiatan;
10. Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan dalam 2 program, 3 kegiatan, dan 8 sub kegiatan;
11. Koperasi dan UKM, dilaksanakan dalam 4 program, 6 kegiatan, dan 6 sub kegiatan;
12. Penanaman Modal, dilaksanakan dalam 4 program, 4 kegiatan, dan 7 sub kegiatan;
13. Kepemudaan dan Olah raga, dilaksanakan dalam 3 program, 7 kegiatan, dan 7 sub kegiatan;
14. Statistik, dilaksanakan dalam 1 program, 1 kegiatan, dan 2 sub kegiatan;
15. Persandian, dilaksanakan dalam 1 program, 1 kegiatan, dan 1 sub kegiatan;
16. Kebudayaan, dilaksanakan dalam 6 program, 7 kegiatan, dan 15 sub kegiatan;
17. Perpustakaan, dilaksanakan dalam 2 program, 3 kegiatan, dan 5 sub kegiatan;
18. Kearsipan, dilaksanakan dalam 2 program, 3 kegiatan, dan 3 sub kegiatan.

c. Pelaksanaan Urusan Pilihan

1. Kelautandan Perikanan, dilaksanakan dalam 4 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
2. Pertanian, dilaksanakan dalam 5 program, 8 kegiatan, dan 13 sub kegiatan;
3. Pariwisata, dilaksanakan dalam 3 program, 3 kegiatan, dan 9 sub kegiatan;

4. Perdagangan, dilaksanakan dalam 4 program, 4 kegiatan, dan 5 sub kegiatan;
5. Perindustrian, dilaksanakan dalam 2 program, 2 kegiatan, dan 4 sub kegiatan.
6. Transmigrasi, dilaksanakan dalam 1 program, 1 kegiatan, dan 4 sub kegiatan.

d. Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dilaksanakan dalam 2 program, 6 kegiatan, dan 13 Sub kegiatan
2. Penelitian dilaksanakan dalam 1 program, 3 kegiatan, dan 4 Sub kegiatan
3. Pengawasan dilaksanakan dalam 2 program, 4 kegiatan, 11 sub kegiatan
4. Kepegawaian dilaksanakan dalam 1 program, 4 kegiatan, 11 sub kegiatan
5. Keuangan dilaksanakan dalam 3 program, 5 kegiatan, 21 sub kegiatan
6. Pengadaan, dilaksanakan dalam 1 program, 1 kegiatan, 3 sub kegiatan

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan secara terinci sebagaimana dalam tabel 3.1.1, 3.1.2 , 3.1.3, dan 3.1.4 sebagai berikut:

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		1. Program Pengelolaan Pendidikan					
				Angka Rata-rata Lama Sekolah	7.65 Tahun	7,41 Tahun	Faktor Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Sosialisasi Gerakan Kembali Ke sekolah , alokasi bantuan bagi peserta didik	
				Angka Harapan Lama Sekolah	12.42 Tahun	12,55 Tahun	Faktor Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Sosialisasi Gerakan Kembali Ke sekolah , alokasi bantuan bagi peserta didik	
				a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	90,00%			
				1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Sekolah	Terlaksananya pembangunan 1 ruang guru di SD Negeri Jumo	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5 Sekolah	Terlaksananya Pembangunan 9 Ruang Uks Di Sekolah Meliputi	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1. Sd Negeri Karangtejo, 2. Sd Negeri Karangseneg 3. Sd Negeri 1 Ketitang, 4. Sd Negeri 3 Gemawang, 5. Sd Negeri 2 Gentan, 6. Sd Negeri 4 Getas, 7. Sd Negeri Nampirejo, 8. Sd Negeri Ngabeyan, 9. Sd Negeri Tlogo			
				3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9 Sekolah	Terlaksananya pembangunan sarpas 3 Sekolah meliputi: 1. SD Negeri Jambu, 2. SD Negeri 2 Wonokerso, 3. SD Negeri 3 Kaloran.	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	16 Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi 10 Sekolah Meliputi	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1. Sd Negeri Karangtejo, 2. Sd Negeri Karangseneng, 3. Sd Negeri 1 Ketitang, 4. Sd Negeri 3 Gemawang, 5. Sd Negeri 2 Gentan, 6. Sd Negeri 4 Getas, 7. Sd Negeri Nglarangan, 8. Sd Negeri Ngabeyan, 9. Sd Negeri Lowungu, 10. Sd Negeri Tlogo			
				5) Pengadaan Mebel Sekolah	28 Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Mebel Di 24 Sekolah Meliputi 1. Sd Negeri Karangtejo, 2. Sd Negeri Karangseneng, 3. Sd Negeri 1 Ketitang, 4. Sd Negeri 3 Gemawang, 5. Sd Negeri 2 Gentan,	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						6. Sd Negeri 4 Getas, 7. Sd Negeri Nampirejo, 8. Sd Negeri Ngabeyan, 9. Sd Negeri Tlogo,			
				6) Pengadaan Perlengkapan Siswa	4 Paket TIK untuk 4 SD	Terlaksananya pengadaan 5 Paket TIK Pembelajaran untuk 1. SD Negeri Danurejo, 2. SD Negeri Campursalam 3. SD Negeri Nglondong, 4. SD Negeri Watukumpul, 5. SD Negeri Bagus	Terdapat penambahan alokasi anggaran berdasarkan musrenbang dan adanya tambahan alokas di perubahan APBD		
				7) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.500 Siswa	Tersedianya biaya personil sebanyak 1.479 Siswa	Sebagian anggaran tidak dapat dicairkan karena dobel anggaran dengan Program Indonesia Pintar	Pendataan calon penerima lebih selektif dan tepat sasaran	
				8) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	122 Paket TIK untuk 122 SD (1830 unit)	Terlaksananya penagdaan 122 Paket TIK untuk 122 SD (1830 unit)	Pilihan spesifikasi produk terbatas yang bisa terpilih dikarenakan adanya kebijakan TKDN	Melakukan proses persiapan lebih awal disesuaikan dengan produk yang ada di TKDN	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12.000 Siswa	Terselenggaranya asesmen nasional untuk 8384 Siswa	Perhitungan awal termasuk siswa Madrasah, dikarenakan tidak ada Ujian Nasional sehingga yang dihitung sebagai realisasi hanya peserta Asesmen Nasional di SD saja	Menyesuaikan kuota dan regulasi pelaksanaan asesmen oleh kemendikbudristek	
				10) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.940 Orang	1826 Orang pada semester I dan 746 Orang pada semester II	Sebagian Pendidik telah menerima TPG dan Sebagian lagi diterima PPPK	Validasi data usulan	
				11) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.193 Orang	2.261 Orang	Adanya selisih jumlah yang menilai PAK	Mengusulkan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
				12) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pendampingan Dapodik sebanyak 2 kali kepada 434 Sekolah Dasar	434 Sekolah	1. Jumlah satuan pendidikan yang tidak sebanding dengan admin dinas 2. Satuan Pendidikan banyak yang tidak melakukan pembaharuan data atau	1. Pembaharuan secara regular 2. Penyusunan SOP Dapodik 3. Peningkatan kapasitas SDM khususnya operator Dapodik Sekolah	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							update data dalam dapodik sehingga data tidak valid		
				13) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Realisasi dana BOS di 409 Sekolah Dasar	434 Sekolah	Selama ini yang dimasukkan dalam DPA hanya untuk SD Negeri saja tidak memasukkan SD Swasta	Menyesuaikan regulasi yang ada	
				14) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1 kegiatan Pelaksanaan pendampingan pengelolaan BOS sebanyak	1 kegiatan	Peralihan mekanisme proses sistem pengelolaan BOS (sebelum memakai sistem local, sekarang memakai ARKAS)	Sudah menggunakan aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS)	
				15) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	19 Sekolah	Terlaksanayanya Pembangunan 14 Lab Sekolah 1. Sd Negeri Karangseneng, 2. Sd Negeri 1 Kertosari, 3. Sd Negeri 3 Kedu, 4. Sd Negeri 1 Ketitang, 5. Sd Negeri 2 Gentan, 6. Sd Negeri 1 Gesing,	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						7. Sd Negeri 4 Getas, 8. Sd Negeri 1 Jampirejo, 9. Sd Negeri Glagahombo, 10. Sd Negeri 3 Gowak, 11. Sd Negeri Nglarangan, 12. Sd Negeri 3 Pagersari, 13. Sd Negeri Ngabeyan, 14. Sd Negeri Lowungu, 15. Sd Negeri 1 Kertosari, 16. Sd Negeri 3 Kedu 17. Sd Negeri 1 Gesing, 18. Sd Negeri 4 Getas, 19. Sd Negeri 1 Jampirejo, 20. Sd Negeri Glagahombo, 21. Sd Negeri 3 Gowak, 22. Sd Negeri 3 Pagersari			
				b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	74,28%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Penambahan Ruang Kelas Baru	4 Sekolah	Terlaksananya pembangunan 2 ruang kelas baru di: 1. SMPN 1 Jumo, 2. SMPN 1 Kaloran	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang di SMPN 1 Kranggan	Keterbatasan Ruang dan spesifikasi teknis tidak diatur di SPM	Menentukan spesifikasi teknis yang standar dan penyediaan alternatif ruang yang standar	
				3) Pembangunan Laboratorium	3 Sekolah	Terlaksananya pembangungn 3 laboratorium Sekolah: 1. SMPN 2 Kedu, 2. SMPN 1 Tretep, 3. SMPN 2 Ngadirejo.	Proses perencanaan pada saat pengadaan barang dan jasa ada beberapa item barang yang dibutuhkan mengalami fluktuasi harga	Menyesuaikan harga di pasaran (<i>e-katalog</i>) dengan TKDN	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10 Ruang	Terlaksananya pembangunan sarpras dan utilitas 3 Ruang: 1. SMPN 1 Wonoboyo, 2. SMPN 1 Tretep, 3. SMPN 2 Ngadirejo.	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	76 Sekolah	Terlaksana rekabilitasi sedang/berat pada 20 Sekolah: 1. SMP Kanisius, 2. SMP Maarif, 3. SMP Mualimin, 4. SMPN 6 Temanggung, 5. SMPN 2 Kedu, 6. SMPN 2 Bejen, 7. SMPN 1 Wonoboyo, 8. SMPN 1 Tretep, 9. SMPN 2 Ngadirejo, 10. SMPN 5 Temanggung,	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						11. SMPN 3 Temanggung, 12. SMPN 2 Selopampang, 13. SMPN 1 Temanggung, 14. SMPN 1 Bejen, 15. SMP Salomo, 16. SMP PGRI Kranggan, 17. SMPN 1 Gemawang, 18. SMPN 1 Kranggan, 19. SMPN 1 Kandangan, 20. SMPN 1 Jumo			
				6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	6 Sekolah	Terlaksananya rehabilitasi 6 ruang guru di Sekolah: 1. SMP Kanisius, 2. SMP Maarif, 3. SMPN 2 Kedu, 4. SMPN 1 Wonoboyo, 5. SMPN 2 Ngadirejo, 6. SMP 3 Salomo	Jadwal pelaksanaan yang singkat sesuai dengan jadwal pelaksanaan DAK Fisik	Melakukan komunikasi dengan pusat agar pelaksanaan kegiatan fisik DAK bisa dilaksanakan sedini mungkin	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat 2 ruang UKS Sekolah SMPN 6 Temanggung dan SMPN 1 Parakan	Jadwal pelaksanaan yang singkat sesuai dengan jadwal pelaksanaan DAK Fisik	Melakukan komunikasi dengan pusat agar pelaksanaan kegiatan fisik DAK bisa dilaksanakan sedini mungkin	
						Terlaksananya rehabilitasi 9 ruang perpustakaan sekolah antaranya: 1. SMP Kanisius, 2. SMP Maarif, 3. SMPN 1 Wonoboyo, 4. SMPN 2 Ngadirejo, 5. SMPN 5 Temanggung, 6. SMPN 3 Temanggung, 7. SMPN 3 Kandangan, 8. SMPN 2 Temanggung, 9. SMPN 1 Jumo.	Jadwal pelaksanaan yang singkat sesuai dengan jadwal pelaksanaan DAK Fisik	Melakukan komunikasi dengan pusat agar pelaksanaan kegiatan fisik DAK bisa dilaksanakan sedini mungkin	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	21 Sekolah	<p>Terlaksananya rehabilitasi 12 laboratorium IPA di</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMP Maarif, 2. SMPN 6 Temanggung, 3. SMPN 2 Bejen, 4. SMPN 1 Wonoboyo, 5. SMPN 2 Ngadirejo, 6. SMPN 2 Selompampang 7. SMPN 1 Bejen, 8. SMP Salomo, 9. SMPN 1 Gemawang, 10. SMPN 1 Parakan, 11. SMP N 1 Kranggan, 12. SMPN 1 Jumo <p>Terlaksananya rehabilitasi 9 Sekolah Lap TIK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMPN 6 Temanggung, 2. 2SMPN 2 Ngadirejo, 3. SMPN 3 Temanggung, 	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						4. SMPN 2 Temanggung, 5. SMPN 2 Selopampang, 6. SMPN 1 Temanggung, 7. SMPN 1 Bejen, 8. SMPN 1 Bejen, 9. SMPN 1 Parakan, 10. SMPN 1 Kranggan			
				9) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	23 Sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat 7 ruang ibadah: 1. SMP Muallimin, 2. SMPN 6 Temanggung, 3. SMPN 2 Bejen, 4. SMPN 1 Wonoboyo, 5. SMPN 3 Temanggung, 6. SMPN 1 Bansari, 7. SMPN 1 Jumo Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat 15 Sekolah ruang	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Toilet: 1. SMPN 6 Temanggung, 2. SMPN 2 Kaloran, 3. SMPN 1 Wonoboyo, 4. SMPN 1 Tretep, 5. SMPN 1 Ngadirejo, 6. SMPN 3 Temanggung, 7. SMPN 3 Kaloran, 8. SMPN 2 Selopampang, 9. SMPN 1 Temanggung, 10. SMPN 1 Bansari, 11. SMP 3 Salomo, 12. SMPN 1 Gemawang, 13. SMPN 1 Parakan, 14. SMPN 1 Kandangan, 15. SMPN 1 Kaloran.			
				10) Pengadaan Mebel Sekolah	1 Paket	Terlaksananya pengadaan 1 Paket mebel sekolah sebanyak 1.386 Set	Pengadaan mebel volume yang banyak tidak dapat disamakan produknya dikarenakan proses pembuatan dilakukan secara manual	Meningkatkan kontrol pengawasan lebih ketat sehingga spesifikasi mebel dapat terpenuhi	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				11) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	957 Siswa Penerima BSM dan 50 Siswa Penerima Bantuan masuk SMA sederajat	Terlaksananya penyediaan biaya personil untuk 957 Siswa penerima BSM dan 50 Siswa Penerima Bantuan masuk SMA sederajat	Proses verifikasi <i>by name by address</i> belum optimal	Proses verifikasi data dari calon penerima BSM lebih ketat agar tidak terjadi tumpang tindih data	
				12) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	8 Sekolah	Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa di 4 Sekolah: 1. SMP Mualimin, 2. SMP Muh 1 Temanggung, 3. SMP Nu Manbaul Huda, 4. SMP Menara Al Quran	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				13) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	10.950 Siswa	Terselenggaranya Asesmen Nasional untuk 2.966 Siswa	Perhitungan awal termasuk siswa Madrasah, dikarenakan tidak ada Ujian Nasional sehingga yang dihitung sebagai realisasi hanya peserta Asesmen	Menyesuaikan kuota dan regulasi pelaksanaan asesmen oleh Kemendikbudristek	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Nasional di SMP saja, dengan masing-masing SMP disampling maksimal 45 siswa		
				14) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.072 Orang	Tersedianya PTK Semester I sebanyak 446 Orang, Semester II 279 Orang	Sebagian Pendidik telah menerima TPG dan Sebagian lagi diterima PPPK	Validasi data usulan	
				15) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	890 Orang	Terlaksananya pengembangan karir untuk 650 PTK	Sebagian Pendidik telah menerima TPG dan Sebagian lagi diterima PPPK	Validasi data usulan	
				16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Realisasi dana BOS bagi 83 Sekolah Menengah Pertama	83 Sekolah Menengah Pertama	Pemahaman regulasi dan pelaksanaan teknis kegiatan belum merata	Pelaksanaan Bimtek Sosialisasi dan Peningkatan SDM Pengelola BOS	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				17) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan pendampingan pengelolaan BOS sebanyak 2 kali	2 kegiatan	Perubahan Juknis BOS dan update sistem informasi pengelolaan BOS (ARKAS)	Pelaksanaan Bimtek Sosialisasi dan Peningkatan SDM Pengelola BOS	
				18) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	8 Sekolah	Terlaksananya rehabilitasi 8 ruang TU di Sekolah: 1. SMP Maarif, 2. SMPN 6 Temanggung, 3. SMPN 2 Kedu, 4. SMPN 1 Wonoboyo, 5. SMPN 2 Ngadirejo, 6. SMPN 3 Temanggung, 7. SMP Remaja 8. SMP PGRI.	Usulan kegiatan DAK tidak sesuai dengan hasil RK yang akan dilaksanakan	Pengusulan Kembali kegiatan yang tidak dapat bantuan DAK	
				19) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	3 Sekolah	Terlaksananya rehabilitasi 3 ruang kepala sekolah: 1. SMPN 2 Bejen, 2. SMPN 2 Ngadirejo, 3. SMPN 1 Parakan.	Usulan kegiatan DAK tidak sesuai dengan hasil RK yang akan dilaksanakan	Pengusulan Kembali kegiatan yang tidak dapat bantuan DAK	
				c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3 Sekolah	Terlaksananya pembangunan 3 ruang kelas/guru Sekolah: 1. TK Pertiwi Badran Kranggan 2. TK Kartini Candirotto 3. TK Dharma Wanita Bantir Candirotto	Usulan kegiatan DAK tidak sesuai dengan hasil RK yang akan dilaksanakan	Pengusulan Kembali kegiatan yang tidak dapat bantuan DAK	
				2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	9 Sekolah	Terselenggaranya 8 Pembangunan sarpras/utilitas sekolah; 1. TK Pertiwi Badran Kranggan 2. TK Negeri Kecamatan Temanggung 3. TK Dharma Wanita 1 Gesing Kandangan 4. TK Negeri Kabupaten Temanggung 5. TK Dharma Wanita Ngaditirto Selopampang	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						6. TK Pertiwi Katekan Ngadirejo 7. TK Dharma Wanita Tlogo Tretep 8. TK Dharma Wanita Banjarsari Ngadirejo			
				3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1 Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi 5 ruang kelas/guru sekolah: 1. TK Pertiwi Badran Kranggan 2. TK Negeri Kecamatan Temanggung (2 kegiatan), 3. TK Dharma Wanita Caruban Kandangan	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	
				4) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	12	Terlaksananya rehabilitasi 2 toilet pada sekolah: 1. TK Negeri Kabupaten Temanggung, 2. TK Dharma Wanita Caruban Kandangan	Ketidaksesuaian antara usulan dan hasil desk RK	Mengusulkan kembali di tahun berikutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5) Pengadaan Mebel PAUD	2 Sekolah	Terlaksananya pengadaan mebel PAUD di 2 sekolah: 1. TK Pertiwi Badran Kranggan, dan 2. TK Negeri Kecamatan Temanggung	Usulan kegiatan DAK tidak sesuai dengan hasil RK yang akan dilaksanakan	Pengusulan Kembali kegiatan yang tidak dapat bantuan DAK	
				6) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	8 Sekolah	1. Terlaksananya a pengadaan alat praktik dan peraga siswa di 9 sekolah 2. TK Pertiwi Badran Kranggan (APE dalam) 3. TK Negeri Kecamatan Temanggung (APE dalam) 4. TK Dharma Wanita 1 Gesing Kandangan (APE dalam) 5. TK Intan Pertiwi Kranggan 6. (APE dalam) 7. TK Dharma	Usulan kegiatan DAK tidak sesuai dengan hasil RK yang akan dilaksanakan	Pengusulan Kembali kegiatan yang tidak dapat bantuan DAK	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Wanita 2 Tlogopucang Kandangan 8. (APE dalam) 9. TK Negeri Kecamatan Temanggung (APE Luar) 10. TK Dharma Wanita 1 Gesing (APE Luar) 11. TK Negeri Kabupaten Temanggung 12. (APE Luar)			
				7) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	23 Orang	Tersedianaya 20 Orang PTK di TK Negeri	Sebanyak 3 org PTK diterima PPPK	Validasi data	
				8) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	152 Orang	130 orang	Keterbatasan anggaran yang ada	Mengusulkan peningkatan anggaran di tahun yang akan datang	
				9) Pengelolaan Dana BOP PAUD	627 Lembaga	621 Lembaga	Beberapa Lembaga tidak melakukan sinkronisasi DAPODIK sesuai tenggat waktu yang ditentukan	Meningkatkan pengelolaan DAPODIK di Lembaga PAUD	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				10)Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pendampingan pengelolaan BOP PAUD kepada 626 Lembaga	Pendampingan pengelolaan BOP PAUD kepada 626 Lembaga	Perubahan Juknis BOS dan update sistem informasi pengelolaan BOP	Pelaksanaan Bimtek Sosialisasi dan Peningkatan SDM Pengelola BOP	
				d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100%	100%			
				1) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	1 Kegiatan	Terselenggaranya Kegiatan Gerakan Kembali ke sekolah di 5 wilayah, penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan, ujian pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pkbm	Pengurangan Anggaran oleh TAPD	Rencana awal disentralkan di Kabupaten, kemudian didistribusikan ke 20 kecamatan dibagi 5 titik wilayah	
				2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pemberian honor bagi 4600 Orang guru keagamaan	Tersedianya 4594 Orang	6 orang pindah tidak diketahui alamatnya atau sudah tidak melakukan aktifitas di lokasi	Mengoptimalkan pendataan calon penerima	
				3) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	23 Lembaga	25 Lembaga	Adanya tambahan 3 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tahun 2022		
				4) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pendampingan pengelolaan BOP Kesetaraan kepada 25 Lembaga 1 kegiatan	25 Lembaga masing masing 1 kegiatan	Perubahan Juknis BOS dan update sistem informasi pengelolaan BOP	Pelaksanaan Bimtek Sosialisasi dan Peningkatan SDM Pengelola BOP	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan		1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
				Angka Kematian Ibu	71.5 per 100.000 KH	75.32 per 100.000 KH	1. Tingginya faktor risiko pada ibu hamil 4T dan penyakit penyerta 2. Siklus pemantauan kesehatan ibu cukup panjang (hamil sampai dengan nifas) 3. Kualitas standar dan kegiatan kelas ibu hamil untuk kunjungan nifas dimasing-masing pelayanan kesehatan berbeda 4. Keterampilan tenaga kesehatan dalam kasus gadar maternal dan deteksi kasus komplikasi persalinan	- Koordinasi dengan tenaga ahli (SPOG) untuk melengkapi semua SOP pada setiap tindakan kebidanan termasuk pelayanan pasien kebidanan - dilaksanakannya pembahasan kasus yang dianggap bermasalah secara berkelanjutan dengan dihadiri oleh seluruh pihak terkait (AMP Maternal)	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Angka Kematian Bayi	12.2 per 1.000 KH	13.23 Per 1.000 KH	<ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan sarana prasarana penanganan kegawatdarutan asfiksi atau penyakit pada bayi; - Kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawadaruratan dan stabilisasi pasien pra rujukan; - Sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi. 	<p>Komitmen kinerja nakes untuk pelaksanaan KN dan IMD</p> <p>Kerjasama lintas program dalam IMD dan asi eksklusif</p> <p>Mengadakan advokasi dengan lintas program/ stake holder dilaksanakannya pembahasan kasus yang dianggap bermasalah secara berkelanjutan dengan dihadiri oleh seluruh pihak terkait (AMP Perinatal)</p>	
				Prevalensi balita gizi buruk	0,5	0,31	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kondisi kesehatan balita dalam penyerapan gizi - Pengetahuan ibu tentang gizi, serta pola asuh orang tua dalam asupan makanan bergizi belum optimal. - Minimnya variasi makanan dan riwayat ASI Eksklusif pada balita 	<p>Monitoring dan evaluasi kegiatan pengamatan/pemantauan tumbuh balita kembangnya secara rutin</p>	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase rumah tangga yang memiliki jamban	82,84 %	100%	Kurangnya monitoring dan kerjasama dengan berbagai sektor	Melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan lintas sektor terkait pengadaan jamban untuk syarat rumah sehat dan terus mengembangkan inovasi MINTI JAMBUL agardapat diadopsi oleh puskesmas lain	
				Persentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	95%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergantian proses dengan adanya TKDN 2. Terdapat Alkes yang belum muncul di ekatalog 3. Untuk sarana Adanya penambahan dan penggantian item pekerjaan sehingga dilakukan tender ulang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan proses pengadaan 2. Monitoring kelengkapan SPA 	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	97,80%	98,72%	1. Keterlambatan pengiriman obat 2. Ketidaksesuaian tanggal kadaluarsa dengan pemesanan 3. Trend penyakit yang tidak dapat diprediksi 4. Adanya mutasi tenaga kesehatan (dokter) sehingga trend peresepan obat berubah 5. Sampai saat ini belum semua obat muncul di e-catalog dan yang lain atau sisanya baru proses tender cepat	Melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan kepala cabang Pemberian denda keterlambatan kepada penyedia	
				Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan antenatal sesuai standar	100 %	100%	1. Belum optimalnya kualitas standar ANC 2. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan kegiatan ibu hamil	1. Melatih kader kesehatan untuk turut mendampingi, mendeteksi ibu hamil dengan masalah kesehatan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3. Pelaksanaan standar ANC yaitu 10T sulit untuk diterapkan secara menyeluruh	2. Gencar melakukan sosialisasi kesehatan ibu hamil di setiap kegiatan KIA	
				Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 %	100%	1. Masih belum optimalnya ketrampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus gadar maternal 2. Masih belum optimalnya ketrampilan tenaga kesehatan dalam mendeteksi kasus komplikasi persalinan	1. Melakukan refreshing pengetahuan nakes terhadap penanganan kasus kegawat daruratan maternal internal di tiap2 Puskesmas 2. Mengagendakan kunjungan tim spesialis kebidanan ke Puskesmas untuk pendeteksian dan penanganan resiko tinggi ibu hamil dan bersalin	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								3. Mengadakan jadwal rutin kunjungan tim spesialis untuk peningkatan pengetahuan nakes dalam penanganan kegawatdaruratan maternal di pelayanan dasar	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100 %	100%	<p>1. Masih belum optimalnya ketrampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus gadar maternal</p> <p>2. Masih belum optimalnya ketrampilan tenaga kesehatan dalam mendeteksi kasus komplikasi persalinan</p>	<p>1. Melakukan refreshing pengetahuan nakes terhadap penanganan kasus kegawatdaruratan maternal internal di tiap2 Puskesmas</p> <p>2. Mengagendakan kunjungan tim spesialis kebidanan ke Puskesmas untuk pendeteksian dan penanganan resiko tinggi ibu hamil dan bersalin</p>	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								3. Mengadakan jadwal rutin kunjungan tim spesialis untuk peningkatan pengetahuan nakes dalam penanganan kegawatdaruratan maternal di pelayanan dasar	
				Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100 %	100%	Pencatatan dan pelaporan sering terlambat.	1. Peningkatan Kesiapan Puskesmas mampu tatalaksana persalinan dan Pusk Poned thd kasus kegawatdaruratan 2. Pemenuhan Sarana prasarana utk penanganan kasus kegawatdaruratan termasuk sarpras utk rujukan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %	99.09%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal 2. Pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal 3. Kelengkapan sarana prasarana penanganan kegawatdarutan asfiksi atau penyakit pada bayi; 4. Kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawatdarutan dan stabilisasi pasien pra rujukan; 5. Sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesiapan Puskesmas mampu tatalaksana persalinan dan Puskesmas PONED kasus kegawatdarutan 2. Pemenuhan Sarana prasarana untuk Puskesmas Ramah Anak 	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	70 %	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal 2. Pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal 3. Kelengkapan sarana prasarana penanganan kegawatdarutan asfiksi atau penyakit pada bayi; 4. Kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawatdarutan dan stabilisasi pasien pra rujukan; 5. Sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesiapan Puskesmas mampu tatalaksana persalinan dan Puskesmas PONED kasus kegawatdarutan 2. Pemenuhan Sarana prasarana untuk Puskesmas Ramah Anak 	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Angka Kematian Neonatal (AKN)	7 per 1.000 KH	9.15 Per 1.000 KH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal 2. Pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal 3. Kelengkapan sarana prasarana penanganan kegawatdarutan asfiksi atau penyakit pada bayi; 4. Kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawat daruratan dan stabilisasi pasien pra rujukan; 5. Sistem rujukan untuk penanganan rujukan persalinan, penanganan bayi dengan komplikasi. 	<p>Komitmen kinerja nakes untuk pelaksanaan KN dan IMD</p> <p>Kerjasama lintas program dalam IMD dan asi eksklusif</p> <p>Mengadakan advokasi dengan lintas program/ stake holder dilaksanakannya pembahasan kasus yang dianggap bermasalah secara berkelanjutan dengan dihadiri oleh seluruh pihak terkait (AMP Perinatal)</p>	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	92.95%	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kualitas pelayanan posyandu dan kurang optimalnya kelas balita - Pemantauan tumbuh kembang balita yang tidak terlaksana dengan rutin melalui posyandu/Puskesmas. - Penimbangan serentak belum mampu menjangkau keseluruhan balita (adanya klasifikasi pendataan balita yang kurang tepat) - Kelengkapan pemberian vitamin A pada balita belum optimal (2x satu tahun pada bulan Februari Agustus) 	<p>Advokasi lintas sector dan stake holder</p> <p>Refresh tentang fungsi dan definisi operasional program</p> <p>Komitmen peningkatan kinerja tenaga Kesehatan</p>	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Angka Kemaian Balita	13,8 per 1.000 KH	15.6 Per 1.000 KH	1.Faktor resiko pada saat kehamilan 2.Balita dengan infeksi meningitis, kelainan jantung, sesak nafas maupun kecelakaan.	Pendeteksian factor resiko kehamilan Pendidikan pola asuh terhadap bayi dan balita Pendidikan pendeteksian factor resiko pada bayi dan balita oleh keluarga	
				Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	82.05%	1.Masih belum optimalnya kegiatan posbindu 2.Sumber rujukan untuk data sasaran berbeda (Dinkes bersumber dari Disdukcapil) 3.Tidak semua Puskesmas melaksanakan evaluasi terkait capaian kegiatan di tahun sebelumnya 4.Terdapat sasaran yang memiliki kesibukan (bekerja, sekolah dll) sehingga penjangkauan skrining sulit dilaksanakan. 5.Pelaporan dan pencatatan data skrining dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta belum terorganisasi dengan baik.	Peningkatan peran kader, peran masyarakat dan pengaktifan kembali pelayanan posbindu Melaksanakan koordinasi, monev dan pendampingan bagi puskesmas dan jejaringnya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelaporannya.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cakupan warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	89,07%	<p>1.Masih belum optimalnya kegiatan posbindu</p> <p>2.Sumber rujukan untuk data sasaran berbeda (Dinkes bersumber dari Disdukcapil)</p> <p>3.Tidak semua Puskesmas melaksanakan evaluasi terkait capaian kegiatan di tahun sebelumnya</p> <p>4.Terdapat sasaran yang memiliki kesibukan (bekerja, sekolah dll) sehingga penjangkauan skrining sulit dilaksanakan.</p> <p>5.Pelaporan dan pencatatan data skrining dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta belum terorganisasi dengan baik.</p>	Peningkatan peran kader, peran masyarakat dan pengaktifan kembali pelayanan posbindu Melaksanakan koordinasi, monev dan pendampingan bagi puskesmas dan jejaringnya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelaporannya.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	83,22%	6.Kurang variatifnya kegiatan di Posyandu Lansia 7.Kurangnya sosialisasi tentang Puskesmas Santun Lansia 8.Adanya posyandu lansia yang tidak aktif 9.Data kunjungan dan skrining tidak terlapor	Aktivasi kegiatan posyandu lansia Peningkatan kemampuan kader posyandu lansia Melibatkan lintas sector terkait untuk berpartisipasi dalam kegiatan posyandu lansia Sosialisasi puskesmas santun lansia dilintas sector maupun masyarakat	
				Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100 %	84,74%	1.Perubahan prevalensi berdasarkan Riskesdas tahun 2023 2.Pelaporan data by name dari faskes swasta belum optimal 3.Indikator capaian adalah kunjungan minimal 1 bulan sekali kasus hipertensi	1.mendorong pelaksanaan deteksi dini dan penemuan kasus hipertensi melalui kerjasama lintas program yang ada di Puskesmas. 2.mendorong peningkatan pelayanan kasus hipertensi sesuai standar	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4.Tidak semua kasus hipertensi tercover kegiatan Prolanis	3.menghimpun data dari faskes swasta di wilayah kerja Puskesmas 4.Optimalisasi promosi kesehatan kepada masyarakat 5.Integrasi dengan lintas program dan lintas sektor 6.Advokasi terhadap pemangku kebijakan terkait hipertensi	
				Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	1.Perubahan prevalensi berdasarkan Riskesdas tahun 2023 2.Pelaporan data by name dari faskes swasta belum optimal 3.Indikator capaian adalah kunjungan minimal 1 bulan sekali kasus DM 4.Ketersediaan alat dan bahan pemeriksaan DM terbatas	1.mendorong pelaksanaan deteksi dini dan penemuan kasus DM melalui kerjasama lintas program yang ada di Puskesmas. 2.mendorong peningkatan pelayanan kasus DM sesuai standar 3.menghimpun data dari faskes swasta di wilayah kerja Puskesmas	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5.Tidak semua kasus DM tercover kegiatan Prolanis.	4.Optimalisasi promosi kesehatan kepada masyarakat 5.Integrasi dengan lintas program dan lintas sektor 6.Advokasi terhadap pemangku kebijakan terkait DM	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100 %	1.Stigma masyarakat yang menyebabkan keluarga ODGJ tidak mau terbuka tentang kondisi kasus ODGJ 2.Belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam pelayanan dan penanganan kasus. 3.Adanya kasus ODGJ yang tidak terdeteksiAlokasi dana desa untuk penanganan dan rujukan kasus ODGJ gaduh gelisah masih minim 4.Ketersediaan obat ODGJ yang terbatas 5.Siklus penangan ODGJ yang harus berkelanjutan	1.Mendorong pelaksanaan deteksi dini dan penemuan kasus ODGJ melalui kerjasama lintas program yang ada di Puskesmas. 2.mendorong peningkatan pelayanan kasus ODGJ sesuai standar 3.Meningkatkan peran lintas sektor dalam pelayanan dan penanganan kasus ODGJ 4.Optimalisasi promosi kesehatan kepada masyarakat	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								5.Integrasi dengan lintas program dan lintas sektor 6.Advokasi terhadap pemangku kebijakan terkait ODGJ	
				Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	95,65%	Alat TCM terbatas, pemeriksaan terduga antri lama, pasien enggan diperiksa atau datangnya kesehatan takut di covidkan, kegiatan screening aktif belum maksimal Alat untuk penegakan diagnosa TBC(TCM) kurang optimal Pemeriksaan penunjang seperti rontgen, deteksi dini TB Anak (uji tuberkulin) hanya dapat dilaksanakan di RS, dan gratis bagi peserta BPJS saja	1.Memaksimalkan kegiatan investigasi kontak pasien TBC untuk dilakukan pemeriksaan terduga, 2.Pembentukan DPPM (Distrik Publik Private Mix) untuk pencatatan pelaporan kasus TB baik klinik swasta maupun pemerintah, 3.Koordinasi antara koalisi profesi TBC sebagai peningkatan jejarin pelayanan program TBC 4.Pembentukan kader TBC aktif disetiap Puskesmas 5.Pengusulan anggaran untuk kegiatan kader	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								6.Monev KOPI TB 7.Advokasi dan koordinasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	87,03%	1.Belum optimalnya pemetaan populasi kunci di Kabupaten Temanggung 2.Penjangkauan kelompok populasi kunci masih melibatkan komunitas atau LSM yang bersumber anggaran non APBD II 3.Kesadaran populasi berisiko HIV/AIDS untuk tes HIV masih belum optimal 4.Belum semua pasien TBC diperiksa HIV 5.Belum adanya regulasi/kebijakan Pemda tentang Pemeriksaan Triple Eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B) wajib bagi ibu hamil untuk pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA)	1. Optimalisasi test and treat HIV AIDS pada populasi kunci, populasi berisiko 2. Fasilitasi tenis pencatatan dan pelaporan 3. Monev bagi fasilitas kesehatan dalam peningkatan kinerja 4. Penjangkauan dan pendampingan dari komunitas 5. Aktivasi layanan HIV AIDS 6. Advokasi kepada stakeholder terkait	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan pembangunan puskesmas	1 paket pembangunan gedung persalinan Puskesmas Candiroto	1 paket pembangunan gedung persalinan Puskesmas Candiroto	Nihil		
				2) Sub kegiatan Pengembangan puskesmas	4 paket penambahan ruang Puskesmas mampu PONEB (Bejen; Gemawang; Ngadirejo; Pringsurat)	4 paket penambahan ruang Puskesmas mampu PONEB (Bejen; Gemawang; Ngadirejo; Pringsurat)	Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak	1. Adanya perpanjangan waktu melalui addendum kontrak di pringsurat, ngadirejo dan Bejen 2. Pembayaran denda atas keterlambatan	
				3) Sub kegiatan Pengembangan fasilitas Kesehatan lainnya	1 paket renovasi gedung Labkesda	1 paket renovasi gedung Labkesda	Nihil		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4) Sub kegiatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	7 unit sepeda motor operasional pusling roda 2 dan 1 unit ambulance PSC; 7 unit ambulance Puskesmas (Bejen; Banjarsari; Bulu; Gemawang, Tepusen, Rejosari, Wonoboyo); 6 unit alat pendingin; 1 paket instalasi air bersih Labkes; 1 paket instalasi air limbah; software bridging P-Care dan SIMPUS) 1 paket;	7 unit sepeda motor operasional pusling roda 2 dan 1 unit ambulance PSC; 7 unit ambulance Puskesmas (Bejen; Banjarsari; Bulu; Gemawang, Tepusen, Rejosari, Wonoboyo); 6 unit alat pendingin; 1 paket instalasi air bersih Labkes; 1 paket instalasi air limbah; software bridging P-Care dan SIMPUS) 1 paket;	Nihil		
				5) Sub kegiatan pengadaan alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Set pemeriksaan kesehatan ibu dan anak 6 paket (6 Puskesmas rawat inap); Set obgyn 7 paket Alkes set kegawat	Set pemeriksaan kesehatan ibu dan anak 6 paket (6 Puskesmas rawat inap); Set	Nihil		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					daruratan maternal dan perinatal 7 paket; Set perawatan pasca persalinan 7 paket; set gawat darurat termasuk EKG 7 paket untuk 7 uskesmas; set pemeriksaan ibu dan anak termasuk IVA test 2 paket; set laboratorium 9 paket untuk 9 puskesmas; alat kesehatan labkesda 1 paket; autoclave; coldbox; drybath; ESR analyzer; A and F sfaty shower; freeze; hematomizer; laminar flow/ PCR flood; roller mixer; spindown, vortec), 3 unit alarm sensor; 4 buah meja instrumen; buah insect killer. Alat kedokteran gigi (dental unit) 4	obgyn 7 paket Alkes set kegawat daruratan maternal dan perinatal 7 paket; Set perawatan pasca persalinan 7 paket; set gawat darurat termasuk EKG 7 paket untuk 7 uskesmas; set pemeriksaan ibu dan anak termasuk IVA test 2 paket; set laboratorium 9 paket untuk 9 puskesmas; alat kesehatan labkesda 1 paket; oktofklar; coldbox; drybath; ESR analyzer; A and F sfaty shower; freeze; hematomizer; laminar flow/ PCR flood; roller mixer; spindown, cortect), 3 unit				

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					unit; 3 unit manual genecolog bed; foot step 4 unit, manual economic bed 6 unit; manual sotamak bed 6 unit; medicine cabinet 8 unit; stetoscope dewasa 2 unit; tensimeter digital 1 unit; timbangan dengan ukur tinggi badan 2 unit; waiting chair 4 seat 12 unit; wheel chair 2 unit; instrument cabinet 6 unit; thermal detector imagine 2 unit; thermometer digital ruangan 8 unit, baby basket 5 unit	alarm sensor; 4 buah meja instrument labkesda; 1 buah insect killer. Alat kedokteran gigi 3 unit; 3 unit manual genecolog bed. foot step 4 unit, manual economic bed 6 unit; manual sotamak bed 6 unit; medicine cabinet 8 unit; stetoscope dewasa 2 unit; tensimeter digital 1 unit; timbangan dengan ukur tinggi badan 2 unit; waiting chair 4 seat 12 unit; wheel chair 2 unit; instrument cabinet 6 unit; thermal detector imagine 2 unit; thermometer digital ruangan 8 unit, baby basket 4 unit			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6) Sub kegiatan pengadaan obat, vaksin	48 paket obat	48 paket obat	Adanya penarikan obat sirup yang membahayakan Ginjal dan belum ada penggantian	Konsultasi pemecahan masalah ke BPKPAD terkait persediaan	
				7) Sub kegiatan pengadaan Bahan Habis Pakai	28 paket (18 paket BHP kefarmasian, 6 paket BHP P2, 4 paket DBHCHT)	28 paket (18 paket BHP kefarmasian, 6 paket BHP P2, 4 paket DBHCHT)	Rekanan lambat dalam menyerahkan dokumen pembayaran	Melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan kepala cabang	
				8) Sub kegiatan distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas Kesehatan lainnya	12 bulan pendistribusian obat dan BMHP ke 26 puskesmas	12 bulan pendistribusian obat dan BMHP ke 26 puskesmas	Tidak adanya karyawan yang bisa menyetir mobil untuk distribusi obat dan BMHP ke 26 Puskesmas	Mengusulkan tambahan tenaga administrasi umum yang bisa menyetir mobil	
				b. Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	100%	99,24%			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>Keputusan Bupati Temanggung nomor 130/168 Tahun 2021 tentang Tim penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung</p>	1) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Bimtek program reproduksi dan KB 1x, cetak form/booklet ANC Terpadu sebanyak 2000 buah dan bagan lembar balik MTBS sebanyak 50 buah	Bimtek program reproduksi dan KB 1x, cetak form/booklet ANC Terpadu sebanyak 2000 buah dan bagan lembar balik MTBS sebanyak 50 buah	Pengadaan cetak dilakukan pada akhir tahun	Pengadaan tahun selanjutnya dilakukan mulai awal tahun	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	12 bulan klaim pelayanan jaminan persalinan bagi ibu hamil dan bersalin miskin, pertemuan AMP Maternal 2x, AMP Perinatal 2x, dan Rekomendasi AMP 2x	12 bulan klaim pelayanan jaminan persalinan bagi ibu hamil dan bersalin miskin, pertemuan AMP Maternal 2x, AMP Perinatal 2x, dan Rekomendasi AMP 2x	Belum semua programmer kesehatan ibu di puskesmas menguasai aplikasi e-kohort	Peningkatan pengetahuan aplikasi e-kohort melalui bintek	
				3) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rapat koordinasi penurunan AKI AKB 2x, sosialisasi MPDN dan e-kohort 3x, jasa telekonsultasi Sp. OG, Sp. A, (USG)	Rapat koordinasi penurunan AKI AKB 2x, sosialisasi MPDN dan e-kohort 3x	Tidak terlaksananya telekonsultasi Sp. OG dan Sp. A (USG) karena pengadaan USG untuk Puskesmas selesai akhir tahun 2022	Koordinasi dengan bidang SDK Sub Kor Sarana dan Prasarana terkait percepatan pengadaan dan pengiriman USG ke Puskesmas	
				4) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orientasi Kalakarya MTBS bagi fasilitator puskesmas, orientasi pendampingan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi, pertemuan koordinasi/ sosialisasi dalam rangka peningkatan peran pokjanan posyandu Tingkat Kabupaten	Orientasi Kalakarya MTBS bagi fasilitator puskesmas, orientasi pendampingan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi, pertemuan koordinasi/ sosialisasi dalam rangka peningkatan peran pokjanan posyandu Tingkat Kabupaten	Nihil		

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orientasi penggunaan panduan praktis untuk caregiever informal pada perawatan jangka Panjang bagi lansia	Orientasi penggunaan panduan praktis untuk caregiever informal pada perawatan jangka Panjang bagi lansia	Nihil		
				6) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Cetak Charta PANDU PTM 60lbr, Juknis PTM era newnormal 30 bk, KMR 1000 lbr, materai 1 lbr, Pendampingan pemberdayaan masyarakat program PTM 1x Rakor Peningkatan Cakupan SPM 1x supervisi ke puskesmas 5x, Koordinasi Tingkat Provinsi 1x	Cetak Charta PANDU PTM 60lbr, Juknis PTM era newnormal 30 bk, KMR 1000 lbr, Pendampingan pemberdayaan masyarakat program PTM 1x Rakor Peningkatan Cakupan SPM 1x supervisi ke puskesmas 5x, Koordinasi Tingkat Provinsi 1x	Pemdampingan Pemberdayaan masyarakat terkendala masih rendahnya kesadaran masyarakat mengikuti POSBINDU	Menambah volume lokasi kegiatan POSBINDU	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Pendampingan pemberdayaan masyarakat program PTM 1x Rakor Peningkatan Cakupan SPM 2x supervisi ke puskesmas 9x,	Pendampingan pemberdayaan masyarakat program PTM 1x Rakor Peningkatan Cakupan SPM 2x supervisi ke puskesmas 9x,	Pemdampingan Pemberdayaan masyarakat terkendala masih rendahnya kesadaran masyarakat mengikuti POSBINDU	Menambah volume lokasi kegiatan POSBINDU	
				8) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	Cetak Kartu Kader 40 bk, Cetak Juknis Penyuluhan KESWA 100 bk Rakor Peningkatan Cakupan Program jiwa 1x Rapat Koordinasi TPKJM Tk. Kabupaten 1x Sosialisasi GME dan Depresi 3x SOsialisasi GME dan Depresi pada Guru BK 1x Sosialisasi Penanganan ODGJ Pasca Rawat bagi Kader 1x Sosialisasi Penyalahgunaan NAPZA 1x Supervisi ke Puskesmas 10x Pemantauan Kasus Pasung 12x	Cetak Kartu Kader 40 bk, Cetak Juknis Penyuluhan KESWA 100 bk Rakor Peningkatan Cakupan Program jiwa 1x Rapat Koordinasi TPKJM Tk. Kabupaten 1x Sosialisasi GME dan Depresi 3x SOsialisasi GME dan Depresi pada Guru BK 1x Sosialisasi Penanganan ODGJ Pasca Rawat bagi Kader 1x Sosialisasi Penyalahgunaan NAPZA 1x Supervisi ke Puskesmas 10x Pemantauan Kasus Pasung 12x	Kurang aktifnya Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)	Memperbarui SK Tim TPKJM dengan menunjuk jabatan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	<p>Pertemuan Teknis dan Validasi Data Program SITB bagi Pengelola Program TB dan Petugas Laboratorium 8x</p> <p>Rapat Evaluasi Kegiatan Investigasi Kontak Pasien TBC dan Pemberian TPT 2x</p> <p>Rapat Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan untuk Alur dan Tatalaksana Tuberkulosis Terbaru 1x</p> <p>Rapat Teknis Validasi Data Logistik SITB 2x</p> <p>Pengiriman Sampel Uji Silang Laboratorium TB ke Laboratorium Rujukan 4x</p>	<p>Pertemuan Teknis dan Validasi Data Program SITB bagi Pengelola Program TB dan Petugas Laboratorium 8x</p> <p>Rapat Evaluasi Kegiatan Investigasi Kontak Pasien TBC dan Pemberian TPT 2x</p> <p>Rapat Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan untuk Alur dan Tatalaksana Tuberkulosis Terbaru 1x</p> <p>Rapat Teknis Validasi Data Logistik SITB 2x</p> <p>Pengiriman Sampel Uji Silang Laboratorium TB ke Laboratorium Rujukan 4x</p>	<p>1. Sinyal internet yang kurang lancar dan tidak semua petugas hadir pada saat validasi data SITB</p> <p>2. Untuk pencatatan logistik tidak sama antara yang di puskesmas dengan yang dinas</p> <p>3. Petugas belum melalui system informasi</p>	<p>1. Datang langsung ke puskesmas</p> <p>2. Melakukan kroscek logistic dengan petugas</p> <p>3. baru</p>	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				10) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Kegiatan Mobile Klinik VCT pada Populasi Beresiko 80 org Pertemuan Introduncing pencatatan pelaporan SIHA 2.0 Versi Terbaru (Bagi Dokter, RR, Farmasi dan Petugas Lab) 1x Jejaring dan Penjangkauan Populasi Kunci HIV AIDS 2x Jejaring dan Koordinasi Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) 2x Validasi Data ODHA On ARV 2x Validasi Data SIHA 2.0, 2x Rapat Teknis dan Koordinasi Layanan PDP HIV AIDS 2x Validasi Data Program HIV AIDS (SIHA)	Kegiatan Mobile Klinik VCT pada Populasi Beresiko 80 org Pertemuan Introduncing pencatatan pelaporan SIHA 2.0 Versi Terbaru (Bagi Dokter, RR, Farmasi dan Petugas Lab) 1x Jejaring dan Penjangkauan Populasi Kunci HIV AIDS 2x Jejaring dan Koordinasi Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) 2x Validasi Data ODHA On ARV 2x Validasi Data SIHA 2.0, 2x Rapat Teknis dan Koordinasi Layanan PDP HIV AIDS 2x Validasi Data Program HIV AIDS (SIHA)	A. Populasi Kunci : 1. yang hadir bukan sasaran 2. kesulitan mencari populasi kunci sesuai dengan sasaran 3. populasi kunci blm mau terlibat aktif dalam penjangkauan 4. terbatasnya jangkauan ke Perusahaan dikarenakan sulit akses masuk B. Petugas Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) HIV di Puskesmas 1. Seringnya pergantian personal yang telah terlatih 2. Kurang aktifnya petugas PDP yang terlatih	1. Meningkatkan koordinasi dengan kelompok Dukungan sebaya 2. Memberikan pendampingan dan motivasi kepada populasi kunci 3. Melaksanakan kegiatan yang ditempat yang sudah melakukan Kerjasama Pendampingan petugas PDP melalui Bimtek	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>dan Triple Eliminasi 1x Pengambilan sampel Viral Load pada ODHA, 40 org x 2 kali</p> <p>Pengiriman spesimen ODHA ke RS Rujukan 6x</p> <p>Pertemuan dan pengambilan logistik HIV AIDS 6x</p> <p>Monitoring dan Supervisi Layanan PDP HIV AIDS 8x</p> <p>Validasi dan Bimbingan teknis SIHA 8x</p> <p>Pelacakan pasien lost to follow up ARV 20x</p> <p>Pendampingan ODHA On ARV ke layanan kesehatan 20x</p> <p>Pembelian ATK Penggandaan</p>	<p>dan Triple Eliminasi 1x Pengambilan sampel Viral Load pada ODHA, 40 org x 2 kali</p> <p>Pengiriman spesimen ODHA ke RS Rujukan 6x</p> <p>Pertemuan dan pengambilan logistik HIV AIDS 6x</p> <p>Monitoring dan Supervisi Layanan PDP HIV AIDS 8x</p> <p>Validasi dan Bimbingan teknis SIHA 8x</p> <p>Pelacakan pasien lost to follow up ARV 20x</p> <p>Pendampingan ODHA On ARV ke layanan kesehatan 20x</p> <p>Pembelian ATK Penggandaan</p>			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				11) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBM Pengambilan Logistik 88 kali 2. Belanja insentif tenaga kesehatan 1 tahun 3. Insentif tenaga vaksinator Covid-19 (12 kegiatan/ 12 bulan) 4. Belanja Honor Pengolah Data kasus COVID-19 tingkat Kabupaten (12 bulan) 5. Insentif Relawan Pemulsaran Jenasah Covid 19 (12 bulan) 6. Insentif Tenaga Non Kesehatan Covid 19 (12 bulan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBM Pengambilan Logistik 88 kali 2. Belanja insentif tenaga kesehatan 5 bulan (puskesmas = Desember 2021 – April 2022, RS = Januari – Februari 2022) 3. Insentif tenaga vaksinator Covid-19 (12 kegiatan/ 12 bulan) 4. Belanja Honor Pengolah Data kasus COVID-19 tingkat Kabupaten (12 bulan) 5. Insentif Relawan Pemulsaran Jenasah Covid 19 (12 bulan) 6. Insentif Tenaga Non Kesehatan Covid 19 (12 bulan) 	<p>Bahan-bahan lain tidak terserap karena dapat alokasi dari dinas kesehatan provinsi Jawa tengah.</p> <p>Jasa penanganan bencana itu sisa anggaran tidak terserap dikarenakan disesuaikan dengan jumlah kasus kematian di tahun 2022 akibat covid turun.</p> <p>Belanja insentif tenaga kesehatan vaksinator masih sisa dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan vaksinasi di kabupaten Temanggung.</p> <p>Makan Minum Tenaga Vaksinasi Sisa Dikarenakan D disesuaikan Dengan Kebutuhan Pelaksanaan Vaksinasi.</p>	Melakukan Penanganan KLB 1 X 24 Jam Disesuaikan Dengan Kasus.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					7. Pertemuan koordinasi linsek dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 tk kabupaten 4x 8. Pertemuan peningkatan kapasitas tracer 26 kali 9. Pertemuan peningkatan kapasitas pengolah data dalam rangka tracing dan manajemen data (2 kali) 10. Penyelidikan KLB Covid-19 (36 kali) 11. Paket data internet (12bulan) 12. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	7. Pertemuan koordinasi linsek dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 tk kabupaten 3x 8. Pertemuan peningkatan kapasitas tracer 26 kali 9. Pertemuan peningkatan kapasitas pengolah data dalam rangka tracing dan manajemen data (4 kali) 10. Penyelidikan KLB Covid-19 (32 kali) 11. Paket data internet (10bulan) 12. Pengambilan vaksin dan logistic (36 kali) 13. Pengambilan logistic vaksin (10 kali)			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					13. Pengambilan vaksin dan logistic (30 kali) 14. Pengambilan logistic vaksin (30 kali) 15. BBM pengambilan logistic Covid 19 (100 kali) 16. Cetak form Penyelidikan Epidemiologi (PE) Campak (26 paket) 17. Cetak form pemantauan Covid-19 (26 paket) 18. Cetak form Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB Penyakit Menular (26 paket) 19. BBM Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Peningkatan Surveilans	14. BBM pengambilan logistik Covid 19 (66 kali) 15. Cetak form Penyelidikan Epidemiologi (PE) Campak (26 paket) 16. Cetak form pemantauan Covid-19 (26 paket) 17. Cetak form Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB Penyakit Menular (26 paket) 18. BBM Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Peningkatan Surveilans dan Pendukung Penanganan Covid (10 kali) 19. BBM Rujukan pengujian specimen surveilans rutin, sentinel dan			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>dan Pendukung Penanganan Covid (20 kali)</p> <p>20. BBM Rujukan pengujian specimen surveilans rutin, sentinel dan dugaan KLB ke Laboratorium kesehatan daerah atau Laboratorium rujukan pemerintah kabupaten/Provinsi (25 kali)</p> <p>20. BBM Kegiatan Pemulasaraan Jenasah dan mobilisasi Pasien Rujukan Covid 19 (24 kali)</p> <p>21. ATK Pendukung kegiatan surveilans imunisasi (100 RIM)</p> <p>21. BBM Kegiatan Pemulasaraan Jenasah dan mobilisasi Pasien Rujukan Covid 19 (50 kali)</p> <p>22. ATK Pendukung kegiatan surveilans imunisasi (60 RIM)</p>	<p>dugaan KLB ke Laboratorium kesehatan daerah atau Laboratorium rujukan pemerintah kabupaten/Provinsi (25 kali)</p> <p>20. BBM Kegiatan Pemulasaraan Jenasah dan mobilisasi Pasien Rujukan Covid 19 (24 kali)</p> <p>21. ATK Pendukung kegiatan surveilans imunisasi (100 RIM)</p> <p>22. ATK Kegiatan Vaksinasi Covid-19 (531 RIM)</p> <p>23. Makmin pelaksanaan vaksinasi (300 kali)</p> <p>24. Cetak form vaksinasi</p>			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					23. ATK Kegiatan Vaksinasi Covid-19 (950 RIM) 24. Makmin pelaksanaan vaksinasi (750 kali) 25. Cetak form vaksinasi				
				12) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Pelatihan kader pembangunan manusia 1x sebanyak 40 kader, Rembuk stunting di 10 desa lokus, orientasi motivator ASI di 10 lokasi, orientasi stunting anak sekolah di SMP, SMA/SMK 7 angkatan, Orientasi PMBA untuk kader 2 angkatan, Rakor pelayanan gizi di puskesmas 2x, Rakor Gizi tingkat	Pelatihan kader pembangunan manusia 1x sebanyak 40 kader, Rembuk stunting di 10 desa lokus, orientasi motivator ASI di 10 lokasi, orientasi stunting anak sekolah di SMP, SMA/SMK 7 angkatan, Orientasi PMBA untuk kader 2 angkatan, Rakor pelayanan gizi di puskesmas 2x, Rakor Gizi tingkat	Kegiatan baru terfokus pada desa lokus stunting	Puskesmas melakukan pemdampingan terhadap semua desa sesuai wilayah kerjanya	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kabupaten 1x, seminar stunting 1x, Reviu e-PPGBM 1x, Reviu antropometri 1x, Pengadaan PMT Ibu hamil KEK 1 paket, pengadaan media promosi Gizi masyarakat (booklet, leaflet, Lembar balik, poster dan roll bnner), Monev program gizi di 26 puskesmas	Kabupaten 1x, seminar stunting 1x, Reviu e-PPGBM 1x, Reviu antropometri 1x, Pengadaan PMT Ibu hamil KEK 1 paket, pengadaan media promosi Gizi masyarakat (booklet, leaflet, Lembar balik, poster dan roll bnner), Monev program gizi di 26 puskesmas			
				13) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok tertentu (750 orang), Sosialisasi dan advokasi pengukuran kebugaran menggunakan aplikasi SIPGAR, Kampanye germas dengan pembuatan kaos (160 sasaran).	Pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok tertentu (750 orang), Sosialisasi dan advokasi pengukuran kebugaran menggunakan aplikasi SIPGAR, Kampanye germas dengan pembuatan kaos (160 sasaran).	Pengukuran kebugaran jasmani belum menggunakan aplikasi SIPGAR. Belum ada tindak lanjut dari pengukuran kebugaran (rockport)	Menggunakan aplikasi SIPGAR saat rockport sehingga langsung diketahui hasilnya. Jika rockport dilakukan dengan manual maka disediakan form hasil rockport untuk sasaran.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				14) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	<p>Pertemuan koordinasi percepatan 5 pilar STBM (2 kali)</p> <p>Peningkatan kapasitas petugas terkait STBM bagi Tenaga Kesehatan (1 kali)</p> <p>Pertemuan Sosialisasi RPAM (1 kali)</p> <p>Pertemuan pengelolaan limbah medis di fasyankes (1 kali)</p> <p>Pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait pengelolaan limbah (2 kali)</p> <p>Pertemuan sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan</p>	<p>Pertemuan koordinasi percepatan 5 pilar STBM (2 kali)</p> <p>Peningkatan kapasitas petugas terkait STBM bagi Tenaga Kesehatan (1 kali)</p> <p>Pertemuan Sosialisasi RPAM (1 kali)</p> <p>Pertemuan pengelolaan limbah medis di fasyankes (1 kali)</p> <p>Pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait pengelolaan limbah (2 kali)</p> <p>Pertemuan sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan</p>	<p>Implementasi 5 pilar STBM terutama pilar CTPS dan pengelolaan limbah cair rumah tangga masih perlu ditingkatkan sehingga belum bertambahnya desa yang terverifikasi sebagai desa STBM.</p> <p>Belum semua pengelola DAMIU mendapatkan sosialisasi RPAM.</p> <p>Penghapusan alkes bermerkuri belum dilaksanakan dengan optimal karena rentang waktu yang disediakan oleh DLH Prov. Jateng singkat.</p> <p>Pembentukan GP2SP belum dapat dilakukan karena masih</p>	<p>Peningkatan pencapaian desa STBM dengan pemberdayaan kader kesehatan.</p> <p>Pendataan pengelola DAMIU yang belum mendapat sosialisasi RPAM</p> <p>Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan RPAM di tahun 2023.</p> <p>Pendataan alkes bermerkuri yang belum dimusnahkan.</p> <p>Upaya pembentukan GP2SP dilaksanakan lagi di tahun 2023.</p> <p>Mengedukasi</p>	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					alkes bermerkuri (1 kali) Rapat koordinasi petugas, lintas sektor terkait penyehatan lingkungan (2 kali) Pertemuan koordinasi pelaksanaan GP2SP (2 kali) Cetak roll up banner mengenai STBM dan jamban sehat (60 buah) Bantuan social jamban sehat (246 sasaran)	alkes bermerkuri (1 kali) Rapat koordinasi petugas, lintas sektor terkait penyehatan lingkungan (2 kali) Pertemuan koordinasi pelaksanaan GP2SP (1 kali) Cetak roll up banner mengenai STBM dan jamban sehat (60 buah) Bantuan social jamban sehat (122 sasaran)	belum siapnya lintas sector yang lain. Ada sasaran yang belum siap menerima bansos jamban sehat	masyarakat mengenai pentingnya jamban sehat	
				15) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Advokasi penggerakan Germas di tatatan sekolah dalam rangka pembentukan duta perubahan perilaku 3x40 orang; Advokasi penggerakan Germas di	Advokasi penggerakan Germas di tatatan sekolah dalam rangka pembentukan duta perubahan perilaku 3x40 orang; Advokasi penggerakan Germas di	Advokasi penggerakan Germas di tatatan sekolah dalam rangka pembentukan duta perubahan perilaku 3x40 orang; Advokasi penggerakan Germas di tatatan	Advokasi penggerakan Germas di tatatan sekolah dalam rangka pembentukan duta perubahan perilaku 3x40 orang; Advokasi penggerakan Germas di tatatan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					tatatan ponpes dalam rangka pembentukan duta perubahan perilaku 3x40 orang; Evaluasi penggerakan Germas di tatanan sekolah dalam rangka pembentukan duta perubahan perilaku 1x30 orang; Advokasi penggerakan Germas pada forum pemuda (relawan) 1x50 orang; Advokasi penggerakan Forum Komunikasi Germas tingkat Kabupaten 1x50 orang; Advokasi penggerakan Germas Forum Komunikasi Germas tk Kabupaten dalam rangka validasi data Germas 1x 30 orang; Kampanye lokal	tatatan ponpes dalam rangka pembentukan duta perubahan perilaku 3x40 orang; Evaluasi penggerakan Germas di tatanan sekolah dalam rangka pembentukan duta perubahan perilaku 1x30 orang; Advokasi penggerakan Germas pada forum pemuda (relawan) 1x50 orang; Advokasi penggerakan Forum Komunikasi Germas tingkat Kabupaten 1x50 orang; Advokasi penggerakan Germas Forum Komunikasi Germas tk Kabupaten dalam rangka validasi data Germas 1x 30 orang; Kampanye lokal	ponpes dalam rangka pembentukan duta perubahan perilaku 3x40 orang; Evaluasi penggerakan Germas di tatanan sekolah dalam rangka pembentukan duta perubahan perilaku 1x30 orang; Advokasi penggerakan Germas pada forum pemuda (relawan) 1x50 orang; Advokasi penggerakan Forum Komunikasi Germas tingkat Kabupaten 1x50 orang; Advokasi penggerakan Germas Forum Komunikasi Germas tk Kabupaten dalam rangka validasi data Germas 1x 30 orang; Kampanye lokal dalam rangka	ponpes dalam rangka pembentukan duta perubahan perilaku 3x40 orang; Evaluasi penggerakan Germas di tatanan sekolah dalam rangka pembentukan duta perubahan perilaku 1x30 orang; Advokasi penggerakan Germas pada forum pemuda (relawan) 1x50 orang; Advokasi penggerakan Forum Komunikasi Germas tingkat Kabupaten 1x50 orang; Advokasi penggerakan Germas Forum Komunikasi Germas tk Kabupaten dalam rangka validasi data Germas 1x 30 orang; Kampanye lokal dalam rangka	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dalam rangka mendukung Germas kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1x200 orang; Pelaksanaan Germas Edukasi Gizi Seimbang di Tk Kabupaten 1x400 orang; Pelaksanaan Germas SBH dalam rangka peningkatan UKBM 15X30 orang; Penggerakan Germas dalam penguatan pemanfaatan media 2x40 orang; Kampanye lokal dalam rangka mendukung Germas (promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat) dalam penyediaan media cetak	dalam rangka mendukung Germas kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1x200 orang; Pelaksanaan Germas Edukasi Gizi Seimbang di Tk Kabupaten 1x400 orang; Pelaksanaan Germas SBH dalam rangka peningkatan UKBM 15X30 orang; Penggerakan Germas dalam penguatan pemanfaatan media 2x40 orang; Kampanye lokal dalam rangka mendukung Germas (promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat) dalam penyediaan media cetak	promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1x200 orang; Pelaksanaan Germas Edukasi Gizi Seimbang di Tk Kabupaten 1x400 orang; Pelaksanaan Germas SBH dalam rangka peningkatan UKBM 15X30 orang; Penggerakan Germas dalam penguatan pemanfaatan media 2x40 orang; Kampanye lokal dalam rangka mendukung Germas (promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat) dalam penyediaan media cetak	mendukung Germas kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1x200 orang; Pelaksanaan Germas Edukasi Gizi Seimbang di Tk Kabupaten 1x400 orang; Pelaksanaan Germas SBH dalam rangka peningkatan UKBM 15X30 orang; Penggerakan Germas dalam penguatan pemanfaatan media 2x40 orang; Kampanye lokal dalam rangka mendukung Germas (promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat) dalam penyediaan media cetak	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				16) Sub kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan	100% deteksi dini penyakit berpotensi KLB	100% deteksi dini penyakit berpotensi KLB	Masih ditemukannya KLB keracunan makanan dan diare	Membentuk tim gerak cepat penanganan KLB	
				17) Sub kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Operasional pelayanan kegawat darurat bidang Kesehatan selama 1 tahun	pelayanan P3K pada moment acara kabupaten 60 kegiatan Penanganan kecelakaan lalu lintas 38 kasus Antar jemput pasien 30 kasus Penjemputan jenazah 10 jenazah	Masih banyak kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran	Pelaksanaan di limpahkan ke Puskesmas dan usulan anggaran yang mencukupi di tahun berikutnya	
				18) Sub kegiatan pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Temanggung untuk kasus IVA Cryo	pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Temanggung terealisasi hanya untuk 166 kasus IVA Cryo	Belum semua pemeriksaan IVA dapat di klaim karena keterbatasan anggaran Penanganan PGOT (Pengemis; Gelandangan dan Orang Terlantar) belum maksimal	Mengusulkan anggaran di tahun berikutnya	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				19) Sub kegiatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Kegiatan On Job Training Petugas Pelaksana Fogging Fokus Penanggulangan DBD 1x Pemantapan Kader dalam Upaya Peningkatan Pemberdayaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Masyarakat (TB, HIV DBD, ISPA, Diare, dll) 2x OJT Pelaksanaan Kelainan Indera 1x OJT Pencegahan dan Penanggulangan Leptospirosis 60 org Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data ISPA 32 org Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher	Kegiatan On Job Training Petugas Pelaksana Fogging Fokus Penanggulangan DBD 1x Pemantapan Kader dalam Upaya Peningkatan Pemberdayaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Masyarakat (TB, HIV DBD, ISPA, Diare, dll) 2x OJT Pelaksanaan Kelainan Indera 1x OJT Pencegahan dan Penanggulangan Leptospirosis 60 org Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data ISPA 32 org Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data ISPA 32 org	Pada saat pelatihan, alat tidak bisa maksimal digunakan Ada beberapa suku cadang yang harus diganti Petugas yang sudah dilatih pindah/keluar (karena tenaga non ASN), masyarakat yang sudah pernah dilatih pindah kerja di luar kota Pada saat praktek lapangan, masyarakat setempat belum siap (masih ada hewan peliharaan yang di dalam rumah, rumah belum kosong, dll)	Usulan perbaikan alat ke propinsi Usulan biaya perawatan/maintenance alat fogging Pergantian petugas baru Bimbingan teknis petugas pelaksana fogging Perpindahan/relokasi tempat pelaksanaan praktek fogging (di lapangan/tempat terbuka)	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>Rahim dengan Metode IVA dan CBE 50 org</p> <p>Rakor Peningkatan Cakupan Program Indera 30 org</p> <p>Rapat Teknis dan Koordinasi Kewaspadaan Dini Penyakit Menular bagi Lintas Sektor 30 org</p> <p>Rapat Teknis dan Validasi Data Program P2PTVZ dan Pencatatan Pelaporan SILANTOR (Sistem Informasi Surveilans Vektor) 30 org</p> <p>Sosialisasi Kewaspadaan Dini Penyakit DBD di Wilayah Endemis DBD 6x</p> <p>Sosialisasi Pencatatan Pelaporan Diare dan Thyphoid 32 org</p> <p>TOT UBM 30 org</p> <p>Pertemuan,</p>	<p>Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim dengan Metode IVA dan CBE 50 org</p> <p>Rakor Peningkatan Cakupan Program Indera 30 org</p> <p>Rapat Teknis dan Koordinasi Kewaspadaan Dini Penyakit Menular bagi Lintas Sektor 30 org</p> <p>Rapat Teknis dan Validasi Data Program P2PTVZ dan Pencatatan Pelaporan SILANTOR (Sistem Informasi Surveilans Vektor) 30 org</p>			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi dan Pengambilan Logistik Penyakit Menular 3x Pendampingan dan Bimtek Penyakit Menular ke Puskesmas, RS dan Klinik Swasta 13x Pembelian ATK Peggandaan	Sosialisasi Kewaspadaan Dini Penyakit DBD di Wilayah Endemis DBD 6x Sosialisasi Pencatatan Pelaporan Diare dan Thyphoid 32 org TOT UBM 30 org Pertemuan, Koordinasi dan Pengambilan Logistik Penyakit Menular 3x Pendampingan dan Bimtek Penyakit Menular ke Puskesmas, RS dan Klinik Swasta 13x Pembelian ATK Peggandaan			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				20) Sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Pembayaran iuran JKN bagi 40.338 jiwa masyarakat miskin selama 12 bulan	Pembayaran iuran JKN bagi 40.039 jiwa masyarakat miskin selama 12 bulan	Target secara nasional setiap Kabupaten/Kota harus UHC dengan kepesertaan JKN minimal 95% dari total penduduk	Adanya penambahan anggaran, karena diakhir tahun 2022 Temanggung baru mencapai 81,11%	
				21) Sub kegiatan operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	Operasional pelayanan Laboratorium Kesehatan daerah selama 12 bulan; 80% kunjungan laboratorium	Operasional pelayanan Laboratorium Kesehatan daerah selama 12 bulan; 80% kunjungan laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan sampel ke laboratorium - Monitoring pengelolaan air di masyarakat belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Dinas terkait untuk meningkatkan kunjungan laboratorium dan meningkatkan promosi pemeriksaan - Meningkatkan monitoring oleh petugas pada pengelola air di masyarakat 	
				22) Sub kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	PPME (Survey Penilaian akreditasi puskesmas)	Tidak dilaksanakan PPME (Penilaian Survey Akreditasi)	Kegiatan PPME (Survey Penilaian akreditasi puskesmas) tidak dapat dilaksanakan dengan adanya SE Menkes No. HK.02.01/MENKES/52/2022 tentang Penyelenggaraan	Pelaksanaan survey direncanakan dilaksanakan tahun 2023 setelah semua regulasi akreditasi lengkap	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan sampai akhir nopember belum ada ketentuan tentang survey akreditasi		
				23) Sub kegiatan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	AFP rate pada usia < 15 tahun 2 per 100.000 penduduk; 100% anak SD mendapatkan pelayanan imunisasi BIAS; UCI 100% dan UMI 80%	AFP rate pada usia < 15 tahun 2 per 100.000 penduduk; 100% anak SD mendapatkan pelayanan imunisasi BIAS; UCI 100% dan UMI 80%	Nihil		
				24) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Koordinasi PISPK Kabupaten 100%	Koordinasi PISPK Kabupaten 100%	- Adanya beberapa indicator PISPK yang capaiannya rendah dan sulit untuk diintervensi (perilaku merokok, penderita HT berobat teratur, penderita TB berobat sesuai standar)	-Promosi kesehatan -Kegiatan intervensi awal dan lanjut yang terintegrasi dengan program kegiatan lain (perkesmas, sanitasi, dll). -Melakukan pertemuan koordinasi dengan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama lintas program dan lintas sector masih belum optimal. - Adanya pergantian petugas PISPK baru yang belum terpapar PISPK. - Kuantitas dan kualitas petugas dalam analisis data dan updating data terbatas. <p>Alokasi Anggaran PISPK tidak memadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> -melibatkan lintas sector (PKK, Dindukcapil, Kemenag, Bappeda, dll) -Konsultasi dengan Dinkes Prov. Jateng terkait program PISPK (aplikasi dan reaktivasi aplikasi PISPK). -Pertemuan analisis data PISPK dan integrasi program termasuk refreshing aplikasi PISPK (cara updating data, input data, dll) -Terus mendorong pengelola untuk selalu updating data capaian perindikator. <p>Menyampaikan usulan ke Bapelkes Semarang untuk pelatihan PISPK</p>	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				25) Sub Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Headset Audio 8 unit; PC unit rendering dan editing video 8 unit; pro webcam 8 unit	Headset Audio 8 unit; PC unit rendering dan editing video 8 unit; pro webcam 8 unit	Tidak ada, karena terlaksana sesuai dengan perencanaan	Tetap dilaksanakan sesuai rencana	
				c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C; D dan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Pelaksanaan workshop akreditasi labkes 1 kegiatan; pemantapan mutu eksternal (PME) Labkesda 1 kegiatan; pembinaan mutu dan akreditasi Labkesda 1 kegiatan	Pelaksanaan workshop akreditasi labkes 1 kegiatan; pemantapan mutu eksternal (PME) Labkesda 1 kegiatan; pembinaan mutu dan akreditasi Labkesda 1 kegiatan	- Persiapan pelaksanaan workshop kurang matang karena waktu mendada - Kurang koordinasi tim pelaksanaan workshop	- Persiapan dilakukan jauh sebelum hari H - Meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk persiapan workshop	
				2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
				a. Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	100%	86, 11%			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan sesuai standar	9 bulan klaim insentif tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19 pada Puskesmas 8 Bulan (April-November) dan RSUD 9 Bulan (Maret-November), honor tim verifikasi insentif selama 12 bulan, ATK pendukung klaim pembayaran insentif tenaga kesehatan	9 bulan klaim insentif tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19 pada Puskesmas 8 Bulan (April-November) dan RSUD 9 Bulan (Maret-November), honor tim verifikasi insentif selama 12 bulan, ATK pendukung klaim pembayaran insentif tenaga kesehatan	Puskesmas mengajukan klaim insentif tenaga kesehatan kepada verifikator pada batas waktu yang ditentukan sehingga tim verifikator memiliki waktu yang terbatas dalam proses pengecekan oleh tim verifikator	Memberikan batas waktu dan aturan yang tegas terhadap keterlambatan pengajuan klaim apabila mengajukan diluar batas waktu yang ditentukan	
				2) Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	100%	97,5%			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Sub kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya penilaian angka kredit fungsional kesehatan (12 rumpun), terlaksananya kunjungan pengawasan keadaan SDM di fasyankes, ATK pendukung kegiatan SDM	Terlaksananya penilaian angka kredit fungsional kesehatan (12 rumpun), terlaksananya kunjungan pengawasan keadaan SDM di fasyankes, ATK pendukung kegiatan SDM	Dalam proses penilaian angka kredit, seringkali terdapat kekurangan berkas pengumpulan dan yang bersangkutan tidak segera melengkapi berkas tersebut, terdapat admin puskesmas yang tidak segera mengupdate data SDM apabila terjadi perubahan data	Memberikan aturan yang tegas terkait batasan waktu yang ditentukan dalam batas pengumpulan, memberikan pengingat secara berkala kepada admin puskesmas dan memberikan saran agar mengupdate data SDM secara berkala (minimal 1 bulan sekali)	
				3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					
				Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi	62 %	100%			
				Cakupan penggunaan obat rasional di puskesmas	77 %	96,15%			
				Pengawasan makanan dan minuman di pasar tradisional	100 %	100%			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan pemberian ijin apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	62 %	100%			
				1) Sub kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Bimtek kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian 60, pengawasan Apotek, toko obat, dan Umot terhadap pemenuhan standart persyaratan 60	Bimtek kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian 64, pengawasan apotek, toko obat dan umot terhadap pemenuhan standart persyaratan 64	Apotik dan toko obat lambat dalam menyelesaikan CAPA hasil pemeriksaan	Melaksanakan desk pemenuhan CAPA dengan apotik dan toko obat	
				b. Kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi, untuk produksi makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	100%	100%			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>1) Sub kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga</p>	<p>Bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan 180 IRTP, pengawasan dalam rangka penerbitan SPP IRT 180, Pengawasan post market sarana IRTP 180, Sampling dan pengkajian pangan IRT 40, KIE 240, Bimtek Kader Keamanan Pangan 90</p>	<p>Bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan 220 IRTP, Pengawasan dalam rangka penerbitan SPP IRT 116, Pengawasan post market sarana IRTP 172, Sampling dan pengkajian pangan IRT 40, KIE 246, Bimtek kader Keamanan Pangan 95</p>	<p>Pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT baru 116 : 1. IRTP off produksi 2. IRTP belum siap dikunjungi IRTP mendaftar di akhir tahun, akan dikunjungi di awal 2023</p>	<p>Peningkatan komitmen BIMTEK oleh pelaku industri rumah tangga; mendekatkan lokasi pelatihan dengan domisili peserta dan melibatkan tenaga puskesmas sebagai narasumber, dan pengawasan sarana IKTP, serta pelaksanaan monitoring data sesuai Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	
				<p>4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>					

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Advokasi pemberdayaan kemitraan peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten kota					
				Peningkatan upaya promosi kesehatan advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Germas pendukung pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; balita; bayi baru lahir; ibu bersalin; ibu hamil; kesehatan lansia 100%	Germas pendukung pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; balita; bayi baru lahir; ibu bersalin; ibu hamil; kesehatan lansia 100%	Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; balita; bayi baru lahir; ibu bersalin; ibu hamil; kesehatan lansia belum terintegrasi	Sosialisasi dan advokasi, pembentukan posyandu prima yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, remaja dan lansia	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					
				Persentase jaringan irigasi kondisi baik	58,82%	58,83%	Adanya bencana alam	Tanggap bencana pada daerah yang rawan akan bencana dengan pencegahan dini	
				Cakupan area layanan daerah irigasi	96,90%	97,97%	Banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian	
				a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1 dokumen perencanaan E-Paksi dan 1 dokumen perencanaan bendung dan irigasi	1 dokumen perencanaan E-Paksi dan 1 dokumen perencanaan bendung dan irigasi	Pelaksanaan di anggaran perubahan.	Mengoptimalkan waktu yang ada	
				2) Sub Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi	Terlaksananya 5 paket pekerjaan yaitu : 1. Rehabilitasi Bendung DI	Terlaksananya 5 paket pekerjaan yaitu : 1. Rehabilitasi Bendung DI	Dokumen Perencanaan di tahun yang sama dengan Konstruksi, beberapa lokasi pekerjaan	Mengoptimalkan waktu yang ada dan Koordinasi dengan Petani Pemakai Air	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Siklewer Desa Pandemulyo (Bankeu), 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Siklewer Desa Pandmulyo kec. Bulu (Bankeu), 3. Pembangunan Talud Senderan Desa Giripurno Kec. Ngadirejo (Bankeu), 4. Jasa Konsultansi Pengawasan, dan 5. Jasa Konsultansi Perencanaan	Siklewer Desa Pandemulyo (Bankeu) dengan realisasi Mercur 1 buah, Sayap 18 m dan Groundshil 1 buah. 2.Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Siklewer Desa Pandmulyo kec. Bulu (Bankeu), dengan realisasi Saluran panjang 319,3 m, Talud 146 m dan Talang 26 m. 3.Pembangunan Talud Senderan Desa Giripumo Kec. Ngadirejo (Bankeu), dengan realisasi Saluran 720 m dan Talud 94,6 m. 4.Jasa Konsultansi Pengawasan 1 paket 5. Jasa Konsultansi Perencanaan 1 paket	terkendala Pengeringan saluran untuk kebutuhan air petani.	dengan kesepakatan penjadwalan pengaliran air	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	<p>Terlaksananya 9 paket pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Krekah 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Aji Gambasan 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sikenting 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sitalang 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Siturunan 6. Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Sipentong 7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sidali 	<p>Terlaksananya 9 paket pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Krekah, dengan realisasi Saluran panjang 195,7 m dan Talud 13,3 m. 2.Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Aji Gambasan, dengan realisasi Pekerjaan Saluran panjang 174 m dan Terjunan 2 buah. 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sikenting, dengan realisasi Saluran panjang 359,5 m dan Talud panjang 42 m. 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sitalang, dengan realisasi Saluran panjang 314,7 m. 5.Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Siturunan, dengan realisasi Saluran panjang 57,8 m 	<p>Dokumen Perencanaan di tahun yang sama dengan Konstruksi, beberapa lokasi pekerjaan terkendala pengeringan saluran untuk kebutuhan air petani dan pelaksanaan di anggaran perubahan.</p>	<p>Mengoptimalkan waktu yang ada dan Koordinasi dengan Petani Pemakai Air dengan kesepakatan penjadwalan pengaliran air</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kebo Kuning 9. Jasa Konsultansi Pengawasan	dan Talud 71 m. 6.Rehabilitasi Jaringan irigasi DI. Sipentong, dengan realisasi Saluran panjang 242,1 m, Talud 7 m dan Bangunan Bagi Sadap 11,8 m. 7.Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sidali, dengan realisasi Saluran panjang 24 m dan Talud panjang 14,5 m. 8.Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kebo Kuning, dengan realisasi Saluran 110,4 m dan Bangunan Pelimpah 1 buah. 9.Jasa Konsultansi Pengawasan 1 paket			
				4) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	a. Terlaksananya 5 paket pekerjaan yaitu : 1. Rehabilitasi Bendung DI. Aji Barang, 2. Rehabilitasi Bendung	a. Terlaksananya 5 paket pekerjaan yaitu : 1. Rehabilitasi Bendung DI. Aji Barang, dengan realisasi Mercu 1 buah dan Sayap 19 m.	Dokumen Perencanaan di tahun yang sama dengan Konstruksi dan beberapa lokasi pekerjaan terkendala pengeringan saluran untuk	Mengoptimalkan waktu yang ada dan Koordinasi dengan Petani Pemakai Air dengan kesepakatan penjadwalan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DI. Aji Nongko, 3. Rehabilitasi Bendung DI. Mundingharjo, 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Siences, 5. Rehabilitasi Talud Pengaman Irigasi DI. Sidodadi b. Kegiatan pemeliharaan rutin di 6 UPTD yaitu : 1. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung 2. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan	2. Rehabilitasi Bendung DI. Aji Nongko, dengan realisasi Talud 27,30 m. 3. Rehabilitasi Bendung DI. Mundingharjo, dengan realisasi Mercu 1 buah dan Sayap Bendung 17 m. 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Siences, dengan realisasi Saluran 46,85 m. 5. Rehabilitasi Talud Pengaman Irigasi DI. Sidodadi dengan realisasi Talud 37,70 m. b. Kegiatan pemeliharaan rutin di 6 UPTD yaitu : 1. Pembelian peralatan dan perlengkapan kerja operasi dan pemeliharaan irigasi sebanyak 1 paket.	kebutuhan air petani	pengaliran air	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASLAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					3. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III Ngadirejo 4. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan 5. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan 6. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak	2. Belanja bahan material untuk pemeliharaan jaringan irigasi sebanyak 1 paket. 3. Pembayaran upah tenaga pemeliharaan jaringan irigasi di 6 UPTD PJP 1-6 sejumlah 15 orang selama 8 bulan.			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Program Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
				Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	89%	95,32%	<p>1. Kontur geografi dan topografi wilayah dan tata kelola SPAM yang belum optimal di tingkat masyarakat.</p> <p>2. Adanya ego masing-masing desa / dusun dalam pemanfaatan sumber air minum</p>	<p>1. Pembentukan unit BUMDes bidang SPAM dan peningkatan kapasitas KPSPAM</p> <p>2. Peningkatan kualitas SDM pengelola SPAM dengan sosialisasi dan pelatihan.</p>	
				a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya kegiatan DAK Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di 7 lokasi yaitu : 1. Desa Karangwuni Kec. Pringsurat 2. Desa Bandunggede Kec. Kedu 3. Desa Gedongsari Kec. Jumo 4. Desa Jragan Kec. Tembarak 5. Desa Kataan Kec. Ngadirejo 6. Desa Gentingsari Kec. Bansari 7. Desa Kertosari Kec. Jumodan 8. Konsultan Pengawasan 1 Paket 9. Konsultan Perencanaan 1 Paket	Terlaksananya kegiatan DAK di 7 lokasi yaitu : 1. Desa karangwuni Kecamatan Pringsurat sebanyak 61 SR 2. Desa Jragan Kecamatan Tembarak sebanyak 533 SR 3. Desa Gentingsari Kecamatan Bansari sebanyak 145 SR 4. Desa Bandunggede kecamatan Kedu sebanyak 265 SR 5. Desa Gedongsari Kecamatan Jumo sebanyak 270 SR 6. Desa Kertosari Kecamatan Jumo sebanyak 275 SR 7. Desa Kataan Kecamatan	a. Penggalian pipa mengganggu aktivitas warga b. Jalur pipa melewati lahan warga	a. Penggalian pipa dan pemasangan dilaksanakan sekaligus b. Sebelum penanaman pipa berkomunikasi dengan pemilik lahan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ngadirejo sebanyak 102 SR 8. Konsultan Pengawasan 1 Paket			
				2) Sub kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Terlaksananya pelatihan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum sebanyak 17 KPSPAM dari bantuan DAK air minum dan pamsimas APBN	Terlaksananya pelatihan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum sebanyak 17 KPSPAM dari bantuan DAK air minum dan pamsimas APBN	1. Pengelolaan SPAM belum profesional 2. Setting tariff iuran belum sesuai BOP SPAM	1. Pembinaan KPSPAM 2. Penyesuaian tariff iuran dengan mempertimbangan biaya produksi dan ekonomi masyarakat.	
				3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase					
				Persentase pelayanan drainase skala kawasan/ kota sehingga tidak terjadi genangan	49%	69,04%	Kondisi lingkungan/ kawasan rawan terjadi genangan	1. Terpenuhinya pembangunan drainase kawasan perkotaan 2. Prioritas Penganggaran 2022 di beberapa titik lokasi drainase	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya 2 paket kegiatan konstruksi yaitu : 1. Pembangunan Drainase Jalan Sundoro 2. Pembangunan Drainase Jalan Temanggung-Gilingsari dan 3. Jasa konsultansi perencanaan 1 paket 4. Jasa konsultansi pengawasan 1 paket	Terlaksananya 2 paket kegiatan konstruksi yaitu: 1. Pembangunan Drainase Jalan Sundoro, dengan realisasi saluran Uditch panjang 475 m. 2. Pembangunan Drainase Jalan Temanggung-Gilingsari dengan realisasi saluran Uditch Panjang 450 m. 3. Jasa konsultan perencanaan 1 paket 4. Jasa konsultan pengawasan 1 paket	Dokumen Perencanaan di tahun yang sama dengan Konstruksi dan ketersediaan barang fabrikasi.	Mengoptimalkan waktu yang ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya 2 paket kegiatan konstruksi yaitu : 1. Pembangunan Drainase Jalan Dusun Getis Gilingsari s.d. Desa Candisari (M) 2. Pembangunan Drainase Jalan Raya Menggoro - Tawangsari (M) 3. Jasa konsultasi perencanaan 1 paket 4. Jasa konsultasi pengawasan 1 paket	Terlaksananya 2 paket kegiatan konstruksi yaitu: 1. Pembangunan Drainase Jalan Dusun Getis Gilingsari s.d. Desa Candisari (M), dengan realisasi saluran uditch panjang 650 m. 2. Pembangunan Drainase Jalan Raya Menggoro - Tawangsari (M) dengan realisasi saluran uditch panjang 239,5 m 3. Jasa konsultan perencanaan 1 paket 4. Jasa konsultan pengawasan 1 paket	Dokumen Perencanaan di tahun yang sama dengan Konstruksi dan ketersediaan barang fabrikasi.	Mengoptimalkan waktu yang ada	
				3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terlaksananya kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem drainase 6 UPTD yaitu : 1. UPTD	Terlaksananya kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem drainase 6 UPTD yaitu: 1. Pembelian	Kondisi eksisting infrastruktur saluran drainase gorong-gorong tingkat kerusakan lebih tinggi dari pada kemampuan	Skala prioritas dalam penangannya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung 2. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan 3. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III Ngadirejo 4. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan 5. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan 6. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak	peralatan dan perlengkapan kerja operasi dan pemeliharaan drainase sebanyak 1 paket. 2. Belanja bahan material untuk pemeliharaan drainase sebanyak 1 paket. 3. Pembayaran upah tenaga pemeliharaan drainase di 6 UPTD PJP 1-6 sejumlah 12 orang selama 8 bulan.	anggaran tahun ini untuk pemeliharannya		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4. Program Pengembangan Permukiman					
				Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/Hibah	100%	100%	1. Proposal baru dikirimkan tahun berjalan. 2. Lokasi dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam penetapan APBD & Proposal berbeda	Sosialisasi kepada Desa terkait proposal dan usulan kegiatan sebelum pelaksanaan (N-1)	
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan Bankeudes di 20 Kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan Bankeudes di 20 Kecamatan (172 desa). Dari 172 desa terdapat 7 desa tidak mencairkan (Desa Ngadimulyo, Ketitang, Gentan, Geblog, Wonotirto, Jumo, Pagersari) dan 3 desa yang mengembalikan dana hibah (Drono, Mondoretno, Lungge)	1. Pemahaman terhadap aturan-aturan dari pemerintah desa masih rendah, 2. Minimnya anggaran untuk melaksanakan monev.	1. Mengadakan sosialisasi terkait aturan-aturan khusus kepada desa, 2. Memaksimal kan kerja tim internal bankeudes, 3. Mencukupi anggaran sesuai kebutuhan.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5. Program Penataan Bangunan Gedung					
				Persentase gedung pemerintah kondisi baik	77,50%	86,82%	Belum tersedia anggaran untuk pendataan	Berkoordinasi dengan BPKPAD selaku pengelola asset dan PD terkait	
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
				1) Sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya fasilitasi permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	Terlaksananya fasilitasi permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sejumlah 64 PGB dan 7 SLF pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	1. Keterbatasan pemohon dalam mengakses SIMBG 2. Penyedia jasa butuh waktu yang lama dalam merevisi gambar hasil sidang	1. Membantu pemohon untuk upload dokumen di SIMBG 2. Menghubungi pemohon agar segera melakukan revisi dengan batas waktu 2 minggu	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya 4 paket konstruksi yaitu: 1. Pembangunan Gedung Sarpras MAKO POLRES Temanggung 2. Penyelesaian Jalan Lingkungan MAKO POLRES Temanggung Tahap II pada tahun 2022 3. Rehab Kantor Koramil Kedu 4. Rehabilitasi Kantor Kejaksaan 5. Konsultan Perencana 1 paket 6. Konsultan Pengawas 1 paket	Terbangunnya 3 Gedung dan 1 jalan lingkungan yaitu : 1. Rehabilitasi Kantor Kejaksaan 2. Rehabilitasi Kantor Koramil Kedu 3. Pembangunan Gedung Sarpras Polres Temanggung 4. Pembangunan Jalan Lingkungan Polres Tahap 2 5. Konsultan Perencana 1 paket 6. Konsultan Pengawas 1 paket	1. Progres fisik yang lambat 2. Lokasi proyek yang berpindah dari site awal	1. Melakukan rapat percepatan pelaksanaan konstruksi dan memberikan surat teguran kepada penyedia yang deviasinya > 10%	
				6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya					
				Persentase Trotoar Kondisi Baik	61%	73,93%	Trotoar sering digunakan untuk PKL	Koordinasi penataan PKL bersama PD terkait	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota					
				1) Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya 1 paket kegiatan konstruksi yaitu Pembangunan Trotoar Jalan Bandunggede - Traji – Gedongsari dan 1 jasa konsultasi perencanaan dan 1 jasa konsultasi pengawasan	Terlaksananya 1 paket kegiatan konstruksi yaitu Pembangunan Trotoar Jalan Bandunggede - Traji – Gedongsari (1,85 x 356 m) dan 1 paket jasa konsultasi perencanaan dan 1 paket jasa konsultasi pengawasan	a. Cuaca hujan sehingga menghambat pelaksanaan kontraktor b. Jenis uditch di perencanaan tidak tersedia di pasaran	a. Menggunakan tenda pada saat pemasangan terraso b. Melakukan rapat koordinasi dengan perencana untuk mengkaji kembali jenis uditch yang digunakan	
				7. Program Penyelenggaraan Jalan					
				Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	84,85%	88,15%	Terjadinya kenaikan harga material yang cenderung drastis	1. Percepatan dalam penentuan atau penyesuaian harga 2. Perencanaan dilaksanakan pada tahun N-1	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93,43%	92,88%	Jumlah anggaran yang tersedia belum bisa mencukupi kebutuhan untuk pemeliharaan jembatan sebanyak 337 unit.		
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya 5 paket pekerjaan jasa konsultansi yaitu : 1. Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan 2. Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan 3. Jasa Konsultansi Perencanaan UKL-UPL Jembatan Gantung Klepu – Guntur 4. Jasa Konsultansi Perencanaan Relokasi	Terlaksananya 5 paket pekerjaan jasa konsultansi yaitu : 1. Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan 1 paket 2. Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan 1 paket 3. Jasa Konsultansi Perencanaan UKL-UPL Jembatan Gantung Klepu – Guntur 1 paket 4. Jasa Konsultansi Perencanaan Relokasi Jalan Dalangan - Gemawang dan	Kegiatan dilaksanakan di anggaran perubahan	Mengoptimalkan waktu yang tersedia	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jalan Dalangan - Gemawang dan Jembatan Kali Sisih 5. Jasa Konsultansi Perencanaan Studi Kelayakan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) Relokasi Jalan Dalangan - Gemawang dan Jembatan Kali Sisih	Jembatan Kali Sisih 1 paket 5. Jasa Konsultansi Perencanaan Studi Kelayakan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) Relokasi Jalan Dalangan - Gemawang dan Jembatan Kali Sisih 1 paket			
				2) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya paket pekerjaan konstruksi rekonstruksi jalan di 19 ruas jalan yaitu : 1. Rekonstruksi Jalan Bengkal - Gambasan (M)	1. Terlaksananya paket pekerjaan konstruksi rekonstruksi jalan di 19 ruas jalan yaitu : 2. Rekonstruksi Jalan Bengkal - Gambasan (M) dengan panjang penanganan	Terjadinya eskalasi harga material yang sangat melonjak pada saat penyusunan HPS	1. Percepatan proses lelang 2. Prioritas program yang paling efektif dan efisien 3. Mengutamakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					2. Rekonstruksi Jalan Bulu - Wanutengah (M) 3. Rekonstruksi Jalan Candirototo - Wonoboyo (M) 4. Rekonstruksi Jalan Caturanom - Glapansari (M) 5. Rekonstruksi Jalan Jamusan - Kertosari (M) 6. Rekonstruksi Jalan Laranganluwok - Tretep (M) 7. Rekonstruksi Jalan Margoyoso - Krawitan (M) 8. Rekonstruksi Jalan Plimbungan - Bansari (M) 9. Rekonstruksi Jalan Sengonpandak - Banaran (M)	jalan 389 m 3. Rekonstruksi Jalan Bulu - (M) dengan panjang penanganan jalan 1225 m 4. Rekonstruksi Jalan Candirototo - Wonoboyo (M) dengan panjang penanganan talud 65,5m 5. Rekonstruksi Jalan Caturanom - Glapansari (M) dengan panjang penanganan jalan 425 m 6. Rekonstruksi Jalan Jamusan - Kertosari (M) dengan panjang penanganan jalan 600m 7. Rekonstruksi Jalan Laranganluwok - Tretep (M) dengan panjang			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					10. Rekonstruksi Jalan Sidelep - Sucen (M) 11. Rekonstruksi Jalan Tleter - Wonokerso (M) 12. Rekonstruksi Jalan Tlogomulyo - Delok (M) 13. Rekonstruksi Jalan Tlogo - Plososari (M) 14. Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Tleter - Kwarakan (DAK) 15. Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Muntung - Muneng (DAK) 16. Pelebaran Jalan MT. Haryono dan Gatot Subrato (Bankeu) 17. Pelebaran Jalan Muntung -	penanganan jalan 141,2 m 8. Rekonstruksi Jalan Margoyoso - Krawitan (M) dengan panjang penanganan jalan 1200 9. Rekonstruksi Jalan Plimbungan - Bansari (M) dengan panjang penanganan jalan 606 m 10. Rekonstruksi Jalan Sengonpandak - Banaran (M) dengan panjang penanganan jalan 320 m 11. Rekonstruksi Jalan Sidelep - Sucen (M) dengan panjang penanganan jalan 475 m			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>Jumo (Bankeu)</p> <p>18. Pembangunan Drainase Jalan Jumo - Ketitang Desa Jumo Kec. Jumo Kab Temanggung (Bankeu)</p> <p>19. Pembangunan Talud Jalan Jurang - Salamsari Desa Salamsari Kec Kedu Kab. Temanggung (Bankeu)</p> <p>20. 4 paket jasa konsultasi pengawasan</p>	<p>12. Rekonstruksi Jalan Tleter - Wonokerso (M) dengan panjang penanganan jalan 800 m</p> <p>13. Rekonstruksi Jalan Tlogomulyo - Delok (M) dengan panjang penanganan 1580 m</p> <p>14. Rekonstruksi Jalan Tlogo - Plososari (M) dengan panjang penanganan jalan 1325 m</p> <p>15. Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Tleter - Kwarakan (DAK) dengan panjang penanganan jalan 2175 m</p> <p>16. Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Muntung - Muneng (DAK) dengan panjang penanganan</p>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						jalan 900 m 17. Pelebaran Jalan MT. Haryono dan Gatot Subrato (Bankeu) dengan panjang penanganan jalan 1350 m 18. Pelebaran Jalan Muntung - Jumo (Bankeu) dengan panjang penanganan jalan 2557 m 19. Pembangunan Drainase Jalan Jumo - Ketitang Desa Jumo Kec. Jumo Kab Temanggung (Bankeu) dengan panjang penanganan jalan 385 m 20. Pembangunan Talud Jalan Jurang - Salamsari Desa Salamsari Kec Kedu Kab. Temanggung (Bankeu) dengan panjang penanganan talud 1100 m 21. 4 paket jasa			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						konsultansi pengawasan telah terlaksana			
				3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya 5 paket konstruksi yaitu : 1. Talud Jalan Kacepit – Selopampang 2. Talud Jalan Kebraman – Gemawang 3. Talud Jalan Sanggrahan – Kwarakan 4. Talud Jalan Wonoboyo – Pringlegi 5. Talud Jalan Malebo - Gemawang	Terlaksananya 5 paket konstruksi yaitu : 1. Talud Jalan Kacepit – Selopampang dengan panjang penanganan talud 106,58 m 2. Talud Jalan Kebraman – Gemawang dengan panjang penanganan talud 55 m 3. Talud Jalan Sanggrahan – Kwarakan dengan panjang penanganan talud 194 m 4. Talud Jalan Wonoboyo – Pringlegi dengan panjang penanganan talud 13 m 5. Talud Jalan Malebo-Gemawang dengan panjang penanganan talud 15 m	Terjadinya eskalasi harga material yang sangat melonjak pada saat penyusunan HPS	1. Percepatan proses lelang 2. Prioritas program yang paling efektif dan efisien 3. Mengutamakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	<p>Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di 4 ruas jalan dan 2 konsultan pengawasan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Berkala Jalan Paponan - Tuksari (M) 2. Pemeliharaan Berkala Jalan Tretep-Nglarangan 3. Pemeliharaan Berkala Jalan Banjarsari – Katekan 4. Pemeliharaan Berkala Jalan Tepusen - Kejiwan 	<p>Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di 4 ruas jalan dan 2 konsultan pengawasan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Berkala Jalan Paponan - Tuksari (M) dengan panjang penanganan jalan 1200 m 2. Pemeliharaan Berkala Jalan Tretep-Nglarangan dengan panjang penanganan jalan 2000 m 3. Pemeliharaan Berkala Jalan Banjarsari – Katekan 4. Pemeliharaan Berkala Jalan Tepusen – Kejiwan dengan panjang penanganan jalan 500 m 	<p>Terjadinya eskalasi harga material yang sangat melonjak pada saat penyusunan HPS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan proses lelang 2. Prioritas program yang paling efektif dan efisien 3. Mengutamakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	<p>Terlaksana 21 paket pekerjaan untuk pemeliharaan rutin jalan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi (Belanja Aspal Buton CPHMA), 2. Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi (Aspal Keras dan Penetrasi 60/70) 3. Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi (Aspal Hot Mix AC-WC) 4. Belanja Bahan- Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional I Temanggung 5. Belanja Bahan- Bahan Bangunan dan Konstruksi 	<p>Terlaksana 21 paket pekerjaan untuk pemeliharaan rutin jalan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi (Belanja Aspal Buton CPHMA) 1 paket. 2. Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi (Aspal Keras dan Penetrasi 60/70) 1 paket. 3. Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi (Aspal Hot Mix AC-WC) 1 paket. 4. Belanja Bahan- Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional I Temanggung 1 paket. 5. Belanja Bahan- Bahan Bangunan dan 	Terjadinya eskalasi harga material yang sangat melonjak pada saat penyusunan HPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan proses lelang 2. Prioritas program yang paling efektif dan efisien 3. Mengutamakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Regional II Parakan 6. Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional III Ngadirejo 7. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional IV Kranggan 8. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional V Kandangan 9. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional VI Tembarak 10. Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jalan Regional I Temanggung 11. Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jalan	Konstruksi Regional II Parakan 1 paket 6. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional III Ngadirejo 1 paket 7. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional IV Kranggan 1 paket. 8. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional V Kandangan 1 paket. 9. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Regional VI Tembarak 1 paket 10. Konsultan Penyusunan Data Base				

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Regional II Parakan 12. Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jalan Regional III Ngadirejo 13. Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jalan Regional IV Kranggan 14. Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jalan Regional V Kandangan 15. Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jalan Regional VI Tembarak 16. Program Preservasi Jalan Regional I Temanggung 17. Program Preservasi Jalan Regional II Parakan	Kondisi Jalan Regional I Temanggung 1 paket 11. Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jalan Regional II Parakan 1 paket 12. Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jalan Regional III Ngadirejo 1 paket 13. Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jalan Regional IV Kranggan 1 paket 14. Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jalan Regional V Kandangan 1 paket 15. Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jalan Regional VI Tembarak 1 paket 16. Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jalan Regional I Temanggung 1 paket 17. Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jalan Regional II Parakan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					18. Program Preservasi Jalan Regional III Ngadirejo 19. Program Preservasi Jalan Regional IV Kranggan 20. Program Preservasi Jalan Regional V Kandangan 21. Program Preservasi Jalan Regional VI Tembarak	Tembarak 1 paket 16. Program Preservasi Jalan Regional I Temanggung 1 paket 17. Program Preservasi Jalan Regional II Parakan 1 paket 18. Program Preservasi Jalan Regional III Ngadirejo 1 paket 19. Program Preservasi Jalan Regional IV Kranggan 1 paket 20. Program Preservasi Jalan Regional V Kandangan 1 paket 21. Program Preservasi Jalan Regional VI Tembarak 1 paket.			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Terlaksananya 2 paket konstruksi yaitu : 1. Pembangunan Jembatan Kali Kranggan Jalan Purwosari - Kramat (M) 2. 2 paket jasa konsultansi pengawasan	Terlaksananya 2 paket konstruksi yaitu : 1. Pembangunan Jembatan Kali Kranggan Jalan Purwosari - Kramat (M) 12 x 6 x 5 meter 2. 1 paket jasa konsultansi pengawasan	Waktu pelaksanaan pada saat curah hujan dengan intensitas tinggi	Rekayasa Teknik dengan perancah yang kuat terhadap arus deras	
				7) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya 3 paket konstruksi yaitu : 1. Rehabilitasi Jembatan Kali Setro Jalan Tuksongo - Soborejo (M) 2. Groundsill Jembatan Kali Trocoh Ruas Jalan Lempuyang – Tretep 3. Groundsill Jembatan Seklitih Ruas Jalan Kalirejo – Bansari 4. 1 paket jasa konsultansi pengawasan	Terlaksananya 3 paket konstruksi yaitu : 1. Rehabilitasi Jembatan Kali Setro Jalan Tuksongo - Soborejo (M) 1 unit <i>groundsill</i> . 2. Groundsill Jembatan Kali Trocoh Ruas Jalan Lempuyang – Tretep 1 unit <i>groundsill</i> 3. Groundsill Jembatan Seklitih Ruas Jalan Kalirejo – Bansari 1 unit <i>groundsill</i> 4. 1 paket jasa konsultansi pengawasan	Waktu pelaksanaan pada saat curah hujan dengan intensitas tinggi	Rekayasa Teknik dengan pembuatan tanggul yang kuat terhadap arus aliran sungai yang deras	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya 6 paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yaitu : 1. Data Base Kondisi Jembatan Regional I Temanggung 2. Data Base Kondisi Jembatan Regional II Parakan 3. Data Base Kondisi Jembatan Regional III Ngadirejo 4. Data Base Kondisi Jembatan Regional IV Kranggan 5. Data Base Kondisi Jembatan Regional V Kandangan 6. Data Base Kondisi Jembatan Regional VI Tembarak	Terlaksananya 6 paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yaitu : 1. Data Base Kondisi Jembatan Regional I Temanggung 1 sebanyak 1 paket 2. Data Base Kondisi Jembatan Regional II Parakan sebanyak 1 paket 3. Data Base Kondisi Jembatan Regional III Ngadirejo sebanyak 1 paket 4. Data Base Kondisi Jembatan Regional IV Kranggan sebanyak 1 paket 5. Data Base Kondisi	Pelaksanaan kegiatan di laksanakan di triwulan IV karena untuk mengetahui kondisi jembatan di akhir tahun.	Mengoptimalkan waktu yang tersedia.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jembatan Regional V Kandangan sebanyak 1 paket 6. Data Base Kondisi Jembatan Regional VI Tembarak sebanyak 1 paket			
				8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi					
				Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	90%	100%	Keterlambatan data yang akan diupdate dalam aplikasi SIPJAKI	Data bisa masuk tepat waktu agar bisa terupdate dalam aplikasi SIPJAKI	
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					
				1) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terbayarnya tanaga pendukung kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Terbayarnya tanaga pendukung untuk 1 orang kali 12 bulan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi.	Belum tersedia anggaran untuk pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Bekerjasama dengan balai atau lembaga terkait untuk mengadakan pelatihan tenaga kerja konstruksi	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					
				Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	88,00%	88,56%	1. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang 2. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan dalam kegiatan pengawasan penegddalian pemanfaatan ruang 3. belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian tata ruang	1. Sosialisasi tentang perda RTRW 2. Adanya informasi yang bisa diakses tentang tata ruang kepada masyarakat	
				a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan wilayah perencanaan RDTR perkotaan Temanggung 2. Persetujuan substansi peta dasar RDTR perkotaan Temanggung dengan BIG 3. Pembahasan draf Raperbup RDTR perkotaan Temanggung 4. Konsultasi publik RDTR kawasan perkotaan Temanggung 5. Draf Raperbup RDTR perkotaan Temanggung yang akan diajukan ke Kementraian ATR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan wilayah perencanaan RDTR perkotaan Temanggung sebanyak 2 kegiatan dan menghasilkan 1 dokumen 2. Persetujuan substansi peta dasar RDTR perkotaan Temanggung dengan BIG sebanyak 1 dokumen 3. Pembahasan draf Raperbup RDTR perkotaan Temanggung sebanyak 11 kegiatan (20 orang) 4. Konsultasi publik RDTR kawasan perkotaan Temanggung 1 kegiatan sebanyak 70 orang 5. Draf Raperbup RDTR perkotaan 	Perda RTRW masih pada tahap revisi sehingga RDTR perlu penyesuaian	Koordinasi penyelesaian RAPERDA RTRW	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Temanggung yang akan diajukan ke Kementraian ATR sebanyak 1 dokumen			
				2) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1. Sosialisasi layanan KKPR sebagai tindak lanjut UUCK 2. Layanan KKPR berusahan dan non berusaha	1. Sosialisasi layanan KKPR sebagai tindak lanjut UUCK sebanyak 450 orang 2. Layanan KKPR berusahan sebanyak 103 dan non berusaha sebanyak 114	Adanya penyesuaian regulasi pelaksanaan pemanfaatan ruang	Sosialisasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan regulasi yang baru	
				b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pansus RTRW menghasilkan Berita Acara kesepakatan substansi antara DPRD dan Bupati 2. Surat validasi KHLS RTRW 3. Asistensi loket substansi Perda RTRW 4. Berita Acara kesepakatan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) antara Bupati dan Kementrian ATR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pansus RTRW menghasilkan Berita Acara kesepakatan substansi antara DPRD dan Bupati selama 10 hari 2. Surat validasi KHLS RTRW (4 kegiatan x 20 orang) 3. Asistensi loket substansi Perda RTRW (4 kegiatan x 10 orang) 4. Berita Acara kesepakatan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) antara Bupati dan Kementrian ATR (8 kegiatan x 20 orang) 	Belum optimalnya komitmen dalam penegakan perda terkait tata ruang	Peningkatan koordinasi dan pelibatan Forum Penataan Ruang dalam penegakan perda terkait tata ruang	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		10. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					
				Persentase sampah yang tertangani	36,70	59,06	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua desa memahami SE Bupati tersebut 2. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah 3. Kurangnya tenaga pelayanan/ kebersihan 4. Umur TPA semakin berkurang karena timbul sampah yang bertambah sedangkan luasan TPA tetap 5. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang persampahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi hingga tingkat desa dan meningkatkan peran serta masyarakat beserta lembaga pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, desa, hingga rumah tangga 2. Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 3. Penambahan tenaga pelayanan/ kebersihan 4. Pengadaan tanah untuk perluasan TPA dan operasional TPA agar 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								dapat menangani sampah dengan maksimal 5. Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan menegaskan bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA	
				Cakupan layanan persampahan	52,00	61,25	<ol style="list-style-type: none"> Jarak Tempuh desa-desa di wilayah Temanggung bagian Utara ke TPA Sanggrahan yang jauh Kondisi geografi desa di Kabupaten Temanggung yang beragam Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan menegaskan bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA Koordinasi dan 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dan peruntukan anggaran belum sesuai dengan SE Nomor 660.1/002 Tahun 2021	kerjasama antardesa untuk penentuan tempat pengumpulan sampah sementara di tingkat kecamatan atau antardesa di suatu titik yang dapat dijangkau kendaraan pengangkut sampah	
				a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota					
				1) Sub kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/PS-3R/TPS	Pembangunan TPS 3R sebanyak 4 unit yaitu : 1. Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo(1 Bangunan TPS 3R, 2 unit kendaraan roda 3, 1 alat pencacah	Pembangunan TPS 3R sebanyak 4 unit yaitu : 1. Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo(1 Bangunan TPS 3R, 2 unit kendaraan roda 3, 1 alat pencacah	Terkait pola ruang lahan membuat kendala dalam pencairan DAK TPS3R	Koordinasi terkait pola ruang lahan untuk pembangunan TPS3R ditahun berikutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>sampah dan 1 alat Pengayak sampah)</p> <p>2. Desa Bandunggede Kecamatan Kedu (1 Bangunan TPS 3R, 1 unit kendaraan roda 3, 1 alat pencacah sampah dan 1 alat Pengayak sampah)</p> <p>3. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan(1 Bangunan TPS 3R, 2 unit kendaraan roda 3, 1 alat pencacah sampah dan 1 alat pemilah sampah)</p> <p>4. Desa Keblukan Kecamatan Kaloran (1 Bangunan TPS 3R, 2</p>	<p>sampah dan 1 alat Pengayak sampah)</p> <p>2. Desa Bandunggede Kecamatan Kedu(1 Bangunan TPS 3R, 1 unit kendaraan roda 3, 1 alat pencacah sampah dan 1 alat Pengayak sampah)</p> <p>3. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan(1 Bangunan TPS 3R, 2 unit kendaraan roda 3, 1 alat pencacah sampah dan 1 alat pemilah sampah)</p> <p>4. Desa Keblukan Kecamatan Kaloran ((1 Bangunan TPS 3R, 2</p>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					unit kendaraan roda 3, 1 alat pengayak sampah, 1 alat pemilah sampah dan 1 alat presshidrolik	unit kendaraan roda 3, 1 alat pengayak sampah, 1 alat pemilah sampah dan 1 alat presshidrolik			
			Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	100 %	Masih menunggu penetapan Perda Retribusi	Mempersiapkan prasarana dan sarana lebih lengkap lagi	
				a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terbangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga sebanyak 3 lokasi yaitu : 1. Desa	Terbangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga sebanyak 3 lokasi 1. Pembangunan	Permukaan air tanah tinggi	Menggunakan fabrikasi	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Lempuyang, Kec Candirot 2. Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung 3. Kelurahan Jurang Kecamatan Temanggung)	Tangki Septik Individu skala Perdesaan Desa Lempuyang, Kec Candirot sebanyak 50 unit 2. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung sebanyak 5 unit 3. Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Jurang Kecamatan Temanggung sebanyak 50 unit)			
				2) Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala	Terbangunnya Pengolahan Limbah Domestik di Permukiman sebanyak 4 Kegiatan :	Terbangunnya Pengolahan Limbah Domestik di Permukiman sebanyak 4 Kegiatan	Kurangnya SDM pekerja karena bersamaan dengan musim tembakau	Mempekerjakan tukang dari luar desa	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASLAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Permukiman	1. Pembangunan Ipal Komunal Desa Kentengsari Kec Candiroti 2. Pembangunan Ipal Komunal Desa Purwosari Kec Kranggan 3. Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Banyuurip Kec Temanggung 4. Pembangunan IPAL Komunal Desa Ngropoh Kec Kranggan	1. Pembangunan IPAL Komunal Desa Kentengsari Kec Candiroti 1 unit 2. Pembangunan IPAL Komunal Desa Purwosari Kec Kranggan 1 unit 3. Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Banyuurip Kec Temanggung 1 unit 4. Pembangunan IPAL Komunal Desa Ngropoh Kec Kranggan 1 unit			
4	Perumahan	Dinas Perumahan		1. Program Pengembangan					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	rakyat dan Kawasan pemukiman	Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		Perumahan					
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6,35 %	5,25 %	Pemulihan pandemik penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Prov dan APBN, kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pmutakhiran data	Memaksimalkan pengusulan RTLH menjadi RLH dari sumber APBN dan APBD Provinsi, Penambahan personil bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	
				Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	86,78 %	88,11 %	Kuantitas/ jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pmutakhiran data	Penambahan personil bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	
				a. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					
				1) Sub kegiatan Penatausahaan	Terbayarnya honor staf	Terbayarnya honor staf pendukung 6	Kualitas dan Kuantitas/jumlahpe	1. Memaksimalkan pekerja di	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	pendukung 6 orang , 2 petugas keamanan dan 1 teknisi pemeliharaan selama 12 bulan untuk Pemeliharaan Rusunawa	orang , 2 petugas keamanan selama 12 bulan dan 1 teknisi pemeliharaan selama 9 bulan untuk Pemeliharaan Rusunawa sebanyak 6 Rusunawa yaitu : 1. Rusunawa Kranggan I 2. Rusunawa Kranggan II 3. Rusunawa Kertosari 4. Rusunawa Parakan Kauman 5. Rusunawa Parakan Kauman 6. Rusunawa Parakan Wetan	gawai kurang	setiap kegiatan 2. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja pegawai	
				2. Program Kawasan Pemukiman					
				Persentase Rumah Layak Huni	88,87 %	94,75 %	Pemulihan pandemi penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Prov dan	Memaksimalkan pengusulan RTLH menjadi RLH dari sumber APBN	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							APBN, kuantitas/jml personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data	dan APBD Provinsi, menambah personil	
				Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	18,50 %	4,86 %	Kuantitas/ jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data	Memaksimalkan pengurusan Penanganan Kumuh dari sumber APBN dan menambah personil	
			Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %			
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 %	100 %			
				a. Kegiatan Peningkatan	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					
				1) Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas RTLH sebanyak 32 unit	Terlaksananya Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas RTLH sebanyak 31 unit di : 1.Desa Gedegan Tlogomulyo 4 Unit 2.Desa Pagersari Tlogomulyo 4 Unit 3.Desa Kerokan Tlogomulyo 4 Unit 4.Desa Caturanom Kec Parakan 1 Unit 5.Desa Bulu Kecamatan Bulu 5 Unit 6.Desa Malangsari Bulu 5 Unit 7.Kelurahan Kebonsari, Temanggung 2 Unit 8.Kel Walitelon Selatan Kec	Salah satu penerima juga tercatat pada Program BSPS sehingga mengundurkan diri dari program perbaikan RTLH dan memilih Program BSPS	Penerima tersebut mengundurkan diri dari program perbaikan RTLH dan memilih Program BSPS, karena nominal bantuan RTLH APBD dibawah BSPS. Menambahkan nominal bantuan di tahun anggaran selanjutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Temanggung 1 Unit 9. Desa Joho Temanggung 1 Unit 10. Kertosari Temanggung 2 Unit 11. Desa Purwodadi Kec Tembarak 1 Unit 12. Desa Danurejo Kec Kedu 1 unit			
				2) Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terbayarnya 1 orang staf pendukung selama 12 bulan untuk fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni	Terbayarnya 1 orang staf pendukung selama 12 bulan untuk fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni	Terbatasnya anggaran untuk operasional pendukung kegiatan perbaikan RTLH	Bekerjasama dengan provinsi dan pusat untuk usulan penanganan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni sebanyak 47 unit (Desa Campursalam Kecamatan Parakan 15 unit, Desa Wanutengah Kecamatan Parakan 15 unit, Desa Joho Kecamatan Temanggung 17 unit)	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni sebanyak 47 unit (Desa Campursalam Kecamatan Parakan 15 unit, Desa Wanutengah Kecamatan Parakan 15 unit, Desa Joho Kecamatan Temanggung 17 unit)	Beberapa penerima bantuan hanya memiliki tanah yang bukan peruntukan permukiman	Mengganti penerima bantuan yang memiliki tanah sesuai peruntukan permukiman	
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
				Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati	100%	100%	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/produk hukum lainnya 2. Kurangnya dukungan sarpras dalam pelaksanaan tugas.	1. Secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patroli 2. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3. Terbatasnya personil yang memiliki kualifikasi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas. 4. Terbatasnya dukungan anggaran		
				Rasio Linmas per RT	1,62	1,42	1. Animo masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kecil, karena tidak mendapatkan gaji/upah/tunjangan/santunan apa pun, sehingga anak muda lebih memilih untuk bekerja di sektor ekonomi yang lain. 2. Up date data jumlah Linmas sangat sulit dilaksanakan kaena dari pihak desa kesulitan untuk melaksanakan pendataan 3. Sebaran jumlah Linmas yang tidak merata	Mengadakan pembinaan linmas ke desa/kelurahan	
				Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan Perbup	1. Sosialisasi pada masyarakat tentang penegakan Perda dan Perbup	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda dan Perbup	2. Peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	
				a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/produk hukum lainnya 2. Kurangnya dukungan sarpras dalam pelaksanaan tugas. 3. Terbatasnya personil yang memiliki kualifikasi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas. 4. Adanya dinamika kependudukan seperti perpindahan dan meninggal dunia serta kurangnya pengetahuan terkait Satlinmas sehingga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara rutin melaksanakan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang penegakan perda dan Perbup serta mengintensifkan patroli 2. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis 3. Peningkatan kapasitas PPNS 4. Menyelenggarakan pembinaan/ pelatihan/ peningkatan kapasitas 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>menyebabkan kurangnya regenerasi anggota Satlinmas.</p> <p>5. Sebaran jumlah Linmas yang tidak merata karena kondisi sosial ekonomi wilayah yang tidak sama.</p>	<p>anggota Satlinmas</p> <p>5. Sosialisasi kepada masyarakat melalui Camat dan/atau Kades/Lurah terkait Satlinmas</p> <p>6. Melaksanakan pendataan jumlah anggota Satlinmas</p>	
				<p>1) Sub kegiatan pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, & Pengawasan</p>	<p>Terlaksananya Patroli, Deteksi Dini, pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan daerah sebanyak 1.385 kegiatan</p>	<p>Terlaksananya Patroli, Deteksi Dini, pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan daerah sebanyak 1.470 kegiatan meliputi :</p> <p>1. Patroli (patroli wilayah, patroli PGOT</p> <p>2. Penertiban K4</p> <p>3. Penertiban PKL</p> <p>4. Pengawasan dan pengamanan</p> <p>5. Penertiban pelajar</p>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Terbayarnya honor SS Banpol, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan selama 13 bulan dan terselenggaranya pelaksanaan PILKADES di 35 desa	Terbayarnya honor SS Banpol, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk 30 banpol & terselenggaranya pelaksanaan PILKADES di 35 desa Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap 1. Masa kampanye 2. hari tenang 3. pelaksanaan pilkades 4. Pasca pilkades			
				3) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Korpsik sebanyak 5 kegiatan dan terlaksananya pembinaan Linmas tingkat Kecamatan se-Kab. Temanggung sebanyak 6 kegiatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Korpsik sebanyak 5 kegiatan dengan jumlah anggota 45 orang dan terlaksananya pembinaan Linmas tingkat Kecamatan se-Kab. Temanggung			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah peserta 460 orang meliputi : 1. Rakor Linmas 30 orang x 2 kegiatan jumlah 60 orang 2. Peningkatan kapasitas Linmas 100 orang x 4 kegiatan jumlah 400 orang			
				2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
				Cakupan Penanganan bencana kebakaran kabupaten	60,81%	60,64%	1. Temanggung memiliki wilayah yang luas. 2. Topologi Temanggung yang pegunungan, perbukitan dan lembah.	1. Peningkatan sarpras 2. Peningkatan kompetensi pegawai 3. Pemberdayaan masyarakat	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>3. Model permukiman yang berkerumun mengakibatkan akses jalan lingkungan yang kecil.</p> <p>4. pengetahuan warga mengenai bahaya kebakarna masih rendah</p>		
				Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	69,8%	60,00%	<p>1. Kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dn jalan yg berliku, naik trun atau gelombang yg dpt membahayakan keselamatan org yg ada ddm kendaraan maupun yg berada d sekitar kendaraan damkar</p> <p>2. Kondisi permukiman yang berkelompok</p>	Memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian</p> <p>3. Kompetensi anggota damkar khususnya penerapan strategi pemadaman disesuaikan dengan objek yg terbakar dn lingkungan ; sekitarnya perlu ditingkatkan, karena setiap kebakaran memiliki strategi pemadaman yg berbeda agar proses pemadaman dpt cepat, efektif dn efisien</p> <p>4. Kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, mulai dari masyarakat yg tdk memberi jalan</p>		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>untuk kendaraan damkar meski sudah dinyalakan sirine maupun masyarakat yg berkerumun di lokasi kebakaran untum photo2 atau nonton yg menghambat pergerakan anggota dn kendaraan damkar dlm proses pemadaman</p> <p>5. Kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, y koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk karena usia dan sering dipergunakan mengakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dn efisien contohnya, selang yg bocor di beberapa titik, nozel yg semprotannya tidak sempurna, dll</p>		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	43	468	<p>1. APD dan sarpras yang dipergunakan dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Kabupaten Temanggung belum sesuai standar Permendagri nomor 122 tahun 2018 tentang Standarisasi Sarpras Damkar di Daerah</p> <p>2. Anggota damkar belum pernah mendapatkan diklat resmi dari pemerintah dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia</p> <p>3. Belum memiliki kendaraan khusus dalam penanganan layanan</p>	<p>1. Pemenuhan sarpras dan APD minimal yang siap dipergunakan di pos induk untuk mengcover seluruh wilayah Temanggung, idealnya di setiap pos tersedia sarparas dan APD untuk penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia</p> <p>2. Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan anggota damkar baik PNS maupun non-PNS</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia yang dialaminya sudah dilengkapi sarpras dan apd sesuai jenis kejadiannya 4. Letak geografis Temanggung yang menyulitkan untuk diakses saat penanganan kejadian tersebut		
				Presentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	43%	80%	1. Biaya pelatihan peningkatan kompetensi damkar yang mahal. 2. Informasi terkait pelatihan terbatas. 3. Lokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi damkar dari pemerintah masih terbatas dan kecil	Mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur Damkar (baik pelatihan maupun lomba)	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	43,75%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll; 2. Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran; 3. Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candirotto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi. 4. Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Peningkatan sarana dan prasarana pendukung (pos damkar dan perlengkapannya) pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2.Pemenuhan sarana sumber air (ground tank) di pos damkar 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemkab Temanggung terkait urusan kebakaran belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 2. Kondisi geografis Temanggung yang berbentuk pegunungan, perbukitan dan permukiman padat yang sulit diakses oleh kendaraan damkar. 3. jumlah pos damkar tidak sebanding dengan luas wilayah dan kondisi geografis sehingga menghambat dan memperlambat pelayanan urusan kebakaran 4. keterbatasan personil dan sarpras damkar Temanggung sehingga pelayanan urusan kebakaran belum maksimal secara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penambahan pos damkar sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) untuk meningkatkan pelayanan urusan kebakaran serta menghadirkan negara saat dibutuhkan warga negaranya. 2. memenuhi kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan skala prioritas mengacu kepada Permendagri no 122 tahun 2018 3. meningkatkan kompetensi anggota damkar untuk meminimalisir korban dari warga negara 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>kualitas dan kuantitas.</p> <p>5. Belum meratanya pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan dini kebakaran.</p> <p>6. Kurangnya kepedulian pemilik dan pengelola bangunan gedung dalam memproteksi bangunannya mulai dari perencanaan pembangunan gedung sampai dengan pemanfaatan bangunan gedung sehingga meningkatkan potensi kebakaran.</p>	<p>dan anggota damkar saat pelayanan urusan kebakaran mengacu kepada Permendagri 16 tahun 2009</p> <p>4. meningkatkan pemahaman warga negara terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran terkait pencegahan dan penanganan dini kebakaran</p> <p>5. pelibatan damkar dalam perencanaan pembangunan gedung terkait proteksi kebakaran dalam perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								6. melaksanakan tugas inspeksi proteksi bangunan gedung untuk meningkatkan pemahaman pemilik & pengelola bangunan gedung dalam pencegahan dan penanganan dini kebakaran	
				1) Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Target Kejadian Kebakaran 44 kejadian berdasarkan total kejadian di tahun 2021	Kejadian kebakaran sebanyak 64 kejadian, peningkatan tersebut salah satunya disebabkan aktifitas manusia mulai Kembali normal. Sedangkan dari realisasi kejadian tersebut yang masuk dalam respon time (kurang dari 15 menit) berdasarkan Permendagri 114 /2018, sejumlah 28 kejadian dikarenakan berbagai permasalahan dan kendala			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Standarisasi sarpras berdasarkan PERMENDAGRI 122/2018 dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Temanggung target 6 Pos	Realisasinya Pos Pemadam Kebakaran saat ini 3 Pos (Pos Temanggung, Pos Candirototo, dan Pos Pringsurat)			
				3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Target Alat Pelindung Diri dalam Penanganan Kebakaran sebanyak 55 Paket (jumlah personal Damkar sebanyak 55 Orang)	Realisasi baru tercukupi 18 Paket yang tersebar di 3 Pos Damkar untuk penanganan Pemadaman Kebakaran			
				4) Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Target Sportingstaf di Damkar Temanggung untuk mencukupi 3 Pos berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2018 sebanyak 54 Orang	Realisasi Sporting Staf di Damkar Temanggung sampai dengan saat ini sebanyak 40 Orang			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran sebanyak 10 kegiatan	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran sebanyak 10 kegiatan dengan peserta 30 orang X 10 kegiatan, total peserta 300 orang	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan, penyelamatan dan evakuasi bencana kebakaran	Mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		3. Program Penanggulangan Bencana					
				Cakupan desa tangguh bencana	9,52 %	11,98 %	Indikator Desa Tangguh Bencana yang belum dipahami banyak masyarakat	Pemerintah Daerah mengarahkan kepada Desa rawan bencana untuk membentuk Desa tangguh bencana	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100 %	100 %	Tidak semua kerusakan infrastruktur akibat bencana dapat tertangani	Tetap memperhatikan perubahan fungsi lahan yang menyebabkan kejadian bencana banjir dan longsor yang merusak infrastruktur publik, data yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan	
				Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	100 %	100 %	Kejadian bencana tidak bisa diprediksi	Peningkatan kapasitas kemampuan TRC BPBD Kabupaten	
				Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	78,3 %	109,22 %	Belum semua desa rawan bencana mendapat layanan mitigasi bencana	Peningkatan peran serta Pemerintah dalam menghimbau masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana dan peningkatan pemanfaatan sarpras kebencanaan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	100 %	100 %	Perubahan fungsi lahan menyebabkan kejadian bencana banjir dan longsor yang merusak infrastruktur publik, data yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan, koordinasi antar instansi terkait belum optimal	Tetap adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan meningkatkan kapasitas kemampuan TRC BPBD Kabupaten Temanggung	
				Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	100 %	100 %	Secara geografis, Temanggung merupakan daerah rawan bencana sehingga banyak lahan rawan bencana digunakan sebagai area permukiman	Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan	
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	Penyampaian layanan informasi terkendala sinyal terutama di desa rawan bencana	Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial dan meningkatkan kapasitas relawan kebencanaan	
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatkan sosialisasi terhadap kesiapsiagaan penanganan bencana	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	Kurangnya sarana dan prasarana Penanggulangan bencana yang standart	Meningkatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan tetap menjalin komunikasi dengan masyarakat yang terdampak bencana	
				a. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
				1) Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelatihan dan pencegahan mitigasi di 7 Kecamatan	Terlaksananya pelatihan dan pencegahan mitigasi di 7 Kecamatan dan 2 desa dengan jumlah peserta sebanyak 380 orang.	Tidak semua peserta pelatihan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan	Melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan desa	
				2) Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap	Terlaksananya pengendalian operasi dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan	Terlaksananya pengendalian operasi dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan	Masih kurangnya Sarana prasarana PB untuk Kesiapsiagaan bencana	Koordinasi dengan kec dan desa untuk pengadaan Sarpras PB untuk kesiapsiagaan bencana	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bencana Kabupaten/ Kota	terhadap bencana	terhadap bencana dengan kegiatan mitigasi bencana 8 kegiatan dan penyediaan sarpras kesiapsiagaan 45 buah			
				3) Sub kegiatan Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan pasca bencana sebanyak 4 paket pekerjaan rekonstruksi, 6 lokasi bantuan bronjong untuk pemulihan sementara kerusakan infrastruktur pasca bencana, 2 tahap penyaluran bantuan social bagi korban bencana	Terlaksananya penanganan pasca bencana sebanyak 4 paket pekerjaan rekonstruksi, 6 lokasi bantuan bronjong untuk pemulihan sementara kerusakan infrastruktur pasca bencana, 2 tahap penyaluran bantuan social bagi 28 orang penerima korban bencana	Tidak semua kerusakan infrastruktur Pasca bencana dapat ditangani dengan rekonstruksi permanen	Pemberian bantuan bronjong untuk pemulihan sementara kerusakan infrastruktur pasca bencana yang belum dapat ditangani dengan rekonstruksi permanen	
				b. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas selama 12 bulan	Terlaksananya Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas sebanyak 2 kegiatan untuk upah pembersihan karantina BLK	Kasus Covid-19 di Kabupaten Temanggung (Level 1) tidak ada kegiatan penanganan Covid 19	Memantau perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Temanggung	
				2) Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya respon cepat darurat bencana selama 12 bulan	- Terlaksananya respon cepat darurat bencana dengan assesemnet di 306 kejadian bencana dan penanganan darurat bencana kekeringan selama 3 bulan, dengan 36 droping air bersih.	Masih kurang tanggapnya pihak Desa terhadap bencana kekeringan.	Melaksanakan Survey Daerah Kekeringan.	
				3) Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana selama 12 bulan	- Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dengan assessment di 306 kejadian bencana.	Apabila terjadi bencana dihari libur atau di malam hari untuk koordinasi dan penandatanganan berita acara dengan pihak desa terkendala.	Mendatangi / menghubungi pihak Perangkat Desa untuk melengkapi administrasi.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4) Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana selama 12 bulan	Terlaksananya penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan memberikan 306 paket logistik kerja bhakti penanganan bencana dan memberikan bantuan bahan rumah (BBR) sejumlah 78 orang korban bencana	Tidak semua korban bencana mendapatkan bantuan.	Memberikan bantuan sesuai dengan kriteria penerima bantuan.	
6	Sosial	Dinas Sosial	Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Penanganan Kemiskinan	1. Program Pemberdayaan Sosial					
				Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Belum semua Sumber Daya Manusia PSKS mempunyai kemampuan dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	Peningkatan kemampuan dan peran serta Sumber Daya Manusia PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	
				a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Karang Taruna yang Terlibat dalam Penanganan PPKS sebanyak 40 orang	Jumlah Karang Taruna yang Terlibat dalam Penanganan PPKS sebanyak 40 orang	Yang terlibat aktif dalam kegiatan baru karang taruna Kabupaten Secara organisasi karang taruna kecamatan maupun desa baru diadakan reorganisasi /penataan organisasi	Penataan organisasi di tingkat kecamatan dan desa Ditindaklanjuti dengan capacity building SDM karang Taruna	
					Pelaksanaan Bimtek dasar PSM 1 kegiatan	Terlaksananya Bimtek dasar PSM yang diikuti oleh 40 orang dan mendapatkan sertifikat	PSM yang ada telah melaksanakan pekerjaannya sebagai pekerja sosial di masyarakat namun belum semua memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang kesejahteraan sosial Dari jumlah PSM yang sudah bersertifikat, ada 36 orang yang aktif melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.	Diselenggarakan bimtek dasar PSM untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan PSM Pemberian fasilitasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan PSM	
					Pelaksanaan pembekalan dasar penanggulangan bencana untuk 90 orang	Terlaksananya pembekalan dasar penanggulangan bencana untuk 90 orang	Diperlukan peningkatan keahlian dan keterampilan anggota TAGANA Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas SDM TAGANA	Diselenggarakan pembekalan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan TAGANA	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi kegiatan TKSK sebanyak 20 orang	Terfasilitasinya kegiatan TKSK sebanyak 20 orang	Diperlukan peningkatan keahlian dan keterampilan TKSK Perlu menyamakan visi dan misi TKSK dalam usaha kesejahteraan sosial	Diselenggarakan capacity building bagi TKSK Diselenggarakan rakor rutin bulanan untuk TKSK	
				3) Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Keluarga Pioner Untuk Peran Serta dalam Penanganan PPKS di 20 Kecamatan	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Keluarga Pioner Untuk Peran Serta dalam Penanganan PPKS di 20 Kecamatan, 4 panti 1 kegiatan 47742 KK. Jumlah terakhir penerima Bansos sembako 4 kegiatan yang terdiri dari: 1. Temu karya Karang Taruna Kabupaten; 2. Bulan Bhakti Karang Taruna;	1. Telah dilaksanakan sosialisasi kepada keluarga pioneer kepada masyarakat namun dikarenakan kondisi dan situasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh 2. Perlu adanya koordinasi lintas PD agar pelaksanaan dan hasil kegiatan lebih maksimal 3. Jumlah panti bertambah sedangkan jumlah bantuan berkurang 4. Jumlah panti bertambah	1. Berkoordinasi dengan DP3P2AKB dalam pelaksanaan sosialisasi keluarga pioneer 2. Ada penambahan anggaran untuk sarpras panti 3. Ada penambahan anggaran untuk sarpras panti 4. Menyampaikan permasalahan ke kementerian sosial agar segera dapat ditindaklanjuti dan dicari solusinya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3. Rapat Kerja Daerah Karang Taruna Kabupaten; 4. Rapat dan kegiatan rutin Karang Taruna 1 kegiatan yaitu fasilitasi rapat dan pertemuan rutin setiap bulan sekali selama satu tahun	sedangkan jumlah bantuan berkurang 5. Tidak adanya sinkronisasi data KPM antara Himbara, Dinas Sosial dan Kementerian Sosial 6. Berubahnya jumlah penerima bansos setiap bulannya 7. Informasi yang berubah-ubah tentang kebijakan teknis program sembako 8. Jumlah penerima bansos sembako berubah-ubah 9. SDM FK KT masih kurang dalam hal pemahaman keorganisasian dan kekarang tarunaan 10. Keaktifan dalam kepengurusan baru 50% 11. Kurangnya dukungan fasilitasi	5. Diselenggarakan Capacity Building untuk karang taruna 6. Pembinaan rutin bagi karang taruna 7. Diselenggarakan Capacity building dan rakor IPISM	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>pembinaan dan peningkatan kualitas anggota Karang Taruna</p> <p>12. Diperlukan dukungan untuk kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengurus</p> <p>13. Belum adanya sekretariat IPSM yang memadai</p>		
				4) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	<p>Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan PSKS lembaga (Karang Taruna, IPSM, Komda Lansia, LKKS, WKSBM, LKSA, SLRT) sebanyak 12 kegiatan</p>	<p>Terfasilitasinya Kegiatan LKKS 2 kegiatan yaitu pertemuan rutin setiap bulan sekali selama satu tahun dan fasilitasi kunjungan pembinaan panti oleh LKKS</p> <p>Terfasilitasinya operasional 1 Puskesmas Kabupaten dan 2 Puskesmas Desa</p>	<p>1. Bertambahnya LKKS</p> <p>2. Perlu pengawasan intens dalam pemilahan LKS yang menjadi satu dengan pondok pesantren</p> <p>3. Program baru dari kementerian sosial dan di daerah masih dalam taraf penataan</p> <p>4. Tidak semua kegiatan Puskesmas difasilitasi oleh Kementerian Sosial</p>	<p>1. Mengoptimalkan peran LKKS sebagai lembaga kesejahteraan sosial</p> <p>2. Sesuai kesepakatan akan dilaksanakan tanpa menunggu alokasi anggaran Dari kementerian sosial</p> <p>3. Pembentukan puskesmas di seluruh desa/ keluarahan di kabupaten temanggung</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5. Belum adanya anggaran daerah untuk operasional Puskesmas	4. Diperlukan dukungan anggaran daerah untuk operasional Puskesmas dari APBD	
				2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					
				Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100 %	100 %	Dengan anggaran yang terbatas pada fasilitas , sehingga kegiatan bimbingan sosial tidak dapat dilaksanakan secara maksimal	Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait (sentra terpadu kartini)	
				a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi ke daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke desa Kelurahan asal					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Terbantunya 10 orang Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dapat memenuhi kehidupan dasarnya melalui Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif	Terbantunya 10 orang Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dapat memenuhi kehidupan dasarnya melalui Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif	Kurang terbukanya klien eks migran bermasalah yang membutuhkan layanan	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait (petugas sosial Kemensos yang ada di Dinas Sosial)	
				3. Program Rehabilitasi Sosial					
				Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus	Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/ UPT kementerian Sosial yang menangani terkait permasalahan anak.	
				Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	Masih kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan bimbingan bagi disabilitas di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan koordinasi dengan UPT Kementerian sosial (Sentra Terpadu Kartini) dalam penanganan disabilitas di Kabupaten Temanggung	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	Masih banyaknya lanjut usia yang tidak dapat diterima di panti pelayanan lansia dikarenakan kondisi lansia yang sudah bedrest	Koordinasi dengan pihak yang terkait dengan penanganan lansia terlantar, terus melakukan koordinasi dengan Pemprov terkait pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar yang mengalami kedisabilitan.	
				Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	100 %	Kurangnya anggaran untuk operasional Rumah Singgah	Perlu adanya dukungan anggaran untuk operasional rumah	
				Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	1,22 %	11,58 %	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS di luar panti merupakan kegiatan respon kasus, dan terdapat kondisimasih	Koordinasi dengan Dinas instansi terkait, perlu dukungan anggaran untuk bimbingan dan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan bimbingan bagi disabilitas, terdapatnya lansia yg tidak dapat dilayani di panti dikarenakan kondisi bedrest, dan kurangnya anggaran untuk operasional Rumsing.	pembinaan lanjut. Selalu memanfaatkan sistem sumber yang ada.	
				a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
				1) Sub kegiatan: Penyediaan Permakanan	Tersedianya kebutuhan dasar bagi Disabilitas terlantar , anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Terlantar Penyandang	Tersedianya kebutuhan dasar bagi Disabilitas terlantar , anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Terlantar Penyandang	Keterbatasan anggaran APBD	Koordinasi dengan Kementerian Sosial RI	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Disabilitas sejumlah 100%	Disabilitas sejumlah 2.545 orang			
				2) Sub kegiatan Penyediaan Sandang	Penyediaan Kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan orang atau Tindak Kekerasan Terlantar sebanyak 100%	Penyediaan Kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan orang atau Tindak Kekerasan Terlantar 111 orang	Kurangnya anggaran	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	
				3) Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu 132 buah (kursi roda anak, kursi roda standar Dewasa, Alat Bantu Jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair Kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Betra, dan Kruk)	Tersedianya alat bantu 132 buah (kursi roda anak, kursi roda standar Dewasa, Alat Bantu Jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair Kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Betra, dan Kruk)	Kurangnya anggaran	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan Reunifikasi Keluarga Disabilitas, Tuna Sosial dan Klien RPS sejumlah 100 %	Terlayannya Reunifikasi Keluarga Disabilitas, Tuna Sosial dan Klien RPS sejumlah 58 orang	Masih banyak klien yang sulit untuk diidentifikasi karena kondisi klien ODGJ	Melaksanakan koordinasi dengan Panti Pelayanan Sosial dan RSJ	
				5) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Fisik, mental dan sosial bagi klien penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar sejumlah 100%	Tersedianya Fasilitas Bimbingan Fisik, mental dan sosial bagi klien penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar sejumlah 251 orang	Kurangnya anggaran	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	
				6) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya bimbingan sosial bagi keluarga klien terlantar sejumlah 100%	Terlaksananya bimbingan sosial bagi keluarga klien terlantar sejumlah 68 orang	Kurangnya anggaran	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	
				7) Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Layanan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar bagi	Layanan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar bagi Klien	Kegiatan ini bersifat respon kasus sehingga anggaran bersifat persediaan	Selalu merespon kasus yang ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak kekerasan dan orang terlantar sejumlah 100%	Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak kekerasan dan orang terlantar sejumlah 73 orang			
				8) Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar sejumlah 100%	Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar sejumlah 3.317 orang	Kegiatan ini bersifat respon kasus sehingga anggaran bersifat persediaan	Selalu merespon kasus yang ada	
				9) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan bagi klien sejumlah 100%	Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan bagi klien 316 orang	Kegiatan ini bersifat respon kasus sehingga anggaran bersifat persediaan	Selalu merespon kasus yang ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				10) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penyediaan Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga sejumlah 100%	Tersedianya Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga 46 orang	Kegiatan ini bersifat respon kasus sehingga anggaran bersifat persediaan	Selalu merespon kasus yang ada	
				11) Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian layanan rujukan	Pemberian rujukan kepada 118 orang	Kurangnya penerimaan oleh Panti Pelayanan Sosial karena kondisi klien atau tidak ada kuota yang tersedia	Koordinasi dengan pihak terkait	
				b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
				1) Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Penyediaan Bantuan dan Asistensi Sosial untuk Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar sejumlah 100 %	Tersedianya Bantuan dan Asistensi Sosial untuk Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar sejumlah 269 orang	Kegiatan ini bersifat respon kasus sehingga anggaran bersifat persediaan	Selalu merespon kasus yang ada	
				2) Sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya perbekalan kesehatan dasar bagi klien terlantar sejumlah 100 %	Tersedianya perbekalan kesehatan dasar bagi klien terlantar sejumlah 84 orang	Kegiatan ini bersifat respon kasus sehingga anggaran bersifat persediaan	Selalu merespon kasus yang ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial pada kasus Anak dan Lanjut Usia terlantar sejumlah 100 %	Terlaksananya bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial pada kasus Anak dan Lanjut Usia terlantar sejumlah 251 orang	Kegiatan ini bersifat respon kasus sehingga anggaran bersifat persediaan	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	
				4) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya bimbingan sosial kepada Keluarga dari Anak dan Lanjut Usia Terlantar sejumlah 100%	Terlaksananya bimbingan sosial kepada Keluarga dari Anak dan Lanjut Usia Terlantar sejumlah 68 orang	Kegiatan ini bersifat respon kasus sehingga anggaran bersifat persediaan	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	
				5) Sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terfasilitasinya ATK untuk kegiatan LUT/AT dan Home Care Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak sejumlah 100%	Terfasilitasinya ATK untuk kegiatan LUT/AT dan Home Care Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak sejumlah 246 orang	Kegiatan ini bersifat respon kasus sehingga anggaran bersifat persediaan	Selalu merespon kasus yang ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6) Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi kasus Anak dan Lanjut Usia Terlantar sebanyak 100%	Terlaksananya pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi kasus Anak dan Lanjut Usia Terlantar sebanyak 73 orang	Kegiatan ini bersifat respon kasus sehingga anggaran bersifat persediaan	Selalu merespon kasus yang ada	
				7) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya layanan penelusuran Keluarga bagi kasus kasus Klien RPS terlantar sejumlah 100%	Terlaksananya layanan penelusuran Keluarga bagi kasus kasus Klien RPS terlantarsejumlah 46 orang	Kegiatan ini bersifat respon kasus sehingga anggaran bersifat persediaan	Selalu merespon kasus yang ada	
				8) Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya layanan rujukan bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar yang memerlukan rujukan sejumlah 100%	Terlaksananya layanan rujukan bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar yang memerlukan rujukan sejumlah 118 orang	Kurangnya penerimaan oleh Panti Pelayanan Sosial karena kondisi klien atau tidak ada kuota yang tersedia	Koordinasi dengan pihak terkait	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9) Sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kerjasama antar Dinas Sosial dengan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial sebanyak 1 Kegiatan	Terlaksananya kerjasama antar Dinas Sosial dengan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial sebanyak 1 Kegiatan			
				4. Program Perlindungan dan jaminan Sosial					
				Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100 %	100 %	Adanya Perubahan penerima menyebabkan Perubahan di Anggaran Perubahan dan SK Bupati	Selalu Koordinasi dan komunikasi dengan pengurus panti terkait perubahan kebijakan.	
				Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	80%	100 %	Kelurahan belum memiliki anggaran untuk pendataan Fakir Miskin	Mengusulkan adanya anggaran khusus pendataan Fakir Miskin di Kelurahan	
				Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	90%	91,11 %	Masih ada penerima bantuan yang belum mempunyai KTP elektronik	Koordinasi dengan Disdukcapil terkait percepatan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	10,1 %	100 %	Masih ada UEP dan KUBE yang belum bisa melanjutkan kegiatan usahanya.	Memotivasi UEP KUBE yang masih ada, agar mempertahankan kegiatan usaha ekonomi produktif dan menjalin Kemitraan	
				Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48 %	61,70 %	Masih ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran disebabkan karena data penerima bantuan berasal dari pusat dan tidak diadakan verval oleh daerah.	Untuk diadakan verval data penerima yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan data penerima bantuan.	
				a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					
				1) Sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terfasilitasinya bantuan Permakanan Anak Panti Asuhan di 8 Panti (381 anak x 365 hr x Rp 7500	Terfasilitasinya bantuan Permakanan Anak Panti Asuhan di 9 Panti (321 anak x 365 hr x Rp 8900	Dari 11 panti penerima awal ada 2 panti yang tidak memenuhi syarat administrative (Surat Izin Operasional/ SIOP panti sudah kadaluarsa	Menghimbau kepada 2 panti tersebut untuk memperbarui masa aktif SIOP	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Proses Adopsi Anak sebesar 100%	Terlaksananya Proses Adopsi Anak sebesar 100%(selama 2022 terlayani sejumlah 30 Anak Adopsi)	Masa pengurusan rekom/SK Dinsos Provinsi agak lama, karena terkendala syarat kekurangan syarat administratif	Memotivasi keluarga COTA untuk memnuhi kekurangan administratif	
				3) Sub kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Porseni Anak Panti sebesar 100%.	Terlaksananya Porseni Anak Panti sejumlah 300 orang dari 11 Panti)	Kekuarangan Anggaran makan minum untuk kegiatan Porseni Panti	Jumlah yang tidak tercover makan minum di subsidi dari masing-masing panti (demi kebersamaan)	
				b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS, PBI, PPKS, PSKS)sebanyak 16 kegiatan	Tersedianya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS, PBI, PPKS, PSKS)sebanyak 16 kegiatan	Adanya perubahan variabel sehingga DTKS tidak ada pembagian berdasar tingkat kesejahteraan.	Koordinasi dengan kemensos karena untuk data kemiskinan memerlukan data dengan tingkat kesejahteraan.	
				2) Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS) sebesar 100%	Terkelolanya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS) sejumlah 487.729	Kepesertaan PBI APBN banyak mengalami penonaktifan	1. Reaktivasi untuk kepesertaan yang di nonaktifkan (sebelum 6 bulan)	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								2. Mengusulkan peserta non aktif ke DTKS kemudian mengusulkannya ke PBI APBN atau mengusulkan peserta non aktif tsb ke PBI APBD II	
				3) Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya bisnis proses PKH, Terfasilitasinya Bantuan Sosial Kartu Jateng Sejahtera sebesar 100% (166 Penerima KJS di 20 Kec)	Terfasilitasinya bisnis proses PKH, Terfasilitasinya Bantuan Sosial KJS sebesar 100% (166 Penerima KJS di 20 Kec)	Data KJS dinamis berubah-ubah karena data Meninggal, doble bansos, sembuh	Selalu koordinasi dengan pendamping kec dan pendamping desa, agar bantuan tepat sasaran.	
				4) Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasinya 289 KUBE @ Rp 8,5 Juta & 63 PM UEP @ Rp 4 juta	Terfasilitasinya 240 KUBE @ Rp 10.000.000 & 63 PM UEP @ Rp 4.000.000	Pencairan Bansos di APBD Perubahan sehingga belum memungkinkan untuk Monev Bansos UEP KUBE	Memastikan pencairan, belanja bantuan dan LPJ berjalan lancar, dengan koordinasi Pendamping UEP di masing2 kecamatan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5. Program Penanganan Bencana					
				Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100 %	100 %	Kurangnya anggaran, sehingga kita tidak bisa melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana	Penambahan anggaran penanganan bencana	
				a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
				1) Sub kegiatan Penyediaan Makanan	Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi Korban Bencana di Kab Temanggung sebesar 100%	Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi Korban Bencana di Kab Temanggung untuk 723 orang	Ketersediaan pengadaan pangan yang terbatas pada anggaran membuat stok menjadi terbatas	Penambahan anggaran untuk penambahan stok ketersediaan pangan untuk masa tanggap darurat bencana	
				2) Sub kegiatan Penyediaan Sandang	Terpenuhinya kebutuhan Sandang bagi Korban Bencana di Kab Temanggung sebesar 100%	Terpenuhinya kebutuhan Sandang bagi Korban Bencana di Kab Temanggung untuk 723 orang	Ketersediaan pengadaan sandang yang terbatas pada anggaran membuat stok menjadi terbatas	Penambahan anggaran untuk penambahan stok ketersediaan sandang untuk masa tanggap darurat bencana	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terfasilitasinya Santunan Kematian bagi masyarakat miskin/Keluarga Rentan di Kab Temanggung sebanyak 100 %	Terfasilitasinya Santunan Kematian bagi masyarakat miskin/Keluarga Rentan di Kab Temanggung sebanyak 2527 orang	SDM desa dan Kel yg kesulitan mengikuti pengajuan secara elektronik (E-Sanka)	Diperbanyak untuk sosialisasi ke Desa dan Kelurahan mengenai E-Sangka	
				b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
				1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Meningkatnya Kemampuan Forum Kampung Siaga Bencana (KSB) sejumlah 30 org anggota di Kab Temanggung	Meningkatnya Kemampuan Forum Kampung Siaga Bencana (KSB) sejumlah 30 org anggota di Kab Temanggung	Kurang aktifnya anggota sehingga Kampung Siaga Bencana minim kegiatan	Reorganisasi anggota Kampung Siaga Bencana dan merencanakan kegiatan untuk mengaktifkan lagi kegiatan kebencanaan di Kampung Siaga Bencana	
				2) Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Meningkatnya Kemampuan Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana anggota di Kab Temanggung	Meningkatnya Kemampuan Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana di Kab Temanggung sejumlah 3 KSB	Kurang aktifnya TAGANA pada kegiatan kebencanaan	Rekrutmen anggota baru untuk TAGANA Kabupaten Temanggung	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terfasilitasinya Peralatan penunjang penanggulangan bencana forum Tagana dengan pengadaan perlengkapan forum Tagana sebesar 100%	Terfasilitasinya Peralatan penunjang penanggulangan bencana forum Tagana dengan pengadaan perlengkapan forum Tagana berupa pakaian dinas lapangan sebanyak 1 paket	Perawatan peralatan bencana yang masih belum maksimal dijalankan	Pembuatan jadwal piket untuk perawatan peralatan bencana	
					Terlaksananya Capacity Building dalam rangka peningkatan Skli Forum Tagana sebanyak 1 kegiatan	Terlaksananya Capacity Building dalam rangka peningkatan Skli Forum Tagana sebanyak 50 orang	Belum keseluruhan anggota TAGANA mengikuti capacity building	Membuat ebook materi capacity building dan disebarluaskan pada anggota TAGANA untuk dapat dipelajari	
					Terlaksananya kesiapsiagaan dan respon cepat dalam rangka penanggulangan bencana sebanyak 365 hari	Terlaksananya kesiapsiagaan dan respon cepat dalam rangka penanggulangan bencana sebanyak 365 hari	Terjadi bencana pada malam hari sehingga kekurangan personil	Bekerjasama dengan perangkat daerah terkait untuk menunjang upaya kebencanaan	
					Terlaksananya Rakor bersama relawan Tagana sebanyak 4 kegiatan	Terlaksananya Rakor bersama relawan Tagana 4 kegiatan	Pembagian tupoksi untuk tambahan anggota baru yang belum maksimal	Pembuatan jadwal dan tugas untuk keseluruhan anggota TAGANA agar tidak ada yang tumpang tindih dalam melaksanakan tanggungjawabnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					
				Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100 %	100 %	Kurangnya anggaran untuk perbaikan sarana dan prasaran makam, dan juga untuk pembuatan lobang makan yang merupakan salah satu pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada jenazah para pahlawan dan keluarganya.	Penambahan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana taman makam pahlawan dan untuk pembuatan lobang makam.	
				a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan	3 kegiatan yaitu : 1. Pemeliharaan kebersihan 2. Penggalian 2 lubang makam 3. Fasilitas peziarah TMP yang berada di 2 lokasi yaitu TMP Prayudha Mudal dan MP Bambang Sugeng Kranggan	Alokasi anggaran masih berkisar pada belanja rutin upah dan belanja pemeliharaan (obat rumput, alat-alat kebun sederhana)	Dibutuhkan alokasi anggaran untuk belanja sarpras pemeliharaan TMP seperti untuk pembuatan lubang makam, pengecatan, tanggul, pagar	

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan wajib yang Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					
				Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	62 %	71,43 %	Tidak mendapatkan pagu anggaran dari APBD	Memaksimalkan kegiatan anggaran APBN	
				Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru atau telah bekerja	40 %	43,75 %	Tidak mendapatkan pagu anggaran	Mengajukan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya	
				Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	40%	52,08 %	Tidak mendapatkan pagu anggaran	Mengajukan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya	
				a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	112 orang	80 orang (APBN)	Tidak mendapatkan pagu anggaran dari APBD	Mengajukan anggaran ke pemerintah pusat / APBN	
				b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	40 LPKS	Ijin pendirian LPKS dan BLKK 3, Ijin Penambahan jurusan LPKS	Tidak mendapatkan pagu anggaran dari APBD	Mengajukan anggaran ke provinsi	
				c. Kegiatan Konsultasi produktivitas pada Perusahaan Kecil	100%	100%			
				1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	70 orang pengusaha perusahaan kecil	70 orang pengusaha perusahaan kecil	Tidak mendapatkan pagu anggaran dari APBD	Mengajukan anggaran ke provinsi	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Program Penempatan Tenaga Kerja					
				Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	74,5%	74,01%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan antara pasar kerja dan SDM pencari kerja tidak matching/seimbang 2. Kurangnya partisipasi angkatan kerja yang bekerja baik bekerja dengan perjanjian kerja ataupun tanpa perjanjian kerja. 3. Kurangnya penyelenggaraan informasi pasar kerja (job fair) sehingga informasi bagi pencari kerja kurang tersampaikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggara kan bursa kerja / informasi lowongan kerja 2. Memberikan layanan pelatihan kerja 	
				Presentase pencari kerja terdaftar yang di tempatkan	62 %	53,61 %	<p>Pengurangan jam kerja, PHK di sektor industri padat karya imbas gagal bayar buyer Amerika dan Eropa, sehingga tidak ada rekrutmen karyawan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan target penempatan dengan melihat perkembangan sektor industri padat karya yg mengalami penurunan produksi 2. Mengalihkan sektor penempatan kerja formal ke arah diluar hubungan 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								kerja dengan mendorong sektor perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan wirausaha	
				Tingkat setengah pengangguran	5,8 %	4,57 %	kondisi perusahaan yang belum stabil sehingga masih banyak karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan dan pengurangan jam kerja	melakukan penguatan jejaring dengan perusahaan nasional yang berinvestasi di Kabupaten Temanggung	
				Persentase tenaga kerja formal	30%	29,30%	adanya pengurangan jam kerja dan pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan	penguatan jejaring dengan perusahaan untuk menginformasikan lowongan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Temanggung.	
				a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan pelayanan antar kerja	1000 Orang	1442 Orang	- Tidak mendapatkan pagu anggaran Pengurangan jam kerja, PHK di sektor	- Mengajukan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	300 Orang	360 Orang	industri padat karya imbas gagal bayar buyer Amerika dan Eropa, sehingga tidak ada rekrutmen karyawan Anggaran terefocusing	berikutnya - Penurunan target penempatan dengan melihat perkembangan sektor industri padat karya yg mengalami penurunan produksi - Mengalihkan sektor penempatan kerja formal ke arah diluar hubungan kerja dengan mendorong sektor perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan wirausaha - Mengajukan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12 Bulan	480 Kali	Anggaran terefokusing	mengajukan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya	
				2) Sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	0 Paket	0 Paket	Anggaran terefokusing	mengajukan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya	
				3) Sub kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100%	100 %			
				4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1 kegiatan	28 orang	Anggaran masuk dalam anggaran perubahan sehingga pelaksanaan sedikit terhambat	Memastikan anggaran bisa dilaksanakan lebih awal ditahun berikutnya	
				5) Sub kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi	16 Orang	10 Orang	Rasionalisasi anggaran	kebijakan anggaran APBD	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)					
				3. Program Hubungan Industrial			-		DINPERINAKER telah melaksanakan sosialisasi penerapan UMK Tahun 2022 pada tanggal 13 Desember 2021 bersama Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Kab. Magelang dan keikutsertaan dalam BPJS ketenagakerjaan yang diikuti oleh 40 (empat puluh) perusahaan skala menengah dan besar se-Kabupaten Temanggung.
				Proporsi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	78%	84,89%	Masih banyak perusahaan yang belum mengikutsertakan 4 program BPJS Ketenagakerjaan Masih banyak perusahaan yang mengikutsertakan BPJS tidak dari awal perjanjian kerja	melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait BPJS Ketenagakerjaan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Presentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	56%	76,47%	Masih banyak perusahaan yang membayar Upah harian, walaupun dibayarkan sebulan	melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait UMK	
				Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	35 %	55,46 %	masih banyak perusahaan yang belum bersedia membentuk LKS Bipartit dan kurang mendorong dibentuknya serikat pekerja di perusahaan - terdapat kasus perselisihan yang didaftarkan pada akhir tahun sehingga proses mediasi penyelesaian masih berlangsung	melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait pentingnya LKS Bipartit dan serikat pekerja serta peraturan perusahaan segera menindaklanjuti semua aduan perselisihan yang masuk terutama yang didaftarkan akhir tahun	
				Persentase perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100 %	93,33 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	21 PP	21 PP	Masih ada perusahaan yang membuat PP belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	Melaksanakan paparan peraturan perusahaan bersama dengan subkor syarat kerja agar sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	
				2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	57 Kegiatan	57 Kegiatan	Upah dan kepesertaanjaminan sosial yang belum sesuai dengan ketenuan perundang - undangan	Melaksanakan pembinaan dan kegiatan monitoring dan evaluasi di perusahaan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	120 Kegiatan	120 Kegiatan	Belum maksimalnya pemitaan kerawan perselisihan hubungan industrial	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi di perusahaan dan Sosialisasi Ketenagakerjaan	
				2) Sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/	100 %	100 %	Permasalahan yang tidak selesai pada tingkat mediasi akan naik banding ke Pengadilan Negeri	Upaya mediasi	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				3) Sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan berupa Rapat persiapan Mayday dan pemberian THR, Rapat persiapan UMK 2023 dan Rapat pembahasan UMK	Masih terjadi perbedaan pendapat mengenai ketentuan perundang - undangan ketenagakerjaan	Melaksanakan Rapat Tripartit agar tercipta hubungan yang harmonis antara unsur pemerintah, unsur pengusaha dan unsur serikat	
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	DPPPAPPKB		1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
				Persentase keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah	2,33%	2,64%	Partisipasi perempuan dalam Lembaga pemerintah dipengaruhi peluang seleksi	perlu dilakukan review terhadap definisi operasional indikator program	Penguatan advokasi dan edukasi keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	38,57 %	45,65 %	Masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG	Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG	
				a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					
				1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	5 kegiatan	terlaksananya sosialisasi tentang PUG dan ARG untuk organisasi Perempuan di 5 Kecamatan	Masih kurangnya pemahaman tentang PUG pada lembaga Pemerintah	Sosialisasi dan advokasi tentang PUG, mengoptimalkan pokja PUG tingkat Kabupaten dan peningkatan kapasitas pokja PUG	
				b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 kegiatan	penguatan organisasi perempuan / GOW dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan	Masih kurangnya kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	
				2. Program Perlindungan Perempuan					
				Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak Perempuan	0,01%	0,003%	Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas	Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping	
				Persentase Perempuan korban kekerasan	0,01 %	0,003%	Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas	Penguatan dalam melakukan pendampingan kelana dan dekela	
				a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				1) Koordinasi dan Sinkronisasi	7 keg Sosialisasi ke	terlaksananya kegiatan sosialisasi	Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan	Sosialisasi Pencegahan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab./Kota	Sekolah - sekolah, Organisasi kemasyarakatan dan Desa	pencegahan kekerasan terhadap perempuan untuk OPD, Perangkat Desa , Organisasi Perempuan	pencegahan kekerasan terhadap perempuan	terhadap Perempuan .dan koordinasi lintas sektoral	Kekerasan terhadap Perempuan dan sosialisasi tentang Aplikasi SIPESAN.
				b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
				1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 keg pelayanan rujukan untuk Perempuan korban Kekerasan	terlaksannnya layanan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Keterbatasan dan kemampuan petugas pelayanan rujukan lanjutan dan belum TERBENTUKNYA upt PPPA	Koordinasi lintas sektoral penanganan dan pendampingan Pelayanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	terlaksananya pelayanan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Keterbatasan dan kemampuan petugas pelayanan rujukan lanjutan dan belum TERBENTUKNYA upt PPPA	Koordinasi lintas sektoral penanganan dan pendampingan Pelayanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	
				1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 keg	5 keg	Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Pelayanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	
				3. Program Peningkatan Kualitas keluarga					
				Persentase desa sayang ibu dan bayi	41,5 %	39,79%	masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan	penguatan dan advokasi dan sosialisasi tentang GSI bersama mitra kerja terhadap	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								semua pemangku kepentingan untuk melakukan Penggerakan DESA Sayang IBU	
				Persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi	100 %	100 %			
				a. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%				
				Sub kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 keg Sosialisasi	terlaksananya Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan	Peningkatan komitmen pemerintah dalam Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					
				Persentase terbentuknya kota layak anak	50%	80%			
				a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%			
				b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota KB	5 keg	terlaksana kegiatan forum anak	Kurangnya fasilitas dari oemkab tentang pemenuhan hak anak	Advokasi serta sosialisasi tentang KHA di lembaga penyedia layanan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5. Program Perlindungan Khusus Anak					
				Persentase anak korban kekerasan	0,01 %	0,0048	Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas	Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping	
				a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ kota	6 kegiatan	6 Kegiatan	Masih kurannya koordinasi lintas sektoral dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak .dan koordinadsi lintas sektoral	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	12 bulan	11 permasalahan anak	Keterbatasan dan kemampuan petugas pendamping anak yang memerlukan perlindungan khusus	Koordinasi dan sinkronisasi Petugas pendamping anak yang memerlukan perlindungan khusus	
				3) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	12 bulan	3 kali koordinasi: -Koordinasi sektoral 1x -Koordinasi PTT 1 x -Koordinasi Org masyarakat 1x	Keterbatasan dan kemampuan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP)		1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandairian Pangan					
				Rasio ketersediaan pangan	100%	122,54%	1. Alih fungsi lahan 2. Peralihan komoditas yang dibudidaya 3. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi 4. Prasarana dan sarana pertanian yang belum merata dan kurang memadai 5. Cuaca ekstrem meningkatkan serangan hama 6. Benih yang digunakan bukan benih unggul	a. Fasilitas bantuan serta pemerataan sarana dan prasarana pertanian b. Penerapan sistem budidaya yang sesuai GAP, GHP c. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian d. Peningkatan pelatihan pembuatan pupuk organic untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi e. Peningkatan dan pemerataan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								sarana dan prasarana pertanian f. Pelatihann PPHT dan GERDAL OPT g. penyelenggaraan sekolah lapang iklim h. Penggunaan benih unggul	
				2. Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat					
				Persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	24,22%	32,53%	tidak semua wilayah dapat memproduksi kebutuhan pangan yang beragam sesuai dengan pola pangan ideal	Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dengan optmalisasi lahan pekarangan sebagai sumber gizi dan sumber pendapatan bagi masyarakat melalui kegiatan pekarangan pangan lestari	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	a. pendataan harga pangan startegis di tingkat produsen/ eceran/ konsumen setiap minggu b. terlaksananya koordinasi Sinkronisasi Luas Tambah Tanam, Luas Panen dan Produksi setiap bulan (12 kali pertemuan)	a. Terlaksananya pendataan harga pangan startegis di tingkat produsen/ eceran/konsu men setiap minggu b. terlaksannya akoordinasi Sinkronisasi Luas Tambah Tanam, Luas Panen dan Produksi setiap bulan (12 kali pertemuan)	a. kurangnya sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD lain terkait dengan data harga pangan b. data enumerator masih terbatas di 2 pasar besar	a. meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait b. menambah jumlah sample pasar	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan 50 Lumbung pangan	Pendampingan lembaga pangan masyarakat (lumbung pangan masyarakat) sebanyak pembinaan 3 kali Pendampingan 12 kali	Pendampingan lembaga pangan masyarakat (lumbung pangan masyarakat) pembinaan 3 kali Pendampingan 12 kali	a. belum semua LPM aktif b. belum meratanya SDM pengelola LPM	a. pendampingan LPM lebih di intensifkan	
				b. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang bergizi, seimbang, seha	• jumlah anggaran belum seimbang dengan jumlah lokus stunting (sumber anggaran DAK Non Fisik peruntukan khusus untuk lokus desa stunting, lokasi kecamatan sudah	memaksimalkan pendampingan sehingga output kegiatan maksimal	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					bergizi, berimbang, sehat dan Aman melalui Pengembangan Tani Pekarangan dan Pengolahan Pangan Lokal dalam upaya penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat berbasis sumber Daya Lokal KWT Anggrek Bulan Ds. Tanjungsari Kec. Tlogomulyo KWT Dewi Ratih Ds. Ngropoh Kec. Kranggan 1 kegiatan	dan Aman melalui Pengembangan Tani Pekarangan dan Pengolahan Pangan Lokal dalam upaya penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat berbasis sumber Daya Lokal Rapat Koordinasi 1 kali Pelatihan 2 kali Pertemuan kelompok masing-masing 4 kali peruntukkan anggaran untuk masing-masing kelompok Rp. 15.000.000,- untuk Pengadaan sarana pembibitan @ Rp. 3.300.000,- Pengembang	ditentukan dari pusat) <ul style="list-style-type: none"> SDM kelompok belum merata 		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						an demplot @ Rp. 6.400.000,- Pertanaman @ Rp. 4.300.000,- Penanganan pasca panen @Rp. 1.000.000,- Operasional Rp. 30.000.000,- 1 kegiatan			
				3. Program Penanganan Kerawanan Pangan					
				Rasio lumbung pangan masyarakat	52	58	Berkurangnya jumlah lumbung pangan aktif sejalan dengan dinamika pembangunan	Pembangunan dan pengaktifan Lumbung pangan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat	
				a. Kegiatan Penyusunan pemutahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya pemutakhiran peta kerentanan dan ketahanan pangan 1 kegiatan	1 kegiatan Terlaksananya pemutakhiran peta kerentanan dan ketahanan pangan Cetak peta per indikator dan komposit Cetak buku FSVA Pendataan sarpras penyedia pangan	Data yang ada hanya sampai level kecamatan (data detail sampai desa belum ada)	koordinasi dengan OPD terkait	
				4. Program Pengawasan Keamanan Pangan					
				Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90%	100%	Masih terdapat petani dengan pola yang terbalik, yaitu rusaknya lahan harus diimbangi dengan pemakaian pupuk kimia di luar ambang batas dan untuk menjamin hasil panen bebas hama, termasuk ulat, pestisida juga digunakan secara tidak bertanggung jawab, sarana uji tes yang kurang	Peningkatan edukasi dan alih teknologi tentang penggunaan dan pembuatan pestisida non kimiawi untuk pelaku budidaya pertanian khususnya PSAT.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya penguatan kelembagaan OKKPD	<ul style="list-style-type: none"> • terlaksanya sosialisasi registrasi PSAT 1x • terfasilitasin ya 12 ijin registrasi PSAT • peningkatan SDM OKKPD 2x • pembelian alat laboraorium pipet uji 50 bh, sarung tangan karet 50 psg, gelas beker 250 ml 6 b, gelas beker 50 ml 6 bh 	Struktur organisasi yang ada belum efektif (masih mengacu pada SOP Pusat)	membuat struktur organisasi sesuai yang dibutuhkan daerah	
				2) Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 kegiatan Tersedianya sarana dan Prasarana pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan	1 kegiatan Tersedianya sarana dan Prasarana pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan	a. anggaran terbatas sehingga : parameter uji terbatas hanya di pestisida dan formalin (belum mencakup semua parameter), jumlah sample masih terbatas, uji belum	uji dilakukan untuk PSAT tertentu (bahan pangan strategis)	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah Kabupaten/Kota	Daerah kabupaten untuk peningkatan mutu dan Keamanan Pangan	Daerah kabupaten untuk peningkatan mutu dan Keamanan Pangan Pengadaan rapid tes residu pestisida sejumlah 60 unit pelaksanaan uji cepat sampel PSAT sejumlah 60 sampel - aman di 50 pasar	dilaksanakan secara berkala b. koordinasi dengan OPD yang lain		
4	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)		1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					
				Prosentase penyelesaian fasilitas pertanahan	100 %	100 %	a. Tidak ada anggaran untuk gugus tugas reforma agrarian dalam memfasilitasi sengketa tanah garapan di OPD di DPRKPLH b. Kurang maksimal kegiatan fasilitas dan	Koordinasi dengan OPD lain ketika akan mengadakan fasilitas dengan kurangnya fasilitas yang dimiliki untuk memaksimalkan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							koordinasi ketika akan memberikan fasilitasi administrasi dari kegiatan fasilitas pertanahan	pelayanan fasilitasi pertanahan	
				Fasilitasi Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Fasilitasi dan Pengadaan Tanah	Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Pemerintah, Kepentingan Program Strategis Nasional yang terfasilitasi secara umum bisa dilaksanakan bersama lintas OPD pengguna dari pengguna Tanah tersebut.	<p>a. Tugas pembantuan yang terfasilitasi dari pengadaan tanah untuk fasilitas Umum (Pengadaan Tanah RSUD) dari 2(dua) Bidang tanah terselesaikan di Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semua administrasi untuk proses kelengkapan berkas Alas Haknya juga terfasilitasi untuk PSN Jalan TOL Bawen Jogjakarata</p> <p>b.</p>	<p>a. Pengadaan tanah untuk perluasan RSUD ada sebagian tanah yang diminta dari penjual di atas harga yang di tentukan TIM KJPP sehingga menyusahkan ketikan tindak lanjut dari transaksi pengadaan tanah tersebut.</p> <p>b. Ada sebagian dari terdampak Tol yang tidak sepakat dengan uang ganti wajar bagi terdampak TOL di wilayah Pringsurat tersebut dari penilaian KJPP.</p>	<p>a. di fasilitasi oleh tim Pengadaan Tanah Kabupaten dan yang sepakat dari Ganti Wajara atas penilaian harga dari KJPP yang di tindak lanjuti untuk transaksi jual beli pengadaan tanah perluasan RSUD.</p> <p>b. dari kegiatan Program PSN tersebut dari warga terdampak yang habis masa sanggahnya atas tanah yang dai ganti wajar atas terdampak TOL maka di lakukan Konsinyiasi di pengadilan Negeri</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>proses yang telah di laksanakan sampai pada proses penyampaian ganti wajar sedangkan utnuk Saluran Irigasi dan Jalan Ekspansi dari Bendung Tingal terfasilitasi sampai proses Appraisal dar tanah yang terdampak dari tol dan saluran dan Jalan Ekspansi.</p>		Temanggung.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)		1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup					
				Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	60,50 %	100 %	Dokumen RPPLH belum di Perda-kan sedangkan tindaklanjutnya adanya fasilitasi penyusunan Naskah Akademis RPPLH oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 ini Belum terupdatenya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Jasa Ekosistem, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan program kegiatan yang dilaksanakan. Dokumen D3TLH terakhir disusun tahun 2017, dan idealnya diperbarui setelah lima tahun (2022).	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %			
				a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	100 %	100 %			
				1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 1 Dokumen	DIKPLHD merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti Nirwasita Tantra tetapi dalam pelaksanaan tidak ada dukungan anggaran untuk mengikuti kegiatan tersebut	Mengikuti kegiatan tersebut dengan fasilitas yang ada	
				2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
				Indeks Kualitas Air	46,00%	52,22%	Lokasi Sampling dilaksanakan di : a. rogo Hulu (Mata Air Jumprit, Ngadirejo) progo Tengah (Parakan Kauman, Parakan	1. Pembinaan dan penyuluhan berkaitan dengan pengelolaan limbah bagi	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>b. Pprogo Hilir (Jengkiling, Kandangan)</p> <p>c. Jambe Hulu (Losari, Tlogomulyo)</p> <p>d. Jambe Tengah (Legoksari, Tlogomulyo)</p> <p>e. Jambe Hilir (Sroyo, Temanggung)</p> <p>f. Pacar Hulu (Pagersari, Tlogomulyo)</p> <p>g. Aacar Tengah (Brojolan, Temanggung)</p> <p>h. Pacar Hilir (Kertosari, Temanggung),</p> <p>dengan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Usaha dan/atau kegiatan dalam Pengelolaan Limbah Cair Domestik dan Limbah Cair Industri 2. Kurangnya sarana dan prasarana unit pengolahan limbah 	<p>masyarakat, usaha dan/atau kegiatan</p> <p>2. Penambahan sarana dan prasarana unit pengolahan limbah</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Indeks Kualitas Udara	85,50%	83,82%	<p>Lokasi sampling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampling Padat Penduduk (Parakan Kauman, Parakan • Sampling Industri (Nguwet, Kranggan) • Sampling Perkantoran (Setda Kab.Temanggung) • Sampling Padat Lalu Lintas (Maron, Temanggung) <p>Dari hasil sampling terjadi peningkatan kadar pencemar di beberapa lokasi titik sampel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kadar Pencemaran Nox pada titik sampel Padat Lalu lintas (Maron, Temanggung), Titik Sampel Industri (Nguwet, Kranggan 2. Peningkatan Kadar Sox sampel Padat Lalu lintas (Maron, Temanggung), sampel Perkantoran (Setda kab.Temanggung) 	Evaluasi ketinggian dan arah shelter alat penangkap sumber pencemar pada pemasangan alat uji kualitas udara	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan akan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	Indeks kualitas air 46% dengan lokasi sampling: Progo Hulu (Mata Air Jumprit, Ngadirejo) Progo Tengah (Parakan Kauman, Parakan) Progo Hilir (Jengkiling, Kandangan) Jambe Hulu (Losari, Tlogomulyo) Jambe Tengah (Legoksari, Tlogomulyo)	Indeks kualitas air 52,22% dengan lokasi sampling: Progo Hulu (Mata Air Jumprit, Ngadirejo) Progo Tengah (Parakan Kauman, Parakan) Progo Hilir (Jengkiling, Kandangan) Jambe Hulu (Losari, Tlogomulyo) Jambe Tengah (Legoksari, Tlogomulyo)	1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Usaha dan/atau kegiatan dalam Pengelolaan Limbah Cair Domestik dan Limbah Cair Industri 2. Kurangnya sarana dan prasarana unit pengolahan limbah	1. Pembinaan dan penyuluhan berkaitan dengan pengelolaan limbah bagi masyarakat, usaha dan/atau kegiatan 2. Penambahan sarana dan prasarana unit pengolahan limbah	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jambe Hilir (Sroyo, Temanggung) Pacar Hulu (Pagersari, Tlogomulyo)	Jambe Hilir (Sroyo, Temanggung) Pacar Hulu (Pagersari, Tlogomulyo)			
					Indeks kualitas udara 85,50 Dengan lokasi sampling <ul style="list-style-type: none"> • Sampling Padat Penduduk (Parakan Kauman, Parakan • Sampling Industri (Nguwet, Kranggan) • Sampling Perkantoran (Setda Kab.Temanggung) • Sampling Padat Lalu Lintas (Maron, Temanggung) 	Indeks kualitas udara 83,82 dengan Lokasi sampling <ul style="list-style-type: none"> • Padat Penduduk (Parakan Kauman, Parakan • Sampling Industri (Nguwet, Kranggan) • Sampling Perkantoran (Setda Kab. Temanggung) • Sampling Padat Lalu Lintas (Maron, Temanggung) 	Terjadi Peningkatan kadar pencemar di beberapa titik sampel uji kualitas udara <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kadar Pencemaran Nox pada titik sampel Padat Lalu lintas (Maron, Temanggung), Titik Sampel Industri (Nguwet, Kranggan) • Peningkatan Kadar Sox sampel Padat Lalu lintas (Maron, Temanggung), sampel Perkantoran (Setda kab.Temanggung) 	Evaluasi ketinggian dan arah shelter alat penangkap sumber pencemar pada pemasangan alat uji kualitas udara	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	<p>Terlaksananya Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup yang meliputi kegiatan pengujian kualitas air permukaan, air limbah, air bersih dan udara dan pengadaan bahan kimia.</p> <p>Dokumen Sistem Mutu Laboratorium yang meliputi metode pengujian, jaminan mutu, dan validitas hasil uji yang dilaksanakan selama 12 bulan</p>	<p>Terlaksananya Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup yang meliputi kegiatan pengujian kualitas air permukaan, air limbah, air bersih dan udara dan pengadaan bahan kimia.</p> <p>Dokumen Sistem Mutu Laboratorium yang meliputi metode pengujian, jaminan mutu, dan validitas hasil uji yang dilaksanakan selama 12 bulan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM analis laboratorium 2. Kurangnya kompetensi SDM laboratorium 3. Keterbatasan anggaran operasional laboratorium 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan SDM analis laboratorium sebanyak 2 orang pada tahun 2022 2. Mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi personel laboratorium melalui webinar, bimtek, dan studi banding 3. Melakukan evaluasi dan menentukan skala prioritas untuk kebutuhan laboratorium, kemudian melakukan pengusulan anggaran di tahun berikutnya 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya gerakan konservasi tanah dan air berkelanjutan di 54 desa yang tersebar di 10 kecamatan	Gerakan konservasi terlaksana di 64 desa di 10 kecamatan	1. Jenis tanaman konservasi kurang diminati masyarakat 2. Koordinasi dan peran serta masyarakat masih minim 3. Jenis tanaman yang tidak cocok dengan lokasi sasaran	1. Bibit tanaman yang didistribusikan dikombinasi dengan tanaman produktif 2. Sosialisasi tentang pentingnya konservasi secara luas 3. Identifikasi kebutuhan bibit dan pemetaan lokasi penanaman	
				3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)					
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74,33	74,33	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya tutupan lahan, masih fokus hanya pada keuntungan nilai ekonomi semata	Memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	0,067 %	1,75 %	Upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung tahun 2022 seluas 180,30 Ha dari luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung sebesar 10.280,46 Ha, dengan permasalahan diantaranya Diperlukan dana/anggaran yang cukup besar untuk melakukan kegiatan penanganan lahan kritis bekas lahan kritis bekas galian c di Desa Kwadungan Gunung, selain itu kegiatan konservasi tanah dan air berkelanjutan bibitnya murni hanya mengandalkan pada bantuan CSR	Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta, Organisasi Masyarakat pemerintahan, maupun masyarakat umum, selain itu adanya edukasi sejak dini atau menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang arti pentingnya kegiatan konservasi	
				Cakupan RTH Publik	0,07 %	1,10 %	1. Keterbatasan lahan RTH 2. Keterbatasan anggaran untuk penyediaan RTH Publik / taman	pengelolaan RTH Publik yang sudah ada.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3. Pengelolaan dan penataan terbatas 4. Jumlah SDM yang terbatas.		
				a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Terbayarnya honor 3 tenaga untuk pemeliharaan Kebun Ngipik milik Pemda di Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat selama 12 Bulan dengan luas lahan sebesar 5,07 Ha	Terbayarnya honor 3 tenaga untuk pemeliharaan Kebun Ngipik milik Pemda di Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat selama 12 Bulan dengan luas lahan sebesar 5,07Ha	Tidak adanya anggaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi tanaman di kebun tersebut yang meliputi penyediaan bibit tanaman baru, pembelian pupuk dan pembasmi hama pada tanaman	Penyediaan alokasi anggaran	
				2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpeliharanya taman kota di Kabupaten Temanggung seluas 7,96 Ha yang terdiri dari 20 Taman Kota, 2 Huta Kota, 8 Pulau Jalan, 16 Jalur Hijau	Terpeliharanya taman kota di Kabupaten Temanggung seluas 7,96 Ha yang terdiri dari 20 Taman Kota, 2 Huta Kota, 8 Pulau Jalan, 16 Jalur Hijau	Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan pertamanan diantaranya tidak tersedianya kendaraan Skylift, mesin potong rumput, chainsew dan minimnya alat keselamatan tenaga pertamanan	Pelaksanaan kegiatan pertamanan dilakukan dengan peralatan yang ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)					
				Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	90,00 %	100 %	Peraturan baru keluar tahun 2021 yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK turunannya, sehingga Kegiatan dan/atau Usaha masih menyesuaikan dengan peraturan baru tersebut	Mendorong Usaha dan/atau Kegiatan untuk membuat teknis atau persetujuan teknis limbah B3	
				a. Penyimpanan Sementara Limbah B3	100 %	100 %			
				1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 kegiatan Terlaksananya fasilitasi penyusunan rincian teknis pengelolaan limbah B3 bagi usaha/kegiatan di Kabupaten Temanggung, Dokumen Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 RSIA	1 kegiatan Terlaksananya fasilitasi penyusunan rincian teknis pengelolaan limbah B3 bagi usaha/kegiatan di Kabupaten Temanggung. Dokumen Rincian Teknis Pengelolaan	Masih rendahnya pengajuan dokumen rincian teknis pengelolaan limbah B3	Pembinaan untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK turunannya kepada Usaha dan atau kegiatan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					HENDRATA MULIA	Limbah B3 RSIA HENDRATA MULIA			
				5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	90,00 %	100 %	Dikarenakan keterbatasan anggaran maka Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan baru bisa di laksanakan pada 50 Usaha/Kegiatan	Diperlukan dukungan anggaran untuk kegiatan Pembinaan dan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan	
				a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan/Usaha di Kabupaten Temanggung sebanyak 50 Kegiatan/ usaha	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan/ Usaha di Kabupaten Temanggung sebanyak 50 Kegiatan/ usaha	Dikarenakan keterbatasan anggaran maka Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan baru bisa di laksanakan pada 50 Usaha/Kegiatan	Diperlukan dukungan anggaran untuk kegiatan Pembinaan dan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan	
				6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
				Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	26,75%	27,87%	1. Masih kurangnya kesadaran sekolah akan perlunya penerapan perilaku ramah lingkungan di lingkungan sekolahnya. 2. Kurangnya SDM di sekolah untuk mengampu kegiatan Adiwiyata serta keterbatasan	1. Sekolah yang sudah mendapat predikat Adiwiyata bisa mengupgrade status sekolah adiwiyata dan bagi sekolah yang akan maju ke tingkat Adiwiyata Mandiri untuk membina sekolah yang	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>anggaran sekolah untuk menjalankan program adiwiyata.</p> <p>3. Keterbatasan dukungan Anggaran dari pemerintah untuk fasilitasi pelaksanaan kegiatan adiwiyata.</p>	<p>ada di Kabupaten Temanggung.</p> <p>2. Sekolah diharapkan dapat mengalokasikan sebagian anggarannya untuk pelaksanaan Program Adiwiyata.</p>	
				<p>7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p>					
				<p>Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup</p>	66,67 %	84,62 %	<p>Penghargaan Kalpataru yang diusulkan untuk penerima penghargaan pada tingkat Provinsi, belum memenuhi syarat dan kriteria. Sehingga belum mendapatkan penghargaan kalpataru di tingkat provinsi.</p>	<p>1. Individu/Instansi / Perusahaan yang sudah dapat penghargaan bisa mengikuti seleksi penghargaan ketinggian yang lebih tinggi</p> <p>2. meningkatkan pembinaan dan menyediakan sarana untuk mengapresiasi penggiat-</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								penggiat lingkungan hidup, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup	
				a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan Sekolah Adiwiyata 10 sekolah	Cakupan Sekolah Adiwiyata 4 Sekolah	Karena hanya 4 sekolah yang sanggup mengikuti dan memenuhi kriteria sekolah Adiwiyata pada tahun 2022	Dilakukan koordinasi dan aktif melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah untuk dapat melakukan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)	
					Terlaksananya Program Kampung Iklim (PROKLIM) 1 lokasi	Terlaksananya Program Kampung Iklim (PROKLIM) 2 lokasi			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					
				Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup	
				9. Program Pengelolaan Persampahan					
			SE Bupati Nomor 660.1/002 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan	Persentase sampah yang tertangani	36,70 %	59,06 %	Jumlah sampah tertangani di Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebanyak 86.263,87 Ton dari jumlah timbulan sampah di Kabupaten Temanggung sebesar	5. Sosialisasi hingga tingkat desa dan meningkatkan peran serta masyarakat beserta lembaga pengelolaan sampah di	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sampah di Tingkat Desa se-Kabupaten Temanggung				<p>146.050,37 ton adapun permasalahannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua desa memahami SE Bupati tersebut 2. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah 3. Kurangnya tenaga pelayanan/kebersihan 4. Umur TPA semakin berkurang karena timbulan sampah yang bertambah sedangkan luasan TPA tetap 	<p>tingkat kecamatan, desa, hingga rumah tangga</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 7. Penambahan tenaga pelayanan /kebersihan 8. Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan menegaskan bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA 	
				Cakupan layanan persampahan	52,00 %	61,25 %	<p>Cakupan layanan persampahan tahun 2022 sebanyak 177 Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung dari 289 Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung adapun kendalanya adalah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tanah untuk TPA/TPST Wil.Utara agar dapat menangani sampah dengan maksimal 2. Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak Tempuh desa-desa di wilayah Temanggung bagian Utara ke TPA Sanggrahan yang jauh 2. Kondisi geografi desa di Kabupaten Temanggung yang beragam 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Koordinasi dan kerjasama antardesa untuk penentuan tempat pengumpulan sampah sementara di tingkat kecamatan atau antardesa di suatu titik yang dapat dijangkau kendaraan pengangkut sampah 	
				a. Kegiatan Pengelolaan Sampah	100 %	100 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<p>Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota 12 bulan</p> <p>Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12 bulan</p> <p>Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 12 bulan</p>	<p>Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota 12 bulan</p> <p>Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12 bulan</p> <p>Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 12 bulan</p>	Sarana dan Prasarana operasional persampahan sudah tidak memadai	<p>1. Peremajaan kendaraan operasional persampahan</p> <p>2. Pengadaan alat perbengkelan dan SDM yang mumpuni</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	<p>Terlaksananya koordinasi dengan desa terkait pengelolaan sampah desa sebanyak 30 desa</p> <p>Penambahan jumlah cakupan pelayanan sebanyak 15 desa dan desa bebas sampah 1 desa</p> <p>Terlaksananya koordinasi terkait penyusunan rancangan regulasi persampahan sebanyak 2 regulasi</p>	<p>Terlaksananya koordinasi dengan desa terkait pengelolaan sampah desa sebanyak 30 desa</p> <p>Penambahan jumlah cakupan pelayanan sebanyak 15 desa dan desa bebas sampah 1 desa</p> <p>Terlaksananya koordinasi terkait penyusunan rancangan regulasi persampahan sebanyak 2 regulasi</p>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari lingkungan hidup sebanyak 3 kegiatan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari lingkungan hidup 3 kegiatan			
					Peningkatan Kapasitas Gerakan Masyarakat Pengelolaan Persampahan Dewan Persampahan dan Fasilitator Persampahan Kecamatan 1 Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Gerakan Masyarakat Pengelolaan Persampahan Dewan Persampahan dan Fasilitator Persampahan Kecamatan 1 Kegiatan	1. Kinerja kurang maksimal 2. Kurangnya fasilitasi untuk pendamping/ FPK	Evaluasi kinerja dan penggantian personil yang peduli akan lingkungan	
				3) Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupat en/Kota	Terlaksananya pemeliharaan alat berat, kendaraan IPLT dan operasional UPT Pengelolaan TPA-IPLT Sanggrahan selama 12 bulan	Terlaksananya pemeliharaan alat berat, kendaraan IPLT dan operasional UPT Pengelolaan TPA-IPLT Sanggrahan selama 12 bulan	Sarana dan Prasarana sudah tidak memadai untuk operasional	Pengadaan Saprass	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		1. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
				Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97,3%	99,997%	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk update data kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi tentang adminduk • inovasi pelayanan loket desa permata & jempol sejati, Bundaku, mahameru dan Berkibar 	
				Persentase Kepemilikan KTP el	98,6%	99,29%	wajib KTP tidak bisa hadir untuk perekaman ktp karena jam sekolah, usia lanjut/ jompo, sakit, OGDJ, karena di luar daerah	<ul style="list-style-type: none"> • inovasi pelayanan pelayanan Ketapel 3323, Jempol Sejati • jemput bola perekaman sampai ke Desa/rumah untuk yang berkebutuhan khusus 	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	67%	49,77%	<ul style="list-style-type: none"> • migrasi data dari siak daerah ke siak terousat sehingga realisasi capaian turun 	1) koordinasi dan bersurat dengan dirjen adminduk kaitannya padandata KIA	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<ul style="list-style-type: none"> • Kurang pedulinya masyarakat tentang arti penting KIA. 	2) sosialisasi pemanfaatan KIA 3) inovasi pelayanan KIA Joss, BUNDAKU dan Desa PERMATA	
				Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • sudah pindah tapi tidak mengurus surat pindah • pengajuan pindah datang tapi blm mengajukan pindah dari daerah asal • alamat tujuan pindah tidak lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pelayanan adpinduk • verifikasi berkas pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku • koordinasi dengan Dukcapil untuk permintaan bantuan pindah dari daerah asal 	
				a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	12 bulan di 20 Kecamatan	pelayanan adminduk di 20 kecamatan	keterbatasan SDM sebagai operator di kecamatan karena pelayanan di adminduk kecamatan	melaksanakan bimtek untuk operator kecamatan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					tersedianya data penduduk yang valid di 19 desa	tersedianya data penduduk yang valid	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk update data kependudukan	inovasi pelayanan Desa Permata dan Jempol Sejati	
				1) Sub kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	terlaksananya penerbitan KIA di Kab temanggung 25.000 keping	terlaksananya penerbitan KIA di Kab temanggung 26.329 keping	kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat KIA	inovasi pelayanan KIA Joss, BUNDAKU dan Desa PERMATA	
				2. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil					
				Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	73%	73,74%	<ul style="list-style-type: none"> kurangnya kesadaran masyarakat usia di atas 40 tahun untuk mendaftarkan akta kelahiran 	<ul style="list-style-type: none"> jemput bola pelayanan ke desa inovasi pelayanan loket desa permata & jempol sejati pelayanan satu hari jadi di loket Dindukcapil 	
				Persentase penerbitan akte kematian	96.5%	100%	kesadaran masyarakat/ahli waris untuk melaporan peristiwa kependudukan (kematian)	<ul style="list-style-type: none"> penerapan buku pokok pemakaman di Desa jemput bola pelayanan ke desa inovasi pelayanan loket desa permata & jempol sejati 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • persyaratan Persyaratan belum lengkap • pendaftaran perkawinan kurang umur harus dengan putusan pengadilan • Pendaftaran beda agama harus putusan pengadilan 	verifikasi lebih teliti berkas persyaratan sesuai aturan perundang-undangan	
				Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • persyaratan Persyaratan belum lengkap • putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga harus menuunggu masa tenggang 	verifikasi lebih teliti berkas persyaratan sesuai aturan perundang-undangan	
				a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	94,85%			
				1) Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	terbitnya 100 akta perkawinan non muslim	terbitnya 137 akta perceraian non muslim	jumlah pencatatan perkawinan sesuai dengan jumlah pemberkatan perkawinan yang di daftarkan di Dindukcapil	melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemuka agama non muslim di Kabupten Temanggung untuk memastikan setiap pemberkatan yang dilaksanakan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					terbitnya 45 akta perceraian non muslim	terbitnya 24 akta perceraian non muslim	jumlah pencatatan perceraian tergantung verifikasi lebih teliti berkas persyaratan sesuai aturan perundang-undangan	inovasi pelayanan BERBIBAR bekerja sama dengan PN (Inovasi BERKIBAR)	
				2) Sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	terbitnya 18.500 akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait	terbitnya 19.954 akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait	kurangnya kesadaran masyarakat usia di atas 40 tahun untuk mendaftarkan akta kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> • jemput bola pelayanan ke desa • inovasi pelayanan loket desa permata & jempol sejati • pelayanan satu hari jadi di loket Dindukcapil 	
					terbitnya 4.500 akta kematian bekerjasama dengan instansi terkait	terbitnya 5.676 akta kematian bekerjasama dengan instansi terkait	kesadaran masyarakat/ahli waris untuk melaporkan peristiwa kependudukan (kematian)	<ul style="list-style-type: none"> • penerapan buku pokok pemakaman di Desa • jemput bola pelayanan ke desa • inovasi pelayanan loket desa permata & jempol sejati 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
				Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	20%	86.67%	<ul style="list-style-type: none"> • ijin hak akses dan pemanfaatan data sampai ke pusat (dirjen adminduk) • aplikasi data warehouse data terpusat 	mempertahankan konsistensi kerjasanma dengan stekholder pengguna	
				Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	70%	83.33%	kurangnya SDM di Desa untuk mendukung inovasi pelayanan adminduk	fasiltasi bimtek pelayanan adminduk	
				a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan dengan 12 OPD	terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan 26 UPD	<ul style="list-style-type: none"> • ijin hak akses pemanfataan data sampai ke pusat • penggunaan webservice dan ewbportal yang belum memenuhi kebutuhan OPD/BHI 	<ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi dan FGD dengan OPD/BHI tentang pemanfaatan data kependudukan • segera menindaklanjuti permohonan pemanfaatan data 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								dari OPD/BHI ke dirjen adminduk <ul style="list-style-type: none"> • rakortek dengan OPD/BHI untuk tindak lanjut pemanfaatan data 	
					tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat selama 12 bulan	tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat (26 OPD)	data yang tersaji hanya data yang sudah dishare oleh pusat	memberikan data kepada masyarakat sesuai data yang kita punya	
					terselenggara inovasi dan pengembangan aplikasi pelayanan kependudukan dan capil sebanyak 3 jenis yaitu Jempol ehati KIA Joss Ketapel 3323	terselenggara inovasi dan pengembangan aplikasi pelayanan kependudukan dan capil	dengan adanya SIAK terpusat maka aplikasi yang sudah ada harus di ganti dengan aplikasi layanan yang baru tidak ada anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • koordiansi dengan dirjen adminduk kaitannya pembuatan aplikasi baru • pengdaan aplikasi pelayanan sesuai dengan ketentuan dari dirjen adminduk tahun 2023 	
				b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	terlaksananya pelayanan adminduk selama 12 bulan	terlaksananya pelayanan adminduk selama 12 bulan - jaringan - administrasi - sarpras	<ul style="list-style-type: none"> permasalahan jaringan dan kerusakan peralatan aplikasi bermasalah mati lampu 	tersedianya Admistrasi Data Base yang kompten dan mencukupi untuk mengatasi permasalahan	
					terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan Pemeliharaan KTP el selama 12 bulan	terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan Pemeliharaan KTP el selama 12 bulan	<ul style="list-style-type: none"> spek peralatan sudah tidak suport dengan aplikasi terbaru pearalatan pendukung sudah tidak dapat diperbaiki 	<ul style="list-style-type: none"> memaksimalkan perbaikan sesuai kebutuhan pelayanan 	
					tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat selama 12 bulan	tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat selama 12 bulan	update data terbaru terlambatb karena belum tersedianya data yang akan di upload	setiap ada pembaharuan data langsung diupload dan secara aktif koordinasi kaitannya data yang akan diupload	
					tersedianya peralatan mobile KTP el	tersedianya peralatan mobile KTP el	<ul style="list-style-type: none"> umur manfaat peralatan KTP terbatas spek peralatan KTP lama tidak suprot dengan apliksi terbaru 	melaksanakan pengadaan peralatan KTP-el dengan spek yang sesuai	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1. Program Penataan Desa					
				Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	35%	30,45%	Sebagian Pemerintah Desa tdk update isian data profil Desa sesuai kondisi yg ada. Hal ini dikarenakan apabila setelah diupdate, kemudian klasifikasi Desa berubah menjadi swasembada, Pemerintah Desa beranggapan bahwa mereka harus melakukan perubahan pada SOTK. karena Desa dg klasifikasi swasembada harus memiliki 3 Kasi dan 3 Kaur.	dilakukan pendampingan dan pembinaan dalam update pengisian data profil desa. Khususnya bagi desa yg masih berklasifikasi Swadaya	
				Persentase Desa yang Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	35%	43,61%	Karena Pandemi Covid kegiatan Lomba Desa dan Desa Binaan ditiadakan baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten sehingga banyak desa yang tidak melakukan isian data Evaluasi Perkembangan Data	pendampingan penginputan Data	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	25%	25%			
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Fasilitasi sarana dan prasarana desa	Fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang berupa, cek lokasi dengan mengukur volume untuk persiapan penyusunan RAB, input RKO, sosialisasi, pendampingan dalam pelaksanaan dari pembukaan dan penutupan di 5 desa TMMD	Fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang berupa, cek lokasi dengan mengukur volume untuk persiapan penyusunan RAB, input RKO, sosialisasi, pendampingan dalam pelaksanaan pembukaan dan penutupan di 5 desa TMMD	- Pelaksanaan TMMD Tahap 3 dilaksanakan pada musim hujan sehingga pelaksanaan TMMD Sengkuyung tidak maksimal	Memberikan motivasi dan semangat pada Desa agar semangat untuk mengoptimalkan kerja bhakti di pagi hari supaya pekerjaan bisa selesai sesuai waktu yang telah ditentukan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1. Desa Wonotirto Kec. Bulu 2. Desa Ngropoh Kec. Kranggan 3. Desa Lowungu Kec. Bejen Karya bakti: 1. Desa Pringsurat Kec. Pringsurat 2. Desa Tlogopucang Kec. Kandangan	1. Desa Wonotirto Kec. Bulu 2. Desa Ngropoh Kec. Kranggan 3. Desa Lowungu Kec. Bejen Karya bakti: 1. Desa Pringsurat Kec. Pringsurat 2. Desa Tlogopucang Kec. Kandangan			
				2. Program Peningkatan Kerjasama Desa					
				Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	100%	100%	Rendahnya kualitas SDM kelembagaan BKAD, Minimnya biaya operasional untuk kegiatan administrasi dan operasional kelembagaan, kurangnya kesadaran aparat	Koordinasi dengan desa dan OPD terkait (Bappeda dan kecamatan)	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan kerja sama antar desa, Kurangnya koordinasi antar OPD dalam pengembangan kawasan perdesaan		
				a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	- Fasilitasi Kersajama Desa di 18 Desa di Kecamatan Bansari dan Kranggan, - Fasilitasi Kerjasama Desa untuk pembangunan jembatan di 2 Desa (Margolelo, Blimbing) Kec. Kandangan	- Fasilitasi Kersajama Desa dalam pembentukan Kawasan Perdesaan di 18 Desa di Kecamatan Bansari dan Kranggan, - Fasilitasi Kerjasama Desa untuk pembangunan jembatan di 2 Desa (Margolelo, Blimbing)	Desa belum memhami mekanisme kerjasama antar desa/pihak ketiga	- Fasilitasi peningkatan kapasitas desa dalam memahami bidang/ruanglingkup yang dapat dikerjasamakan baik antar desa/pihak ketiga - Memberikan pemahaman dalam penyusunan Permakades, Rancangan Permakades/ Perjanjian dengan pihak ketiga yang telah disusun dan wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3. Program Administrasi Pemerintahan Desa					
			Perbub nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	266 desa	266 desa	Desa masih ragu dengan pagu indikatif dan adanya informasi dari Provinsi yang sering terlambat	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan surat tentang penyusunan RKPDes - Sosialisasi RKPDe - Pendampingan penyusunan RKPDes 	
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	80%	100%	Desa masih ragu dengan pagu indikatif dan adanya informasi dari Provinsi yang sering terlambat	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan surat tentang penyusunan APBDes - Sosialisasi APBDes - Pendampingan penyusunan APBDes 	APBD
				Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	80%	100%	Kurang tertibnya desa dalam administrasi pertanggung jawaban keuangan	Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan	
			Perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang PKD	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	100%	100%	1) Kurangnya komunikasi, koordinasi dan transparansi antara PKPKD dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa	1) Pendampingan dan pembinaan kepada desa untuk segera menyelesaikan APBDes tepat waktu	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2) Faktor cuaca yang berpengaruh pada saat pembangunan dilaksanakan 3) Penentuan status lokasi yang belum jelas asal – usulnya 4) Masuknya Dana ke RKD di akhir tahun	2) Penerbitan surat kepada desa mengingatkan batas waktu penyelesaian APBDes	
			Perbup nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	83%	100%	Permasalahan: pemerintah desa dlm menyusun lppd dan lkppd masih sering copy paste lppd dan lkppd tahun sebelumnya.	Upaya mengatasi masalah: dinpermades mengirimkan surat perihal tata cara penyusunan lppd dan lkppd yg berisi batas waktu, dan sistematika penyusunan lppd dan lkppd sebagai pedoman bagi desa.	
			Perbup nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	10%	0%	Tidak ada pelanggaran disiplin kepala Desa yang berdampak pada proses keputusan hukum tetap	1. Dibentuk tim penegakan disiplin kades & perangkat desa yg terdiri dari dinpermades, inspektorat, bag hukum dan bag. Pemerintahan setda.	sosialisasi, pembinaan, koordinasi dan penegakan disiplin

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								2. dilakukan kegiatan pembinaan disiplin kades n perangkat desa. 3. Dibuat laporan aduan masy terkait kinerja pemerintah desa 4. Sosialisasi perbup 40/2022 ttg disiplin kades & perangkat desa	
			Perbup nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa	Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	83%	100%	Pengelola aset belum memahami alur tentang pencatatan, Ketidاكلancaran dalam pembuatan laporan akhir tahun, Laporan Aset belum rutin dilakukan tiap bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Bintek - Membuka konsultasi dan pendampingan - Fasilitasi 	
				a. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %			
				1)Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kegiatan penyusunan RKPDes diawali dengan sosialisasi,	Kegiatan penyusunan RKPDes diawal dengan sosialisasi,	Tim Penyusun yang ada di desa belum semua memahami sepenuhnya tentang tata cara penyusunan RKPDes	Memberikan bimbingan dan arahan serta dibuatkan panduan berupa Tahapan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					pendampingan dalam penyusunan dengan menyampaikan panduan dan pedoman penyusunan serta pemantauan pelaksanaan penyusunan sehingga Perdes tentang RPKDes dapat diselesaikan tepat waktu di 266 desa	pendampingan dalam penyusunan dengan menyampaikan panduan dan pedoman penyusunan serta pemantauan pelaksanaan penyusunan sehingga Perdes tentang RPKDes dapat diselesaikan tepat waktu di 266 desa		penyusunan sesuai Perbup tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa	
				2) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi pengelolaan keuangan desa 4 kali - Penyusunan 3 Perbup (Perbup Pedoman Penyusunan APBDes, Perbup Tata cara pengalokasian dan pengelolaan ADD, BHP, 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi pengelolaan keuangan desa 4 kali - Penyusunan 3 Perbup (Perbup Pedoman Penyusunan APBDes, Perbup Tata cara pengalokasian dan pengelolaan ADD, BHP, 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua PPKD memahami tentang Pengelolaan keuangan desa - tugas dan pekerjaan yang tertumpu pada salah satu orang utamanya yang menguasai IT 	-Peningkatan kapasitas SDM PPKD dan monitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan desa	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BHR, Perbup Tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa - Bimbingan Teknis Kepala Desa, 266 Desa	BHR, Perbup Tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa - Bimbingan Teknis Kepala Desa, 266 Desa			
				3) Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	- Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa - Sosialisasi/Santiaji - Penerbitan SK Biaya Pilkades - Penerbitan SK Wilayah Pemilihan - Monitoring/Pengawasan Penetapan DPS, DP Tambahan dan DPT - Monitoring pendaftaran - Monitoring Uji Kompetensi	- Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa - Sosialisasi/Santiaji - Penerbitan SK Biaya Pilkades - Penerbitan SK Wilayah Pemilihan - Monitoring/Pengawasan Penetapan DPS, DP Tambahan dan DPT - Monitoring pendaftaran	Kendala : aturan 500 dpt/tps Masalah : Biaya pelaksanaan membengkak, tidak bisa dilakukan anggaran perubahan.	Solusii : Mengatur TPS sebaik mungkin agar pelaksanaan menyesuaikan aturan kondisi darurat covid-19	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Kampanye dan Hari Tenang - Monitoring Pelaksanaan Pilkades 266 desa - Pembekalan - Target 37 Kades - Waktu Pembekalan kelas 2 hari - Pembekalan lapangan 1 hari 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Uji Kompetensi - Monitoring Kampanye dan Hari Tenang - Monitoring Pelaksanaan Pilkades 266 desa - Pembekalan Realisasi 37 Kades - Waktu Pembekalan kelas 2 hari - Pembekalan lapangan 1 hari 			
				4) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	20 kecamatan	257 Bumdes dengan klasifikasi Dasar : 6 Bumdes Tumbuh : 156 Bumdes Berkembang : 37 Bumdes Maju : 3 Bumdes 244 Bumdes dalam proses pengajuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola BUMDesa tidak memahami dan mempedomani Peraturan yang berlaku. - Kurangnya Kapasitas SDM Pengelola BUMDesa dalam menggali potensi desa masing-masing dalam upaya mengembangkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUM Desa. - Peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa melalui bimbingan teknis. - Membuat surat permintaan laporan pertanggung- 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Badan Hukum 13 Bumdes belum mengajukan Badan Hukum 48 Bumdes sudah berbadan hukum 196 Bumdes menunggu terbitnya sertifikat badan hukum	dan meningkatkan usaha BUM Desa. - Kurangnya peran dan kepedulian pemerintah Desa dalam pengembangan usaha BUMDesa dan penetapan regulasi BUMDesa.	jawaban pengelolaan BUM Desa. - Memfasilitasi dan memantau perkembangan pendaftaran badan hukum BUM Desa.	
				5) Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terisinya kekosongan perangkat desa sebanyak 125	120 perangkat desa	kekosongan perangkat pada bulan desember baru bisa diisi pada bulan januari	pendataan dan usulan anggaran tahun berikutnya	
				5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum ADAT					
				Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	30%	100%	Kurangnya peran pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masing-masing unsur lembaga yang ada di	- Sosialisasi - Pendampingan - Pembinaan - Peningkatan kapasitas	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							desa/kelurahan, Masih minimnya anggaran untuk fasilitas pendampingan unsur lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, Masih kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi bagi unsur lembaga kemasyarakatan desa yang ada		
			<ul style="list-style-type: none"> ○PERDA nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes ○Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUM Desa Bersama 	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	29% dari 257 Bumdes	96,62% dari 257 Bumdes	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola BUMDesa tidak memahami dan mempedomani Peraturan yang berlaku. - Kurangnya Kapasitas SDM Pengelola BUMDesa dalam menggali potensi desa masing-masing dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan usaha BUM Desa. - Kurangnya peran dan kepedulian Pemerintah Desa dalam pengembangan usaha BUMDesa dan penetapan regulasi BUMDesa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUM Desa. - Peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa melalui bimbingan teknis. - Membuat surat permintaan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa. - Memfasilitasi dan memantau perkembangan pendaftaran badan hukum BUM Desa. 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dengan daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa pada 20 kecamatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa 20 kecamatan (266 LKD)	Belum semua desa menyusun dan menetapkan Perdes 266 LKD	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang LKD sebagai dasar penyusunan peraturan dibawahnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40 kelompok	40 kelompok	usaha ekonomi masyarakat di desa belum ter monitor secara intens	Fokus untuk menyatukan semua usaha ekonomi di desa dalam Bumdes	
				3) Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi	a. Terlaksananya fasilitasi Rapat Koordinasi kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna. b. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna. c. Terlaksananya bintek pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. d. Tersedianya data kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna 20 kecamatan	a. Terlaksananya fasilitasi Rapat Koordinasi kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna. b. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna. c. Terlaksananya bintek pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. d. Tersedianya data kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna 55 kelompok TTG pada 20 kecamatan	kurangnya penghargaan atau reward hasil TTG desa	- monitoring - pembinaan - usulan penghargaan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK; - terlaksananya Fasilitasi kegiatan TP. PKK Kabupaten Temanggung di 289 desa/ kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK; dan - terlaksananya Fasilitasi kegiatan TP. PKK Kabupaten Temanggung di 289 desa/ kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kader PKK juga bekerja, sehingga melaksanakan tugas sbg Kader di sela2 pekerjaan utama. 2 1 orang Kader merangkap beberapa jenis Kader, sehingga ketika ada agenda bersamaan tidak dapat maksimal. 3 Sarpras utk Kader belum memadai (Laptop, Printer) adanya di Kantor Desa, sedangkan beberapa Laporan skrg dilaporkan melalui aplikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Berkoordinasi dengan Pemdes utk dapat mensupport Sarpras PKK. 2 Mengikutsertakan pelatihan bagi kader PKK baru. 3 Memaksimalkan penggunaan media elektronik utk Sosialisasi, Konsultasi, dan Koordinasi 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DPPPAPKB		1. Program Pengendalian Penduduk dan informasi Keliarga					
				persentase penyediaandata mikro keluarga di desa/kelurahan	100 %	100 %	Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT	aplikasi simantap kon KB	
				persentase pasangan usia subur yang ingin ber -KB tidak terpenuhi/unmetneed	9,51%	11,45%	1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB Baru 76,58 % 2. Rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB) 3. Ada bagian PUS yang Menginginkan anak lagi/tambah anak 4. Karena salah satu PUS bertemunya bulan/tahunan	adanya inovasi berupa aplikasi SIMATAPKON-KB [Sistem Informasi Managemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana], Sehingga bisa mengetahui segegmentasi sasaran pelayanan KB	
				Persentase Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	2,05 %	2,45%	1. Karena sudah hamil duluan 2. Kemauam anak untuk segera menikah dan punya anak 3. Kemauan dan ketakutan Orang Tua untuk segera menikah anak	1. Melakukan pencegahan dan KIE tentan PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan) Melalui tatap muka tatap muka, media sosial, media cetak, media elektronik)	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								2. Melakukan dukungan teman sebaya melalui PIK Remaja dan forum anak	
				Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun (ASFR 15-19 th)	26,5 %	6,67% Penundaan Kehambilaan kepada usia anak	Data rutin tentang ASFR (angka Kelahiran) belum dapat di update secara rutin	Updating data sebagai perhitungan ASFR melalui data di Dinas Kesehatan dan Data Laporan R1 dari kader dinas DKPPPKPB	
				Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 bulan Terpenuhi dukungan manajemen kegiatan DAK non Fisik BOKB	Terpenuhinya dukungan manajemen kegiatan DAK non Fisik BOKB	adanya perubahan nomenklatur dalam SIPD, yang mana kegiatan baru dilaksanakan setelah semester 1	mengoptimalkan kegiatan dan anggaran penunjang BOKB (sinkronisasi Nomenklatur)	
				2) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Adanya Jumlah Data dan Informasi Keluarga / laporan verifikasi dan validasi keluarga beresiko stunting	Adanya Jumlah Data dan Informasi valid Keluarga/ laporan verifikasi dan validasi keluarga beresiko stunting	Kemampuan dan pemahaman kader selaku pelaksana verbal msh kurang (SDM kader) sehingga datanya masih ada yang kurang valid dan diperlukan konfirmasi ke Desa.	Mengoptimalkan pendampingan kepada kader /Sub PPKBD	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Adanya Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Adanya Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB setiap bula di 20 Kecamatan	pengiriman laporan, belum tepat waktu, sehingga berpengaruh pada kesedian data di OPD. Hal ini dikarenakan jumlah SDM di tingkat Kecamatan masih kurang.	Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi dari OPD ke tingkat Kecamatan dan Desa	
				2. Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB					
				presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	75,9 %	76,58% Kemauan Masyarakat supaya berKB	1. tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi moderen 2. PUS muda .yang menikah di usia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon	1. Melakukan pencegahan dan KIE tentang PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan) Melalui tatap muka tatap muka , media sosial, media cetak, media elektronik) 2. Melakukan dukungan teman sebaya melalu PIK Remaja dan forum anak	
				Persentase kepesertaan KB aktif	75,9%	76,58%	masih ada (23,24%)PUS belum memahami alat Kotrasepsi KB)	adanya inovasi beruNpa aplikasi SIMANTAPKON-KB Sistem Informasi Manajemen	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana], Sehingga bisa mengetahui segmentasi sasaran pelayanan KB	
				Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	45,38%	45,03%	1. Masih adanya rumor kegagalan IUD di masyarakat 2. masih adanya PUS mengikuti pelayan KB non IMKJP 3. masih ada (23,24%)PUS belum memahami alat Kotrasepsi KB	1. Melakukan KIE tentang pelayan KB MKJP melalui Kader KB Melalui tatap muka oleh petugas melalui media sosial, media cetak dan media elektronik 2. Melaksanakan pelayanan KB secara rutin di faskes dan moment strategis	
				Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	34%	33,85%	1. Desa belum menganggarkan Program Bangga Kencana secara rutin 2. Pembinaan belum dilaksanakan secara rutin oleh TIM Pokja Kampung KB tingkat kabupaten dan Kecamatan	advokasi dan refresing pengetahuan Kampung KB bagi TIM Pokja Kampung KB tingkat kabupaten dan Kecamatan.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %	100 %			
				1) Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan mitra kerja	1 kegiatan	terlaksannnya rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka advokasi program bangga kencana	Belum semua rapat koordiasi bisa difasilitasi karena keterbatasan anggran	Usulan tambahan anggaran	
				2) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai dengan kearifan budaya lokal	1 kegiatan	Ketersediannya media KIE program bangga kencana	Belum optimalnya media KIE untuk masyarakat	Mengoptimalkan distribusi bahan KIE (Leaflet, Banner, Spanduk dsbg) di Lini Lapangan dan lewat Media sosial baik media elektronik	
				3) Sub Kegiatan Promosi & KIE program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta media Luar Ruang	1 kegiatan	Promosi dan KIE program KKBPK (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Belum adanya MOU dengan Media Elektronik (TV Temanggung dan radio RT FM)	Melaksanakan Koordinasi untuk penyusunan MOU Dengan Direktur RT FM dan TV Temanggung	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Melalui Media Massa Cetak (pamflet dan spanduk) dan media Elektronik TV Temanggung (2 Kali Penayangan) dan ERTE FM (7 kali penyiaran)			
				4) Sub Kekuatan Pelaksanaan Mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok)	12 bulan	terlaksannnya rapat koordinasi program bangga kencana tingkat kabupaten sampai tingkat Kecamatan	Belum semua kegiatan lokmin dan rako , mengevauasi dan membuat rencana kegiatan	Sosialisasi tentang indikator kinerja program bangga kencana lewat rapat lengkap Dinas tingkat kabupaten oleh bidang dan penyuluh KB	
				5) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	12 bulan	Adanya kegiatan penyuluhan di balai KKBPK dan terpenuhinya sarana internet, air dan listrik	Tidak adanya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung dan kantor dari DAK dan DAU dan operasional kegiatan perkantoran (Bahan kebersihan, ATK, photocopy DLL.)	Usulan penganggaran lewat DAU	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6) Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	3 kegiatan	1. Rapat Koordinasi Audit stanting 2. Audit Stanting dengan Tim Ahli dan Tim Pakar 3. Monev	Data awal tentang stanting yang masih bias	Verivikasi dan validasi data keluarga beresiko Stunting	
				b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	100 %	100%			
				1) Sub kegiatan Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	12 bulan	Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP) Melaksanakan Penggerakan Program KKBPK selama 10 kegiatan	Kualitas SDM Kader IMP masih rendah , regulasi pembenukan IMPbelum ada	Peningkatan kapasitas kader IMP	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 bulan	Tercapainya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Belum tersedia SDM yang kompeten sehingga di kelola tenaga staf umum	1. Mengusulkan pelatihan tenaga pengelola bidang alkon dari tenaga yang ada 2. Mengusulkan tenaga yang kompeten.	
				2) Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12 bulan	Tercapainya Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1. Masih adanya Rumor kegagalan IUD di masyarakat 2. Masih adanya PUS mengikuti pelayanan KB Non-MKJP 3. Masih ada (23,42%) PUS belum memahami tentang alat kontrasepsi MKJP	Meningkatkan KIE alkon MKJP terutama alkon MOP	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Sub kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 kegiatan	1. Tersedianya Balai Penyuluhan KB 1 Unit di Kecamatan Bulu 2. Tersedianya sarana kelengkapan Balai KB di 8 Kecamatan Bulu, Tembarak, pringsurat, kranggan, ngadirejo, kandangan, bansari, gemawang	Adanya kenaikan pajak PPN dari 10% menjadi 11% sehingga menunda pembangunan Sehingga merevisi RAB	Mengikuti regulasi yang ada Penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal kontraktual	
				4) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 bulan	Terlaksananya Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Petugas RR (Programer KB di Faskes) mengalami perubahan personil	- Orentasi bagi petugas programe KB di Faskes - Optimilasi Sitem/SOP	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi	100 %	100%			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	12 bulan	terlaksanakanya kegiatan rakor pokja kampung KB dan poktan (Kelompok Kegiatan) BKR, BKL, PIK Remaja, UPPKA di kampung KB	1. Tidak semua poktan yang di bentuk berjalan 2. Regenerasi kader poktan (Kelompok kegiatan) BKR, BKL, PIK Remaja, UPPKA	Orentasi kader poktan (Kelompok Kegiatan) BKR, BKL, PIK Remaja, UPPKA	
				3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					
				Indeks pembangunan Keluarga	40 %	55,97 %			
				a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	100 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) (DPPPAPP KB))	<p>Tersedianya</p> <p>1. BKB KIT di 10 Desa (Soborejo, Tempuran, Baledu, Ngemplak, Parakan, Kauman, Watukumpul, Medari, Karanggedong, Purborejo, Gentingsari) dan</p> <p>2. KIT SIAP NIKAH di 20 Desa (Soborejo, Tempuran, Kandangan, Baledu, Ngemplak, Parakan, Kauman, Watukumpul, Medari, Karanggedong, Purborejo, Gentingsari, Bansari, Kandangan, Wadas, Tlogorejo, Campursalam,</p>	<p>Tersedianya</p> <p>1. BKB KIT di 10 Desa (Soborejo, Tempuran, Baledu, Ngemplak, Parakan, Kauman, Watukumpul, Medari, Karanggedong, Purborejo, Gentingsari) dan</p> <p>2. KIT SIAP NIKAH di 20 Desa (Soborejo, Tempuran, Kandangan, Baledu, Ngemplak, Parakan, Kauman, Watukumpul, Medari, Karanggedong, Purborejo, Gentingsari, Bansari, Kandangan, Wadas, Tlogorejo, Campursalam, Dangkel,</p>	Adanya perubahan Juknis DAK Fisik sehingga pelaksanaannya menunggu perubahan tersebut	Mengikuti regulasi yang ada	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>Dangkel, Mandisari, Traji, Candisari, Balesari)</p> <p>3. Tersedianya BKB KIT di 10 Desa ((Soborejo, Tempuran, Baledu, Ngemplak, Parakan Kauman, Watukumpul, Medari, Karanggedong, Purborejo, Gentingsar...)) dan</p> <p>4. KIT SIAP NIKAH di 20 Desa ((Soborejo, Tempuran, Kandangan, Baledu, Ngemplak, Parakan Kauman, Watukumpul, Medari, Karanggedong, Purborejo, Gentingsari, Bansari,</p>	<p>Mandisari, Traji, Candisari, Balesari)</p> <p>3. Tersedianya BKB KIT di 10 Desa ((Soborejo, Tempuran, Baledu, Ngemplak, Parakan Kauman, Watukumpul, Medari, Karanggedong, Purborejo, Gentingsar.</p> <p>4. KIT SIAP NIKAH di 20 Desa ((Soborejo, Tempuran, Kandangan, Baledu, Ngemplak, Parakan Kauman, Watukumpul, Medari, Karanggedong, Purborejo, Gentingsari, Bansari, Kandangan,</p>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kandangan, Wadas, Tlogorejo, Campursalam, Dangkel, Mandisari, Traji, Candisari, Balesari)	Wadas, Tlogorejo, Campursalam, Dangkel, Mandisari, Traji, Candisari, Balesari)			
				2) Sub kegiatan Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahan dan kesejahteraan keluarga BKB	1. Penyediaan Paket Data bagi TPK (Tim Pendamping Keluarga) 2. tersedianya operasional survilance bagi TPK	1. Penyediaan Paket Data bagi TPK (Tim Pendamping Keluarga) 2. Tersedianya operasional survilance bagi TPK	Penyerapan survilance stunting rendah dikarenakan aplikasi Elsimil dan Google form untuk input data pendampingan TPK baru bisa dipakai Bulan Juli 2022 sehingga pengadaan paket data baru bisa di belikan pada Bulan Juli.	Menyusun Google Form secara mandiri	
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	1. Program Penyelenggaraan LaluLintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase potensi titik parkir yang tertangani	98,18%	98,18%	Belum adanya Manajemen Pengelolaan perparkiran yang efektif dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perparkiran	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya baik sumber daya Manusia maupun Sumber daya Anggaran Pengelolaan Perparkiran, dalam rangka optimalisasi manajemen perparkiran agar menjadi lebih baik	
				Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,53%	99,56%	Kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk mengujikan kendaraannya secara berkala masih rendah..	Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan informasi terkait dengan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi keselamatan LLAJ, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji di jalan guna memastikan operasional kendaraan di jalan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	25,00% (Jumlah bengkel kelas 1 memenuhi standar = 1 unit)	50,00% (Jumlah bengkel kelas 1 memenuhi standar = 2 unit)	Untuk menjadi bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai	Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar	
				Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	50% (Jumlah bengkel kelas 2 memenuhi standar = 4 unit)	50% (Jumlah bengkel kelas 2 memenuhi standar = 4 unit)	Untuk menjadi bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.	Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar	
				Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	60,87% (Jumlah bengkel kelas 3 memenuhi standar = 28 unit)	60,87% (Jumlah bengkel kelas 3 memenuhi standar = 28 unit)	Untuk menjadi bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.	Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar	
				Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	87,18%	100%	Minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi semakin turun yang kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi yang relatif lebih handal dan lebih fleksibel	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang berdaya saing serta handal dalam penyediaan jasa layanan angkutan umum sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang tertuang	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	
				Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100%	100%	Adanya kewajiban angkutan umum untuk masuk dan menggunakan fasilitas terminal sebagaimana amanat Undang undang no. 22 tahun 2019	Tingkat operasional angkutan umum yang semakin rendah akibat minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum mempengaruhi	
				Prosentase Terminal TipeC dalam kondisi baik	85,71%	85,71% Terminal Pingit, Terminal Kranggan, Terminal Plaza, Terminal Kerkop, Terminal Ngadirejo, Terminal Maron	Pemeliharaan terminal agar senantiasa dalam kondisi baik membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar	Penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai serta peningkatan kinerja petugas yang bertanggung jawab memastikan terminal senantiasa dalam kondisi prima dan siap untuk aktifitas pelayanan	
				Persentase peneranganjalan di ruas jalan kabupaten	12,91%	32,06% Jumlah PJU di jalan kabupaten sebanyak 4173 titik.	Terbatasnya penyediaan anggaran dalam pengadaan penerangan jalan umum	Usulan penambahan penyediaan anggaran dalam pengadaan penerangan jalan umum	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2 paket 1. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Listrik (1 paket 48 buah) 2. Pengadlan lampu penerangan jalan umum(LPJU) tenaga surya (1 Paket 2 Unit) Lokasi : Kec. Selopampang, Kec. Tembarak, Kec.. Temanggung, Kec. Gemawang	2 Paket 1. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Listrik(1 paket 48 buah) 2. Pengadlan lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya (1 Paket 2 Unit) Lokasi : Kec. Selopampang, Kec. Tembarak, Kec.. Temanggung, Kec. Gemawang	Keterbatasan anggaran pengadaan penerangan jalan umum untuk memenuhi permohonan masyarakat	Mengusulkan penyediaan penambahan anggaran dari sumber DAU dan DAK.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalandi Jalan Kabupaten/Kota	4 Paket 1. Pengadaan warning light; Lokasi : Desa Rejosari Kec. Pringsurat, Desa Joho Kec. Temanggung. 2. Pengadaan Cermin tikungan ; Lokasi : Kec. Gemawang, Kec. Tembarak, Kec. Wonoboyo, Kec. Bejen. 3. Pengadaan Delienator; Lokasi :Jl. Cemoro wates Kec. Wonoboyo. 4. Pengadaan Rambu lalu lintas (RPPJ); Lokasi : Desa Selosabrang Kec. Bejen.	4 Paket 1. Pengadaan warning light; Lokasi : Desa Rejosari Kec. Pringsurat, Desa Joho Kec. Temanggung . 2. Pengadaan Cermin tikungan ; Lokasi : Kec. Gemawang, Kec. Tembarak, Kec. Wonoboyo, Kec. Bejen. 3. Pengadaan Delienator; Lokasi :Jl. Cemoro wates Kec. Wonoboyo. 4. Pengadaan Rambu lalu lintas (RPPJ); Lokasi : Desa Selosabrang Kec. Bejen.	Keterbatasan personil yang mempunyai kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa serta keterbatasan sarana dan prasarana	Mengirimkan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi pegawai khususnya pengadaan barang dan jasa	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	12 bln (Pemeliharaan dan penggantian lampu penerangan jalan umum di ruas jalan Kabupaten Temanggung)	12 bln (Pemeliharaan dan penggantian lampu penerangan jalan umum di ruas jalan Kabupaten Temanggung sebanyak 867 unit)	Keterbatasan personil dan sarpras untuk memenuhi permohonan dari masyarakat dalam pelayanan pemeliharaan penerangan jalan umum	Penambahan personil dan sarpras untuk memenuhi pelayanan pemeliharaan penerangan jalan umum	
				4) Sub kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan	12 bln 1. Pemeliharaan traffic light; di lokasi : Simpang Geneng, Simpang Sroyo; Simpang OBL; Simpang Prapanca; Simpang BCA; Traffic Simpang Ngadirejo 2. Pemeliharaan rambu lalu lintas diruas jalan Kabupaten Temanggung	12 bln 1. Pemeliharaan traffic light; di lokasi : Simpang Geneng, Simpang Sroyo; Simpang OBL; Simpang Prapanca; Simpang BCA; Traffic Simpang Ngadirejo 2. Pemeliharaan rambu lalu lintas diruas jalan Kabupaten Temanggung Sebanyak 50 unit	Keterbatasan sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan pemeliharaan traffic dan perlengkapan jalan	Pemenuhan sarpras pemeliharaan traffic dan perlengkapan jalan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	12 bln Lokasi : Terminal Candirotro; Terminal Ngadirejo; Terminal Maron; Terminal Plaza; Terminal Kranggan; Terminal Pingit; Terminal Kerkop	12 bln Lokasi : Terminal Candirotro; Terminal Ngadirejo; Terminal Maron; Terminal Plaza; Terminal Kranggan; Terminal Pingit; Terminal Kerkop	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan terminal	Mengusulkan penambahan anggaran untuk menunjang pemeliharaan	
				2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal tipe C	12 bln	12 bln Tercapainya peningkatan pelayanan di terminal sebanyak 10 Orang yang tersebar di terminal tipe C Kab. Temanggung	Kurangnya kesadaran pengemudi angkutan umum dalam mengoptimalkan fungsi terminal	Menugaskan personil dan sosialisasi pengemudi untuk mengoptimalkan fungsi terminal	
				c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100 %	100 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 bln	12 bln Tersedianya SDM pengelola parkir dan tercapainya optimalnya manajemen parkir dalam rangka pencapaian target pendapatan parkir	Manajemen Pengelolaan parkir belum efektif karena dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah melalui sektor parkir	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya baik sumber daya Manusia maupun Sumberdaya Anggaran Pengelolaan Perparkiran, dalam rangka optimalisasi manajemen parkir agar menjadi lebih baik	-
				d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 paket (Pengadaan Sound Level tester)	1 paket (Pengadaan Sound Level tester)	-	-	
				2) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5,400 set (Tanda Bukti Lulus Uji PNBPN)	5,400 set (Tanda Bukti Lulus Uji PNBPN)	-	-	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 bulan (Operasional pengujian kendaraan bermotor, Servise Peralatan Pengujian Kendaraan bermotor, Servise Kalibrasi Kendaraan Bermotor)	12 bulan Terlaksananya Operasional pengujian kendaraan bermotor, Servise Peralatan Pengujian Kendaraan bermotor, Servise Kalibrasi Kendaraan Bermotor	Kenaikan harga BBM sebagai penunjang kegiatan operasional sehingga membutuhkan anggaran yang cukup	Mengajukan tambahan dalam perubahan anggaran	
				e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Keg.Pengamanan Lebaran, Natal Tahun Baru, dan Pengamanan kegiatan lain	Terlksananya Keg.Pengamanan Lebaran, Natal Tahun Baru, dan Pengamanan kegiatan lain	Keterbatasan anggaran dan personil dalam melaksanakan pengamanan lalu lintas.	Mengusulkan penambahan anggaran kegiatan pengamanan lalu lintas	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub Kegiatan Pengadaan, Pem asangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 paket (Pembayaran utang belanja Pengadaan Monitor Display/TV Wall)	1 paket (Pembayaran utang belanja Pengadaan Monitor Display/TV Wall)	-	-	
				F. Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 bln Pelayanan mobilitas anak sekolah. Lokasi : Jalur terminal Madureso – SMP N5 TMG, Jalur Kranggan – Purwosari Pringsurat	12 bln Adanya Pelayanan mobilitas anak sekolah. Lokasi : Jalur terminal Madureso – SMP N5 TMG, Jalur Kranggan – Purwosari Pringsurat	-	-	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	444 orang Pemberian bantuan Sosial Pengemudi angkutan umum di Kab. Temanggung) Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 460 / 398 Tahun 2022	443 orang Pemberian bantuan Sosial Pengemudi angkutan umum di Kab. Temanggung) (1 orang penerima bansos meninggal dunia)	Kesulitan dalam melakukan koordinasi Untuk komunikasi dengan penerima bansos terkait waktu pembagian bansos yang singkat	Melakukan kerjasama dengan organda dalam melakukan koordinasi dengan penerima banos	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO	<ul style="list-style-type: none"> o UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik o UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik o UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik o PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang KIP 	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik					
				Persentase PPID badan publik yang aktif	18%	18,18%	Belum optimalnya dukungan keterbukaan informasi publik pada badan publik	Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan	
				Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	25%	28,13%	minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi	Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi	
				Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100%	100%	Kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sangat baik.	Meningkatkan Kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASLAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<ul style="list-style-type: none"> o Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Pemerintah Daerah o Permenpan RB No. 62 Th 2018 tentang Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 	a. Kegiatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 bulan Pengelolaan media center, pengelolaan LPPL Temanggung TV, LPPL RT FM,MCAP (Mobil Comunity Accses Poin)	1. Terlaksananya deseminasi dengan bentuk publikasi sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan, program dan hasil capaian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk rilis berita secara aktual faktual dan valid. 2. Terlayani kebutuhan internet kepada masyarakat secara gratis pada fasilitas umum dan pada daerah blank			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<ul style="list-style-type: none"> o Perbub No. 25 Th 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kab. Temanggung o Perda No. 12 Th 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kab. Temanggung o Perbub No. 23 Th 2018 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kab. Temanggung 	2) Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik	12 bulan untuk Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya pelayanan informasi publik berupa penyajian dokumen/infor masi kepada masyarakat secara cepat, mudah, murah, dan sederhana	Belum optimalnya penyajian dokumen/informasi kepada masyarakat dikarenakan masih kurangnya kesadaran badan publik untuk menginformasikan data yang dimiliki.	Monitoring dan evaluasi penyampaian dokumen oleh badan publik secara berkala	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<ul style="list-style-type: none"> o UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik o PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang KIP o Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Pemerintah Daerah o Perbub No. 55 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemkab Temanggung 	3) Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	12 bulan Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebanyak 32 kelompok	Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), FK Metra, Saka Milenial, dan Relawan TIK dikarenakan masih rendahnya kesadaran dalam melaksanakan diseminasi informasi	Monitoring dan pembinaan kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), FK Metra, Saka Milenial, dan Relawan TIK secara berkala	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Program Aplikasi Informatika					
				Persentase ketersediaan akses internet publik	100%	80%	Keterbatasan bandwidth yang akan didistribusikan di ruang publik, keterbatasan anggaran serta sapsras pendukung di area publik (kelistrikan dan keamanan alat)	Direncanakan pembangunan akses internet publik berbasis fiber optik dengan bandwidth terpisah dari bandwidth internet PD	
				Persentase ketersediaan jaringan intranet	100%	84,11%	Sebagian desa ada yang memiliki akses internet dari penyedia jasa lain karena sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Beberapa UPT sudah dihapus dan tidak lagi masuk dalam organisasi perangkat daerah sehingga tidak dialokasikan anggaran pembangunan jaringan internet di eks UPT tersebut	Penambahan anggaran untuk pengadaan repeater yang dapat diakses untuk desa-desa	
				Persentase sistem informasi yang terintegrasi	40%	52,48%	Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi, serta belum tercukupinya peralatan jaringan di seluruh PD	Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan untuk pelayanan publik	
				Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	55%	71,29%	Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi, serta terbatasnya SDM di bidang TIK	Penambahan SDM TIK dan diterbitkannya regulasi yang mengatur pengelolaan sistem informasi yang baku	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	Terdapat beberapa data domain dan sub domain yang sudah tidak aktif digunakan, akan tetapi tidak ada laporan dari pemilik/pengguna domain dan sub domain (OPD terkait)	Pendataan dan evaluasi data domain dan sub domain yang aktif dan tidak aktif dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	
				2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	800 Mbps	800 Mbps 1. Penyediaan bandwidth untuk OPD dan UPTD dan Pemerintah Desa 2. pemeliharaan infrastruktur jaringan Pemkab 3. Lisensi Firewall	Karena masih mengunakan jaringan radiosehingga masih banyak gangguan performasi jaringan	Memperbanyak titik-titik tripter untuk memberikan jalur koneksi backup	
				b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan			
				2) Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	98 Apl	100 Apl	Dalam pelaksanaan pengembangan dan pembuatan aplikasi tidak sesuai alur prosedur yang sudah ditetapkan yaitu berdasarkan surat permintaan/pemohonan pembuatan aplikasi OPD, sehingga kesulitan untuk menentukan target	Mengembalikan prosedur sesuai dengan daftar permohonan pembuatan aplikasi dengan konsekuensi mengabaikan permintaan dari para pejabat yang tidak sesuai prosedur	
				3) Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	12 bulan	12 bulan	Dalam pengembangan dan pembuatan aplikasi terkendala pada proses integrasi dengan aplikasi pusat atau aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga	Untuk aplikasi pusat terkendala dengan kebijakan sedangkan terkait pihak ketiga perlu dilakukan koordinasi dengan OPD dan Pengembang	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah RI Nomor 17/per/m.ku km/ix/2015 tentang pengawasan koperasi	<p>1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</p> <p>Persentase koperasi aktif</p> <p>a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>20%</p> <p>100%</p> <p>30 koperasi</p>	<p>27,47 %</p> <p>100%</p> <p>30 Koperasi Tercapainya Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten</p>	<p>Banyak koperasi yang tidak diketahui alamatnya dan tidak ditemukan pengurus dan pengelola, masih banyak koperasi aktif yang tidak melakukan pelaporan rutin (tahunan dan triwulan) ke Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan</p> <p>1. Pengawasan terhadap semua koperasi yang belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. 2. Kurangnya SDM yang kompeten dan ahli di bidang pengawasan.</p>	<p>Optimalisasi tenaga pendamping koperasi yang melakukan pendataan dan pendampingan koperasi di wilayah Kabupaten Temanggung</p> <p>1. Disusun jadwal pengawasan dan pemeriksaan di awal tahun serta dilaksanakan sesuai rencana yang telah dibuat. 2. Diadakan pelatihan atau peningkatan kapasitas pengawas</p>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun	2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi					
				Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota penambahan nilai asset dan omset koperasi	25 %	100 %	masih banyak koperasi yang belum melaporkan laporan keuangan, adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi kegiatan usaha koperasi termasuk kondisi keuangan	Fasilitasi pendataan, pendampingan dan penyuluhan	
				a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Koperasi 1. Terlaksananya fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pembiayaan serta pemasaran usaha koperasi. 2. Terlaksananya Diklat kelembagaan koperasi sebanyak 35 Koperasi	30 Koperasi 1. Terlaksananya fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pembiayaan serta pemasaran usaha koperasi. 2. Terlaksananya Diklat kelembagaan koperasi sebanyak 35 Koperasi	1. Kesiapan koperasi dalam mengakses pembiayaan dan pemasaran (terutama pemasaran digital) masih rendah. 2. Terlaksananya fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pembiayaan serta pemasaran usaha koperasi.	Pembinaan dan pendampingan terhadap peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar dan pembiayaan untuk dapat dioptimalkan kembali.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					3. Pendataan Koperasi secara menyeluruh	3. Pendataan Koperasi secara menyeluruh	3. Terlaksananya Diklat kelembagaan koperasi sebanyak 35 Koperasi 4. Pendataan Koperasi secara menyeluruh 5. Banyaknya koperasi yang sedang dalam masa pemulihan usaha pasca covid 6. Banyaknya Koperasi yang tidak aktif (Kurang Lebih 76% Kopersasi yang ada di Temanggung tidak aktif)		
				3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro					
				Persentase usaha mikro aktif	34%	100%	Keterbatasan kemampuan, ketrampilan dan permodalan sehingga berdampak pada kurang aktifnya usaha mikro	Peningkatan kebutuhan hidup bagi pelaku usaha mikro sehingga menumbuhkan usaha mikro aktif	
				a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 UKM 1. Terbayarnya Honor Tenaga SPG UMKM CENTER dan berkembangnya 50 usaha mikro dalam berproduksi	50 UKM 1. Terbayarnya Honor Tenaga SPG UMKM CENTER dan berkembangnya 50 usaha mikro dalam berproduksi	1. Adanya kendala akses pemasaran bagi pelaku UMKM 2. Kurang sinergi antar sesama Pelaku UMKM	1. Terdapat fasilitas pemasaran secara offline dan online di UMKM CENTER 2. Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM dengan melakukan Gelar Produk UMKM	
				4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian					
				Persentase Koperasi sehat	9.5%	15,09% Sejumlah 91 koperasi aktif yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, aset dan omset Sebanyak 27 koperasi yang telah dinilai kesehatannya	Kurangnya SDM yang kompeten dan ahli di bidang pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi Pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota masih rendah Monitoring dan evaluasi koperasi masih lemah	Diselenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian sesuai dengan kebutuhan koperasi Meningkatkan dan mengintensifkan kualitas pembinaan serta monitoring evaluasi perkoperasian	
				a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1). Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK NF)	105 Orang	180 orang 1. Terlaksananya Diklat Kelembagaan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi : 35 peserta 2. Terlaksananya Diklat Manajemen Perkoperasian Bagi Koperasi Sektor Riil : 35 orang 3. Terlaksananya Diklat Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi : 30 orang 4. Terlaksananya Diklat Koperasi Berbasis Kompetensi Bagi Manager : 30 orang	1. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang terselenggara selama ini belum memberikan arah yang jelas mengenai kurikulum, proses dan capaian pembelajarannya 2. Minat koperasi dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan masih rendah 3. Tema pendidikan dan pelatihan yang ditawarkan kurang bervariasi	1. Mendatangkan narasumber dalam pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang ahli, kompeten dan memiliki kurikulum, proses dan capaian pembelajaran yang jelas 2. Pelaksanaan Diklat serta tema dan materi yang dipilih lebih bervariasi, up to date dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan koperasi	
				b. Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	1 paket	1 paket Terselenggaranya pelatihan Batik Tulis Di Desa Kramat, Kranggan : 30 orang	Belum ada produsen batik tulis di Desa Kramat, Kecamatan Kranggan	Merekomendasikan peserta pelatihan untuk mengikuti Pelatihan Batik Lanjutan agar kapasitas dan keterampilan UKM semakin meningkat	
				c. Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100% Terselenggaranya Pelatihan dan Pendidikan untuk UKM sebanyak 5 Diklat	1. Belum semua UKM menjadi binaan Dinas karena keterbatasan SDM pembina dan anggaran 2. Keterbatasan kemampuan dan ketrampilan Pelaku UKM terkait literasi keuangan, teknologi informasi, digitalisasi, akses pemasaran dan akses permodalan	1. Mengupayakan agar Kabupaten Temanggung tetap memperoleh Dana Alokasi Khusus Non Fisik setiap tahun 2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan UKM 3. Pembinaan dan monitoring evaluasi terhadap UKM perlu ditingkatkan	
				1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	105 orang	160 orang 1. Terselenggaranya Diklat Optimalisasi Bisnis UMKM Melalui Digital Marketing : 35 orang 2. Terselenggaranya Diklat Start Up Bisnis Bagi Wirausaha Pemula : 30 orang	1. Keterbatasan kemampuan dan ketrampilan Pelaku UKM terkait literasi keuangan, teknologi informasi, digitalisasi, akses pemasaran dan akses permodalan 2. Persaingan usaha yang semakin ketat	1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan UKM 2. Pembinaan dan monitoring evaluasi terhadap UKM perlu ditingkatkan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3. Terselenggaranya Diklat Vokasional Bidang Pengolahan Kopi : 30 orang 4. Terselenggaranya Diklat Design Produk dan Onovasi Produk Unggulan : 30 Orang 5. Terselenggaranya Diklat Manajemen Keuangan dan Peningkatan Akses Pembiayaan : 35 orang			
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal		1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
				Nilai Realisasi Investasi	520 M	1,836.01M	Adanya Perubahan perizinan dari OSS 1.1 ke OSS RBA	Melakukan Pendampingan secara masiv kepada Pelaku Usaha	
				Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10%	28,13%	Terjadi benturan tugas pengkajian, yang saat ini terkait kajian berada di BAPPEDA	Melakukan Koordinasi dengan BAPPEDA terkait Kajian Teknis Potensi Investasi	
				Persentase Ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	100%	100%	Pelatihan bidang Penanaman Modal dan Perizinan jarang diadakan	Melakukan Koordinasi dengan BKPSDM untuk melaksanakan Pelatihan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan & Mengalokasikan Anggaran Untuk Kegiatan Pelatihan dimaksud.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Kegiatan	Kegiatan 1. Terselenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan dan produk unggulan 2. Tersusunnya raperda Penanaman Modal	Raperda tentang perubahan Perda Menara Telekomunikasi perlu di sesuaikan dengan regulasi baru menjadi raperda Penyelenggaraan Infrastruktur pasif Telekomunikasi	Dalam Pembahasan di DPRD diusulkan diubah menjadi Raperda Penyelenggaraan Infrastruktur pasif Telekomunikasi	
				2. Program Promosi Penanaman Modal					
				Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100%	100%	Keterbatasan Data dan Informasi peluang usaha di bidang unggulan di wilayah kabupaten Temanggung	Melakukan Koordinasi lintas sektoral dalam memperoleh data dan informasi terkait peluang usaha yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung	
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	8 Kegiatan dan 200 orang	8 Kegiatan dan 200 orang	Informasi peluang usaha yang ada belum tersampaikan kepada para investor.	- Mengikuti Kegiatan Promosi di Luar Daerah - Mengundang para investor pada Forum investasi Temanggung (FIT)	
				3. Program Pelayanan Penanaman Modal					
				Persentase pelayanan perizinan online	100%	98,34%	Adanya perizinan yang belum dapat dilakukan secara online yaitu izin penyelenggaraan reklame	Membuat aplikasi sederhana (google doc) untuk pelayanan izin penyelenggaraan reklame	
				Persentase perizinan yang bebas calo	100%	100%	Anggapan masyarakat bahwa mengurus izin itu sulit sehingga menyerahkan urusan perizinan kepada orang lain yang dianggap dapat membantu dalam mengurus perizinan.	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kemudahan dalam pengurusan izin melalui media yang ada.	
				Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	95%	100%	Adanya gangguan pada aplikasi yang digunakan dalam hal ini adalah aplikasi OSS RBA dan Sicantik.	Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait gangguan pada aplikasi OSS RBA.	
				a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan belum dapat dilakukan pada satu tempat, Pemohon Masih harus mengurus rekomendasi pada dinas teknis yang berada pada beberapa titik lokasi.	Merencanakan pengadaan Mal Pelayanan Publik (MPP)	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	1 Kegiatan	1 Kegiatan Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Masih Banyaknya Masyarakat yang kurang paham dengan tata cara pembuatan NIB.	Melakukan Pendampingan Pembuatan NIB kepada Para Pelaku Usaha di Kecamatan serta pada kelompok kelompok UMKM	
				2) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 bulan	12 bulan Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan satu pintu	Masyarakat kesulitan dalam melakukan konsultasi dan pengaduan	Menginformasikan dan Menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media social.	
				4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
				Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	100%	93.53%	Pengawasan dan pengendalian dilakukan setelah NIB terbit. Dalam mengajukan NIB pemohon dapat langsung mengakses aplikasi OSS dimanapun, tanpa perlu pendampingan sehingga, kebenaran data yang diinput kadang kadang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut baru dapat di ketahui setelah diadakan pengecekan ke lokasi.	Memberikan Teguran kepada pemohon izin yang tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%	100%	Perlunya waktu tertentu untuk melakukan mediasi antara pihak yang mengajukan pengaduan dan pihak yang diadukan	Membuat jadwal pelaksanaan mediasi yang disampaikan kepada pihak yang mengajukan pengaduan dan pihak yang diadukan	
				Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100%	100%	Masih ada pelaku usaha yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Melakukan pengecekan pelaku usaha yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui aplikasi OSS RBA	
				a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 bulan	12 bulan Terlaksananya pemantauan Penanaman Modal	Pelaku Usaha kurang paham dalam Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Melakukan Pendampingan Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kepada Para Pelaku Usaha	
				2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 bulan	terlaksananya BIMTEK/ Sosialisasi Kemudahan Berusaha Berbasis Resiko sebanyak 344 pelaku usaha	Keterbatasan kuota peserta bintek/sosialisasi	1. Mengundang pelaku usaha bintek yang belum pernah mengikuti Bintek serupa	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								2. Bintek Pembinaan Penanaman Modal dilaksanakan pada tanggal 29,30, 31, Maret 18, 23, 25 mei, 13, 14 juli, 1, 2, 3 November 2022 dengan jumlah perusahaan/ pelaku usaha yang berpartisipasi sebanyak 344 pelaku usaha	
				3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 bulan	12 bulan Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal	Sampai Batas Waktu yang telah ditetapkan pelaku usaha belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Melakukan Pengawasan Dengan Mengingatn secara tertulis melalui surat Kepada Para Pelaku Usaha yang belum menyampaikan LKPM agar segera menyampaikan LKPM.	
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
				Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	76,90%	92,86 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	35 Orang	54 Orang Tercapaiannya beasiswa untuk Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi di Kabupaten Temanggung (sekolah Perguruan Tinggi) Berdasarkan SK Bupati Nomor 420/390 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu Perprestasi Kabupaten Temanggung	Masih susahnya mencari data mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi	Melakukan sosialisasi lintas sektoral sehingga mendapatkan data yang disandingkan dengan Data Kemiskinan Daerah	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	2 kegiatan 1. Pemberian Bantuan Hibah Kepada KNPI 2. Pembentukan TIM Paskibraka kabupaten sebanyak 52 orang dan Pengiriman Perwakilan Paskibraka Ke Provins sebanyak 2 orang	2 kegiatan Tercapainya 1. Pemberian Bantuan Hibah Kepada KNPI 2. Pembentukan TIM Paskibraka dan Pengiriman Perwakilan Paskibraka Ke Provinsi	Masih kesulitan dalam perekrutan siswa untuk paskibraka yang sesuai dengan SOP	Setelah mendapatkan personil dilaksanakan karantina dengan memperbanyak latihan dilapangan.	
				2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
				Persentase Pelatih Olah Raga bersertifikat	34,50 %	96%			
				Persentasi PrestasiOlah raga	56,40%	45,24%			
				Persentasi Atlit berprestasi	20,00%	40,91%			
				a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1. Pemeliharaan komplek stadion Bhumi Phala selama 12 bulan 2. Fasilitasi bankeudes	Tercapainya 1. Pemeliharaan Komplek stadion Bumi phala 2. Fasilitasi bankeudes	1. Kurangnya anggaran untuk kegiatan tersebut 2. Kurang koordinasinya antara pemdes dengan masyarakat terkait bantuan yang di terima sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan	1. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan 2. Ketika anggaran sudah masuk Rekening desa tetapi dari Pihak Pemdes belum melakukan kegiatan sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan.	
				b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan Tercapainya 1. Penyelenggaraan POPDA tingkat Kabupat 2. Pengiriman POPDA tingkat Karesidenan en sebanyak 268 personil 3. Pengiriman PODA tingkat Provinsi 128 personil	1. Kurangnya anggaran untuk kegiatan tersebut 2. Kurangnya Koordinasi diantara Organisasi olahraga di Kabupaten Temanggung	Melaksanakan efisiensi dalam penyelenggaraannya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Tingkat daerah Provinsi	100%	36%			
				1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	75 orang Pembinaan dan Pengembangan atlet berprestasi	27 orang Adanya Pembinaan dan Pengembangan Atlet berprestasi (sesuai SK Kepala Dinas DINDIKPORA Nomor 426/107 Tahun 2022	Penghargaan tersebut hanya untuk masyarakat berprestasi berjenjang di KOPDA	Mengusulkan peningkatan anggaran di tahun yang akan datang	
				d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 kegiatan Hibah Untuk FORMI 1. FORDA 2. FORNAS 3. POTRATNAS	1 kegiatan tercapainya Hibah Untuk FORMI 1.FORDA 2.POTRATNAS			
				3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	100%			
				Persentase gugus depan yang aktif	90,10	100%			
				kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan Tercapainya Hibah untuk Kuwarcab Pramuka di Kabupaten Temanggung			
14	Statistik	DINKOMINFO		1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
				Cakupan ketersediaan data makro daerah	100%	100 %			
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	91,6%			
			<ul style="list-style-type: none"> o UU 16 TAHUN 1997 tentang Statistik o Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 	1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 kegiatan ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	1 kegiatan Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral di tingkat produsen data. - Ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dibentuk forum data sebagai wadah komunikasi terkait permasalahan data antara Pembina Data, Wali Data dan Produsen Data, - Koordinasi secara intensif dengan BPS terkait updating data statistik makro daerah dengan dasar pelaksanaan perpres 39 Tahun 2019 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	1 kegiatan Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	1 kegiatan Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	Pemutahiran/Updating data ke aplikasi bank data pembangunan dari produsen data masih belum sesuai target waktu yang ditentukan.	- Dilaksanakannya rapat teknis terkait pengisian data ke aplikasi bank data pembangunan tiap semester. - Dilaksanakan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan produsen data dalam proses pengumpulan data statistik sektoral.	
15	Persandian	DINKOMINFO		1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi					
				Kegiatan Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	1 kegiatan Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah dan belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	Meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.	
16	Kebudayaan	DINBUDPAR		1. Program Pengembangan Kebudayaan					
				Persentase kelompok Seni Budaya yang aktif produktif	75,58%	125,61% Target : 289 kelompok Realisasi: 363 Kelompok	Kurangnya Kualitas dan Kuantitas pemuda Pelaku Seni Budaya, kurangnya kuantitas pembina dan pendamping Seni budaya	Membentuk Komite Seni Budaya Nusantara (KSNB) yang diantara anggotanya dari kalangan akademisi/sekolah	
				a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	10 Event	8 Event 1. Festival Budaya hari jadi Kab. temanggung 2. Festival Liyangan 3. Lomba Jaran Kepang 4. Honor ss 3 orang	Ada 2 event yang tidak dilaksanakan, 1. Gerbek Parakan, kegiatan di limpahkan ke kecamatan parakan 2. Festival Lembutan di limpahkan ke kec. Bansari	Upaya mengatasi agar target sesuai realisasi adalah memperbaiki koordinasi pada penyusunan anggran awal antara kecamatan setempat terkait kegiatan yang akan dilakukan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						5. Pentas Teater di Pringsurat 6. Workshop bedah gerak jaran kepeng 7. Workshop tari jaran kepeng kreasi 8. Wiwit mbako panen kopi			
				b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/kta	100%	100%			
				1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	210 Kelompok seni penerima bantuan	196 Kelompok seni penerima bantuan Kegiatannyaterpenuhinya fasilitasi penyaluran hibah meliputi 1. Sosialisasi penerima hibah sejumlah 196 kelompok sebanyak 6 kali 2. Perjalanan dinas berupa monitoring penerima bantuan 3. Pemenuhan ATK kegiatan	1. Ada 14 Kelompok penerima hibah pindah ke bankeu dan ke OPD lain karena tidak sesuai dengan urusan dinas 2. Penerima hibah yaitu kelompok kesenian, ada beberapa yang persyaratan adminstrasinya lambat terkumpul	Sosialisasi ke pengurus kelompok kesenian mengenai administrasi yang diperlukan	
				2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Kegiatan	Kajian Tarian Bangilun	Kurangnya literatur tentang seni Tarian bangilun dan nara sumbernya serta belum banyak adanya dokumentasi bangilun	Melakukan kajian untuk mengali literasi dan dokumentasi mengenai sejarah tarian bangilun,	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Persentase Pelestarian Sejarah Lokal	5,38%	5,73%			
				Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Peningkatan akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Terlaksananya Peningkatan akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Terlaksananya Peningkatan akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Pendataan Dilapangan terkait sejarah masih minim informas dari masyarakat	Mencari /oengalian informasi kepada masyarat/ dari Pemerintah Desa	
				3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya					
				Persentase Pelestarian Cagar Budaya	4,65%	5,18%	Kurangnya SDM Cagar Budaya, Kurangnya anggran Pelestarian CB	Pemenuhan SDM Pelestari CB, Menjalin Kerjasama dengan Badan atau Lembaga lain dalam rangka pelestarian CB	
				Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	3 Kegiatan/ Lokasi	Kegiatan /Lokasi 1. Terlaksananya Pelestarian Cagar Budaya : Situs Liyangan, Situs Gedongsari, Situs Makam Pangaran Gagak Baning,	Kurangnya SDM Cagar Budaya, Kurangnya anggran Pelestarian CB	Pemenuhan SDM Pelestari CB, Menjalin Kerjasama dengan Badan atau Lembaga lain dalam rangka pelestarian CB	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Situs Watu Ambal, Situs Mangli, 2. Sewa tempat temuan CB dan Pengadaan Alat Kebersihan, 3. Pemeliharaan situs diluar liyangan			
				2) Sub kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	2 Kegiatan	2 Kegiatan, 1.Kajian Cagar Budaya, 2.Cetak Buku wayang Kedu	Untuk penerbitan Buku wayang Kedu belum ber ISBM	Ditahun 2023 akan di ajukan ISBN	
				4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
				Persentase obyek wisata yang berkembang	33,33%	31,25%	Adanya pembatasan kegiatan pariwisata yang di sebabkan Pandemi Covid-19	Menunggu pandemi berakhir dan berinovasi	
				Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik wisata	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 kegiatan	Fasilitasi penyaluran Bankeu dari APBD1 dan APBD 2 Sejumlah 19 desa	Banyak Persyaratan administrasi dari Desa penerima bankeu yang belum dan lambat di selesaikan	Sosialisasi lebih awal pada desa Penerima Bankeu	
				2) Sub kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	Koordinasi dengan pengiat Destinasi wisata	Tidak adanya anggran untuk menunjang kegiatan	Pengusulan anggran, kerjasama dengan Pemdes setempat dan menggandeng kegiatan Pusat atau provinsi	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan Koordinasi dengan pengiat Destinasi wisata	terbatasnya anggaran untuk menunjang kegiatan	Pengusulan anggaran, kerjasama dengan Pemdes setempat dan menggandeng kegiatan Pusat atau provinsi	
				4) Sub kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	12 kegiatan	12 kegiatan Terpenuhinya pembayaran 12 bulan honor ss lapangan 5 orang dan honor ss 1 orang administrasi, terpenuhinya 12 bulan sarpras di rest area kledung, Meteorit, dan Taman Kartini	Anggaran yang ada hanya cukup untuk pemeliharaan ringan saja, sedangkan keadaan dilapangan membutuhkan anggaran untuk Renovasi dan pembaharuan	Pengusulan anggaran untuk menunjang Renovasi dan pembaharuan di Rest Area dan Taman kartini	
				5) Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 kegiatan	Terlaksananya monitoring selama 12 bulan ke beberapa destinasi wisata di Kabupaten Temanggung	Terbatasnya anggaran	Monitoring dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain seperti monitoring kegiatan bankeu	
				5. Program Pemasaran Pariwisata					
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	20%	80,96%	Pengumpulan data kunjungan wisatawan per destinasi masih manual	Pembuatan Aplikasi untuk mempermudah laporan data kunjungan wisatawan per Destinasi	
				Kegiatan Lama Tinggal Wisatawan	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12 bulan	12 bulan Terlaksananya Promosi kegiatan ditemanggung yang berkaitan dengan seni, budaya dan pariwisata	Tidak adanya anggaran yang menunjang untuk kegiatan	Pengusulan anggaran, dan kerjasama dengan Pngiat wisata dan budaya seni	
				2) Sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan Terpenuhinya 12 bulan honor ss sebanyak 4 orang dan terpenuhinya Fasilitasi kegiatan pemasaran selama 12 Bulan	Kurangnya alat untuk kegiatan pemasaran, seperti Camera dan sarpras pembuatan media promosi	Pemenuhan sarpras Promosi melalui pengadaan alat	
				6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					
				Persentase Peningkatan Desa Wisata	10,03%	8,65%	Desa kurang paham tentang manfaat desa Wisata bagi masyarakatnya	Sosialisai mengenai manfaat dan peluang bagi kemajuan desa	
				Persentase desa wisata naik klasifikasi	5 %	73,9%	Terkendalanya aturan mengenai asetment / penilaian desa wisata 4 tahun sekali	Asentment akan kita laksanakan di Tahun 2024	
				Persentase Peningkatan Jumlah pelaku Ekraft	8,27 %	9,9%%	Kurangnya SDM untuk Pendataan dan pengalian ekonomi Kreatif	Mencari pelaku ekraf dengan melibatkan pengiat wisata, pemerintah desa dan sosial media	
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 Kegiatan	1kegiatan Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan pemasaran destinasi wisata	Anggaran yang ada hanya digunakan untuk 1 Kegiatan non fisik (DAK)	Pengusulan anggran untuk mencakup semua penggiat wisata	
				2) Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	4 Kegiatan	Terlaksannya Pelatihan: 1. pelatihan inovasi dan higienisasi sajian kuliner di Destinasi 2. Pelatihan Pemandu Wisata 3. Pelatihan pengelolaan Homestay 4. Pelatihan pengeloelan Desa wisata 5. Pelatihan Digitalisasi, Branding, pemasaran dan penjualan pada Desa wisata	1. Perlunya untuk keberlanjutan ilmu yang didapat di pelatihan dan Hanya 40 orang setiap pelatihan yang bisa ikut pelatihan, dikarenakan anggaran yang mampu untuk menampung 40 orang dari pengiat wisata 2. Penyesuaian kegiatan dengan riteratur sub kegiatan yang ada.	Adanya kegiatan keberlanjutan pelatihan seperti monitoring dan controling	
17	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		1. Program Pembinaan Perpustakaan					
				Persentase perumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan.	35 %	30 % (1009,05)	Pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pengunjung perpustakaan di desa/kelurahan, sekolah, TBM dan Perpustakaan daerah, kurang updatenya koleksi perpustakaan serta terbatasnya kegiatan inklusi sosial yang ada di perpustakaan	Adanya kegiatan gerakan Sindoro Sumbing (termasuk didalamnya EMPIS TAHU dan Tour de Library), aplikasi ipusda dan perpustakaan keliling dan layanan perpustakaan umum melalui lembur	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase perpustakaan yang aktif	35,35 %	97,68 %	Pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pengunjung perpustakaan di desa/kelurahan, sekolah, TBM dan Perpustakaan daerah, kurang updatenya koleksi perpustakaan serta terbatasnya kegiatan inklusi sosial yang ada di perpustakaan.	Adanya kegiatan gerakan Sindoro Sumbing (termasuk didalamnya EMPIS TAHU dan Tour de Library), aplikasi ipusda dan perpustakaan keliling dan layanan perpustakaan umum melalui lembur	
				a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	96,42%			
				1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	12 bulan Adanya Layanan internet/hotspot, terbitan berkala, 12bulan	12 bulan Tercapainya Layanan internet/hotspot, terbitan berkala, 12 bulan	- jaringan internet tidak stabil - jumlah e-book kurang update dan kurang variasi (1.170 judul)	- menambah jumlah bandwidth - menambah jumlah ebook	
				2) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	12 bulan Adanya Layanan Perpustakaan Keliling 176 titik (sekolah dan Desa)	12 bulan Tercapainya Layanan Perpustakaan Keliling 233 titik (desa dan Sekolah)	- jumlah SDM dan armada perpustakaan keliling kurang - koleksi untuk anak dan remaja sangat kurang	- menambah jumlah armada dan SDM - menambah jumlah koleksi anak dan remaja - pengusulan penambah anggaran	
				3) Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	1 kegiatan Pengadaan buku 228judul/ exsemplar	1 kegiatan Tercapainya Pengadaan buku 228 judul/exsemplar	- belum bisa maksimal karena keterbatasan anggaran	- pengusulan penambahan anggaran	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1). Sub kegiatan Pengembangan Literasi	12 bulan Layanan Perpustakaan bagi masyarakat	12 bulan Tercapainya layanan perpustakaan bagi masyarakat			
				3. Program pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno					
				a. Kegiatan Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarik	75 %	99,12%	Masih terbatas penulis yang mengangkat tema budaya enis nusantara, Hasil koordinasi melalui media sosial ke masyarakat belum diketahui kepemilikan naskah kuno, Kegiatan penelusuran langsung belum dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk covid-19, Belum ada anggaran khusus untuk alih media koleksi naskah kuno (jika ditemukan) dan pengadaan bahan perpustakaan koleksi budaya etnis nusantara.	Adanya sumbangan bahan perpustakaan budaya etnis nusantara dari masyarakat. Dari FIKT (Forum Ikatan Kadang Temanggung)	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	1 kegiatan Tertibnya administrasi pelaporan dan pengelolaan naskah kuno dan koleksi nasional yang dilestarikan	1 kegiatan Tercapainya administrasi pelaporan dan pengelolaan naskah kuno dan koleksi nasional yang dilestarikan	Sulitnya menemukan naskah kuno dan minimnya anggaran untuk pengadaan koleksi perpustakaan (koleksi nasional)	Melakukan Penelusuran naskah kuno ke Desa / kelurahan/sekolah/ instansi di wil. Kab Temanggung dan Perpunas RI serta menambah pengadaan buku koleksi perpustakaan (koleksi nasional)	
18	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip		1. Program Pengelolaan Arsip					
				Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku	29.07 %	34,30 %	Kurangnya kesadaran pengelola arsip pada unit kerja (desa)	Terus melakukan pembinaan dan monitoring pada unit kerja (desa)	
				Persentase arsip vital konvensional yang dialih mediakan	40 %	40,08 %	Keterbatasan sarana dan prasarana (Mesin Scanner untuk scan arsip peta belum ada)	Memanfaatkan sarana yang meskipun hasil tidak maksimal	
				a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	12 bulan Pengelolaan arsip in aktif	12 bulan Tercapainya pengelolaan arsip in aktif	Depot arsip tidak memenuhi standar	Mengusulkan penyediaan depot arsip sesuai standar	
				b. Kegiatan PengelolaanSimpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub Kegiatan Pemberdayaan kapasitas unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan 1. Pembinaan dan monitoring Desa 2. pengawasan kerarsipan pada 24 OPD (Dinas dan Badan)	1 kegiatan 1. Pembinaan dan monitoring Desa 2. pengawasan kerarsipan pada 24 OPD (Dinas dan Badan)	1. Kurangnya kesadaran pengelola arsip pada unit kerja (desa) Masih 2. kurangnya anggaran yang ada	1. Terus melakukan pembinaan dan monitoring pada unit kerja (desa) 2. Pengusulan anggaran	
				2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					
				a. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung/dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah Terlaksananya Penyelamatan Arsip Di DPKKK	Kurangnya personil pengelola arsip dan tidak adanya anggaran	Pengadaan tenaga pengelola arsip dan perlunya dukungan anggaran	

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pelaksanaan urusan pilihan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Pelaksanaan Urusan Pilihan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP)		1. Program Pengelolaan Tangkap Ikan					
				Prosentase Nelayan perairan umum yang terbina.	20	43,58	Tidak adanya anggaran khusus untuk sosialisasi dimaksud dan pembinaan hanya bisa dilaksanakan pada saat penebaran benih ikan di perairan umum	Himbauan untuk pembuatan Perdes dan papan larangan penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan serta sanksi yang diberikan	
				2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			1. harga pakan yang fluktuatif (cenderung naik)	1. fasilitasi sarana produksi perikanan	
				Produktivitas Ikan Nila	5,40 kg/m ²	5,40 kg/m ²	2. kualitas benih yang tidak stabil,	2. penerapan pola tanam dengan penjadwalan tebar benih dan kegiatan panen secara terukur, tidak melebihi kebutuhan pasar	
				Produktivitas ikan Lele	12,60 kg/m ²	12,60 kg/m ²	3. kualitas air yang menurun	3. Penerapan 4 T (Tepat mutu, Tepat Jumlah, Tepat harga, Tepat waktu	
Produktivitas Ikan Mas	5,80 kg/m ²	5,80 kg/m ²	4. tahapan persiapan kolam belum diterapkan dengan benar						
							5. perubahan cuaca/iklim mempengaruhi tingkat kematian ikan		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(meningkatkan serangan penyakit, kenaikan tingkat kematian tinggi sehingga mengurangi jumlah panen/produksi akhir) 6. perubahan trend pasar dari ikan mas ke ikan nila 7. banyaknya predator alami (lingsang, biawak, blekok dll)	4. pembinaan dan pendampingan cara budidaya ikan yang baik sesuai CPIB 5. diversifikasi pakan untuk mengurangi ketergantungan pakan pabrik, 6. memasang jaring pengaman predator, 7. penyediaan benih yang bermutu	
				a) Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil					
				1) Pengembangan kapasitas Pembudidaya ikan kecil.	1 kegiatan	1. Sosialisasi kegiatan sebanyak 4 kali pertemuan 2. Monev ke 15 kelompok penerima hibah 3. Hibah uang untuk 15 kelompok (untuk pembelian sarana produksi perikanan budidaya)	a. nama kelompok penerima yang berubah-ubah b. rendahnya kompetensi SDM kelompok penerima	Memaksimalkan waktu yang ada sehingga output kegiatan tercapai	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					
				1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 dokumen Tersedianya desain gambar untuk rehab Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk: 1. Poklahsar Lele Mina Brana – Temanggung 2. Poklahsar Pelangi Jaya – Tlogomulyo			
				2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	Tersedianya sarana produksi budidaya ikan meliputi : 1. Calon induk 2. Benih ikan 3. Pakan 4. Kemasan/ packing benih Tabung dan oksigen	1. Keberadaan predator yang berpengaruh pada ketersediaan benih 2. Cuaca ekstrem yang mengakibatkan tingginya penyakit pada ikan Kurang optimalnya Serapan benih ikan dari masyarakat	1. Pemasangan alat untuk mengurangi predator 2. Monitoring kualitas air secara rutin untuk mengurangi penyakit pada ikan 3. Menggalkkan promosi dan kemitraan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Program Pengolahan dan Permasalahan Hasil Perikanan Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	33%	100%	1. Tidak ada anggaran khusus untuk pembenihan uceng 2. Jumlah permintaan sebar benih ikan tidak sebanding dengan hasil produksi benih ikan (uceng) belum sesuai dengan yang diharapkan karena umur induk sudah tidak produktif 3. penurunan kualitas air sehingga ikan rentan terhadap serangan penyakit	1. Memaksimalkan pembenihan ikan uceng dan Nilem melalui teknik penyuntikan dengan menggunakan hormon ovaprim guna meningkatkan hasil produksi 2. Perbaiki majeman pakan dan kualitas air, 3. melakukan domestifikasi induk uceng di perairan umum	
				4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	100%	100%	1. Tingginya harga bahan baku olahan ikan dan turunnya daya beli masyarakat	1. Menjalin kerjasama dengan warung/ toko dan sekolah berasrama / pondok pesantren	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2. Pendataan produk olahan hasil perikanan belum optimal	untuk pemasaran produk. Bahan baku diambil langsung dari pembudidaya 2. peningkatan Pendataan produksi olahan hasil perikanan melalui kelompok binaan DKPPP	
2	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP)		1. Program Penyedia dan Pengembangan Sarana Pertanian					
				Produktivitas padi	63,15 kuintal/ha	63,15 kuintal/ha	1. Peralihan komoditas yang dibudidaya 2. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi 3. Prasarana dan sarana pertanian yang belum merata dan kurang memadai 4. Cuaca ekstrem meningkatkan serangan hama	1. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian 2. Peningkatan pelatihan pembuatan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi 3. Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pertanian 4. Pelatihann PPHT dan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5. Benih yang digunakan bukan benih unggul	Gerdal OPT 5. Penyelenggaraan sekolah lapang iklim 6. Penggunaan benih unggul	
				Produktivitas jagung	45,95 kuintal/ha	46,1 kuintal/ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralihan komoditas yang dibudidaya 2. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi 3. Prasarana pertanian yang belum merata dan kurang memadai (irigasi tersier) 4. Cuaca ekstrem meningkatkan serangan hama 5. Benih yang digunakan bukan benih unggul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian 2. Peningkatan pelatihan pembuatan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi 3. Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pertanian 4. Penyelenggaraan sekolah lapang iklim 5. Pelatihan PPHT dan Gerdal OPT 6. Penggunaan benih unggul 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Produktivitas Ubi Kayu	339,70 kuintal/ha	340,00 kuintal/ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budidaya masih tumpangsari 2. Masa panen relative lebih lama 3. Peralihan komoditas yang dibudidaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan intensifikasi pertanian 2. Penggunaan bibit unggul 	
				Produktivitas bawang putih	79,45 kuintal/ha	69,1 kuintal/ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. biaya produksi bawang putih tinggi tidak diikuti dengan harga jual yang menguntungkan bagi petani 2. Peralihan komoditas yang dibudidaya 3. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi 4. Pengaruh cuaca, yang berpengaruh pada peningkatan serangan hama/penyakit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendampingan dan fasilitasi, bantuan sarana dan prasarana pertanian, penggunaan 2. penggunaan benih unggul, 3. penanganan hama dan penyakit secara lebih dini, secara berkelompok dan penyuluhan GAP (Good Agricultural Practices) yang benar, 4. pelatihan pembuatan pupuk organik gunaantisipasi kelangkaan pupuk di pasaran, 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								5. bimtek pengolahan pasca panen komoditas hortikultura dan fasilitasi sarana prasarana pasca panen hortikultura	
				Produktivitas bawang merah	80,00 kuintal/ha	81,00 kuintal/ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya fluktuasi harga dengan disparitas yang terlalu tinggi, 2. harga saprodi yang terus naik, 3. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi 4. serangan hama penyakit akibat cuaca ekstrim 5. kebijakan impor yg kadang kurang berpihak kepada petani kecil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terus dupayakan peningkatan ilmu budidaya (GAP), pasca panen (GHP), PPHT dengan teknologi yang ada dan terus berkembang 2. review kebijakan impor komoditas Hortikultura 3. Adanya jaminan harga komoditas, melalui kerjasama semua pihak baik petani pemerintah maupun swasta. 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Produktivitas cabai rawit	55,00 kuintal/ha	76,36 kuintal/ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya fluktuasi harga dengan disparitas yang terlalu tinggi, 2. harga saprodi yang terus naik, 3. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi 4. serangan hama penyakit akibat cuaca ekstrim 5. kebijakan impor yg kadang kurang berpihak kepada petani kecil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terus dupayakan peningkatan ilmu budidaya (GAP), pasca panen (GHP), PPHT dengan teknologi yang ada dan terus berkembang 2. review kebijakan impor komoditas Hortikultura 3. Adanya jaminan harga komoditas, melalui kerjasama semua pihak baik petani pemerintah maupun swasta. 	
				Produktivitas cabai besar	69,40 kuintal/ha	79,04 kuintal/ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya fluktuasi harga dengan disparitas yang terlalu tinggi, 2. harga saprodi yang terus naik, 3. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terus dupayakan peningkatan ilmu budidaya (GAP), pasca panen (GHP), PPHT dengan teknologi yang ada dan terus berkembang 2. review kebijakan impor komoditas Hortikultura 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<ul style="list-style-type: none"> 4. serangan hama penyakit akibat cuaca ekstrim 5. kebijakan impor yg kadang kurang berpihak kepada petani kecil. 	3. Adanya jaminan harga komoditas, melalui kerjasama semua pihak baik petani pemerintah maupun swasta.	
				Produktivitas tembakau	6,75 kuintal/ha	6,68 kuintal/ha	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penurunan luas panen 2. Pengaruh cuaca, sehingga jadwal tanam mundur 2 dasarian 3. kepastian harga yang tidak menentu (cenderung turun setiap tahun) sehingga petani beralih ke komoditas yang lain yang lebih menguntungkan. 4. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bantuan pupuk dan sarpras yang lain 2. Pelatihan PPHT dan pupuk organik 3. Bantan bibit unggul 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Produktivitas kopi robusta	7,20 kuintal/ha	6,93 kuintal/ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peremajaan kopi, sehingga belum produksi; 2. Perubahan regulasi tentang pupuk subsidi dan kenaikan harga pupuk non subsidi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. peremajaan kopi yang sudah tua dengan cara penyambungan dengan benih entres yang berkualitas dan bersertifikat, pelatihan budidaya dan PPHT. 2. pelatihan GAP dan fasilitasi serta pendampingan oleh PPL secara intensif, pemberian 	
				Produktivitas kopi arabika	6,90 kuintal/ha	5,90 kuintal/ha	<p>pola tanam sebagian besar secara tumpang sari dengan komoditas lain sehingga pola perawatan, pemupukan dan pemeliharaan belum optimal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan GAP dan fasilitasi serta pendampingan oleh PPL secara intensif, pemberian 2. bantuan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen, pengembangan kopi dengan benih unggul yang berkualitas, 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Produktifitas Cengkeh	2,35 kuintal/ha	4,17 kuintal/ha	Tanaman Sebagian sudah tua dan tidak produktif perlu peremajaan, Adanya Serangan BPKC	Peremajaan Tanaman Cengkeh, Gerdal Cengkeh daerah Endemi BPKC, dan Pembinaan Penyulingan Cengkeh untuk penambahan pendapatan	
				Produktivitas Vanili	2,93 kuintal/ha	3,02 kuintal/ha	Sulitnya melakukan pendataan Vanili karena resiko keamanan, belum adanya Varietas Unggul Lokal Temanggung yang disertifikasi, serangan OPT	Mempercepat Pemurnian Benih Vanili Unggul Lokal Temanggung, Kebun Bibit Panili, dan penguatan Data Panili di Kab Temanggung, PPHT Panili	
				Produktivitas ternak sapi	177,40 kg/ekor	177,40 kg/ekor	1. Adanya wabah PMK 2. Pemotongan ternak sapi sebagian besar berbobot dibawah 200 kg	1. pengendalian penyebaran PMK, dengan vaksin, pengobatan, hygiene sanitasi kandang dan pelatohan pada peternak 2. Menyarankan dan memberikan himbauan kepada jagal untuk melakukan pemotongan diatas bobot 200 kg	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Produktivitas ternak domba	13,70 kg/ekor	13,70 kg/ekor	Tingginya pemotongan usia domba dibawah 1 tahun	Menyarankan dan memberikan himbauan kepada jagal untuk melakukan pemotongan diatas umur 1 tahun	
				Produktivitas ternak kambing.	13,70 kg/ekor	13,70 kg/ekor	Tingginya pemotongan usia kambing dibawah 1 tahun	Menyarankan dan memberikan himbauan kepada jagal untuk melakukan pemotongan diatas umur 1 tahun	
				Produktivitas ternak ayam ras pedaging.	0,75 kg/ekor	0,75 kg/ekor	1. Ketimpangan antara harga sapi/nak dengan harga penjualan 2. Cuaca ekstrem berpengaruh pada meningkatnya serangan penyakit	1. Memperkuat peran stakeholder dalam penstabilan harga 2. perbaikan pakan 3. Pemberian vitamin 4. Pengendalian penyakit	
				Produktivitas ternak ayam ras petelur.	10,88 kg/ekor	10,35 kg/ekor	1. peremajaan ayam petelur, 2. pemusnahan 15.862 ekor ayam petelur di TW III Th.2021 3. Ketimpangan antara harga sapi/nak dengan harga penjualan	1. Perbaikan pakan 2. Pemberian vitamin 3. Pengendalian penyakit 4. Memperkuat peran stakeholder dalam penstabilan harga	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Produktivitas ternak ayam buras.	0,70 kg/ekor	0,70 kg/ekor	Tidak terkendalinya perkawinan silang	Sosialisasi ternak unggas untuk dikandangkan, bantuan hibah untuk budidaya ayam kedu karena produktivitas telur lebih tinggi dan bertipe dwiguna	
				a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 %	100 %			
				1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.	1 kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan : 21 kali 2. Sosialisasi: 2 kali 3. Rakor: 1 kali 4. Pengadaan Pupuk: 311.390 kg 5. Pengadaan cacing vermikompos: 80 kg 6. Pengadaan Insektisida: 166 liter 7. Pengadaan Fungisida : 331 kg 8. Pengadaan Agen hayati: 27 paket 9. Pengadaan pohon vanili: 1.600 batang 10. Pengadaan paranet: 10 rol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. karena cuaca ekstrem 1 lokasi uji multi lokasi (pemuliaan tembakau) gagal 2. Pergantian Kerjasama penelitian tembakau yang sebelumnya dengan Balittas Malang ke BRIN 3. e katalog pupuk tayang terlambat 4. penyedia bibit Vanili yang mempunyai kebun sumber benih yang berlabel terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uji multi lokasi sudah cukup di 9 UML 2. Pembaharuan perjanjian Kerjasama penelitian 3. Mendorong kelompok binaan untuk membuat bibit bersertifikat 	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						11. Pengadaan Plastik uv: 6 rol + 12. Pengadaan plastik uv: 8 buah 13. Pengadaan Trichoderma : 290 kg 14. Pengadaan Handsprayer : 8 unit 15. Pengadaan bibit cengkeh: 2.000 batang 16. Pengadaan bibit kopi : 48.450 batang 17. Pengadaan gunting pangkas: 40 unit 18. Benih kopi arabika: 25.000 butir 19. Pengadaan polybag: 85 kg 20. Pengadaan polybag : 23 pack 21. Pengadaan bibit alpukat : 370 batang			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						22. Pengadaan bibit mimba : 4.860 batang 23. Pengadaan sungkup plastik: 4 rol 24. Pembuatan rumah pembibitan : 4 unit 25. Pengadaan kerodong : 3.000 buah 26. Bantuan tenaga kerja: 780 orang 27. Pengadaan soil tester: 27 buah 28. Pengembangan varietas tembakau: 1 paket 29. Pengadaan alat olah kemas benih: 4 unit			
				2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.	1 Kegiatan	Terlaksananya Hibah Uang Pengadaan Sarana Pertanian sebanyak 32 Kelompok Tani (pokir)	1. data kelompok (pokir) berubah-ubah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan 2. Pengelolaan alsintan di kelompok masih belum tertata	1. Dilakukan prioritas CPCL didasarkan pada kriteria urgensi kebutuhan setiap kelompok tani	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								2. Mewajibkan kelompok penerima hibah untuk mengelola alsintan dengan system UPJA	
				b) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman.	1 kegiatan	Tersediaanya 60.000 entres	Pemasaran mengandalkan pembelian entres dalam jumlah besar	1 Mencari target pasar yang lebih luas 2 Meningkatkan promosi 3 Mengundang pihak ke-3 dalam pemasaran entres	
				2) Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	12 ulanan	Terlaksannya kegiatan berupa: 1. Bantuan hibah uang kepada 79 kelompok (pokir) 2. Sosialisasi dan pembinaan kelompok penerima hibah 79 kelompok 3. Pengadaan obat hewan 1 paket	1. Data kelompok (pokir) berubah-ubah sehingga memperlambat pelaksanaan kegiatan 2. Adanya wabah PMK	data kelompok harus fix di n-1 pembatasan peredaran ternak yang terinfeksi PMK	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					
				Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama.	76,50%	79,15%	Kemampuan Kelompok dalam mengelola dan Memelihara Bantuan Alsintan masih rendah serta Belum semua kelompok membentuk struktur pengelolaan Alsintan berupa Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	perlunya mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi kelompok tani dalam pemanfaatan dan pengelolaan jasa Alsintan dengan mengganding institusi terkait maupun prosuden alat	
				a) Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	100%			
				1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B.	1 kegiatan	Tertindakannya Identifikasi, pengukuran dan peninjauan lokasi alih fungsi sebanyak 26 lokasi	Pemohon alih fungsi tidak dapat di hubungi sehingga lokasi tidak dapat ditemukan dan pihak notaris tidak memberikan kelengkapan berkas sehingga menghambat verifikasi lahan	Koordinasi dengan OPD terkait (DPM)	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.	1 kegiatan	Terlaksananya verval APBN, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan prasarana pendukung pertanian lainnya berupa JUT, irigasi perpipaan, embung , irigasi tersier, pupuk subsidi, monev kegiatan APBN 1 kegiatan	Anggaran APBN berubah mendekati akhir tahun	Waktu pelaksanaan di lapangan di maksimalkan	
				b) Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	100%			
				1) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya.	2 unit	terlaksananya pembangunan kandang dan rumah pupuk sejumlah 2 unit (*pokir)	Kurangnya kesiapan lahan kelompok penerima (pokir)	Usulan kelompok harus menyertakan surat pernyataan lahan dalam status clean and clear	
				3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner					
				Persentase penanganan penyakit hewan.	85%	100%	Obat hewan dan alat kesehatan hewan masih minim	Koordinasi dengan provinsi dan pusat untuk menambah prasarana penanganan kasus berupa obat hewan, bahan/alat diagnostik dan alat kesehatan hewan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat.	70%	100%	Kurangnya SDM lapangan sehingga jangkauan pengawasannya kurang luas	Memaksimalkan SDM yang ada, sehingga jangkauan pengawasan dapat diperluas	
				a) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	100%	Terlaksananya <ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi pengawas pemotongan hewan qurban 1 kegiatan • Pengawasan pemotongan hewan qurban 1 kegiatan • Pengadaan obat-obat hewan 1 paket • Pengadaan sarpras 1 paket 	Obat-obatan dan sarana pengendalian wabah PMK terbatas	Koordinasi dengan provinsi untuk penambahan bantuan obat-obatan dan sarana yang lain	
				b) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium.	1 kegiatan	1 kegiatan Terlaksananya operasional Puskesmas selama 12 bulan, tersedianya	Penggunaan anggaran sudah ditentukan oleh pusat, yang belum tentu dibutuhkan oleh daerah	Memaksimalkan anggaran untuk pengadaan obat-obatan yang urgent dan dibutuhkan kelompok	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						obat-obatan untuk Kesehatan hewan 1 paket, terlaksannaya uji 3sampel			
				4. Program Penyuluhan Pertanian					
				Persentase pengendalian bencana pertanian.	40,25%	41,45%	Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT	Pembinaan pengendalian OPT kepada kelompok tani dan pelatihan pembuatan persnab	
				a) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan OPT dan Gerdal meliputi : 1. Sosialisasi dan pelatihan pembuatan pesnab di 4 KT. 2. Gerakan pengendalian OPTtanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di 50 KT kelompok:	1. Jumlah Petugas POPT terbatas, daerah yang terserang hama sangat luas 2. Pengendalian hama dilakukan tidak serentak dan kontinyu sehingga hama terlanjur meluas	1. Melibatkan kelompok untuk swadaya dalam pengendalian OPT, bekerjasama dengan lab hama provinsi untuk petugas POPT 2. Pengendalian hama penyakit dilakukan terjadwal dan bersamaan	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3. Pelatihan mitigasi OPT Gerdal di 4 Kali, : 4. Pengadaan obat pengendali OPT Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terdiri dari: Fungisida 240 kg, Insektisida 6 ltr, petrocum klerat 600 kg, agensia hayati 7 paket, dithane 45 kg, dorsban 50 ltr, furadan 78 kg, PGPR 60 ltr, POC 60 liter, kresban 46 ltr, antracol 42 kg, curacron 16,5 ltr, sidatan XR 525 SL 52 liter, decoprima 35 kg, entomobac			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						15 kg , feromon 2.470 bh, likat kuning 2160 buah, bakterisida merk dagang Nordox 259 kg, rodentisida sulfur 6.916 btg, fungisida (Topsin M 70 WP, Metazeb 80 WP) 235 kg dan insektisida (Matros 18 EC, Bassa 50 EC dan Starfidor 5 WP) 122 ltr. 5. jaring burung pipit 1.039 unit untuk 56 KT			
				2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.	1 kegiatan	1. Terlaksananya Pengukuran curah hujan setiap bulan di 20 lokasi se Kabupaten Temanggung 2. terlaksananya kegiatan Sekolah lapangan Iklim (SLI) Bersama BMKG 2 kali	1. Alat ukur curah hujan ada yang rusak 2. Demplot SLI hanya beberapa tempat saja di Temanggung	1. Perbaiki alat ukur curah hujan yang rusak 2. Perbanyak an demplot SLI	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5. Program Penyuluhan Pertanian					
				Persentase kelompok tani yang naik kelas.	0,83%	1,03%	ada sebagian kelompok tani yang tidak aktif	Pembinaan secara kontinyu dan intensif kepada kelompok tani	
				a) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100%	100%			
				1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan Pelatihan tematik 17 kali dan tersedianya biaya operasional 20 BPP	Banyaknya kebutuhan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM penyuluh	Memilih pelatihan yang urgent	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.	2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa sebanyak 31 kegiatan	Kapasitas SDM yang kelompok yang belum merata	Meningkatkan pendampingan kelompok	
				3) Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	20 Keg	Terlaksananya sekolah lapang sebanyak 20 kali	Jumlah penyuluh yang terbatas (tidak sepadan dengan jumlah kelompok)	Memaksimalkan SDM yang ada dan penyuluh swadaya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		1. Program Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata					
				Persentase obyekwisata yang berkembang.	37,50%	34,00%	1. Obyek Wisata Alam yang sangat berpengaruh terhadap cuaca, sehingga berdampak pada kunjungan wisatawan 2. Infastruktur pendukung pariwisata yang masih kurang memadai, seperti jalan, parkir dll 3. Manajemen pengelola Obyek Wisata yang kurang Profesional	1. Penambahan Gazebo/ desain obyek yang bisa dinikmati walupun cuaca hujan 2. Pembangunan Infrastruktur jalan yang memadai untuk mobil dan bus pariwisata 3. Peningkatan bankeu dari daerah dan pusat 4. Pelatihan SDM Pariwisata	
				a) Pengelolaan Daya Tarik Wisata					
				1) Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100%	Fasilitasi penyaluran Bankeu dari APBD1 dan APBD 2 sejumlah 19 desa Penerima , meliputi	Banyak Persyaratan administrasi dari Desa penerima bankeu yang belum dan lambat di selesaaiikan	Sosialisasi lebih awal pada desa Penerima Bankeu	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						monitoring dan sosialisasi Administrasi dan mekanismenya			
				2) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	Koordinasi dengan pengiat Destinasi wisata meliputi : 1. Posong 2. Botorono 3. Rest Area Kledung 4. Taman Kartini 5. Pikatan Water park 6. Simpleng Kledung Park	Tidak adanya anggaran untuk menunjang kegiatan	Pengusulan anggaran, kerjasama dengan Pemdes setempat dan menggandeng kegiatan Pusat atau provinsi	
				3) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 kegiatan	Koordinasi dengan pengiat Destinasi wisata 1. Botorono 2. Posong 3. Kledung Park 4. Rest area Kledung 5. Simpleng 6. Taman kartini 7. Alam sewu	Tidak ada anggaran untuk menunjang kegiatan	Pengusulan anggaran, kerjasama dengan Pemdes setempat dan menggandeng kegiatan Pusat atau provinsi	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	12 kegiatan	Terpenuhinya pembayaran 12 bulan honor ss lapangan 5 orang dan honor ss 1 orang administrasi, terpenuhinya 12 bulan sarpras di rest area kledung, Meteorit, dan Taman Kartini	Anggran yang cukup untuk pemeliharaan ringan saja, sedangkan keadaan dilapangan membutuhkan anggran untuk Renovasi dan pembaharuan	Pengusulan anggran untuk menunjang Renovasi dan pembaharuan di Rest Area dan Taman kartini	
				5) Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 kegiatan	Terlaksananya Monitoring selama 12 bulan Kebeberapa Detinasi wisata di Kabupaten temanggung : 1. Botorono 2. Posong 3. Kledung Park 4. Rest areaKledung 5. Simpleng 6. Taman kartini 7. Alam sewu	Tidak ada anggran untuk mendukung kegiatan	Monitoring dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain, seperti monitoring penyaluran bankeu	
				2. Program Pemasaran Pariwisata					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan.	20%	80,96%	Pengumpulan data kunjungan wisatawan per destinasi masih manual	Pembuatan Aplikasi untuk mempermudah laporan data kunjungan wisatawan per Destinasi	
				a) Kegiatan Lama Tinggal Wisatawan					
				1) Sub kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Bulan	Terlaksannya Promosi kegiatan ditemanggung yang berkaitan dengan seni,budaya dan pariwisata meliputi : 1. Pembuatan iklan kegiatan pariwisata dan kebudayaan melalui wesite, sosme 2. Pembuatan video promosi dan foto dokumentasi kegiatan Dinas	Tidak adanya anggaran yang menunjang untuk kegiatan	Pengusulan anggaran, dan kerjasama dengan Penganat wisata dan budaya seni	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	12 kegiatan	Terpenuhinya 12 bulan honor ss sebanyak 4 orang dan terpenuhinya Fasilitasi kegiatan pemasaran selama 12 Bulan, meliputi dokumentasi video dan foto di kegiatan Dinas	Kurangnya alat untuk kegiatan pemasaran, seperti Camera dan sarpras pembuatan media promosi	Pemenuhan sarpras Promosi melalui pengadaan alat	
				3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
				Persentase Peningkatan Desa Wisata.	10,03%	8,65%	Desa kurang paham tentang manfaat Desa wisata bagi masyarakatnya	Sosialisasi mengenai manfaat dan peluang bagi kemajuan desa	
				Persentase desa wisata naik klasifikasinya.	10%	8,65%	Desa kurang paham tentang manfaat Desa wisata bagi masyarakatnya	Sosialisasi mengenai manfaat dan peluang bagi kemajuan desa	
				Persentase Peningkatan Jumlah pelaku Ekraft.	5%	73,9%	Terkendala Aturan mengenai Assesment atau penilaian Desa wisata 4 tahun sekali, sedangkan terakhir penilaian pada tahun 2020, sehingga indikator ini bisa terlaksana di tahun 2024	Masih menunggu di tahun 2024	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a) Pengembangan Pariwisata					
				1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.	11 Kegiatan	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan pemasaran destinasi wisata	Hanya 40 orang yang bisa ikut pelatihan, dikarenakan anggaran yang mampu untuk menampung 40 orang dari pengiat wisata	Penambahan anggaran untuk mencakup semua penggiat wisata	
				2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.	4 Kegiatan	Terlaksananya Pelatihan: 1. pelatihan inovasi dan higienisasi sajian kuliner di Destinasi 2. Pelatihan Pemandu Wisata 3. Pelatihan pengelolaan Homesty 4. Pelatihan pengeloelan 5. .Pelatihan Digitalisasi, Branding, pemasaran dan penjualan pada Desa wisata	Perlunya untuk keberlanjutan ilmu yang didapat di pelatihan dan Hanya 40 orang setiap pelatihan yang bisa ikut pelatihan, dikarenakan anggaran yang mampu untuk menampung 40 orang dari pengiat wisata	Adanya kegiatan keberlanjutan pelatihan seperti monitoring dan controling	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Perdagangan	Dinkopdag		1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
			Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.						.
				Persentase pasar daerah dalam kon disi baik.	67%	66,67%	Kerusakan pada atap pasar dan cuaca ekstrim yang menambah kerusakan pasar	Adanya perbaikan Pasar secara rutin	
				Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang.	60%	62,27%	Kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati zona dagang	Mengadakan sosialisasi kepada Pedagang Pasar	
				Persentase realisasi penerimaan pendapatan Pasar.	90%	100%	Kurangnya Kesadaran pedagang untuk	Program e retribusi di 6 Pasar Daerah	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							membayar Retribusi Pelayanan Pasar	(Temanggung, Candiroto, Ngadirjo, Parakan, Kranggan, Pngiit)	
				Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruangsesuai peruntukan	32%	53,27%	Ruang tetap untuk PKL masih kurang dan penerangan di taman pengayoman kurang terang, angkot tidak melewati plaza,keramaian terpusat di sekitar alun-alun	Perlu pengembangan sarana perdagangan (kakilima) untuk wilayah temanggung timur	
				a) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.					
				1) Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan.	1 Kegiatan	1. Terselenggara-nya kegiatan Workshop Penataan dan Pemberdayaan PKL selama 1 (satu) hari di Jambu Kluthuk Resort Caturanom Parakan. 2. Peserta perwakilan pelaku PKL 50 org	-Peserta Workshop belum sepenuhnya paham	Pendampingan monev	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	6 Pasar daerah	Terpeliharanya 6 Pasar daerah (Pasar Temanggung, Parakan, Ngadirejo, Candioto, Kranggan, Pingit)	Masih banyak titik lokasi kerusakan di pasar yang belum dapat diperbaiki	Membuat proposal pengajuan revitalisasi pasar dan membuat rencana anggaran perbaikan prioritas pada tahun 2023	
				2. Program Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Parang Penting					
			Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.						

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi	68,37%	98,08%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada petugas khusus yang melakukan pemantauan harga bapak harian dan input data di UPT pasar. 2. Koneksi internet yang tidak stabil baik di UPT maupun di Dinas. 	Perbaikan jaringan internet guna memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan Dinas	
				a). Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				1. Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	12 bulan	Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen untuk penyaluran ke Kios Pupuk Lengkap di wilayah kabupaten temanggung setiap bulan selama 1 tahun dan Pantauan harga barang kebutuhan pokok dan	Terjadinya kelambatan distribusi di bulan maret 2022 karena bersamaan dengan bulan puasa	Melakukan koordinasikan dengan produsen dalam rangkaantisipasi adanya kepadatan arus lalu lintas menjelang lebaran	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						barang penting setiap hari kerja selama setahun			
				3. Program Pengembangan Ekspor					
				Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sector perdagangan.	2,32%	27,80%	Belum semua Perusahaan mengirimkan laporannya, Dinkopdag tidak ada wewenang memberi sanksi bagi yg tidak menirinkan laporan	Dilakukan permintaan laporan melauai email ke Dinkopdag agar lebih mudah dan efisien	
				a) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	2 kegiatan	1. Pantauan nilai ekspor terhadap pelaku ekspor olahan kayu setiap bulan dalam 1 tahun 2. Pantauan nilai ekspor terhadap pelaku ekspor kopi setiap bulan dalam 1 tahun	1. Masih adanya dampak pandemic covid 19, nilai ekspor mengalami penurunan; 2. Masih kurangnya para pelaku usaha unrukber export impor	Melakukan pertemuan dengan eksportir untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh eksportir baik langsung maupun medsos	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					
			Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.						
				Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang.	90%	100%	Belum terciptanya alat UTTP yang sesuai standar di masyarakat	Dilakukan pendataan dan pelayanan tera/tera ulang di Kab. Temanggung	
				a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.					
				1) Pelaksanaan Metrologi Legal, BerupaTera, Tera Ulang.	90%	Jumlah potensi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Temanggung ada 6000, yang sudah di tera/tera ulang 6.057 Berasal dari UTTP pada Pasar 6 Pasar daerah (Pasar Temanggung,	1. Kesadaran masyarakat tentang tera/tera ulang masih kurang; 2. Data alat UTTP di Kab. Temanggung belum terdata secara lengkap sampai di tingkat RT	1. Melakukan sosialisasi secara personal/umum tentang pentingnya tera/tera ulang 2. Pendataan alat UTTP	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Parakan, Ngadirejo, Candiroto, Kranggan, Pingit), Pasar Desa (Pasar Selopampang, pasar tembarak, pasar medono, pasar gemawang, pasar ngimbrang Bulu, pasar kedu, pasar kandang, pasar jumo, pasar tepusen, pasar kaloran, Kecamatan Tlogo, Kecamatan Bansari. 19 SPBU di Kab Temanggung, 30 Gudang Tembakau dan Timbangan Jembatan pada perusahaan (asapal, rosok, tekstil, beras)			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7	Perindustrian	Dinperinaker		1. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri							
				Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah.	33%	64,62%	Dari 9 komoditas unggulan di Kab. Temanggung baru tersentuh adalah 1 komoditas yaitu tembakau	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan usulan kegiatan ke Prov/Pusat Pembinaan IKM secara mandiri 			
				a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
				1) Koord inasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	1 laporan	Pelaksanaan Monev industri existing	Pelaksanaan kegiatan di suport dari anggaran kegiatan lain	Mengajukan anggaran			
				2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.	1 dokumen	Terkoordinisnya pembangunan sumber daya industri	Pelaksanaan kegiatan di suport dari anggaran kegiatan lain	Mengajukan anggaran			
3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	25 IKM	Pelatihan IKM dari pengrajin tembakau yang terdiri dari 30 orang	Hasil olahan tembakau baru berupa rajangan dengan harga yang rendah	Menambah varian produk untu menambah pendapatan petani							

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Program Pengenalan Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota					
				Persentase pembinaan industri penghasil cukai.	4,77%	9,92%	Sistem SIINas yang terintegrasi dengan OSS belum banyak diketahui oleh pelaku industri	Merencanakan Sosialisasi SIINas yang terintegrasi dengan OSS	
				a) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.					
				1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	1 kegiatan	37 pelaku industri yang terverifikasi	Pelaku usaha belum memahami pentingnya mendaftarkan usahanya di SIINas	Merencanakan Sosialisasi SIINas yang terintegrasi dengan OSS	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Transmigrasi	-	-	1. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan a) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1) Pemindehan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	100%	0%	Kewenangan di Provinsi	Mengusulkan kuota	-
					5 KK	0 KK Karena kewenangan Provinsi	b. Tidak mendapatkan kuota pemberangkatan dari Disnakertrans; c. Anggaran dari Provinsi	Mengusulkan kuota	

3.1.4 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan urusan pilihan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)		1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	100%	1. Kurangnya komitmen dari Perangkat Daerah 2. Kurangnya fasilitasi dan pendampingan secara intensif dari verifikator Bappeda	1. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyiapkan data dukung sebelum penginputan 2. Fasilitasi dan pendampingan secara lebih insentif dari verifikator Bappeda	
				Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	90%	100%	1. Kurangnya komitmen dari Perangkat Daerah 2. Kurangnya fasilitasi dan pendampingan secara intensif dari verifikator Bappeda	1. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyiapkan data dukung sebelum penginputan 2. Fasilitasi dan pendampingan secara lebih insentif dari verifikator Bappeda	
				a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	3 Kegiatan Non DAU (Bankeu Prov, DAK dan APBN)	Fasilitasi: 1. Bamkeu Pov : 199 usulan (Rp. 485.443.186.456) 2. DAK Fisik: 2.104 usulan (Rp. 1.005.440.849.351); 3. DAK Non Fisik: 41 usulan (Rp. 265.846.825.000) 4. APBN (Rp. 148.134.810.200)	1. Deadline waktu terlalu cepat; 2. Ketidaksiapan data dukung dari Perangkat Daerah; 3. Perangkat Daerah kurang mencermati aturan pengusulan	1. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyiapkan data dukung sebelum penginputan; 2. Pendampingan kepada Perangkat Daerah lebih intensif; 3. Perangkat Daerah untuk lebih mencermati syarat-syarat usulan	
				2) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	3 Kegiatan 3 Dok/laporan	Kegiatan: 1. Musrenbang kelurahan di 23 kel; 2. Musrenbang Kacamatan di 20 Kec 3. Musrenbang Kabupaten. Dok/laporan: 1. RKPD 2023 2. Perubahan RKPD 2022; 3. Rancangan RPD2024-2026	Inkonsisten program pada dokumen RPJMD dan Dokumen RKPD	Mencermati program untuk menampung usulan yang bersumber NON DAU	
				b) Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Penyusunan profil pembangunan daerah Kab/Kota	6 Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input e-database semesteran (semester 1 dan 2); 2. Verifikasi data pokok 4 Triwulan (TW 1,II,III, dan IV) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilis data makro pada N+1; 2. Masih ada data yang kurang valid 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan BPS; 2. Mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas data 	
				c) Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembnagunan Daerah					
				1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah	12 bulan 7 Keg/laporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi di 26 Perangkat Daerah dan 20 Kecamatan; 2. Tersusunnya dok evaluasi RKPD (semester 1 dan II); 3. Laporan Capaian Kinerja RPJMD (Evaluasi Perubahan RPJMD 2018-2023 4. Verifikasi renja PD Triwulan (Semester I,II,III,IV) 	Format Laoran renja belum sesuai dengan Permendagri 86	Mendorong dan menekankan Perangkat Daerah agar dalam membuat laporan mengacu pada Permendagri no 86	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90%	98,80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen dari Perangkat Daerah 2. Terdapat Perangkat Daerah yang tidak menyusun Renstra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyiapkan data dukung sebelum penginputan 2. Pendampingan secara lebih insentif dari Bappeda dalam penyusunan Renstra 	
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90%	90,54%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen dari Perangkat Daerah 2. Terdapat beberapa kegiatan di Renstra yang tidak terakomodir dalam Renja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyiapkan data dukung sebelum penginputan 2. Pendampingan secara lebih insentif dari Bappeda 	
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90%	91,94%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen dari Perangkat Daerah 2. Terdapat Perangkat Daerah yang tidak menyusun Renstra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyiapkan data dukung sebelum penginputan 2. Pendampingan secara lebih insentif dari Bappeda 	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3. Terdapat beberapa kegiatan di Renstra yang tidak terakomodir dalam Renja		
				Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90%	95,74%	1. Kurangnya komitmen dari Perangkat Daerah 2. Terdapat beberapa kegiatan di Renstra yang tidak terakomodir dalam Renja	1. Mendorong Perangkat Daerah untuk menyiapkan data dukung sebelum penginputan 2. Pendampingan secara lebih insentif dari Bappeda	
				a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
				1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPd)	9 urusan 1 dokumen	Koordinasi dan memfasilitasi dokumen perencanaan di 9 urusan pada bidang: 1. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 2. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Update data dari Perangkat Daerah kurang optimal	Berkoordinasi intens dengan Perangkat daerah yang membidangi;	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 4. Bidang Komunikasi dan Informatika; 5. Bidang Statistik; 6. Bidang Persandian; 7. Bidang Perpustakaan; 8. Bidang Kearsipan; 9. Bidang Pertanahan. 10. Urusan Pemerintahan (Bagian Kesra Setda, Bagian Hukum Setda, Bagian Ortala Setda, Bagian PBJ Setda, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat DPRD, Inspektorat) 11. Kesatuan Bangsa dan Politik; 12. Kecamatan			

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 urusan	Monitoring dan evaluasi di 14 urusan pada bidang: 1. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 2. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 4. Bidang Komunikasi dan Informatika; 5. Bidang Statistik; 6. Bidang Persandian; 7. Bidang Perpustakaan; 8. Bidang Kearsipan; 9. Bidang Pertanahan. 10. Urusan Pemerintahan (Bagian Kesra Setda, Bagian Hukum Setda, Bagian Ortala Setda, Bagian PBJ Setda,	Laporan progres dan realisasi kegiatan Perangkat Daerah tidak tepat waktu	Komunikasi intensif dengan Perangkat Daerah terkait via media sosial	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat DPRD, Inspektorat) 11.Kesatuan Bangsa dan Politik; 12.Kecamatan			
				3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Urusan 3 dok/laporan	Koordinasi dan memfasilitasi dokumen perencanaan di 5 urusan pada bidang: 1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Kesehatan; 3. Bidang Sosial; 4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga; 5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; 6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	1. Data anak tidak sekolah pendataan di tingkat desa belum bisa optimal; 2. Aplikasi SIPBM belum dimanfaatkan optimal	1. Pendataan di awal tahun untuk mendapatkan sasaran anak tidak sekolah yang akan diupayakan kembalike sekolah baik formal maupun non formal pada tahun ajaran baru. 2. Memnfaatkan/ mengoptimalkan aplikasi SIPBM	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						4 dokumen: 1. LP2KD; 2. Laporan SDGs; 3. Laporan stunting; 4. Laporan penanganan anak tidak sekolah			
				4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Urusan	Monitoring dan evaluasi di 13 urusan pada bidang: 1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Kesehatan; 3. Bidang Sosial; 4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga; 5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; 6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hasil monev stunting: 1. Kelembagaan TPPD si desa/kekel belum berjalan karena masih baru; 2. Intervensi spesifik di desa belum secara khusus menyasar baduta stunted; 3. Cakupan sanitasi belum layak di beberapa des/kel lokus Hasil Monev kemiskinan: 1. Program satu perangkat daerah satu desa dampingan belum dilaksanakan optimal oleh Perangkat daerah karena pemahaman yang belum utuh; 2. Keterbatasan anggaran untuk pendampingan	1. Dikoordinasikan dengan dinas teknis untuk pembekalan tugas TPPS desa/kel; 2. Sasaran pemberian PMT berduta disarankan prioritas unuk baduta stunting di desa/kel; 3. Koordinasi dengan DPRKPLH unuk intervensi sanitasi di des/kel likus agar layak dan aman; 4. Merefresh kembali juknis program sate PD satu desa dampingan; 5. Pemantauan lebih intensif dengan memberikan matrik progres kegiatan; 6. Coaching pelaksanaan kegiatan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
				1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 urusan 1 dokumen	Koordinasi dan memfasilitasi dokumen perencanaan di 5 urusan: 1. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 2. Bidang Penanaman Modal; 3. Bidang Kebudayaan; 4. Bidang pariwisata 5. Bidang Tenaga Kerja; 6. Bidang Perindustrian; 7. Bidang Perdagangan; 8. Bagian Perekonomian Setda	1. Keterlambatan data dari Perangkat Daerah; 2. Data yang belum update	Berkoordinasi dengan Perangkat daerah yang membidangi;	
				2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 urusan	Monitoring dan evaluasi di 5 urusan pada bidang: 1. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 2. Bidang Penanaman Modal;	Akses infrastruktur yang dirasa masih kurang mendukung kegiatan perekonomian	Perbaiki infrastruktur terutama akses jalan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3. Bidang Kebudayaan; 4. Bidang pariwisata 5. Bidang Tenaga Kerja; 6. Bidang Perindustrian; 7. Bidang Perdagangan; 8. Bagian Perekonomian Setda			
				3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Urusan 2 dokumen	Koordinasi dan memfasilitasi dokumen perencanaan RKPD 3 urusan pada bidang 1. Bidang Kelautan dan Perikanan; 2. Bidang Pertanian; 3. Bidang Pangan.	Perubahan iklim yang tidak menentu sehingga mempengaruhi produktivitas dan hasil pertanian	Penggunaan bahan-bahan organik serta menggunakan bibit unggul untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim	
				c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100% Terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kurangnya anggaran dan perubahan iklim	Mengusulkan tambahan anggaran dan memaksimalkan anggaran di APBN dan DAK serta update data	
				1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 urusan 1 dokumen	Koordinasi dan penyusunan bahan materi RKPD 3 urusan pada bidang: 1. Bidang Pekerjaan umum dan tata ruang;	Kurangnya anggaran karena beberapa dokumen yang harus di review antara lain: 1. Standar sanitasi Kabupaten; 2. EHRA: dan 3. RP3KPKPK	Mengusulkan tambahan anggaran dan mengefektifan usulan APBN dan DAK	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2. Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 3. Bidang perhubungan 4. Bidang Lingkungan Hidup			
				2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 urusan	Monitoring dan evaluasi di 3 urusan pada bidang 1. Bidang Pekerjaan umum dan tata ruang; 2. Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 3. Bidang perhubungan; 4. Bidang Lingkungan Hidup.	1. adanya perubahan iklim sehingga mempengaruhi pilar konsistensi infrastruktur dengan kondisi baik; 2. angka air bersih dan sanitasi masih sangat rendah	1. Meningkatkan kualitas bangunan infrastruktur; 2. Menghimpun kembali air bersih dan sanitasi sebagai databaseline	
2	Penelitian dan Pengembangan	Bappeda		1. Program Penelitian dan Pengembangan					
				Persentase Pemanfaatan hasil penelitian dan Pengkajian	100%	100%	1. Keterbatasan memberikan informasi dan publikasi ke bawah dari tingkat kecamatan sampai dengan desa	1. Mendasarkan kajian-kajian yang ada dengan permasalahan dan isu strategis daerah	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2. Keterbatasan SDM pengampu kegiatan 3. Penyediaan data dukung dari Perangkat Daerah yang belum optimal	2. Melibatkan stakeholder dalam penyusunan dokumen kelitbangan 3. Sosialisasi dan desiminasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan dukungan perencanaan dan penganggaran	
				Persentase Hasil Krenova yang Dikembangkan	60%	100%	1. Masih banyak data inovasi yang belum terinventarisasi 2. Peran serta Perangkat Daerah dan masyarakat dalam inovasi belum optimal	1. Menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) tingkat kabupaten	
				a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	100%			
				1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 dokumen	1. dokumen kajian teknokratik yang tersusun (Penyusunan Dokumen Sistem novasi Daerah)	Terbatasnya anggaran untuk penelitian dan pengkajian,serta terbatasnya SDM	Dilakukan dg membuat kajian mandiri tanpa melibatkan akademisi dan pihak ketiga. Memanfaatkan sumber daya yang ada di bidang litbang	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2. dokumen dokumen Indeks Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tersusun			
				2) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 kegiatan	1 kegiatan fasilitasi pelaksanaan data kelitbangan	Terbatasnya anggaran utk fasilitasi kelitbangan yg mencakup banyak kegiatan : 1. penyusunan jurnal kelitbangan, 2. Penyusunan Peraturan Bupati ttg penyelenggaraan Inovasi Daerah, 3. penyusunan SIDA, IID/IGA, PDSD, krenova dan SUSI AWARD	memaksimalkan anggaran yang ada	
				b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					
				1) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 kegiatan 1 dok	1 kegiatan fasilitasi pelaksanaan KKN 1 kegiatan fasilitasi pelaksanaan TJSLP 1 dokumen Indeks Daya Saing Daerah	Terbatasnya anggaran utk fasilitasi KKN, TJSLP dan PDSD	memaksimalkan anggaran yang ada	
				c) Pengembangan Inovasi dan Teknologi					
				1) Penelitian, Pengembangan, dan	35 karya 1 dokumen	20 karya krenova masyarakat terjangkau	Terbatasnya anggaran utk fasilitasi lomba	memaksimalkan anggaran yang ada	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		15 karya krenova perangkat daerah terjaring 1 dokumen Indeks Inovasi Daerah	krenova dan IGA		
3	Pengawasan	Inspektorat		1. Program Penyelenggaraan Pengawasan					
				Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 2. Temuan pemeriksian terkait kebijakan lama ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu 3. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi 4. SDM APIP kurang/terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa; 2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama; 3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan 	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	42%	80,29%	1. kurang pahamnya auditor dalam melaksanakan evaluasi SAKIP., 2. Kurang Pahamnya Perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP, 3. Waktu pelaksanaan reviu yang kurang dengan obrik yang banyak dan SDM terbatas	1. melaksanakan peningkatan kompetensi terhadap evaluator/Auditor.; 2. Melaksanakan bimtek SAKIP untuk OPD; 3. pelaksanaan Reviu dilaksanakan dengan desk langsung (fullboard)	
				Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	17%	38,17%	1. pelaksanaan reviu dengan waktu yang mendesak; 2. Jumlah Personil terbatas	1 Pelaksanaan reviu dilaksanakan secara karantina agar selesai tepat waktu; 2. Personil melaksanakan tugas tambahan	
				Prosentase Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	31%	91,17%	1. belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa 2. jumlah personil yang terbatas 3. belum semuanya dapat dilakukan pengawasan	1. auditor diusulkan untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa 2. Personil melaksanakan tugas tambahan 3. pemilihan obrik dilakukan dengan pemetaan risiko	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
				1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 PD	Terlaksananya audit kinerja di 5 Perangkat Daerah: 1. Dinarpus; 2. DKPPP; 3. Dinkes; 4. Dinkominfo; 5. BPBD	Belum ada diklat audit kinerja	Diadakan diklat/PKS erkait audit kinerja	
				2) Reviu Laporan Kinerja	47 PD	114 PD terdiri: 1. Reviu LKJIP Kabupaten 1 2. Evaluasi SAKIP 45 PD 3. Reviu LPPD 1 4. Reviu renja+Perubahan 12 PD 5. Rev KUA PPAS 1 6. Evaluasi PPRG 5 PD; 7. Rebiu RKPD Perubahan PDDT 1 PD	Waktu yang singkat dalam reviu dan SDM yang terbatas untuk bisa mencakup semua OPD bisa direviu	Reviu dilaksanakan dengan desk menginap (fullboard)	
				3) Reviu Laporan Keuangan	25 dokumen	144 dokumen : 1. Reviu RKA &RKPA 20 PD 2. Reviu Dak Fisik dan Non Fisik 6 PD 3. Reviu LKPD 4. Reviu dan Audit Dana BOS 60 Sekolah;	1. Masih belum adanya pemahaman OPD terkait ketepatan waktu dan kelengkapan Laporan Keuangan sehingga memudahkan Tim reviu dalam mealksnakan tugasnya.	1. Perlu adanya penekanan kepada OPD untuk penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						5. Rev tata kelolapajak daerah 1; 6. Reviu PAPBJ 7. Reviu SSH, ASB, HSPK; 8. Reviu BMD	2. Masih adanya pendapat bahwa reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat terlalu lama; 3. Terbatasnya waktu yang diberikan kepada Tim reviu Inspektorat dalam melaksanakan reviu.	2. Memberikan sosialisai kepada OPD bahwa selama dokumen lengkap tim reviu akan segera menyelesaikan reviu dengan cepat; 3. Berkomunikasi dengan BPKPAD terkait permintaan reviu Laporan Keuangan lebih memperhatikan waktu yang cukup untuk Tim reviu melaksanakan tugasnya.	
				4) Pengawasan Desa	45 desa	280 desa: 1. Monev asset desa 266 desa; 2. Pendampingan PBJ Desa 5 desa; 3. Rev kualitas belanja desa 1; 4. Evaluasi Dana Desa 5; 5. Audit Ketaatan	Penugasan berbenturan dengan adanya penugasan mandatori mendadak di luar PKPT	Penugasan diselesaikan sesuai urgensi waktu yang telah ditetapkan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5) Kerjasama Pengawasan Internal	1 kegiatan	1 kegiatan Kegiatan Gelar pengawasan Daerah	<p>Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya SOP yang baku dan mendukung pelaksanaan Pengawasan Internal. 2. Sarana Prasarana <p>Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan dan eselonisasi APIP (Inspektorat) yang disejajarkan dengan SKPD yang menjadi obyek Pemeriksaan 2. Perlu dukungan Politik dari Lembaga tertinggi di Daerah. 	<p>Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan update SOP terkait pengawasan Internal. 2. Mengusulkan penambahan Sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan. <p>Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan adanya perbaikan eselon di Inspektorat Daerah guna memperlancar pelaksanaan Pengawasan terhadap OPD di Daerah; 2. Lebih meningkatkan komunikasi dengan Lembaga Tertinggi di daerah guna mendapatkan dukungan Politik dalam pelaksanaan Pengawasan di daerah. 	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	115 obrik 12 bulan	Pelaksanaan tindak lanjut pada 132 obrik yaitu 1. 111 desa, 2. 29 perangkat daerah dan 3. 2 desa	1. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 2. Temuan pemeriksian terkait kebijakan lama ditidakanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu 3. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi 4. SDM APIP kurang/terbatas	1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa; 2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama; 3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan	
				b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					
				1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	100%	100% Penanganan18 kasus aduan	1. Sarana prasarana kurang. 2. Metode kerja pengawasan, 3. Persepsi negative terkait pengawasan Dominannya Lembaga pengawas eksternal.	1. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung pengawasan. 2. Memperbaiki metode kerja dengan menyusun SOP utamanya yang terkait dengan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								3. Melakukan sosialisasi kepada auditi terkait dengan pengawasan dengan mengedepankan unsur pembinaan. 4. Meningkatkan dan menjalin komunikasi secara intensif dengan Lembaga pengawas Internal	
				2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	60 PD	Terlaksana 71 pengawasan dengan tujuan tertentu dengan rincian : 1. 18 PD Reviu HPS; 2. Reviu DAK Non Fisik (BOK) Puskesmas 26; 3. Reviu Inakes/Vaksin 27;	1. Sarana prasarana kurang. 2. Metode kerja pengawasan, 3. Persepsi negative terkait pengawasan Dominannya Lembaga pengawas eksternal.	1. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung pengawasan. 2. Memperbaiki metode kerja dengan menyusun SOP utamanya yang terkait dengan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah 3. Melakukan sosialisasi kepada auditi	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					
				Nilai maturitas SPIP	3,15	3,008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP; 2. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah 3. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia; 4. Adanya peraturan baru dengan skala nilai baru dan parameter berbeda (membuat level spip turun) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP; 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian 3. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (2x setahun) 	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	40%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen PD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas; 2. Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ; 3. Adanya mutasi pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada PD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas 2. Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI 3. Dilaksanakan sosialisasi kepada PD yang dicanangkan sebagai ZI 	
				Persentase tindak lanjut aduan <i>Whistle Blowing</i>, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen PD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas; 2. Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ; 3. Adanya mutasi pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada PD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas 2. Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI 3. Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai ZI 	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Nilai Survey Penilaian Integritas	81,77	77,37	Adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan	Berkoordinasi dengan BKPSDM mengenai informasi kepegawaian yang paling update sesaat sebelum survei dilaksanakan agar populasi sample tepat	
				Prosentase penanganan aduan masyarakat	100%	100%	Masyarakat belum semuanya paham tentang tata cara pengaduan, sehingga aduan tidak jelas	Sosialisasi tentang tata cara pengaduan masyarakat	
				a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					
				1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8 kegiatan 20 buku	10 kegiatan rakor pengawasan 20 buku: 1. buku Perbup Perencanaan Pengawasan 10; 2. Buku SK PKPT;10	Permendagri sebagai dasar acuan penyusunan Perbup perencanaan pengawasan terlambat dikeluarkan	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Inspektorat provinsi terkait penusunan perbup perencanaan pengawasan	
				b) Pendampingan dan Asistensi					

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100% 100% 4.500 laporan 5 kegiatan 5 PD	1. Terkoordinirnya. Laporan LHKSN, LHKPN semua Peranagkat Daerah; 2. Survei SPI yang dilakukan oleh KPK dibantu BPS secara online 3. Laporan LHKASN 616 pegawai; 4. Rakor Saber punli dengan tim Kejaksaan, Polri, Tni dan Pemda 5. Pendampingan ZI di 5 Perangkat Daerah (DPMPTSP, Capil, BKPSDM, Bappeda, RSUD	1. Belum semua PD dan personil mengerti akan pentingnya benturan kepentingan, nilai integritas, zona integras, SPI, LHKASN LHKPN; 2. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat terlaksananya kegiatan sehingga diperlukan refresh atas informasi tentang benturan kepentingan, nilai integritas, zona integritas, SPI, LHKASN dan LHKPN; 3. Adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan Adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan Adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan;	1. Perlu penyegaran kembali baik dengan sosialisasi, pendampingan dalam penyusunan rencana Tindak Pengendalian benturan kepentingan, nilai integritas, zona integras, SPI, LHKASN LHKPN; 2. Melaksanakan pendampingan yang lebih intensif kepada PD dan evaluasi benturan kepentingan dan pembangunan Zona Integritas	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>4. Integritas Penyelenggara Negara terhadap pelayanan publik yang diberikan belum meningkat secara signifikan.</p> <p>5. 3 PD pd ZI (bappeda, BKPS DM, RSUD) tidak memenuhi batas minimal IPKP dan/IPAK</p>		
				2) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 kegiatan	Kegiatan: Pendampingan SPIP di 46 PD	<p>1. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP)</p> <p>2. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh,</p> <p>3. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk</p>	<p>1. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada PD secara rutin (2x setahun)</p> <p>2. Perlu penyegaran kembali baik dengan sosialisasi, pendampingan dalam penyusunan rencana Tindak Pengendalian</p> <p>3. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas</p>	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/ berkembang	pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian; dan perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung	
3	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM)		1. Program Kepegawaian Daerah	79,13%	93,28%	Terdapat beberapa regulasi baru tentang manajemen kepegawaian baik kebijakan atau petunjuk teknis	Konsultasi dan Koordinasi secara intens ke Kementerian atau instansi terkait	
				Persentase penyusunan formasi pegawai	100%	100%	1. Beberapa jabatan belum disesuaikan dengan peta jabatan yang ada 2. Beberapa jenjang JF belum terakomodir dalam peta jabatan yang ada.	1. Dilakukan bimtek/diklat penghitungan. 2. Koordinasi internal di BKPSDM dan koordinasi yang intensif dengan Bag. Ortala Setda dan PD (perlu reviu Anjab ABK).	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3. Pengusulan kebutuhan SDM menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terbatas		
				Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan dan kevalidan berkas usul pensiun. b. Pegawai yang akan pensiun belum/tidak upload pdf dokumen kepegawaian sebagai kelengkapan usul pensiun melalui e-file di Simpeg. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat edaran dan sosialisasi kepada yang menangani kepegawaian atau PNS yang akan pensiun agar melakukan update data dan upload dokumen elektronik di SIMPEG. 2. Koordinasi yang intensif dengan PD dan BKN. 	
				Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berkas belum lengkap. 2. Proses verifikasi hingga terbitnya SK menunggu Pertek BKN yang memakan waktu lama. 3. Keterlambatan upload dokumen P2KP dan SKP dikarenakan ada perubahan peraturan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan personil/SDM pengampu usul kenaikan pangkat (petugas verifikator, petugas input data SAPK dan petugas <i>upload</i> dokumen di DocuDigital BKN). 2. Mengoptimalkan komunikasi dengan PD dan BKN. 	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	80%	86,51%	Keterbatasan sumberdaya SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan struktural	Menambah kuota peserta diklatpim.	
				Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	47%	42,09%	Keterbatasan sumberdaya SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan	Menambah kuota peserta diklatpim, khususnya perempuan	
				Persentase Pelanggaran disiplin ASN	0,2%	0,02%	Sosialisasi Peraturan Per UU an terhadap para pejabat struktural kadang tidak tersampaikan kepada para pejabat pelaksana/fungsional	Dilakukan sosialisasi kepada unit PD terkecil secara non formal	
				Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	90%	14,29%	Terjadinya kasus pada akhir triwulan IV sehingga pada bulan tersebut masih dilakukan tahapan penyelesaian kasus.	Memaksimalkan dan mengupayakan penyelesaian kasus di triwulan berkenaan.	
				Persentase Pelaksanaan <i>Updating</i> Data Kepegawaian	95%	100%	Bukti fisik terhadap update data kepegawaian dari PD tidak tersampaikan ke BKPSDM	Konfirmasi ke PD atas kebenaran perubahan/ update data kepegawaian yang dilakukan.	
				Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	100%	100%	Perlu ketelitian dalam proses verifikasi usulan JF, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berbeda dan beragam bagi masing-masing jabatan fungsional yang ada.	Dilakukan Pembinaan dan Koordinasi dengan instansi pengusul	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
				1) Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	1 dokumen	3 dokumen: 1. Usulan Proyeksi Kebutuhan 2023 ke BKN. 2. Usulan Formasi lulusan PKN STAN. 3. Usulan Formasi lulusan IPDN	1. Beberapa jabatan belum disesuaikan dengan peta jabatan yang ada 2. Beberapa jenjang JF belum terakomodir dalam peta jabatan yang ada. 3. Pengusulan kebutuhan SDM menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	1. Bimtek/diklat penghitungan jumlah kebutuhan pegawai. 2. Koordinasi internal di BKPSDM dan koordinasi yang intensif dengan Bag. Ortala Setda dan PD (perlu <i>reviu</i> Anjab ABK).	
				2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 kartu/sk	406 SK Pensiun Reguler terbit: 1. Jan: 25 SK 2. Feb: 33 SK 3. Mrt: 35 SK 4. Apr: 36 SK 5. Mei: 44 SK 6. Jun: 35 SK 7. Jul: 39 SK 8. Agt: 43 SK 9. Sep: 24 SK 10. Okt: 41 SK 11. Nov: 23 SK 12. Des: 28 SK 24 SK Non Reguler Pensiun: 1. APS: 5 SK 2. MD: 19 SK	Kelengkapan dan kevalidan berkas usul pensiun Pegawai yang akan pensiun belum/tidak <i>upload</i> pdf dokumen kepegawaian sebagai kelengkapan usul pensiun melalui e-file di Simpeg.	1. Membuat surat edaran dan sosialisasi kepada yang Kasubag Umpeg atau PNS yang akan pensiun agar melakukan <i>update</i> data dan <i>upload</i> dokumen elektronik di SIMPEG. 2. Koordinasi yang intensif dengan PD dan BKN.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 PD/ 5.000/record	46 PD/ 12.219 <i>record</i> usulan perubahan data PNS yang diverifikasi	Bukti fisik terhadap <i>update</i> data kepegawaian dari PD tidak tersampaikan ke BKPSDM	Konfirmasi ke PD atas kebenaran perubahan/ <i>update</i> data kepegawaian yang dilakukan.	
				b) Mutasi dan Promosi ASN					
				1) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.00	1. 833 orang/ SK 2. Periode April: 494 orang/SK 3. Periode Oktober: 339 orang/SK	1. Berkas belum lengkap. 2. Proses verifikasi hingga terbitnya SK menunggu Pertek BKN yang memakan waktu lama. 3. Keterlambatan <i>upload</i> dokumen P2KP dan SKP dikarenakan ada perubahan peraturan.	1. Mengoptimalkan personil/SDM pengampu usul kenaikan pangkat (petugas verifikator, petugas input data SAPK dan petugas <i>upload</i> dokumen di DocuDigital BKN). 2. Mengoptimalkan komunikasi dengan PD dan BKN.	
				2) Pengelolaan Promosi ASN		2 dokumen 1. Pelantikan JPT, tgl 4 Feb 2022 2. Pelantikan Es 3 dan 4, tgl 10 Juni 2022	Keterbatasan sumberdaya SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan struktural	Menambah kuota peserta diklatpim.	
				c) Pengembangan Kompetensi ASN					
				1) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	3 orang	Bantuan beasiswa Tugas Belajar untuk 14 orang: 1. Wahyuni D. P, SKM	Pengajuan beasiswa dari PNS yang tugas belajar baru dilaksanakan di akhir tahun anggaran.	Koordinasi dengan ybs dan PD untuk segera mengajukan permohonan bantuan beasiswa tugas belajar.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2. Ristanti, A.Md.Keb 3. Retno P, A.Md.Keb 4. Meidina F, SKM 5. Haryanti B. R, A.Md.Keb 6. dr. Sri Rahayuningsih 7. dr. Sadar S 8. dr. Anis M 9. Dewi R.A, SKM 10. Rismanto, A.Md 11. Sekar A.K, A.Md.KG 12. Beti H, S.Tr.Keb 13. Satya P.K, S.Farm.Apt 14. Muyasaroh, S.Farm.Apt			
				2) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		1. 203 SK JF terbit 2. Periode april: 154 SK 3. Periode okt: 49 SK	Perlu ketelitian dalam proses verifikasi usulan JF, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berbeda dan beragam bagi masing2-masing jabatan fungsional yang ada.	Dilakukan Pembinaan dan Koordinasi dengan instansi pengusul	
				d) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	100% Terlaksananya penilaian kinerja aparatur	Terdapat regulasi baru terkait Penyusunan SKP dan Penyusunan TPP	1. Koordinasi dengan BKD Prov, BKN Kanreg, dan Pusat 2. Sosialiasi kepada PD	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1/50 dokumen/orang 1 perbup	1 Perbup tentang TPP	Sosialisasi dari Kemendagri untuk tahapan <i>upload</i> syarat permohonan pengajuan TPP di Aplikasi Simona baru bisa dilaksanakan di bulan Januari 2023.	1. Konsultasi dengan Provinsi dan Pusat secara intens 2. Koordinasi dengan Tim Penyusun dan Pembina	
				2) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	46 unit kerja/PD 3 orang medical checkup	1. Sosialisasi SKP di semua PD. 2. <i>Medical Checkup</i> untuk 2 orang:	Adanya Peraturan tentang SKP dan P2KP yang baru dan baru.	1. Sosialisasi dan pendampingan penyusunan SKP dan P2KP secara intens dengan PD 2. Untuk <i>Medical Checkup</i> , koordinasi dengan ybs, keluarga, dan PD	
				3) Pembinaan Disiplin ASN	140 orang 25 unit kerja/PD 1.200 buah ID card	6 unit kerja/PD 1. Dinkes, 39 orang 2. SDN Kerokan, Tlogomulyo: 28 orang 3. Kasubag Umpeg PD: 26 orang 4. Sekcam: 20 orang 5. Kepala SD Koorwilcam Tmg: 37 orang 6. Kepala SD Koorwilcam Bejen: 29 orang Cetak 1.000 buah ID card untuk pejabat es 2,3,4, dan pelaksana	Sosialisasi Peraturan Per UU an terhadap para pejabat struktural kadang tidak tersampaikan kepada para pejabat pelaksana/fungsional	Dilakukan sosialisasi kepada unit PD terkecil secara non formal	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 orang 15 SK/orang	1 SK Hukuman Disiplin Ringan III terbit dari 7 kasus yang masuk.	Terjadinya kasus pada akhir triwulan IV sehingga pada bulan tersebut masih dilakukan tahapan penyelesaian kasus yang lain.	Memaksimalkan dan mengupayakan penyelesaian kasus dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.	
4	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)		1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
				Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	100%	99,73%	Keterlambatan Penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang berimbas pada keterlambatan penetapan RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Temanggung	Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
				Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	89,96%	100%	Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer masih kurang, karena PD pengampu sebagian besar belanja modal	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
				Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%	42,86%	Keterlambatan Penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang berimbas pada keterlambatan penetapan RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Temanggung	Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100%	100%	SKPD tidak respon terhadap verifikasi dokumen pengajuan dan lebih bersifat pasif dan tidak konfirmasi dan tidak koordinasi dengan BPKPAD	Kordinasi dengan SKPD lebih diintensifkan	
				Persentase realisasi keuangan	93%	87,61%	Rekonsiliasi BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan belum selesai, ada beberapa belanja yang tidak terealisasi	Kedepan Pemda mendorong PD untuk mencermati antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	
				Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	90%	95,65%	Faktor Sumber Daya Manusia	Pemda mendorong Perangkat Daerah segera melaksanakan target kinerja	
				Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	Pada saat IKD dilaporkan, belum semua SKPD mengirim SPJ Anggaran dan Kas Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan pergantian personil penatausahaan keuangan	Melakukan monitoring laporan keuangan dan Melaksanakan asistensi kepada Perangkat Daerah	
				a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					
				1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	4 dokumen	4 dokumen yaitu: 1. Dokumen rancangan KUA; 2. Dokumen rancangan PPAS; 3. Dokumen KUAS; 4. Dokumen PPAS	ketepatan waktu dalam menyusun dokumen dikarenakan menunggu penetapan dari DPRD	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS sebanyak 4 dokumen telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 dokumen	4 dokumen: yaitu: 1. Dokumen rancangan perubahan KUA; 2. Dokumen rancangan perubahan PPAS; 3. Dokumen perubahan KUAS;; 4. Dokumen perubahan PPAS	ketepatan waktu dalam menyusun dokumen dikarenakan menunggu penetapan dari DPRD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS sebanyak 4 dokumen telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
				3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.300 dokumen	2.300 DPA Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	Beberapa OPD rincian DPA tidak sesuai dengan ketentuan (rekeningnya berbeda, melampaui standar harga dll)	menyarankan OPD untuk merevisi anggaran dengan mekanisme bersurat sesuai dengan ketentuan	
				4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 dokumen	2 Dokumen (Perda Perubahan dan Perbup Pejabaran APBD)	permasalahan dalam menunggu penetapan dari DPRD	Berusaha sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	
				5) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 paket	0	Terjadi Refocusing sehingga Sub kegiatan dihapus	Kinerja kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah telah dapat dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yang ada.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					
				1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.344 dokumen	1.344 bankeu	Pada tahun 2022, pencatatan register khusus Bankeu masih manual sehingga masih kesulitan untuk mencari lokasi Bankeu	Sedang dibuatkan Aplikasi sederhana pada e-keuangan yang bernama Si Tuanku yang dapat digunakan pada tahun 2023	
				2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	7.660 dokumen	9.411 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Tidak semua OPD langsung menindaklanjuti hasil verifikasi sehingga pencairan SP2D terlambat	Perangkat Daerah segera melengkapi persyaratan verifikasi sehingga SP2D dapat segera diterbitkan	
				3) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	104 dokumen	1.248 dokumen (dari 103 OPD dan 1 Bupati x 12 Bulan)	Permasalahan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) tidak terkonfirmasi	Rekonsiliasi kas dengan KPP Pratama, KPPN, SKPD.	
				c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%			
				1) Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	103 dokumen	103 Laporan keuangan SKPD)	Belum optimalnya laporan keuangan SKPD sehingga menghambat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah	Mengoptimalkan laporan keuangan SKPD dengan melakukan rekonsiliasi antar bidang pada BPKPAD selaku SKPD	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7 dokumen	7 dokumen (LRA, LP SAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK	Kewajiban Pemda untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dan tepat waktu	Melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah	
				3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen yaitu Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1 Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi: 2 Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD	kewajiban pemda untuk menyusun dan menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Menyusun dan menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
				4) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung-jawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	103 dokumen	(103 laporan SKPD)	Adanya beberapa SKPD yang tidak akuntabel dan tidak tepat waktu dalam menyusun dan menyampaikan laporan	Melakukan pembinaan terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada seluruh SKPD.	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					-
				Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	86,31%	100%	Sumber Daya Manusia di SKPD	Koordinasi dengan SKPD lebih intensif	
				Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	98,90%	88,21%	Pihak yang memanfaatkan aset Pemda belum melakukan permohonan perpanjangan atas aset Pemda yang dimanfaatkan	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD tentang pemanfaatan barang milik daerah	
				a) Pengelolaan Barang Milik Daerah					
				1) Penyusunan Standar Harga	103 satuan kerja	103 surat usulan dari OPD, hasilnya 2 dokumen yaitu standar harga penetapan dan standar harga perubahan	Standar harga yang terdiri dari 103 satuan kerja telah tersusun	Standar Harga telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
				2) Penatausahaan Barang Milik Daerah	103 unit kerja	103 unit kerja	masih terdapat SKPD yang melaporkan SPJ barang kurang tepat waktu	Dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait kendala yang dihadapi agar dapat melaporkan SPJ tepat waktu	
				3) Pengamanan Barang Milik Daerah	720 bidang	453 bidang (453 Jumlah Sertifikat tanah yang terbit)	Terdapat tanah-tanah pemerintah yang belum bersertifikat	Melakukan pengukuran ulang jalan kabupaten dan irigasi untuk pensertifikatan atas aset yang belum bersertifikat	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 satuan kerja	965 Tanah/Bangunan (958 Tanah dan 7 Bangunan)	Penyewa tidak segera memperpanjang kontrak	Melakukan koordinasi dan bersurat dengan penyewa	
				5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	103 satuan kerja	103 satuan kerja	Meskipun semua OPD telah melaporkan laporan BMD akhir tahun, tetapi ketepatan waktu masih perlu perbaikan	Mengeluarkan Surat Pemberitahuan pada OPD agar melaporkan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.	
				3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					-
				Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	0,96	1,94	belum semua Wajib Pajak mempunyai kesadaran sendiri untuk mendaftarkan objeknya, sedangkan petugas dan sumber daya bidang pendapatan sangat terbatas.	Peningkatan anggaran dan peningkatan kapasitas SDM petugas untuk kegiatan pendataan baru	
				Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100%	100%	Untuk PBB-P2 tergantung masih bergantung pada peran aktif wajib pajak dan perangkat desa, sedangkan untuk BPHTB masih bergantung pada peran PPAT/PPATS	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi	
				Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100%	100%	Masih ditemukan perbedaan antara izin dan pajak	Koordinasi dengan DPM dan Satpol PP terkait	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							reklame, sedangkan Satpol PP belum mempunyai data yang terkirim secara cepat dan otomatis terkait pelanggaran izin dan pajak reklame.	penyelenggaraan reklame agar tercipta sinkronisasi antara pajak dan izin reklame, dan dapat diketahui reklame yang telah terpasang namun belum berizin dan belum bayar pajak.	
				Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	90%	96,35%	belum tersedianya alat bantu yang mampu memonitor capaian pendapatan daerah secara real time membuat penyajian informasi capaian pendapatan daerah secara keseluruhan tidak bisa dilakukan secara instan dan cepat	membuat aplikasi yang bisa digunakan membantu menyajikan laporan pendapatan daerah	
				Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	95%	100%	pelaporan yang dilakukan tidak bisa diawal waktu, seringnya terjadi diatas tanggal 7 tiap awal bulannya. hal ini disebabkan karena sumber daya manusia di perangkat daerah terbatas dan bertumpuknya tugas yang lain membuat pelaporan tidak dapat dilakukan awal waktu	selalu mengingatkan kepada perangkat daerah tentang pentingnya melaporkan pendapatan yang sudah diperoleh tiap awal bulan, baik ketika ada rakor pimpinan maupun ketika dilakukan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					
				1) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	600 OP/WP	1.886 OP/WP yang terdiri dari Pajak air tanah 642 dan Pajak Reklame 1.244)	Masih terdapat beberapa Subyek dan Obyek pajak yang seharusnya bisa ditetapkan sebagai subyek dan Obyek pajak namun belum terdata	Melakukan pendataan terus menerus terhadap subyek dan obyek pajak dan ditetapkan sebagai subyek dan obyek pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku	
				2) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 bulan	12 bulan	masih terdapat data obyek pajak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	Melakukan desk NJOP dengan perangkat desa/kelurahan	
				3) Penagihan Pajak Daerah	12 bulan	12 bulan	Terdapat beberapa Wajib Pajak yang menunda/menolak melakukan pembayaran pajak	Petugas pajak melakukan penagihan kepada wajib pajak	
				4) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 bulan	12 bulan	Adanya keterlambatan pengiriman Berita Acara Rekonsiliasi Retribusi yang menghambat penyusunan laporan keuangan SKPD	Membuat <i>Google formulir</i> untuk mendapatkan angka retribusi dengan jumlah yang tepat agar laporan keuangan dapat tersusun secara tepat waktu	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah (SETDA)		1. Program Perekonomian dan Pembangunan					
				Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100%	100%	Pelaksanaan pengadaan/jasa di PD belum dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang diinput dalam RUP	Membuat surat Sekretaris Daerah Nomor: P/00005/050/I/2022 Tgl. 4 Januari 2022 tentang Pengisian SIRUP Tahun Anggaran 2022 dan percepatan kegiatan PBJ dengan rapat koordinasi, dan sinergi dengan Bagian Pembangunan	
				Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan	100%	100%	Persiapan Perencanaan dari OPD dalam pemaketan kegiatan sering berbeda dengan pelaksanaan	Membuat surat Sekretaris Daerah Nomor: P/00005/050/I/2022 Tgl. 4 Januari 2022 tentang Pengisian SIRUP Tahun Anggaran 2022 dan percepatan kegiatan PBJ dengan rapat koordinasi, dan sinergi dengan Bagian Pembangunan	
				Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan NonTender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	50%	96.51%	Belum tercapainya prosentase pelaksanaan PBJ di OPD untuk pagu <50juta dalam pencatatan NonTender di aplikasi LPSE	Membuat surat Sekretaris Daerah Nomor: P/1919/050/01/XI/2021 tentang Pencatatan Non Transaksional pada SPSE versi. 4.4 Tgl. 15 November 2021	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a) Pelaksanaan ULP dan LPSE					
				1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.000 Paket	6.720 Paket terdiri dari: 1. Tendering 136 paket 2. ePurchasing 152 Paket 3. Penunjukan Langsung 4.893 paket 4. Dikeculikan 1.539 paket	Jumlah Keseluruhan paket pekerjaan di SIRUP yang sering berubah karena kewenangan Pengguna Anggaran	Membuat surat Sekretaris Daerah Nomor: P/00005/050/II/2022 Tgl 4 Januari 2022 tentang Pengisian SIRUP TA 2022 dan percepatan kegiatan PBJ dengan rapat koordinasi	
				2) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	103 Perangkat Daerah	1. Dinas/Badan: 25 2. Bagian Setda: 9 3. Kecamatan: 20 4. Kelurahan: 23 5. Puskesmas 26	Pelaku pengadaan belum sepemahaman terkait Aturan tentang pengadaan barang/jasa yang perubahannya cepat	1. Upgrade spse versi 4.4 dan aplikasi AMEL di LPSE 2. Dibuat Surat Sekda Nomor P/204/050/01/XI/2022 tentang pencatatan Non transaksional pada SPSE v.4.4	
				3) Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Kegiatan	Kegiatan: 1. Bimbingan teknis dan pelatihan belanja secara online pada merketpalce bela pengadaan melalui blangkon jateng tahun 2022 2. Sosialisasi katalaog lokal pemkab Temanggung kepada pelaku usaha	1. Prosentase pelaksanaan belanja manual masih banyak dibanding belanja melalui online untuk pagu anggaran <50Juta 2. Minimnya informasi ke pelaku usaha dalam menayangkan produk	1. Dibuat Surat Edaran Sekda No. 001317/TAHUN 2022 tentang percepatan penyelenggaraan katalog dan pemanfaatan toko daring 2. Dibuat SE Sekda No. 00441/TAHUN 2022 tentang Gerakan Peningkatan Produk dalam Negeri	

No	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3. Bintek Pengisian RUP pada Aplikasi SIRUP tahun 2022 4. Rakor Evaluasi PBJ TA 2022 dan Perencanaan PBJ TA 2023 di Pemkab Temanggung	3. belum sepemahaman terkait Aturan tentang pengadaan barang/jasa yang perubahanya cepat	3. Upgrade spse versi 4.4 dan aplikasi AMEL di LPSE 4. Dibuat Surat Sekda No. P/310/005/01.05/2022 tentang Tindak lanjut katalog lokal Pemkab Temanggung	

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis daerah tahun 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pengurangan kemiskinan. Kebijakan strategis ditetapkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan isu strategis daerah sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Kebijakan Strategis Daerah dalam Rangka Penyelesaian Masalah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM		TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3		4
1.	Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19	1.	1. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022 Kepada Ojek, Pelaku Usaha Mikro dan Pengemudi penumpang Umum di Kabupaten Temanggung 2. Keputusan Bupati No 460/398 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 Kepada Ojek, Pelaku Usaha Mikro, dan Pengemudi Angkutan Penumpang Umum di kabupaten Temanggung.	Penanganan dampak inflasi di kabupaten Temanggung
		2.	1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Peraturan Bupati Temanggung nomor 14 Tahun 2018 tentang Penempatan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kuliner Taman Pengayoman Kabupaten Temanggung;	Penataan dan Pemberdayaan PKL.

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM		TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3		4
			2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.	
		3.	1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian 2. Keputusan Bupati Temanggung nomor 520/430 Tahun 2022 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Temanggung	Pengawasan pupuk bersubsidi.
		4.	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah berupa los, kios dan pertokoan Pasar Daerah di Kabupaten Temanggung
		5.	1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Mewujudkan Pasar digital (E-retribusi, Qris, SIMPASAR) guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan pendapatan asli daerah seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan	Penyusunan landasan, arah, dan kebijakan dalam rangka Pelaksanaan pembangunan tenaga kerja serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya
		7.	Keputusan Bupati Temanggung Nomor 973/270 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022	Pencapaian target pendapatan PBB-P2 tahun 2022

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM		TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3		4
2.	Optimalisasi Reformasi Birokrasi	8.	1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah 2. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 072.3/0293 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui inovasi.
		9.	Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 113 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		10.	Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	Panduan Penegakan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa
		11.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung
		12.	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung	Meningkatkan kualitas pengelolaan kesehatan, menata pembangunan kesehatan secara sinergis, memenuhi hak kebutuhan semua komponen dalam pembangunan kesehatan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan penyelenggara kesehatan.
		13.	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung	Panduan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana tanah Longsor.
		14.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
		15.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Pengembangan dan pembinaan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
		16.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Sebagai Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil PNS;

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM		TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3		4
3	Penanggulangan Kemiskinan terdampak Covid-19	17.	Surat Keterangan Bupati Temanggung No 444/166 Tahun 2022 tentang Desa/Kelurahan Lokasi Prioritas Penanggulangan Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2023	Menentukan Lokasi Prioritas Penanggulangan Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
		18.	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung	Membuat rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung pariwisata.
4	Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	19.	Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022	Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sebagai landasan, arah, dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan
		20.	1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023; 2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.	Penyusunan Renstra PD yang menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 serta sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja PD yang mengarah pada pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU).
		21.	Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/371 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Evaluasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	Penyusunan Evaluasi Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 guna mengevaluasi kinerja Perangkat P-RPJMD Tahun 2013-2018. Menjelaskan capaian-

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM		TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3		4
				<p>capaian Indikator Kinerja Daerah P-RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 beserta analisisnya yang meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, dan urusan penunjang pemerintahan.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan menganalisis tingkat pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten Temanggung sebagaimana termuat dalam P-RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 berdasarkan pencapaian indikator sasaran, indikator program dan penganggaran yang telah ada; 2. Menganalisis tentang permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan upaya pemecahan yang telah dilaksanakan di masing-masing PD; dan 3. Memberikan masukan/rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi guna penyesuaian dan

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM		TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3		4
				pencapaian target pembangunan Kabupaten Temanggung seperti yang termuat dalam P-RPJMD Tahun 2018-2023.
		22.	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041
		23.	Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa sesuai ketentuan dan mendukung prioritas kegiatan Pemerintah Kabupaten Temanggung
		24.	Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2023	Penyusunan Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyusunan APBDes
		25.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022	Penyusunan Pedoman Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022
		26.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM		TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3		4
		27.	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;</p> <p>2. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga</p>	Mewujudkan Temanggung Bebas Sampah
		28.	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Melaksanakan Gerakan Konservasi Tanah dan Air yang Berkelanjutan guna Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
		29.	Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengembangan Kawasan Industri

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2021

Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2021

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Capaian IPM Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 69,88, nilainya masih dibawah rata rata Provinsi Jawa Tengah, dimana IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 rerata sebesar 72,16. Kabupaten Temanggung termasuk salah satu dari 14 Kabupaten dari 29 Kabupaten di Jawa Tengah yang IPM nya masih di bawah 70, hal ini tentu patut memperoleh perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah agar ketertinggalan dalam pembangunan SDM tidak terlalu jauh disparitasnya dengan daerah lainnya. Memang Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 2014 - 2020 cenderung meningkat namun dengan rata rata laju peningkatannya lamban (rerata 0,38% pertahun), tahun 2020 lajunya	a. Perlu adanya kebijakan yang lebih kreatif dan inovatif untuk percepatan capaian IPM Kabupaten Temanggung, sehingga kualitas SDM Temanggung tidak terlalu jauh mutunya dengan daerah sekitar. Harapannya mutu sumber daya manusia tidak ikut menurun di tengah pandemi covid-19 sekarang ini, memang salah satu komponen perhitungan SPM yaitu Pendidikan.	Kebijakan dalam rangka percepatan capaian IPM Kabupaten Temanggung, dari sisi peningkatan kualitas SDM adalah melalui Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah agar mencapai Wajar Dikdas 9 tahun dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Pemetaan dan pendataan anak usia sekolah dengan pemilahan anak sekolah, anak tidak sekolah, anak tidak melanjutkan sekolah dan anak putus sekolah dengan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan database terkait, sehingga dapat disusun langkah dan rencana aksi penuntasan anak usia sekolah agar dapat mengakses pendidikan baik formal maupun non formal. b. Memberikan informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya yang memiliki anak usia didik agar dapat memberikan motivasi kepada anaknya agar mengakses fasilitas pendidikan yang ada. Layanan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan prestasi yang dicapai,	Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dengan menekan jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah di Kabupaten Temanggung dan penyediaan anggaran utk ATS melalui kejar Paket A, B dan C.

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>lebih lamban dibanding tahun sebelumnya, dari 68,34 pada tahun 2017 dua tahun kemudian menjadi 69,56 pada tahun 2019 dan sebesar 69,88 ditahun 2021.</p>		<p>kemudahan akses pembelajaran dan fasilitasi bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yang akan tetap dilayani dengan sarana prasarana pendidikan yang ada.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dengan mengupayakan pemenuhan standar minimal pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu serta perintisan model pembelajaran yang sesuai dengan regulasi.</p> <p>d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kualitas kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan. Pemetaan kebutuhan dan kondisi sarana prasarana pendidikan sesuai dengan kondisi riil di sekolah dan alternatif pembiayaan yang dapat mencukupi kebutuhan tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan kondisi sarana prasarana pendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan.</p> <p>e. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan kesetaraan yaitu pelayanan untuk semua paket pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi semua kategori usia, dilakukan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM lembaga pendidikan kesetaraan yang sudah ada serta metode pembelajaran lembaga kesetaraan</p>	

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>yang mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan tetap mengacu kepada metode pembelajaran dan kurikulum kesetaraan yang sudah ada.</p> <p>f. Penanganan anak tidak sekolah melalui Gerakan Kembali ke Sekolah (GKS); dengan melakukan kampanye agar anak usia sekolah mau mengakses pendidikan formal maupun informal disertai dengan revitalisasi lembaga pendidikan kesetaraan (26 PKBM dan 1 SKB) serta dengan melakukan penataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, warga belajar, lembaga dan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan regulasi pelayanan minimal pendidikan di jenjang kesetaraan</p> <p>g. Melaksanakan revitalisasi Dapodik dengan melaksanakan pembaharuan data dan penataan komponen didalamnya, baik tenaga pendidik dan kependidikan, data peserta didik, sarana prasarana pendukung dan kelembagaan sehingga pelayanan pendidikan dapat optimal disertai dengan kebijakan pendukung yang berbasis kepada data Dapodik.</p> <p>h. Pemberian Bantuan siswa miskin masuk sekolah dengan didasari data dasar yang akurat dan valid didukung dengan komponen database pendukung yang sesuai, meliputi data kependudukan dan data kemiskinan daerah</p>	

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<p>sehingga bantuan beasiswa dapat diberikan tepat sasaran, tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan</p> <p>i. Pemenuhan kebutuhan pendidik dan kebutuhan yang disesuaikan dengan standar pelayanan minimal pendidikan, pemetaan kepegawaian (ASN dan Non ASN) dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar, kemampuan sarpras dan kebutuhan peserta didik yang ada.</p>	
		<p>b. Pandemi Covid-19 telah merubah sistem tatap muka pembelajaran di seluruh sekolah dari langsung menjadi daring, hal ini sangat mempengaruhi kualitas Pendidikan, untuk itu agar pemerintah daerah segera melakukan perencanaan kebijakan sekolah sehingga standar mutu Pendidikan tetap memenuhi syarat kebutuhan abad 21.</p>	<p>Menetapkan kebijakan pembelajaran normal dengan panduan kalender pendidikan yang telah ditetapkan disertai penerapan pembelajaran / kurikulum dengan acuan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek.</p>	<p>Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan pasca Pandemi Covid-19</p>
		<p>c. Sekolah harus segera mengejar ketertinggalan di bidang pembelajaran akibat covid 19 tahun 2020 dan tahun 2021 sekaligus merehabilitasi kehilangan masa sosialisasi antar siswa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 2. Proses pelayanan pendidikan dengan mempedomani Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan standar penilaian pendidikan. 	<p>Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan pasca Pandemi Covid-19</p>

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			3. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara normal di satuan pendidikan dan kunjungan rumah ke siswa 4. Pemberian bantuan BOP Program kejar paket dan modul untuk siswa kejar paket	
2.	<p>Kontraksi ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sudah mulai pulih bergerak kembali tumbuh positif 3,34%, namun demikian dampak dari kontraksi ekonomi tersebut masih dirasakan sampai akhir tahun 2021, memang pengangguran menurun akan tetapi angka kemiskinan masih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak dari pandemi covid 19 (menekan/menahan laju peningkatan kemiskinan) pada tahun 2021 belum cukup efektif hasilnya.</p>	<p>a. Pemerintah Daerah segera mengidentifikasi sektor perekonomian penyumbang PDRB mana saja yang sangat terpuruk, terpuruk dan normal oleh pandemi covid-19 ini, tiga kategori terdampak tersebut penting untuk diidentifikasi agar kebijakan pemda lebih tepat sasaran (efektif).</p>	1. Hasil identifikasi sektor perekonomian penyumbang PDRB: <ul style="list-style-type: none"> a. Sektor yang sangat terpuruk (penurunan PDRB $\geq 4\%$): sektor transportasi dan pergudangan b. Sektor yang terpuruk (kenaikan PDRB $\leq 2,5\%$): sektor industri pengolahan, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa lainnya c. Sektor yang mulai bangkit (kenaikan PDRB $\geq 2,5\%$): sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum d. Sektor yang normal (kondisi sebelum dan sesudah covid tidak banyak mengalami pergeseran): sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 	<p>Teridentifikasinya sektor perekonomian penyumbang PDRB mana saja yang sangat terpuruk, terpuruk, bangkit dan normal oleh pandemi covid-19</p>

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>b. Dari data hasil identifikasi berbagai sektor terdampak covid-19 tersebut, pemerintah daerah pada tahun anggaran perubahan 2022 segera mengambil langkah langkah taktis berupa kebijakan baik regulasi maupun anggaran yang memadai, untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelamatkan sektor yang sangat terpuruk • Memulihkan sektor yang terpuruk • Akselerasi sektor yang mulai bangkit dan • Perlindungan pada sektor yang normal agar perekonomian dan tingkat kesejahteraan sosial segera pulih kembali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemda merealisasikan dukungan sektor yang sangat terpuruk agar bisa bangkit kembali yaitu dengan Bantalan sosial tambahan berupa subsidi transportasi untuk angkutan umum, ojek dan lain-lain sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. 2. Pemberian Bantuan Sosial (berdasarkan Peraturan Bupati & SK Bupati). Mengalokasikan Bansos UEP kelompok sejumlah 240 KUBE dan perorangan sejumlah 63 orang, dengan anggaran Rp. 3.128.915.280,- 3. Mengalokasikan BLT DBHCHT dengan sasaran 9.188 orang, dengan anggaran Rp. 12.322.795.500. 4. Monitoring pelaksanaan pencairan Bantuan Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. membangkitkan sektor perekonomian yang sangat terpuruk akibat pandemi covid 19 2. menekan/ menahan laju peningkatan kemiskinan terutama untuk masyarakat yang bergerak di sektor yang sangat terpuruk dan sektor yang terpuruk. 3. Mempertahankan dan meningkatkan sektor yang sudah bangkit dari pandemi covid- 19
		<p>c. Mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat dengan menekan laju inflasi pada tingkat paling rendah, memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran dan penciptaan lapangan kerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dalam upaya menekan laju inflasi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting (Pemantauan harga secara rutin dilaksanakan di 6 Pasar Daerah dan dilaporkan melalui aplikasi SIHATI). 	<p>mempertahankan konsumsi masyarakat melalui menekan laju inflasi, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, dan penciptaan lapangan kerja.</p>

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. Memperlancar arus pasokan dan distribusi ke pasar c. Melaksanakan pencaangan gerakan menanam (penanaman komoditas cabai, bawang merah dan bawang putih terutama di kawasan food estate). d. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait (Melalui bazar dan Gerakan Pangan Murah (GPM)). e. Melaksanakan sidak pasar dan distributor untuk menjaga kestabilan harga pasar. f. Melaksanakan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah. <p>2. Upaya memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran dengan merealisasikan belanja wajib dari dana transfer umum sebesar 2% untuk program perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Sosial Ojek - Bantuan Sosial Sopir dan Angkutan Umum - BPUM <p>3. Upaya penciptaan lapangan kerja melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan komunitas dan koordinator umkm di tiap kecamatan untuk mempermudah akses informasi terkait kegiatan maupun fasilitasi bagi pengembangan UMKM 	

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan daya saing usaha dengan memberikan fasilitasi dan pendampingan kemudahan berusaha (pembuatan NIB). c. Membuka peluang event bazar bagi UMKM d. Menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan sumber daya UKM 	
		<p>d. Mempercepat realisasi konsumsi pemerintah (belanja APBD) tahun 2022 dengan mengutamakan bahan/ sumber daya dan produk lokal agar produksi barang dan jasa masyarakat bergerak pulih kembali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Percepatan proses pengadaan barang jasa, antara lain dengan edaran: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Sekretaris Daerah No. P/000724/050.3/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Percepatan pengadaan barang/jasa b. Surat Sekretaris Daerah No. P/103/005/IV/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa c. Surat Sekretaris Daerah No. P/0885/005/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Percepatan P3DN d. SE Sekretaris Daerah No. 00441 Tahun 2022 tentang Gerakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri e. SE Sekretaris Daerah No. 2396/ Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 2. Mendorong pembelanjaan pemerintah pada produk lokal yang <i>traceable</i> melalui toko daring (marketplace) 3. Mendorong UMKM agar bergabung pada toko daring (marketplace) 	<p>Percepatan realisasi belanja APBD dengan mengutamakan produk lokal</p>

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4. Dilaksanakan RPKK secara berkala dan rutin (triwulan)	
3.	<p>Realisasi Pendapatan daerah tahun 2021 melampaui target sebesar Rp.87,339 M lebih, atau ter-realisasi sebesar 104,6% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2021. Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp.175,394M lebih,</p> <p>atau ter-realisasi 91,5% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2021. APBD tahun 2021 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit Rp.169,695M pada Realisasinya justru surplus sebesar Rp.93,037 M lebih.</p> <p>Silpa sebesar 262,5 M lebih sebagaimana yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2021 atau senilai 12,3% tersebut dirasa sangat besar.</p>	a. Dari sisi Perencanaan terus melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2022 agar realisasi anggaran tahun 2022 lebih maksimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya percepatan perubahan APBD TA. 2022 telah dilakukan dan sesuai ketentuan perundang undangan. 2. Perubahan APBD Tahun 2022 telah mengakomodasi kebutuhan mendesak yang harus direalisasikan pada Tahun 2022 	Belanja wajib sesuai arahan Kementerian dan peraturan-peraturan terbaru telah terpenuhi di perubahan APBD TA 2022

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>b. Dari sisi pelaksanaan APBD melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi SKPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan untuk mempercepat penyerapan APBD antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Sekretaris Daerah No. P/000724/050.3/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Percepatan pengadaan barang/jasa b. Surat Sekretaris Daerah Nomor P/001471/050/VIII/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Bankeu TA. 2022 c. Surat Bupati Temanggung Nomor P/558/050.3/ 01.4/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Evaluasi Kegiatan s/d TW III d. Surat Sekretaris Daerah Nomor P/002313/050.3/ XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Efektivitas Kegiatan Tahun 2023 e. Surat Edaran Nomor 903/1371/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Percepatan Realisasi APBD TA 2022 2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Tiap Triwulan 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 	<p>Penyerapan anggaran Belanja pada saat ini sudah mencapai kurang lebih 90,55%.</p>

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		c. Terus melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (<i>idle cash</i>) atas Silpa tahun 2021 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar.	Langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (<i>idle cash</i>) atas Silpa tahun 2021 antara lain: 1. Melakukan evaluasi berdasarkan saldo kas daerah, penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran kas untuk menentukan jumlah dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito. 2. Menggunakan aplikasi Perbendaharaan Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk dapat memperkirakan kebutuhan belanja dari masing-masing SKPD, sehingga apabila ada sisa uang di RKUD dimasukan ke dalam Deposito	BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito untuk membiayai kebutuhan pengeluaran ataupun sebab lainnya.
		d. Perbaiki manajemen keuangan program dan kegiatan sehingga silpa tahun berjalan tidak kembali semakin membesar setiap tahunnya.	Kebijakan untuk mengantisipasi agar silpa tahun berjalan tidak besar adalah melalui penyesuaian penganggaran program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Kesesuaian sub kegiatan RKPD dan APBD mencapai 99,73 %
4.	a. Belanja Pegawai proporsinya terhadap total belanja daerah tahun 2021 sebesar 36,3%, jika dibandingkan dengan arahan UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan keuangan Pusat dan daerah) masih diatas yang diamanatkan sebesar 30% dari total belanja daerah diluar tunjangan guru (alokasi TKD).	Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dengan Ketentuan UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)	Belanja pegawai Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.163.271.983.090 (29.98%).	Proporsi belanja pegawai terhadap belanja daerah diluar tunjangan guru di bawah 30%

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>b. Untuk belanja modal secara nominal realisasinya meningkat dibanding tahun sebelumnya, akan tetapi dari sisi proporsi masih cukup rendah dengan trend yang menurun, jika tahun 2016 proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah sebesar 17,7%, untuk tahun 2021 hanya 12,6% dari total belanja daerah. Hal ini tentu hendaknya menjadi perhatian tersendiri dari Pemerintah daerah sehubungan dengan berlakunya UU nomor 1 tahun 2022 dimana belanja infrastruktur pelayanan publik daerah minimal alokasinya 40% dari total belanja daerah tidak termasuk belanja transfer ke desa dan bagi hasil (daerah diberi waktu 5 tahun untuk memenuhinya).</p>		<p>Kebijakan terkait belanja modal dalam APBD adalah menaikkan proporsi Belanja Modal sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>Proporsi Belanja Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 meningkat menjadi 13,29%</p>
5.	<p>Sampai akhir tahun 2021 Pemerintah Daerah masih belum menyelesaikan berbagai Piutang sebesar Rp. 64.152.261.364, 50 dengan rincian sebagai berikut: a. Dinas Kesehatan : Rp. 678.655.850,- b. Rumah Sakit Umum Daerah : Rp.18.959.162.090,-</p>	<p>Untuk menjaga kredibilitas manajemen keuangan, Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan terkait dengan upaya penyelesaian piutang tersebut.</p>	<p>Kebijakan terkait penyelesaian piutang antara lain: 1. Penetapan Peraturan Bupati No. 93 Tahun 2021 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Daerah 2. Penyelesaian piutang Tahun 2021 antara lain: a. Piutang pajak (parkir, pajak air tanah, penerangan jalan umum), b. Piutang retribusi (sewa rest area kledung, sewa BMD)</p>	<p>Menghapuskan piutang yang sudah kadaluarsa dan sudah tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi.</p>

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	c. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Rp.1.614.532.595,- d. Perhubungan Rp. 534.261.500,- e. Koperasi dan UMUM dan Perdagangan: Rp. 4.488.158.472,- f. Dinas Penanaman Modal : Rp. 483.588.543.- g. BPKPAD : Rp. 37.383.902.314,50 h. BKP SDM : Rp.10.000.000,-		c. Piutang hasil pemanfaatan kekayaan daerah (deviden PD Bank Pasar, deviden Bank Jateng, deviden PD Bhumi Pala Wisata) d. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah (pasien pada RSUD, BPJS Kesehatan, covid, Kapitasi JKN di Dinkes, pengembalian uang muka gedung kantor BPKPAD, denda keterlambatan gedung kantor BPKPAD, klaim BPK gedung kantor BPKPAD, pengembalian uang muka gedung kantor Dindukcapil, denda keterlambatan gedung kantor Dindukcapil, klaim BPK gedung kantor Dindukcapil, Pengembalian Gaji) e. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi (Pendapatan Bagi Hasil Provinsi PKB, BBNKB, PBBKB, dan PAP) 3. Tim Peneliti Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah telah melaksanakan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan atas piutang limpahan dari KPP Pratama sebesar 5.834.172.853,00 dan mengusulkan penghapusan tahap I sebesar 4.123.994.039,00	

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
6.	a. DID Kabupaten Temanggung tahun 2020 DID sebesar Rp.61,335 M, tahun 2021 sebesar Rp. 17,15 M, tahun 2022 hanya memperoleh alokasi DID sebesar Rp.2,44 M lebih, tentu ini disebabkan oleh karena kinerja beberapa item indikator kinerja kriteria DID yang menurun di tahun sebelumnya.	1. Pada tahun 2022 dan seterusnya, pemerintahan Kabupaten Temanggung perlu bekerja keras agar berbagai komponen pembangunan yang menurun kinerjanya/ tidak berprestasi dapat bangkit menyamai komponen lainnya yang memang kinerjanya layak memperoleh penghargaan/ insentif dana dari pemerintah pusat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD disebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal yang sebelumnya disebut DID kepada Daerah, atas pencapaian kinerja Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar. 2. Insentif fiskal diberikan kepada daerah berkinerja baik pada tahun sebelumnya berdasarkan klaster Daerah, indikator kesejahteraan, kriteria utama, dan kategori kinerja. 3. Upaya yang telah dilakukan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan desk capaian kinerja tiap Triwulan b) Sinkronisasi Data Dukung DID dengan BPS dan OPD terkait c) Koordinasi dan validasi data pembangunan dengan BPS d) Konsultasi dan koordinasi via Zoom meeting dengan DJPK di Ruang Setda Temanggung e) Mengirim surat pemberitahuan capaian kinerja daerah TW II, dalam rangka memperoleh di Anggaran Perubahan DID Tahun 2022 dengan anggaran 3 Triliun yang akan dialokasikan pada TW II Tahun 2022 f) Mendorong PD terkait untuk selalu update data capaian pada system yang digunakan oleh Kementrian terkait. 	Mendorong peningkatan capaian kinerja indikator Penentuan alokasi Dana Insentif Fiskal

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>b. DID merupakan instrument fiscal pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerah lebih berprestasi, kreatif, inovatif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditransfer kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu.</p>	<p>a. Diperlukan road map yang jelas dan terukur berupa RENCANA AKSI DID untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah dari Kemenkeu lebih besar, dengan dukungan program dan kegiatan yang berkualitas disertai anggaran yang cukup, sehingga DID menjadi sumber pendapatan kreatif daerah.</p>	<p>Rencana Aksi Daerah untuk mendapatkan dana insentif fiskal antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan capaian kinerja indikator kesejahteraan, kriteria utama, dan kategori kinerja b) Melaksanakan desk capaian kinerja tiap Triwulan c) Sinkronisasi Data Dukung DID dengan BPS dan OPD terkait d) Koordinasi dan validasi data pembangunan dengan BPS e) Meningkatkan prestasi daerah di skala nasional 	<p>Tersusunnya rencana aksi untuk mendapatkan dana insentif fiskal</p>

No	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
7	1) Tidak adanya tenaga yang kompeten di satuan pendidikan untuk melakukan penilaian terhadap kondisi bangunan gedung	1 Diperlukan survey dan penilaian kondisi bangunan gedung bersama dengan konsultan perencana dan DPUPR	Dilakukan survey dan penilaian dengan melibatkan Tim Teknis DPUPR dan konsultan perencana (sesuai kemampuan anggaran) pada perencanaan pembangunan gedung sekolah	Terdatanya Bangunan dan gedung sesuai kondisi sebenarnya
	2) Perubahan Standart Nasional Pendidikan (SNP) yang mengatur kelayakan sarpras, sehingga beberapa bangunan yang telah ada sebelumnya belum sesuai dengan SNP yang ditetapkan.	2 Diperlukan pemetaan ulang terhadap pemenuhan SNP di satuan pendidikan.	Dilakukan pemetaan ulang terhadap pemenuhan SNP di satuan pendidikan, telah ada data sarana dan prasarana di satuan pendidikan	Tersajinya Data Sarpras di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan
	3) Minimnya kontribusi APBD dalam kegiatan Rehab, RKB dan pemenuhan sarpras lainnya	3 Diperlukan kegiatan Rehab, RKB dan pemenuhan sarpras lainnya melalui Bankeu Provinsi dan DAK.	Mengusulkan kegiatan Rehab, RKB dan pemenuhan sarpras lainnya melalui Bankeu Provinsi dan DAK.	Tercukupinya usulan kegiatan Rehab, RKB dan pemenuhan sarpras lainnya melalui Bankeu Provinsi dan DAK
	4) Menurunnya motivasi belajar karena tidak adanya Pembelajaran Tatap Muka selama ± 2 tahun.	1 Melaksanakan PTM sesuai dengan protokol kesehatan	Telah dilaksanakan PTM dengan menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Sejak tanggal 20 Januari 2022	Meningkatnya motivasi belajar bagi siswa
	5) Kesulitan ekonomi dan sosial masyarakat akibat pandemi Covid 19	2 Perlu melakukan Kampanye Gerakan kembali ke sekolah pada anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah untuk kembali ke sekolah baik jalur formal maupun non formal	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pendataan Anak usia sekolah tidak sekolah, dan - Melaksanakan sosialisasi gerakan kembali ke sekolah 	Penurunan jumlah anak usia sekolah tidak sekolah

No	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>6) Di Kabupaten Temanggung terdapat sejumlah 9.943 anak usia 7-18 yang tidak terdaftar di sekolah formal baik di wilayah Kabupaten Temanggung maupun di Luar wilayah Kabupaten Temanggung dari total tersebut, sejumlah 2.537 telah terdaftar di pendidikan kesetaraan baik paket A, Paket B dan Paket C. Hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor penyebab di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Ekonomi 2. Faktor pernikahan dini 3. Masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan tidak terlalu penting, sehingga lebih memilih agar anaknya bekerja baik di sektor formal maupun informal. 	<p>a Perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga persepsi dan anggapan bahwa pendidikan kesetaraan sama derajatnya dengan pendidikan formal, sehingga lulusan pendidikan kesetaraan juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.</p> <p>b Perlu memperbaiki proses pelaksanaan pembelajaran di pendidikan kesetaraan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>c Perlu melakukan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah.</p>	<p>Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendidikan kesetaraan sama derajatnya dengan pendidikan formal.</p> <p>Melaksanakan perbaikan lembaga pendidikan kesetaraan agar sesuai dengan SNP, antara lain dalam hal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar Isi - Standar proses - Standar kompetensi lulusan - Standar pendidik dan tenaga pendidikan - Standar sarana dan prasarana - Standar pengelolaan - Standar pembiayaan - Standar penilaian pendidikan <p>Melaksanakan Integrasi data kependudukan khususnya penduduk usia sekolah dengan data dapodik sehingga dapat terpetakan anak putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah</p>	<p>Peningkatan jumlah warga belajar yang sekolah di lembaga pendidikan kesetaraan</p> <p>Lembaga pendidikan kesetaraan sesuai dengan SNP</p> <p>Tersajinya data AUSTS di Kabupaten Temanggung</p>

No	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	7) Pelaksanaan pelayanan ANC & PNC tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena pandemi Covid-19 (2 Tahun)	Perlu adanya Koordinasi dengan tenaga ahli (SPOG) untuk melengkapi semua SOP pada setiap tindakan kebidanan termasuk pelayanan pasien kebidanan di masa Pandemi.	Sosialisasi panduan pelayanan ANC PNC di masa pandemi disetiap pelayanan kesehatan di masa pandemi	Nakes tetap dapat memberikan pelayanan ANC dan PNC kepada sasaran
	8) Pandemi Covid dimana kehamilan menjadi faktor Komorbid (Peningkatan Kematian ibu terjadi karena kasus Covid)	a Perlu melakukan sosialisasi secara masiv dan melakukan vaksinasi Covid pada Ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi vaksinasi Covid bagi ibu hamil - Melakukan advokasi pelaksanaan vaksinasi covid bagi ibu hamil 	Bumil mendapatkan pelayanan vaksinasi covid secara optimal
b Perlu melaksanakan pemberian pelayanan ANC sesuai standar SOP di masa pandemi		Melaksanakan pemberian pelayanan ANC sesuai standar SOP di masa pandemi	Tersusnya penatalaksanaan penanganan kasus kegawatdaruratan ibu dan anak	
c Perlu melakukan sosialisasi kesehatan ibu hamil di setiap kegiatan KIA		Melaksanakan sosialisasi kesehatan ibu hamil dan pemberian materi tentang kesehatan ibu dan anak di setiap kegiatan KIA	Meningkatkanya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak	
d Perlu melakukan kajian kematian maternal dan perinatal oleh tim spesialis dan pihak2 yang terkait untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan terhadap permasalahan		Melakukan pertemuan kajian AMP untuk menelaah lebih mendalam penyebab kematian ibu dan bayi yang terjadi di Kab. Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui secara pasti penyebab kematian ibu - Menyusun rekomendasi dari hasil kajian 	

No	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
9)	Tingginya kasus resiko tinggi pada ibu hamil (jml Bumil: 10470, Resti Bumil : 3940) = 38 %	a Melakukan Pendampingan ibu hamil yang mempunyai faktor resiko kehamilan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan Bumil, melakukan pendampingan dalam pengawasan kesehatan bumil dengan faktor resiko bekerjasama dengan kader kesehatan - Komitmen dengan seluruh Puskesmas untuk membuat pemetaan bumil resti - Komitmen dengan seluruh Puskesmas untuk melakukan pemantauan bumil resti 	Terpantaunya kesehatan bumil resti di tiap-tiap wilayah Puskesmas
		b Perlu mengadakan pelatihan kepada kader kesehatan untuk turut mendampingi, mendeteksi ibu hamil dengan masalah kesehatan	Telah dilaksanakan pelatihan kader kesehatan di masing-masing wilayah Puskesmas	Peningkatan pengetahuan kader tentang kesehatan ibu dan anak
		c Dibutuhkan mapping terhadap Ibu hamil dengan resiko tinggi oleh masing2 bidan pembina wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dengan seluruh Puskesmas untuk membuat pemetaan bumi resti - melakukan pemantauan bumil resti di masing-masing bidan pembina wilayah 	Terpantaunya kesehatan bumil resti di tiap-tiap wilayah Puskesmas
		d Perlu dilaksanakan Sosialisasi perencanaan kehamilan sehat kepada masyarakat	Melaksanakan kegiatan screening layak hamil bagi PUS di Kab. Temanggung, terutama bagi Catin	Penapisan faktor risiko kehamilan dari awal sebelum hamil
10)	Kapasitas kemampuan nakes dalam pertolongan kasus kegawatdaruratan maternal	Perlu upaya peningkatan pengetahuan nakes terhadap penanganan kasus kegawatdaruratan maternal internal di tiap2 Puskesmas	Mengadakan bimbingan dan pelatihan oleh tenaga ahli ke masing2 Puskesmas utk peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan nakes dalam penanganan kasus kegawatdaruratan ibu dan bayi	Peningkatan pengetahuan nakes terhadap kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal

No	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	11) Kurangnya koordinasi dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu (masih beranggapan bahwa upaya hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan)	a Perlu melakukan advokasi kepada lintas sektor dan stake holder untuk masalah kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas	Melaksanakan pertemuan lintas program dan lintas sektor untuk koordinasi kegiatan percepatan penurunan AKI dan AKB	Menjalin kerjasama dan dukungan dari lintas program dan lintas sektor terhadap program percepatan penurunan AKI dan AKB
		b Pemerintah Daerah membuat kebijakan agar pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita melalui APBDes.	Advokasi terhadap pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan program kesehatan ibu, bayi dan balita
		c Perlu melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk pelaksanaan program percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Temanggung	Mengoptimalkan peran kader kesehatan dan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas kader kesehatan.	Terlaksananya program percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Temanggung
	12) Pandemi Covid sehingga masyarakat enggan untuk pergi ke fasilitas kesehatan	Perlu meningkatkan pelayanan Posbindu untuk melakukan screening kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran kader kesehatan, masyarakat dan PKK serta mengaktifkan kembali pelayanan posbindu di Desa/Kelurahan - Melaksanakan Kegiatan PISPK 	Meningkatnya jumlah pelayanan screening kesehatan kepada masyarakat

No	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
13)	Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang paradigma sehat dimana pentingnya deteksi dini Penyakit Tidak Menular dan datang ke layanan kesehatan sebelum jatuh sakit	a Perlu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengenali faktor risiko Penyakit Tidak menular melalui peran kader kesehatan, baik melalui kunjungan perkesmas maupun posbindu	Melaksanakan sosialisasi deteksi dini risiko penyakit tidak menular kepada masyarakat melalui Posbindu	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap deteksi dini risiko penyakit tidak menular
		b Perlu melakukan pelayanan kesehatan masyarakat dengan cara jemput bola	Melakukan screening kesehatan ke rumah-rumah warga melalui kader kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
14)	Masih ada populasi kunci yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan HIV, seperti pasien TB	Perlu adanya kolaborasi program TB-HIV, agar semua pasien TB diperiksa HIV dan Pasien HIV discreening TB, kerjasama dengan lembaga inklusif HIV	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin dengan LSM Kalandara - Kegiatan mobile VCT (Voluntary Conselling dan Testing) pada tempat-tempat titik berkumpul LSL - Kegiatan mobile VCT di lapas (WBP = Warga Binaan Pemasyarakatan - Koordinasi dan jejaring untuk memaksimalkan screening HIV pada ibu hamil dan pasien TBC 	Pemeriksaan/ screening HIV pada populasi kunci (LSL; waria); WBP, ibu hamil dan pasien TBC
15)	Belum tercatatnya populasi risiko tinggi di Kabupaten Temanggung, data LSL, Waria masih berupa perkiraan, belum ada LSM yang menjangkau populasi kunci di Kabupaten Temanggung	Perlu melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan relawan/ aktivis penjangkau populasi Kunci (LSL dan Waria) yang ada di Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya koordinasi (case conference) antara Puskesmas dengan kelompok penjangkauan populasi kunci (LSM Kalandara) untuk validasi data LSL dan waria - Melaksanakan pemetaan populasi kunci di titik-titik tempat berkumpul populasi kunci 	- Tersedianya data LSL dan Waria) yang ada di Kabupaten Temanggung

No	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	16) Notifikasi pasangan dan tes HIV pada ODHA belum berjalan secara maksimal, masih ada yang belum open status ke pasangan sehingga untuk pasangan ODHA banyak yang belum dilakukan screening HIV	Perlu meningkatkan Screening Notifikasi Pasangan ODHA dengan mengoptimalkan peran Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dalam penjangkauan ODHA	Mengoptimalkan peran kelompok pendamping sebaya (KDS) dalam mensosialisasikan pentingnya Screening notifikasi pasangan dan deteksi dini HIV AIDS	Meningkatnya Screening Notifikasi Pasangan ODHA
	17) Kegiatan Investigasi Kontak (IK) pasien TBC oleh kader terhenti karena adanya gelombang 2 COVID-19 pada bulan Juli-November sehingga tidak berjalan secara maksimal	Perlu memaksimalkan kegiatan Investigasi Kontak Pasien TBC oleh kader, baik itu kader puskesmas maupun kader MSI	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Investigasi Kontak Pasien TBC secara masiv - Penganggaran BOK untuk membiayai kader 	Terlaksanya Investigasi Kontak Pasien TBC oleh kader puskesmas maupun kader MSI secara maksimal
	18) Sebagian masyarakat masih takut untuk datang ke fasilitas kesehatan, takut di COVID kan oleh petugas	a Melakukan kegiatan screening aktif TBC di tempat-tempat yang berisiko tinggi penularan TBC seperti ponpes, tempat keramaian, lembaga pemasyarakatan dll	Kegiatan screening aktif TBC telah dilaksanakan, bekerjasama dengan kader MSI (mentari Sehat Indonesia) di Ponpes-ponpes, Pabrik, Puskesmas, dan desa.	Menurunkan resiko penularan TBC di tempat-tempat berisiko tinggi

No	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		b Perlu memaksimalkan jejaring, baik jejaring internal maupun eksternal dalam upaya penemuan kasus TBC, terutama di klinik swasta, dokter praktek mandiri, apotek mandiri yang selama ini belum dilaporkan di Puskesmas.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kegiatan optimalisasi jejaring koalisi profesi TBC - Kegiatan supervisi dan bimbingan teknis sebagai upaya peningkatan penemuan kasus TBC di dokter praktek mandiri; klinik swasta dll 	Terlaporkannya penemuan kasus TBC terbaru
	19) Baru 5 dari 26 puskesmas yang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab ruang farmasi yang merupakan salah satu syarat pelayanan farmasi sesuai standar yaitu Puskesmas Ngadirejo, Pringsurat, Gemawang, Bejen, dan Parakan	a Diperlukan pemenuhan SDM apoteker di semua puskesmas tahun 2022 dengan CPNS baru sebagai penanggung jawab ruang farmasi di Puskesmas	Di tahun 2022 tenaga apoteker yang merupakan syarat pelayanan farmasi sesuai standar telah terpenuhi dengan adanya CPNS formasi Apoteker yang ditempatkan di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung	Dengan adanya tenaga Apoteker di Seluruh Puskesmas (26 Puskesmas), maka cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi telah memenuhi target 100%
b Diperlukan koordinasi dengan penanggung jawab ruang farmasi puskesmas terkait pelaksanaan informasi obat		Sudah dilaksanakan koordinasi dengan penanggung jawab ruang farmasi puskesmas terkait pelaksanaan informasi obat	Terjalannya koordinasi dengan penanggung jawab ruang farmasi puskesmas	
c Diperlukan koordinasi dengan penanggung jawab ruang farmasi puskesmas terkait pelaksanaan konseling		Sudah dilaksanakan koordinasi dengan penanggung jawab ruang farmasi puskesmas terkait pelaksanaan konseling	Terjalannya koordinasi dengan penanggung jawab ruang farmasi puskesmas terkait pelaksanaan konseling	

No	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		d Perlu mengikutsertakan apoteker penanggung jawab ruang farmasi pada pelatihan pelayanan kefarmasian bagi tenaga kefarmasian di Puskesmas	Telah dilaksanakan pelatihan pelayanan kefarmasian bagi tenaga kefarmasian di Puskesmas dengan mengikutsertakan apoteker	Apoteker telah mengikuti pelatihan pelayanan kefarmasian
	20) Target RPJMD untuk persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota pada tahun 2021 hanya tercapai 22,54%. Hal ini disebabkan perubahan status jalan Kabupaten menjadi jalan desa/jalan lingkungan/jalan kawasan khusus, sehingga panjang drainase kawasan/kota berubah.	Perlu pendataan ulang terkait status jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.	Dilaksanakan pendataan status jalan di Kabupaten Temanggung, dengan data sebagai berikut: - Jalan Nasional : 14 ruas - Jalan Provinsi : 4 ruas - Jalan Kabupaten : 207 ruas	Tersedianya data status jalan di Kabupaten Temanggung
	21) Target awal peserta pelatihan sejumlah 160 orang/ 10 jurusan, setelah anggaran di refocusing jumlah peserta pelatihan menjadi 112 orang/ 7 jurusan	-	Telah dilaksanakan pelatihan sesuai dengan ketersediaan anggaran	Telah dilaksanakan pelatihan dari anggaran APBD dan APBN
	22) Tidak tercapai karena adanya PPKM Covid-19	Perlu melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan bersama tim, baik dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Satwasker dan Dinperinaker	1. Telah dilaksanakan sosialisasi dan monitoring berkelanjutan perusahaan- perusahaan di Kabupaten Temanggung dan rapat koordinasi dengan Tim Kepatuhan yang terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan/ Kesehatan, Kejaksaan dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2. Menyusun Raperbub BPJS Ketenagakerjaan	Termonitornya jumlah perusahaan yang membayar BPJS

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>23) Persentase sampah yang tertangani linier dengan pertumbuhan jumlah penduduk.</p> <p>24) Realisasi persentase sampah yang tertangani tersebut berdasarkan perhitungan yang masuk sampah terkelola di TPA, seiring dengan banyaknya sampah yang terkelola di sumber atau di desa (TPSD) maka sampah yang terkelola berkurang dari target.</p>	<p>Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memberikan edukasi kepada Pemerintah desa agar memaksimalkan pengelolaan sampah di tingkat TPSD, sehingga sampah yang masuk TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) hanya merupakan sampah residu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan hingga tingkat desa dan meningkatkan peran serta masyarakat beserta lembaga pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, desa, hingga rumah tangga - Telah dibentuk Dewan Persampahan di tingkat Kecamatan dan PSRT di tingkat desa untuk mengelola smpah secara mandiri di TPSD. 	<p>Terkelolanya sampah secara optimal di tingkat TPSD.</p>
	<p>25) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB</p>	<p>Perlu Mengoptimalkan tim Advokasi KKBPK</p>	<p>Mengoptimalkan tim Advokasi KKBPK, Peningkatan kapasitas pengelola program KKBPK dari tingkat RT sampai Desa, Kecamatan dan Kabupaten</p>	<p>Menambah jumlah Peserta KB aktif Khususnya MKJP , dan mengurangi jumlah PUS un met need</p>
	<p>26) Rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB)</p>	<p>Perlu peningkatan kapasitas pengelola program KKBPK dari tingkat Kabupaten, kecamatan, desa, RW, dan RT</p>	<p>Mengoptimalkan kegiatan pelayanan kontrasepsi MKJP kepada akseptor dalam kegiatan strategis, dan mengoptimalkan pelayanan di Faskes/ KKB (Klinik Keluarga Berencana) baik Pemerintah dan Swasta</p>	<p>Meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi modern di PUS</p>

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	27) Tidak semua masyarakat dengan keinginan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi modern	Diperlukan sosialisasi terhadap pentingnya penggunaan alat kontrasepsi modern terhadap Pasangan Usia Subur	Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan kontrasepsi modern pada PUS Dilakukan di setiap puskesmas dan Desa : 1. Kursus catin 2. Kelas Ibu Hamil 3. Rakor Kader KB Frekuensi: minimal 1 bulan sekali Sasaran: 1. Pasangan Calon Pengantin 2. Ibu Hamil beserta suami 3. Kader KB Desa	
	28) Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi, serta belum tercukupinya peralatan jaringan di seluruh PD	Diperlukan pengelompokan aplikasi sesuai dengan jenisnya.	Sudah dilakukan pengelompokan sistem informasi berdasarkan jenis dan penggunaannya, bukan dari duplikasi dan pengguna dari sistem informasi, antaralain: Aplikasi Simpus DKK Aplikasi SID Dinpermades Aplikasi Web Kecamatan Aplikasi Web OPD DII, pada bulan Maret 2022	Tercukupinya target aplikasi yang terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>29) Penyebab prosentase integrasi aplikasi rendah atau tidak sesuai target, dikarenakan website yang sama atau sejenis penghitungannya 1-1 dalam istilah yang lain belum dikelompokkan menurut jenisnya. website yang dimaksud sbb :</p> <p>Website SID = 289 (harusnya 1) Website Kecamatan = 20 (harusnya 1) Website OPD/Dinas/Badan = 23 (harusnya 1) Website PPID pembantu = 46 (harusnya 1) Simpus = 26 (harusnya 1) Website Puskesmas = 26 (harusnya 1) Paten Kecamatan = 20 (harusnya 1) TOTAL pengurangan jumlah wbsite = 443</p>	<p>Diperlukan penghitungan capaian persentase aplikasi yang terintegrasi berdasarkan jumlah aplikasi, tidak berdasarkan jumlah pengguna aplikasi.</p>	<p>Pengelompokkan aplikasi sudah berdasarkan jumlah aplikasi bukan berdasarkan jumlah pengguna/duplikasi aplikasi.</p>	<p>Penghitungan capaian persentase aplikasi yang terintegrasi berdasarkan jumlah aplikasi, tidak berdasarkan jumlah pengguna aplikasi.</p>

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	30) Tidak tersedianya anggaran yg cukup untuk pengadaan peralatan akses internet publik. sejak tahun 2020 terjadi refocusing anggaran sehingga alokasi untuk penyediaan alat tidak tersedia. kondisi tersebut berlangsung sampai tahun ini.	Perlu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.	Sudah dianggarkan pemeliharaan dan pengadaan peralatan jaringan untuk memenuhi kebutuhan terselenggaranya hotspot di area publik pada tahun 2023	Teranggarkannya pengadaan peralatan akses internet publik.
	31) Masih banyak koperasi yang belum melaporkan laporan keuangan, data terekap sampai bulan Desember 2021, Sementara laporan RAT sesuai Permendakop sampai dengan 31 Maret 2022.	Diperlukan tindakan tegas terhadap koperasi untuk melaporkan laporan keuangan dan melakukan RAT sesuai dengan Permendakop	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan koperasi aktif - Pendampingan pembuatan laporan RAT Koperasi dan pelaksanaan RAT - Penyuluhan dan pembinaan koperasi agar melaporkan RAT ke DINKOPDAG sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, pasal 7 ayat 5 huruf (a) disebutkan bahwa "Rapat Anggota Tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku). 	Data koperasi aktif yang melaporkan RAT bertambah sehingga berpengaruh terhadap data nilai aset dan omset koperasi
	32) Terjadi benturan tugas pengkajian, yang saat ini terkait kajian berada di BAPPEDA	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada terkait pengkajian potensi	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada terkait pengkajian potensi melalui kegiatan FGD, seminar dan pelatihan	Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengkajian potensi.

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	33) SDM di DPM belum memiliki standar teknis pelayanan dan belum semua SDM diakomodir BKPSDM selaku pembina kepegawaian	Perlu koordinasi dengan BKPSDM untuk lebih banyak menyelenggarakan pelatihan untuk SDM DPM	- Menyelenggarakan Pelatihan terkait pelayanan prima yang difasilitasi oleh BKPSDM serta mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh BKPSDM atau DPMPSTSP Provinsi secara daring.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
	34) Target informasi peluang usaha ada 5 sektor yaitu : 1. Pariwisata 2. UMKM 3. Pertanian 4. Perkebunan 5. Peternakan dan Perikanan	Berkolaborasi dengan lintas sektoral	- Melakukan Survey Lapangan dan mengkaji ulang informasi peluang usaha yang sudah ada bersama Linsek - Menyampaikan Informasi Peluang Usaha melalui Pameran-pameran, Gelar UMKM dan publikasi melalui website dan jejaring sosial lainnya	Tersedianya Informasi Peluang Usaha di 5 Sektor Unggulan Yaitu Pariwisata, UMKM, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
	35) Dari total 37 Cabang Olahraga yang terdaftar, pada tahun 2021 ada 20 Cabang Olahraga yang mengikuti kejuaraan/lomba di tingkat provinsi dan tingkat Nasional. Dari 20 yang mengikuti, terdapat 4 Cabang Olahraga yang berhasil menyumbangkan Prestasi baik Tingkat Provinsi maupun Nasional. Minimnya Cabang Olahraga yang mengikuti Kejuaraan/ Lomba tidak terlepas dari situasi pandemi yang masih melanda. Sebagian besar Kejuaraan/Lomba yang diselenggarakan pada tahun 2021 dilaksanakan secara virtual, sehingga tidak semua Cabang Olahraga dapat menggelar kejuaraan/Lomba.	Perlu Mendorong masing-masing Cabang Olahraga untuk dapat aktif mengikuti Kejuaraan/Lomba baik yang diselenggarakan di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional. Selain itu juga mendorong untuk pembinaan atlet dari masing-masing Cabang Olahraga agar lebih berprestasi	Sudah mengikuti kejuaraan/Lomba baik yang diselenggarakan di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional pada tahun 2022 sebanyak 43 cabang olahraga. Dari 43 cabang olahraga, 11 cabang olahraga menyumbangkan prestasi. Rencana Tahun 2023 akan mengikuti 13 event kejuaraan olahraga	Meningkatkan keaktifan cabor dalam mengikuti kejuaraan/lomba di tingkat Propinsi, Nasional, maupun International

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	36) Pada saat penyusunan Laporan IKPD per tanggal 31 Desember 2021, terdapat 2 (dua) data makro daerah yang belum ada, yaitu Data Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita yang disebabkan angka PDRB tahun 2021 belum selesai perhitungannya.	Koordinasi secara intensif baik dengan BPS ataupun OPD terkait untuk updating ketersediaan data makro daerah	Telah dilakukan koordinasi dengan BPS Kab. Temanggung terkait penjadwalan. Dua data yang belum ada tersebut telah release pada bulan Maret tahun 2022 dengan angka sebagai berikut: Pertumbuhan Ekonomi 2021 : 3,34% Pendapatan Perkapita 2021 : Rp 28.484.020 Telah terbentuk forum data dalam rangka mewujudkan 1 data Indonesia berdasarkan perbup nomor 80 tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia dan SK Bupati nomor 50/273 Tahun 2021 tentang penyelenggara satu data Indonesia, Forum satu data Indonesia, dan Sekretariat satu data Indonesia Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya kebutuhan data makro yang lengkap
	37) Adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan pelestarian sejarah lokal tidak dapat dilaksanakan	Perlu memberikan informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat desa untuk melakukan kegiatan pelestarian sejarah lokal yang ada	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan informasi terkait sejarah lokal ke masyarakat melalui jejaring sosial, website. - Melaksanakan event-event kebudayaan 	Melestarikan sejarah lokal yang belum terinventaris yang ada di Kabupaten Temanggung.
	38) Tahun 2021 layanan kunjungan ke perpustakaan baru dibuka pada bulan Oktober	Perlu adanya inovasi dan peningkatan kualitas layanan;	Layanan perpustakaan dibuka secara penuh/tidak ada batasan, penambahan jam layanan perpustakaan di hari diluar jam kerja (Jumat sore, Sabtu dan Minggu), serta mempromosikan gemar membaca melalui kegiatan tour de library/kunjungan PAUD (PG/TK) dan SD	Meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	39) Tidak ada penambahan koleksi bahan perpustakaan sejak tahun 2019	Perlu menambah koleksi bahan perpustakaan;	Koordinasi dan Konsultasi ke Perpusnas mengenai DAK, penambahan bahan perpustakaan melalui pembelian dan sumbangan, kerjasama dengan Kadang Temanggung dengan program Pojok FIKT	Meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan
	40) Kegiatan layanan perpustakaan keliling tidak ada	Perlu menambah Fasilitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan konsultasi ke Perpusnas tentang DAK sarana prasarana Perpustakaan - Melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling melalui inovasi Tamasya Pustaka dengan bekerjasama dengan Perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung (Desa/Kelurahan/ Sekolah/Madrasah) 	Bertambahnya Layanan Perpustakaan ke masyarakat
	41) Kegiatan promosi peningkatan kunjungan perpustakaan tidak ada	Perlu menambah kegiatan Promosi Perpustakaan	Melaksanakan Gerakan Sindoro Sumbing Seperti : Mendoan Temanggung, Empis Tahu (Emansipasi Wanita Serba Ingin Tahu), Tour de Library, Tamasya Pustaka serta Kegiatan Literasi Informasi, melaksanakan kegiatan bazar buku (kerja sama dengan penerbit Jogja), Sosialisasi Gerakan Sindoro Sumbing melalui TV Temanggung.	Kegiatan promosi perpustakaan meningkat
	42) Masih terbatas penulis yang mengangkat tema budaya etnis nusantara	1. Perlu melakukan penelusuran naskah kuno di wilayah Kabupaten Temanggung	Melaksanakan kegiatan penelusuran naskah kuno di wilayah Kabupaten Temanggung, Pengadaan bahan perpustakaan untuk koleksi naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara, Mengadakan kegiatan lomba penulisan dengan tema budaya etnis nusantara khususnya daerah Temanggung.	Meningkatnya cakupan koleksi naskah kuno

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	43) Hasil koordinasi melalui media sosial ke masyarakat belum diketahui kepemilikan naskah kuno	2. Perlu pengadaan bahan perpustakaan untuk koleksi naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara	Koordinasi dengan Perpustakaan Nasional untuk Validasi Naskah Kuno, Alih media Naskah Kuno yang sudah ditemukan	Meningkatnya cakupan koleksi naskah kuno
	44) Kegiatan penelusuran langsung belum dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk covid-19		Sudah dilaksanakan penelusuran langsung secara intensif terhadap obyek yang menjadi sasaran lokasi penelusuran	Meningkatnya cakupan koleksi naskah kuno
	45) Belum ada anggaran khusus untuk pengadaan bahan perpustakaan untuk koleksi naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara		Advokasi ke Kecamatan, Desa, Sekolah untuk menginformasikan masyarakat yang memiliki Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis nusantara	Meningkatnya cakupan koleksi naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara
	46) Klasifikasi Desa Wisata ada 4 yaitu Desa Wisata Rintisan, Desa Wisata Berkembang, Desa Wisata Maju dan Desa Wisata Mandiri. Perubahan klasifikasi desa wisata dilakukan setiap 4 tahun sekali dengan melakukan asesment/penilaian ulang sesuai dengan perbup 95 tahun 2021	Mendorong desa wisata yang sudah ada untuk menaikkan klasifikasi Desa Wisata sesuai dengan Perbup 95 tahun 2021	Memberikan pembinaan, pelatihan, serta pendampingan pada desa wisata yang ada, dan selanjutnya dilakukan asesmen untuk mengetahui perkembangan klarifikasi desa wisata tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Desa Wisata	Menaikkan level/grade desa wisata yang ada di Kabupaten Temanggung

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>47) Pedagang Pasar tidak sesuai zonasi peruntukan jenis usaha dikarenakan tidak laku, sehingga Pedagang mengganti jenis usaha di lokasi yang sama.</p> <p>48) Zonasi Pedagang Pasar, baru dilaksanakan di Pasar Candiroto, Pasar Parakan, dan sebagian Pasar Temanggung.</p> <p>49) Ada Pedagang yang membeli/meneruskan los (waris orang tua) akan tetapi tidak bisa berjualan dengan jenis usaha sesuai zonasi, sehingga Pedagang tersebut tidak patuh sesuai zonasi peruntukannya.</p>	<p>Perlu melakukan penataan pedagang pasar sesuai zonasi.</p> <p>Perlu Penertiban dan memberikan pemahaman kepada Pedagang yang tidak sesuai dengan zonasi jenis usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan sosialisasi kepada Pedagang Pasar - Mengawasi kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukannya dengan penataan pedagang, pemetaan zonasi pasar sesuai peruntukannya - Pemasangan papan petunjuk zonasi untuk Pasar Kliwon Temanggung Utara, Selatan, dan Barat, Pasar Legi Parakan, Pasar Adiwirangun Ngadirejo dan Kranggan. 	<p>Meningkatkan kepatuhan pedagang Pasar Daerah sesuai dengan zonasi peruntukannya</p>
	<p>50) PKL belum menempati sesuai peruntukan di Taman Pengayoman karena sarana prasarana kurang mendukung (Lampu penerangan) dan daya tarik pembeli kurang karena lokasi tidak strategis.</p>	<p>Perlu Penambahan sarana prasarana (Lampu penerangan, Tempat sampah) dan melakukan Pembinaan lokasi serta Penataan kembali PKL di lokasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan anggaran pembiayaan untuk Kegiatan Perencanaan, Pengadaan Sarpras dan fasilitasi penunjang lainnya. 	<p>Pembenahan lokasi serta penataan PKL</p>

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	51) Karena terbatasnya anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan pembinaan pada IKM di 9 (sembilan) komoditas unggulan hanya bisa dilaksanakan pada 4 (empat) komoditas unggulan	Perlu mencari sumber pendanaan diluar APBD Kabupaten Temanggung antara lain ke Provinsi, Pusat atau Kementerian untuk dapat memfasilitasi 5 (lima) komoditas unggulan lain yang belum tertangani	Mengusulkan pendanaan IKM ke kementerian, dan provinsi.	Teranggarkannya fasilitasi dan pendampingan pengembangan komoditas unggulan yang belum tertangani
	52) Terbatasnya jumlah industri penghasil tembakau di Kabupaten Temanggung (3 unit), sebagian besar IKM Tembakau (lembutan) belum bisa dijadikan penghasil cukai	Perlu melakukan pembinaan kepada para pelaku IKM tembakau lembutan menuju industri penghasil cukai	Telah dilaksanakan pembinaan terhadap IKM tembakau , Tembakau lembutan: Jumlah IKM = 800 IKM Waktu: Bulan Juni sampai November Tahun 2022 Tempat: 14 Kecamatan penghasil Tembakau dengan materi pengolahan tembakau lembutan, packing, dan pemasaran, dengan arah penerapan cukai tembakau lembutan di tahun berikutnya	Terbinanya IKM tembakau
	53) Raperda inisiatif masih dalam proses fasilitasi di Biro Hukum Provinsi	Perlu Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi dan melaksanakan pembahasan raperda lebih awal	Telah dilaksanakan Koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah perihal fasilitasi/penyusunan Raperda Inisiatif	Tersusunnya Raperda Inisiatif DPRD
	54) Adanya refocusing anggaran pada tahun 2021	Perlu dilakukan sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah	Telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi atau penyebar luasan masalah wawasan Kebangsaan bagi sekolah-sekolah, sasarannya adalah pelajar	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah

NO	TEMUAN/ PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	55) Pembatasan Kegiatan Masyarakat karena pandemi Covid	Perlu dilakukan sosialisasi wawasan kebangsaan di desa/kelurahan	Telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi atau penyebar luasan masalah wawasan Kebangsaan bagi desa/kelurahan	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan di desa/kelurahan
	56) Belum ada regulasi terbentuknya FKUB	Untuk disusun Regulasi terbentuknya FKUB	Pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan 08 Tahun 2006 tentang FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah	Terbentuknya FKUB di 20 Kecamatan
	57) Adanya refocusing anggaran pada tahun 2021	Perlu dilaksanakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah dilaksanakan pada tahun 2022	Sudah dilaksanakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah dilaksanakan pada tahun 2022, dan akan dilanjutkan pada bulan Maret tahun 2023 di 3 Desa / Kelurahan dan kepada para pelajar SMP	Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

4.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan/atau kegiatan berupa tugas pembantuan pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Tugas Pembantuan dari Pemerintah yang dilaksanakan adalah urusan pertanian. Adapun pelaksanaan tugas pembantuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/ 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
- 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

- 10) DIPA Nomor SP DIPA – 018.08.4.039158/2022 tanggal 17 November 2021
- 11) Revisi ke 3 DIPA Nomor SP DIPA- 018.08.4.039158/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

b. Gambaran Umum

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 pada bidang pertanian yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

c. Target Kinerja

1. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ditargetkan berupa dukungan manajemen satuan kerja yang meliputi operasional, honor dan administrasi.
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian target meliputi sosialisasi ke kelompok penerima manfaat, pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi bantuan untuk 1 kelompok berupa irigasi perpipaan, 2 kelompok berupa pembangunan embung pertanian, dan 16 kelompok rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
 - b. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida meliputi :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi e RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi dan Fasilitasi Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi berupa rapat koordinasi dan evaluasi, perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan/

kabupaten dan koordinasi dan konsultasi ke pusat dan propinsi, fasilitasi untuk petugas entry e RDKK di tingkat kecamatan dan kabupaten.

- 2) Kegiatan Fasilitasi Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima pupuk bersubsidi meliputi rapat koordinasi dan evaluasi, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke propinsi dan pusat, fasilitasi untuk petugas verifikasi dan verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan dan kabupaten
- c. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian yaitu fasilitasi kegiatan asuransi pertanian meliputi rapat koordinasi, perjalanan dalam rangka koordinasi/ pengumpulan data di tingkat kecamatan / kabupaten dan perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke propinsi

d. Realisasi

- a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan total pagu anggaran Rp. 2.063.953.000,- terealisasi sejumlah Rp 2.063.723.000,- atau 99.99%. Sedangkan realisasi capaian program tercapai 100%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (pagu Rp 1.540.000.000 realisasi Rp 1.540.000.000 atau 100% dengan capaian fisik 100%, berupa:
 - a. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier terlaksana di 16 kelompok tani penerima manfaat.
 - b. Irigasi perpipaan terlaksana di 1 kelompok tani penerima manfaat (KT Sumber Amanah Desa Petarangan Kec Kledung) .
 - c. Pembangunan embung pertanian terlaksana di 2 kelompok tani penerima manfaat (KT. Mitra Tani I Desa Gununggempol Kec Jumo dan Gapoktan Tani Maju Desa Kramat Kec. Kranggan).
 2. Kegiatan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Pagu Rp 15.000.000,- Realisasi Rp 15.000.000,- atau 100% dan realisasi fisik 100%) meliputi kegiatan Monitoring pemanfaatan alsintan ke kelompok penerima dan fasilitasi untuk petugas Input BAST dan petugas pemeriksa alsintan.

3. Fasilitas Pupuk dan Pestisida (Pagu Rp 414.405.000,- realisasi Rp 414.240.000 atau 99,96% realisasi fisik 100%) meliputi kegiatan Fasilitas e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi dan Fasilitas Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi di 20 kecamatan. Kegiatan input/entry data di aplikasi e-alokasi 2023 dilaksanakan oleh petugas entry. Verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh petugas verifikasi dan validasi tingkat kecamatan, kemudian laporan hasil verifikasi dan validasi disampaikan ke dinas kabupaten setiap bulan.
4. Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian (Pagu Rp 16.048.000 realisasi Rp 16.048.000 atau 100% realisasi fisik 100%) memfasilitasi pendampingan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Sosialisasi kegiatan AUTP dilaksanakan di tingkat kabupaten dengan peserta petugas penyuluh pertanian lapangan dan perwakilan petani/ gapoktan. Dengan sosialisasi ini diharapkan petugas dapat menyampaikan informasi terkait AUTP kepada petani/kelompok tani/gapoktan sehingga petani/kelompok tani/gapoktan bisa ikut dalam program AUTP ini.
5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian (Pagu Rp 78.500.000 realisasi Rp 78.435.000 atau 99,92% realisasi fisik 100%). Kegiatan ini mendukung pelaksanaan kegiatan baik fisik di lapangan maupun pendampingannya.

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
1	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen			2.063.953.000	2.063.723.000	99.99	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya / terehabilitasinya jaringan irigasi tersier sebanyak 16 unit • Terbangunnya irigasi perpipaan sebanyak 1 unit • Terbangunnya embung pertanian sebanyak 2 unit 	100	APBN
1.1	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	SP DIPA-018.08.4.039158/2022 tanggal 31 Oktober 2022	Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Output: Terbangunnya jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan dan embung pertanian Rincian Kegiatan: 1. Sosialisasi kegiatan 2. Transfer dana dan pembangunan fisik dilapangan 3. Monitoring dan evaluasi kegiatan	1. KT Harapan Baru Desa Medari Kec Ngadirejo 2. KT Sido Nglilir Desa Danurejo Kec Kedu 3. KT Agung II Desa Bagusan Kec. Selopampang 4. KT Rejo Tani Desa Balerejo Kec Tlogomulyo 5. KT Karya Bangun Kel Kowangan Kec Temanggung 6. KT Maju Makmur Desa Mangunsari Kec Ngadirejo 7. Gapoktan Suka Maju Desa Campursari Kec Ngadirejo 8. Gapoktan Subur Makmur Desa Sanggrahan Kec Kranggan 9. KT Dewi Sri Desa Ketitang Kec Jumo 10. KT Ngasinan Desa Karangtejo Kec jumo 11. KT Sido Makmur Desa Kranggan Kec Kranggan	DKPPP	1.540.000.000	1.540.000.000	100		100	APBN

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	
				12. KT Murih Rahayu I Desa Lempuyang Kec Candirot 13. KT Ngudi Makmur Desa Badran Kec Kranggan 14. KT Mekar Mandiri Desa Karangwuni Kec Pringsurat 15. KT Murih Rahayu Desa Baledu Kec Kandangan 16. KT Trampil I Desa Tegalurung Kec Bulu 17. KT Sumber Makmur Desa Petarangan Kec Kledung 18. KT Mitra Tani I Desa Gununggempol Kec Jumo 19. Gapoktan Tani Maju Desa Kramat Kec Kranggan								
1.2	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	SP DIPA-018.08.4.039158/2022 tanggal 31 Oktober 2022	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Rincian Kegiatan : 1. Belanja Bahan 2. Belanja Honor Output Kegiatan 3. Belanja perjalanan dinas biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		15.000.000	15.000.000	100	Terlaksananya pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian di Kabupaten Temanggung	100	APBN	
						1.500.000	1.500.000					
						3.600.000	3.600.000					
						1.500.000	1.500.000					
						8.400.000	8.400.000					

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
1.3	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	SP DIPA-018.08.4.039158/2022 tanggal 31 Oktober 2022	<p>Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida</p> <p>Output: Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi dan Tersusunya RDKK pupuk bersubsidi tahun 2022</p> <p>Rincian Kegiatan: A. Penyusunan e RDKK untuk pendataan penerima pupuk subsidi 1. Belanja Bahan 2. Belanja Honor Output Kejiata 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota B. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penerima pupuk bersubsidi 1. Belanja Bahan 2. Belanja Honor Output Kegiatan 3. Belanja Barang Persediaan barang konsumsi 4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		414.405.000	414.240.000	99.96	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi dan Tersusunya RDKK pupuk bersubsidi tahun 2022 di 20 kecamatan	100	APBN
						52.355.000	52.355.000				
						172.200.000	172.200.000				
						2.000.000	2.000.000				
						6.000.000	6.000.000				
						23.500.000	23.500.000				
						118.250.000	118.250.000				
						1.850.000	1.850.000				
						27.750.000	27.750.000				
						9.000.000	9.000.000				
						1.500.000	1.335.000				
1.4	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	SP DIPA-018.08.4.039158/2022 tanggal 31 Oktober 2022	<p>Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian</p> <p>Output:</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		16.048.000	16.048.000	100	Terlaksananya kegiatan pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung	100	APBN

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
			Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Asuransi Usahat Tani Padi (AUTP) Rincian Kegiatan: 1. Belanja Bahan 2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.500.000 498.000 3.000.000 7.050.000	5.500.000 498.000 3.000.000 7.050.000				
1.5	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	SP DIPA-018.08.4.039158/2022 tanggal 31 Oktober 2022	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian Output: Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Rincian Kegiatan: 1. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 2. Belanja Bahan 3. Belanja Honor Output Kegiatan 4. Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi 5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		78.500.000 28.680.000 6.770.000 7.600.000 1.700.000 13.500.000 15.0000.000 5.250.000	78.435.000 28.680.000 6.770.000 7.600.000 1.700.000 13.500.000 15.0000.000 5.185.000	99.92	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis kegiatan prasarana dan sarana pertanian	100	

Tabel 4.2
DATA PENERIMA KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN:

NO	NAMA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	JENIS BANTUAN
1	KT Harapan Baru	Medari	Ngadirejo	RJIT
2	KT Sido Nglilir	Danurejo	Kedu	RJIT
3	KT Agung II	Bagusan	Selopampang	RJIT
4	KT Rejo Tani	Balerejo	Tlogomulyo	RJIT
5	KT Karya Bangun	Kowangan	Temanggung	RJIT
6	KT Maju Makmur	Mangunsari	Ngadirejo	RJIT
7	Gapoktan Suka Maju	Campursari	Ngadirejo	RJIT
8	Gapoktan Subur Makmur	Sanggrahan	Kranggan	RJIT
9	KT Dewi Sri	Ketitang	Jumo	RJIT
10	KT Ngasinan	Karangtejo	Jumo	RJIT
11	KT Sido Makmur	Kranggan	Kranggan	RJIT
12	KT Murih Rahayu I	Lempuyang	Candirototo	RJIT
13	KT Ngudi Makmur	Badran	Kranggan	RJIT
14	KT Mekar Mandiri	Karangwuni	Pringsurat	RJIT
15	KT Murih Rahayu	Baledu	Kandangan	RJIT
16	KT Trampil I	Tegalurung	Bulu	RJIT
17	KT Sumber Amanah	Petarangan	Kledung	Irigasi Perpipaan
18	KT Mitra Tani I	Gununggempol	Jumo	Embung Pertanian
19	Gapoktan Tani Maju	Kramat	Kranggan	Embung Pertanian

4.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan/atau kegiatan berupa tugas pembantuan provinsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Tugas Pembantuan dari Pemerintah yang dilaksanakan adalah urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Adapun pelaksanaan tugas pembantuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

Berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah dengan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung , Nomor 2690/HK.03.01/J.1/2022, dan Nomor : 15 /059/IV/2022, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui swakelola tipe II di Kabupaten Temanggung.

b. Gambaran Umum

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan dengan beberapa program dan kegiatan, yang meliputi:

- 1) Program Penguatan Pengelolaan Pelayanan KB di Faskes, Jaringan, dan Jejaring.
 - Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Faskes 4 kali setahun (Mei-Juli-September-November 2022)
- 2) Program Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung.
 - Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung untuk menyatukan visi dan strategi dalam promosi mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK.
- 3) Program Advokasi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan mitra kerja terkait kelanjutusiaan
 - Kegiatan Pertemuan untuk menggalang komitmen dan dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan atau pelayanan ramah lansia di kabupaten Temanggung.
- 4) Program Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Tahun 2022.
 - Kegiatan Pertemuan yang dapat meningkatkan kader kelompok UPPKA mengenai peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga Akseptor.

- 5) Program Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan.
 - Kegiatan Pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi dan promosi PPKS dengan ditambah kegiatan pemeriksaan kesehatan sederhana.
- 6) Program Orientasi 7 Dimensi Lansia tangguh dan PJP tingkat Kabupaten Temanggung.
 - Kegiatan Pertemuan untuk kelompok BKL Lokus Pro PN agar dapat melaksanakan pelayanan ramah lansia dengan menerapkan 7 dimensi lansia tangguh dan perawatan jangka panjang (PJP) dalam kegiatan kelompoknya.
- 7) Program Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN
 - Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten merupakan pembentukan sekolah lansia di kelompok BKL Pro PN yang ditunjuk.
- 8) Program Verifikasi dan Validasi Data kasus Stunting dan Keluarga Resiko Stunting tingkat kabupaten Temanggung tahun 2022.
 - Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data kasus Stunting dan Keluarga Resiko Stunting tingkat kabupaten Temanggung tahun 2022.
- 9) Program Orientasi bagi kader Tim Pendamping keluarga kabupaten Temanggung tahun 2022.
 - Kegiatan Orientasi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader pendamping dalam proses pendampingan keluarga berresiko stunting di lini lapangan.

c. Target Kinerja

- 1) Program Penguatan Pengelolaan Pelayanan KB di Faskes, Jaringan, dan Jejaring.
Keluaran / Outputnya :
 - Sasarannya adalah petugas R/R di 1.992 Faskes dari 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah

2) Program Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung.

Keluaran / Outputnya :

- 30 orang yang terdiri dari pengelola Pro PN Kab/Kota, Stakeholder, Mitra Kerja Lintas Sektor (Pokja Advokasi Daerah) di masing-masing Kab/Kota.

3) Program Advokasi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan mitra kerja terkait kelanjutusiaan

Keluaran / Outputnya :

- Peserta kegiatan advokasi dan koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja terkait kelanjutusiaan sebanyak 20 orang yang terdiri dari stakeholder, pemangku kebijakan, lintas sektor dan Juang Kencana di Kabupaten Temanggung.

4) Program Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Tahun 2022.

Keluaran / Outputnya :

- Sasaran kegiatan orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor adalah terdiri kader kelompok UPPKA yang menjadi target Pro PN Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga tahun 2022 dan PKB/PLKB yang menjadi pembina wilayah kelompok UPPKA tersebut.

5) Program Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan.

Keluaran / Outputnya :

- Peserta kegiatan pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan adalah 20 orang yang terdiri dari pengelola, konselor, klien PPKS di Kabupaten Temanggung.

6) Program Orientasi 7 Dimensi Lansia tangguh dan PJP tingkat Kabupaten Temanggung.

Keluaran / Outputnya :

- Peserta kegiatan orientasi 7 dimensi lansia tangguh dan PJP Tingkat Kabupaten sebanyak 25 orang yang terdiri dari PKB/PLKB, Kader BKL, Keluarga Lansia dan Lansia di Kabupaten Temanggung.

7) Program Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN

Keluaran / Outputnya :

- Peserta Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten sebanyak 30 orang lansia anggota BKL sebagai siswa sekolah lansia dan 3 orang yang bertindak sebagai fasilitator.

8) Program Verifikasi dan Validasi Data kasus Stunting dan Keluarga Resiko Stunting tingkat kabupaten Temanggung tahun 2022.

Keluaran / Outputnya :

- Memverifikasi data sasaran hasil PK21 dengan data di lapangan. Mengupdate data sasaran hasil PK21 dengan hasil verifikasi lapangan. Memvalidasi atau mengkonfirmasi data hasil pengukuran balita dan kasus stunting berdasarkan hasil padanan PK21 dengan EPPGBM. Meningkatkan cakupan hasil pengukuran balita dan update kasus stunting.

9) Program Orientasi bagi kader Tim Pendamping keluarga kabupaten Temanggung tahun 2022.

Keluaran / Outputnya :

- Internal
Kementrian / Lembaga : SDM Aparatur pengelola dan pelaksana program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga, termasuk penyuluh KB
- Eksternal
Kementrian / Lembaga adalah pendampingan keluarga beresiko stunting oleh kader pendamping. Untuk proses mendukung pendampingan keluarga beresiko stunting di lini lapangan, BKKBN bersama mitra kementrian / lembaga terkait akan membentuk 200.000 tim kader pendamping meliputi Bidan Desa, Kader IPM dan Kader PKK.

d. Realisasi

- 1) Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Faskes 4 kali setahun (Mei-Juli-September-November 2022).

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan ini dilaksanakan dalam 4 kali setahun berupa updating faskes KB, pencatatan pelaporan faskes, update informasi pencatatan dan pelaporan faskes, serta monev hasil pencatatan dan pelaporan faskes.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp. 15.400.000,00 (100%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.15.400.000,00.

- 2) Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung untuk menyatukan visi dan strategi dalam promosi mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan pertemuan advokasi kepada pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja tentang Pro PN Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam percepatan penurunan stunting agar kegiatan Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam percepatan penurunan stunting dapat dialokasikan dalam APBD.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp. 11.900.000,00 (100%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 11.900.000,00.

- 3) Kegiatan Pertemuan untuk menggalang komitmen dan dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan atau pelayanan ramah lansia di kabupaten Temanggung.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan pertemuan untuk menggalang komitmen dan dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan/atau pelayanan ramah lansia di Kabupaten Temanggung.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp. 16.200.000,00 (100%) dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 16.200.000,00.

4) Kegiatan Pertemuan peningkatan kader kelompok UPPKA mengenai peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga Akseptor.
Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan yang dilaksanakan adalah Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor bagi kelompok UPPKA di Kabupaten.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp.6.760.000,00 (100%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.6.760.000,00.

5) Kegiatan Pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi dan promosi PPKS dengan ditambah kegiatan pemeriksaan kesehatan sederhana.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp.10.806.000,00 (100%) dari Alokasi Anggaran sebesar Rp.10.806.000,00.

6) Kegiatan Pertemuan untuk kelompok BKL Lokus Pro PN.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Bina Keluarga Lansia hadir sebagai salah satu implementasi program BKKBN dalam mewujudkan pelayanan ramah lansia dan lansia itu sendiri dapat berbagi pengetahuan serta pengalaman dan juga menjadi sarana berbagi informasi dan pembinaan 7 dimensi lansia tangguh serta Pendampingan Perawatan Jangka Panjang sehingga lansia di Indonesia menjadi lansia sehat, mandiri, sejahtera dan bermartabat.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp.8.750.000,00 (100%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.8.750.000,00

7) Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten berupa pembentukan sekolah Lansia di kelompok BKL Pro PN yang ditunjuk. Masing – masing Kabupaten membentuk minimal 1 (satu) sekolah Lansia di wilayahnya. Kegiatan berupa pertemuan dengan

mendatangkan fasilitator di setiap pertemuan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Fasilitator bisa melibatkan orang yang memiliki keilmuan sesuai dengan kurikulum dan/atau pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap lansia, misalnya PLKB, Juang Kencana, Komda Lansia, dll.

- Realisasi Anggaran sebesar Rp.17.000.000,00 (100%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.17.000.000,00.

8) Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data kasus Stunting dan Keluarga Resiko Stunting tingkat kabupaten Temanggung tahun 2022.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan dilaksanakan dalam 6 tahap yaitu :
 - Cetak Output Data Keluarga Beresiko Stunting
 - Sosialisasi Panduan Verifikasi dan Validasi
 - Orientasi Verifikasi dan Validasi
 - Pelaksanaan Verifikasi Validasi oleh TPK
 - Rekapitulasi
 - Rekonsiliasi
- Realisasi Anggaran sebesar Rp.90.035.000,00 (100%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.90.035.000,00.

9) Kegiatan Orientasi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader pendamping dalam proses pendampingan keluarga beresiko stunting di lini lapangan.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Pendampingan keluarga berisiko Stunting oleh Kader Pendamping. Untuk mendukung proses pendampingan keluarga berisiko Stunting di lini lapangan, BKKBN bersama mitra Kementerian/Lembaga terkait akan membentuk 200.000 Tim Kader Pendamping meliputi Bidan Desa, Kader IMP dan Kader PKK.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp.309.523.500,00 (95,66%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.408.223.500,

LAMPIRAN : MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN

Tabel 4.3
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah {Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana}	Kontrak Swakelola Nomor 1769.023 / SP.03 / J.3 / 2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Penguatan Pengelolaan Pelayanan KB di Faskes, Jaringan, dan Jejaring	<p>Program : Penguatan Pengelolaan Pelayanan KB di Faskes, Jaringan, dan Jejaring</p> <p>Kegiatan : Pencatatan dan pelaporan Faskes 4 kali setahun (Mei-Juli-September- November 2022)</p> <p>Keluaran/Output : Sasarannya adalah petugas R/R di 1.992 Faskes dari 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah</p> <p>Rincian Kegiatan : Kegiatan ini diharapkan untuk dimanfaatkan dalam 4 kali dalam setahun dengan arah untuk updating faskes KB, peningkatan pencatatan pelaporan faskes, update informasi pencatatan dan pelaporan faskes, serta monev hasil pencatatan dan pelaporan faskes</p>	Kabupaten Temanggung	DPPPAPKB Bidang KBKR	15.400.000,00	15.400.000,00	100	Terlaksananya untuk updata data untuk capaian kegiatan dalam laporan 3 blnan dalam kegiatan setahun pelaporan selalu terupdate.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1521.023 / SP.03 / J.4 / 2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung	Program : Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung Kegiatan : Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung untuk menyatukan visi dan strategi dalam promosi mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK Keluaran / Output : 30 orang yang terdiri dari Pengelola Pro PN Kab/Kota, Stakeholder, Mitra Kerja Lintas Sektor (Pokja Advokasi Daerah) di	Kabupaten Temanggung	DPPPAPKB Bidang KSPK	11.900.000,00	11.900.000,00	100	Terlaksannya Kegiatan Advokasi dan KIE pengasuhan 1,000 HPK percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Temanggung	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			masing – masing Kabupaten/Kota. Rincian Kegiatan : Kegiatan pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja tentang Pro PN Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam percepatan penurunan stunting agar kegiatan Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam percepatan penurunan stunting dapat dialokasikan dalam APBD								
3.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1521.023 /SP.03/J.4/2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Advokasi dan Koordinasi dengan	Program : Advokasi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan Mitra Kerja Terkait Kelanjutusiaan Kegiatan : Pertemuan untuk menggalang komitmen dan	Kabupaten Temanggung	DPPPAPPKB Bidang KSPK	16.200.000,00	16.200.000,00	100	Terlaksannya advokasi dan Koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pembentukan sekolah lansia	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Stakeholder dan Mitra Kerja Terkait Kelanjutusiaan	dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan atau pelayanan ramah lansia di Kabupaten Keluaran / Output : Peserta Kegiatan Advokasi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan Mitra Kerja Terkait Kelanjutusiaan sebanyak 20 orang yang terdiri dari Stakeholder, Pemangku Kebijakan, Lintas Sektor dan Juang Kencana di Kabupaten Temanggung Rincian Kegiatan : Kegiatan pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk menggalang komitmen dan dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan/atau pelayanan ramah lansia di Kabupaten Temanggung						dan pelayanan ramah lansia di Kabupaten Temanggung.		

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1521.023 /SP.03/J.4/2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Tahun 2022	<p>Program : Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Tahun 2022</p> <p>Kegiatan : Kegiatan pertemuan yang dapat meningkatkan kader kelompok UPPKA mengenai peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor.</p> <p>Keluaran / Output : Sasaran kegiatan Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor adalah terdiri kader kelompok UPPKA yang menjadi target Pro PN Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tahun 2022 dan PKB/PLKB yang menjadi Pembina wilayah kelompok UPPKA tersebut</p>	Kabupaten Temanggung	DPPPAPKB Bidang KSPK	6.760.000,00	6.760.000,00	100	Tercapainya target Pro PN peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan kelompok UPPKA di bina oleh PKB/PLKB.di Kabupaten Temanggung.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rincian Kegiatan : Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target Pro PN Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga adalah dengan dilaksanakannya Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor bagi kelompok UPPKA di Kabupaten.								
5.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1521.023 /SP.03/J.4/2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan	Program : Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan Kegiatan : Kegiatan pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi dan promosi PPKS dengan ditambah kegiatan pemeriksaan kesehatan sederhana. Keluaran / Output : Peserta kegiatan Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan adalah 20 orang yang	Kabupaten Temanggung	DPPPAPKB Bidang KSPK	10.806.000,00	10.806.000,00	100	Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi PPKS untuk pemahaman dan peningkatan Pengetahuan dengan tambahan kegiatan pemerinsaaan Kesehatan yang terdiri dari pengelola, asesor dan Klien PPKS di Kabupaten Temanggung.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			terdiri dari Pengelola, Konselor, Klien PPKS di Kabupaten Temanggung. Rincian Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi Pengelola PPKS di Kabupaten sehingga terwujud Pelayanan Prima dan Program Bangga Kencana dapat tersebar luas menjangkau seluruh kalangan masyarakat.								
6.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1521.023 /SP.03/J.4/2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Orientasi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP Tingkat Kabupaten Temanggung	Program : Orientasi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP Tingkat Kabupaten Temanggung Kegiatan : Kegiatan pertemuan untuk kelompok BKL Lokus Pro PN agar dapat melaksanakan pelayanan ramah lansia dengan	Kabupaten Temanggung	DPPPAPKB Bidang KSPK	8.750.000,00	8.750.000,00	100	Terlaksananya kegiatan 7 dimensi lansia tangguh dan Perawatan Jangka Panjang sehingga menjadi lansia sehat, mandiri sejahtera dan bermartabat di Kabupaten Temanggung.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>menerapkan 7 dimensi lansia tangguh dan Perawatan Jangka Panjang (PJP) dalam kegiatan di kelompoknya</p> <p>Keluaran / Output : Peserta Kegiatan Orientasi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP Tingkat Kabupaten sebanyak 25 orang yang terdiri dari PKB/PLKB, Kader BKL, Keluarga Lansia dan Lansia di Kabupaten Temanggung.</p> <p>Rincian Kegiatan : Bina Keluarga Lansia hadir sebagai salah satu implementasi program BKKBN dalam mewujudkan pelayanan ramah lansia dan lansia itu sendiri dapat berbagi pengetahuan serta pengalaman dan juga menjadi sarana berbagi informasi dan</p>								

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pembinaan 7 dimensi lansia tangguh serta Pendampingan Perawatan Jangka Panjang sehingga lansia di Indonesia menjadi lansia sehat, mandiri, sejahtera dan bermartabat.								
7.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1521.023 /SP.03/J.4/2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN	Program : Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN Kegiatan : Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten berupa pembentukan sekolah Lansia di kelompok BKL Pro PN yang ditunjuk Keluaran / Output : Peserta Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten sebanyak 30 orang Lansia	Kabupaten Temanggung	DPPPAPPK B Bidang KSPK	17.000.000,00	17.000.000,00	100	Terlaksannya pembinaan 7 dimensi lansia tangguh dan PJP sesuai dengan kurikulum yang di tetapkan untuk kepedulian lansia di Kabupaten Temanggung.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>anggota BKL sebagai siswa sekolah Lansia dan 3 orang yang bertindak sebagai Fasilitator.</p> <p>Rincian Kegiatan : Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten berupa pembentukan sekolah Lansia di kelompok BKL Pro PN yang ditunjuk. Masing – masing Kabupaten membentuk minimal 1 (satu) sekolah Lansia di wilayahnya. Kegiatan berupa pertemuan dengan mendatangkan fasilitator di setiap pertemuan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Fasilitator bisa melibatkan orang yang memiliki keilmuan sesuai dengan kurikulum dan/atau</p>								

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap lansia, misalnya PLKB, Juang Kencana, Komda Lansia, dll.								
8.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1530.023/SP.03/J 5/2022 Tanggal : 26 April 2022 Tentang Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kasus Stunting Dan Keluarga Resiko Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2022	Program : Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kasus Stunting Dan Keluarga Resiko Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Kegiatan ; Sosialisasi, Orientasi, Verifikasi dan Validasi, Rekonsiliasi Data Keluarga Beresiko Stunting Keluaran / Output : Memverifikasi data sasaran hasil PK 21 dengan data di lapangan. Mengupdate data sasaran hasil PK 21 dengan hasil verifikasi lapangan.	Kabupaten Temanggung	DPPPAPKB Bidang Adpin	90.035.000,00	90.035.000,00	100	Terlaksannya kegiatan Verifikasi dan Validasi data Keluarga kasus stunting di Kabupaten Temanggung.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>Memvalidasi atau mengkonfirmasi data hasil pengukuran balita dan kasus stunting berdasarkan hasil padanan PK 21 dengan EPPGBM. Meningkatkan cakupan hasil pengukuran balita dan update kasus stunting.</p> <p>Rincian Kegiatan : Kegiatan akan dilaksanakan dalam 6 tahap yaitu : a. Cetak Output Data Keluarga Beresiko Stunting b. Sosialisasi Panduan Verifikasi dan Validasi c. Orientasi Verifikasi validasi d. Pelaksanaan Verifikasi Validasi oleh TPK e. Rekapitulasi f. Rekonsiliasi</p>								

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 5635 / PK 01.02 / J.6 / 2022 Tanggal : 11 Juli 2022 Tentang Kegiatan Orientasi bagi Kader Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2022	Program : Kegiatan Orientasi bagi Kader Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Kegiatan : Kegiatan Orientasi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader Pendamping dalam proses pendampingan keluarga berisiko Stunting di lini lapangan Keluaran / Output : Internal Kementerian/ Lembaga : SDM Aparatur pengelola dan pelaksana program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, termasuk Penyuluh KB Eksternal Kementerian/Lembaga	Kabupaten Temanggung	DPPPAPKB Bidang Latbang	408.223.500,00	390.523.500,00	95,66	Kegiatan untuk pendampingan mendukung proses keluarga resiko stunting di kabupate temanggung dapat di laksanakan sesuai target kegiatan sedangkan anggaran tidak bisa terserap 100 % karean a semua sudah terlaksana sesuai dengan standar harga yang ada di Daerah lebih rendah dengan standar harga dari Pusat dengan demikian anggaran sisa di kegiatan ini.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			a. Calon Pengantin b. Ibu Hamil c. Ibu Pasca Hamil d. Anak usia 0-5 Tahun e. Bidan f. Kader PKK g. Kader Poktan h. Penyuluh KB Non PNS Rincian Kegiatan : Salah satu aspek strategis dalam RAN Percepatan Penurunan Stunting adalah pendampingan keluarga berisiko Stunting oleh Kader Pendamping. Untuk mendukung proses pendampingan keluarga berisiko Stunting di lini lapangan, BKKBN bersama mitra Kementerian/Lembaga terkait akan membentuk 200.000 Tim Kader Pendamping meliputi Bidan Desa, Kader IMP dan Kader PKK.								
			Jumlah			585.074.500	567.374.500	96,97			

4.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- a. Desain dilaksanakan tahun berjalan sehingga membutuhkan waktu untuk pelaksanaan teknis di lapangan.
- b. Pengerjaan teknis irigasi mundur dari jadwal yang sudah ditentukan karena bersamaan dengan musim hujan dan musim tembakau .

4.4 Saran dan Tindak Lanjut

- a. Perlunya dukungan kesiapan lokasi dan lahan serta perencanaan untuk penyusunan SID sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan lebih cepat untuk mengejar sebelum musim penghujan.
- b. Untuk pekerjaan fisik perlunya adanya dukungan anggaran perencanaan N-1 dari APBD.

BAB V

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2022 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022.

Hasil-hasil pencapaian kinerja program merupakan realisasi dari seluruh pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2022. Keberhasilan ini merupakan sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Temanggung. Di sisi lain, masih terdapat beberapa target kinerja program dan kegiatan yang belum berhasil dicapai, tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk bekerja lebih keras lagi. Keberhasilan maupun kekurangan yang ada merupakan bentuk evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun 2022 diraih berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen, yaitu Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dengan didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Temanggung yang telah mendukung agenda pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2022, dengan harapan semoga capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2022 ini memberikan manfaat yang luas bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan Temanggung yang “**Tentrem, Marem, dan Gandem**”.

**DOKUMENTASI KEGIATAN
TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021**

1. DINKES



Sosialisasi panduan pelayanan ANC PNC di masa pandemi disertai pelayanan kesehatan di masa pandemi



Advokasi pelaksanaan vaksinasi covid bagi ibu hamil



Pembuatan SOP kasus kegawatdaruratan ibu dan anak dari masing-masing Puskesmas



Peningkatan kualitas pertemuan KIA di mulai dari tingkat desa dengan pemberian materi tentang kesehatan ibu anak



Pelaksanaan pertemuan kajian kematian ibu diwilayah Kabupaten Temanggung



Komitmen dengan seluruh Puskesmas untuk pemantauan bumil risti



Komitmen dengan seluruh Puskesmas untuk menganggarkan pelatihan kader dari sumber dana yang mendukung



Komitmen dengan seluruh Puskesmas untuk membuat pemetaan bumi resti



Komitmen dengan Puskesmas untuk melaksanakan screening layak hamil di masing-masing Puskesmas terutama pada catin



Melaksanakan pertemuan dengan SKPD terkait pembuatan komitmen untuk mensinergikan program dan kegiatan pada penurunan AKI AKB



Advokasi terhadap pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita



Koordinasi dengan kader dalam pendataan dengan skrining usia produktif



Kegiatan PISP



Integrasi dengan lintas program (kesehatan keluarga; usia produktif; imunisasi dll) terkait pendataan kasus hipertensi



Optimalisasi jejaring puskesmas (Klinik-DPM; BPM dll)



Sosialisasi lintas sektor/program bersamaan dengan kegiatan posbindu



Bekerjasama dengan kelompok pendamping (KDS) untuk mensosialisasikan pentingnya notifikasi pasangan dan deteksi dini HIV AIDS



Kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin dengan LSM Kalandara



Adanya pertemuan koordinasi, case conference untuk validasi data LSL



Kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin data HIV



Koordinasi dan jejaring untuk memaksimalkan screening HIV pada ibu hamil dan pasien TBC



Adanya kegiatan Inisiasi DPPM TB dan lokakarya DPPM TNB untuk membuat rencana kerja DPPM selama 5 tahun ke depan



Kegiatan optimalisasi jejaring koalisi profesi TBC



Supervisi dan bimbingan teknis sebagai upaya peningkatan penemuan kasus TBC di dokter praktek mandiri; klinik swasta dll

2. BAPPEDA



Kegiatan Rapat Peningkatan Perolehan Anggaran Dana Intensif Daerah 2023



Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri

3. BPKPAD



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 973/456 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2005-2008
(PELIMPAHAN KPP PRATAMA TEMANGGUNG)

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan berdasarkan Laporan Hasil Reviu Atas Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2005-2008 (Pelimpahan KPP Pratama Temanggung) dari Inspektorat Kabupaten Temanggung Nomor R/493.LHR/700/003/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, perlu menghapus piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2005-2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2005-2008 (Pelimpahan KPP Pratama Temanggung);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln A Yani No 32 Telp (0293) 491004 Fax (0293) 490040
TEMANGGUNG KODE POS 56216

Temanggung, 4 Agustus 2022

Nomor : 903/1371/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Percepatan Realisasi
APBD TA 2022

Kepada Yth : Kepala Perangkat Daerah
Selaku Pengguna Anggaran
di-

TEMANGGUNG

Berdasarkan hasil Monitoring dan Fasilitasi Percepatan Penyerapan APBD Tahun Anggaran 2022, disampaikan bahwa untuk Kabupaten Temanggung, sampai dengan keadaan Bulan Juli 2022 pada posisi penyerapan rendah (capaian realisasi masing-masing Perangkat Daerah) terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk melakukan percepatan penyerapan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan:

1. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa;
2. Untuk belanja pengadaan barang modal perlengkapan kantor agar dilaksanakan pada bulan Agustus 2022.
3. Untuk kegiatan yang telah dilakukan kontrak, segera diajukan uang muka pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak.
4. Untuk kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, segera dimintakan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan dana Alokasi Khusus Non Fisik agar mempedomani tata cara pelaporan dan pencairannya sehingga tidak terdapat keterlambatan.
6. Bagi perangkat daerah yang mengelola belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Desa untuk mengambil langkah-langkah guna percepatan penyalurannya.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan.


PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH,
SETDA
DARYANING PRABOWO, M.M.
Pemerintah Kabupaten Temanggung
NIP. 19680119 199311 1 001

Tembusan:
* Ruang Temanggung (saham/terang)

**Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah di Luar Tunjangan Guru pada Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022**

Pemerintah Kabupaten Temanggung

No.	Uraian	Penetapan	Perubahan
1	Belanja Daerah	1.989.495.211.214	2.163.271.983.090
2	Belanja Pegawai	605.754.761.467	648.522.650.645
3	Proporsi	30,45	29,98

4. DINBUDPAR



PEMBINAAN DESA WISATA



PEMBINAAN DESA WISATA 2



PEMBINAAN DESA WISATA 3



PENGGALIAN SEJARAH LOKAL



PENGGALIAN SEJARAH LOKAL 2

5. DINKOMINFO



KOORDINASI STATISTIK DENGAN BPS



KOORDINASI STATISTIK DENGAN BPS 2



INSTALASI ODP SPLITER 2:8



PROGRESS PENURUNAN SLACK KABEL FO



INSTALASI RECTIFIER DI SERVER SETDA

6. DINKOPDAG



PERSENTASE KEPATUHAN PEDAGANG PASAR SESUAI ZONASI PERUNTUKAN PEDAGANG



PERSENTASE PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENEMPATI RUANG SESUAI PERUNTUKAN

7. DIMPUSIP



ADVOKASI KE PERPUSNAS MENGENAI DAK



TAMASYA PUSTAKA (KEGIATAN LITERASI INFORMASI)



SOSIALISASI GERAKAN SINDORO SUMBING MELALUI TV TEMANGGUNG



PENAMBAHAN BAHAN KOLEKSI MELALUI PEMBELIAN BUKU BARU DI PENERBIT ATAU TOKO TOGAMAS

8. DPRKPLH



SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DILAKSANAKAN DI DESA DAN DI PASAR DAERAH



SOSIALISASI DILAKUKAN DI DESA YANG AKAN MELAKUKAN PENGELOLAAN SAMPAH

9. DPUPR



**DOKUMENTASI PEKERJAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN SUNDORO
FOTO 0% 100%**

10. SEKRETARIAT DPRD



PEMBAHASAN RAPERDA / PANSUS



PEMBAHASAN RAPERDA